



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Kota Bima menyusun Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bima dalam Penyusunan dan Pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2019 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Bahwa pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Karena hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk menciptakan suatu produk/hasil dengan mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan APBD, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, permendagri nomor 13 tahun 2006 dan permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian proses kegiatan yang dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang dijabarkan dalam peraturan Kepala Daerah untuk menjadi landasan bagi para Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Walikota selaku Kepala Daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Kuangan (BPK), selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Kementerian Keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah Kota Bima selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adapun secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Bima;
- b. perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. cara Pemerintah Kota Bima mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Arus Kas; (f) Neraca; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dari pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- 4) Pos luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

e. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- 1) Kas dan Setara Kas;
- 2) Investasi Jangka Pendek;
- 3) Piutang;

- 4) Persediaan;
- 5) Investasi Jangka Panjang;
- 6) Aset Tetap;
- 7) Aset Lain-lain;
- 8) Kewajiban Jangka Pendek;
- 9) Kewajiban Jangka Panjang; dan
- 10) Ekuitas

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menjelaskan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; dan
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2572);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 547);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 233, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106);
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 236);
24. Peraturan Walikota Bima Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Berita daerah Kota Bima tahun 2019 Nomor 500);

25. Peraturan Walikota Bima Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 193);
26. Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 232);
27. Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 233);
28. Peraturan Walikota Bima Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 645);
29. Peraturan Walikota Bima Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 690).

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut.

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab I | Pendahuluan |
| | 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan |
| Bab II | Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target APBD |
| | 2.1 Ekonomi Makro |
| | 2.2 Kebijakan Keuangan |
| | 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD |
| Bab III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan |
| | 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan |
| | 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan |
| Bab IV | Kebijakan Akuntansi |
| | 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah |
| | 4.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan |
| | 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan |
| Bab V | Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan |
| | 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran |
| | 5.1.1 Pendapatan-LRA |
| | 5.1.2 Belanja |
| | 5.1.3 Pembiayaan |
| | 5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) |
| | 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal |
| | 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan |
| | 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) |
| | 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya |

| | | |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| | 5.2.5 | Saldo Anggaran Lebih Akhir |
| 5.3 | | Penjelasan Laporan Operasional |
| | 5.3.1 | Pendapatan-LO |
| | 5.3.2 | Beban |
| | 5.3.3 | Kegiatan Non Operasional |
| | 5.3.4 | Pos Luar Biasa |
| 5.4 | | Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas |
| | 5.4.1 | Perubahan Ekuitas |
| 5.5 | | Penjelasan Komponen-Komponen Neraca |
| | 5.5.1 | Aset |
| | 5.5.2 | Kewajiban |
| | 5.5.3 | Ekuitas |
| 5.6 | | Penjelasan Komponen-Komponen Laporan Arus Kas |
| | 5.6.1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi |
| | 5.6.2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan |
| | 5.6.3 | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan |
| | 5.6.4 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris |
| Bab VI | | Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan |
| Bab VII | | Penutup |
| Lampiran-Lampiran | | |

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Indikator Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Beberapa Indikator Kemiskinan antara lain :

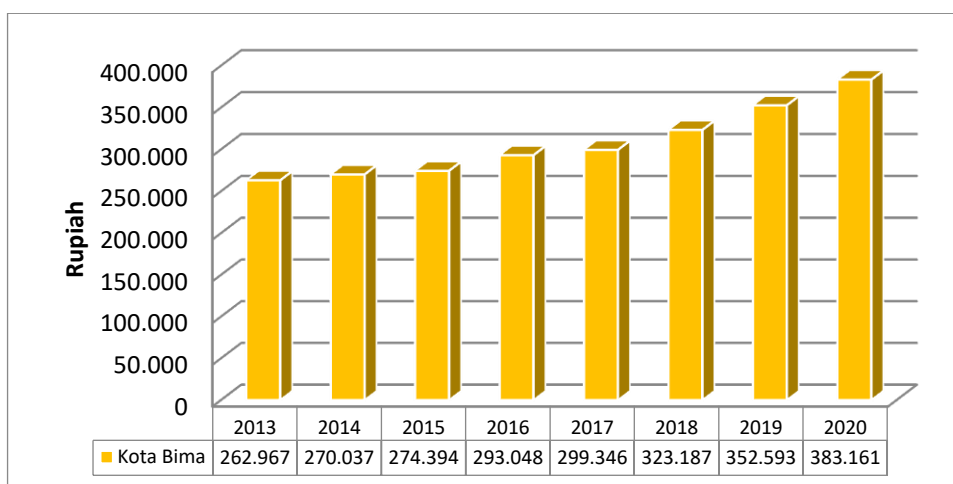
1. Penduduk Miskin. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah Penduduk miskin suatu wilayah, diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut.
2. Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman dan makanan yang setara dengan 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan (GK) = Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
3. Persentase Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan). Secara sederhana Persentase Kemiskinan yang juga disebut Tingkat Kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Garis kemiskinan di Kota Bima mengalami peningkatan sebesar Rp30.568 dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun ini garis kemiskinan Kota Bima sebesar Rp383.161. Persentase penduduk miskin di Kota Bima secara trend selalu menurun semenjak tahun 2016. Persentase penduduk miskin di Kota Bima pada tahun 2020 sebesar 8.35 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 14.660 jiwa.

Tabel 2.1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2013 – 2020
(*Poverty Line* - Rupiah)

| Jumlah Penduduk Miskin (<i>Poverty Line</i> - Rupiah) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kota Bima | 262.967 | 270.037 | 274.394 | 293.048 | 299.346 | 323.187 | 352.593 | 383.161 |

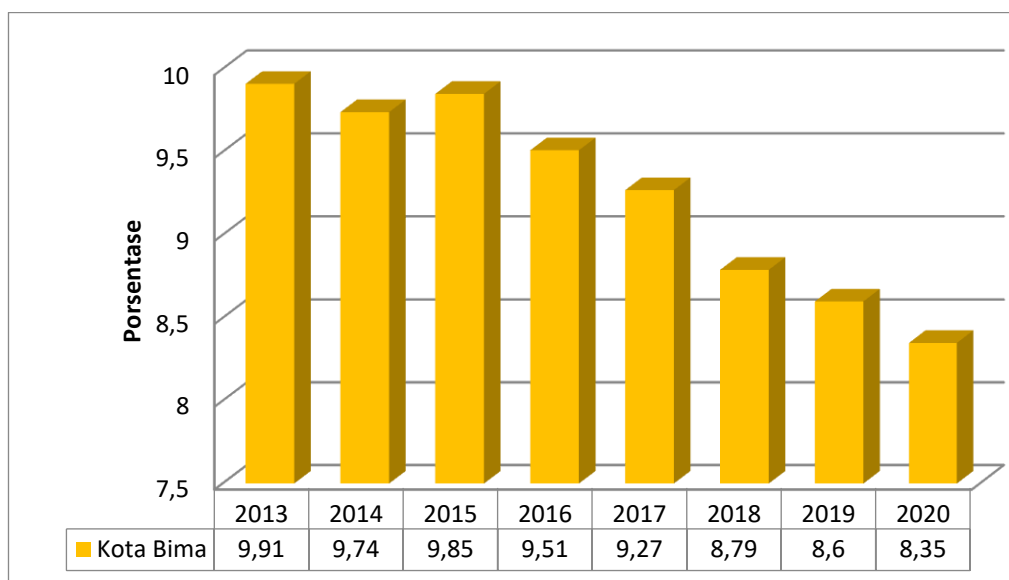
Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2021



Grafik 2.1.1 Jumlah Miskin Kota Bima Tahun 2013-2020

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2021

Tabel 2.1.2
Persentase Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2013 – 2020
(%)



Grafik 2.1.2 Persentase Miskin Kota Bima Tahun 2013-2020

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2021

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi di Kota Bima pada tahun 2020 mencapai 74,24 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan

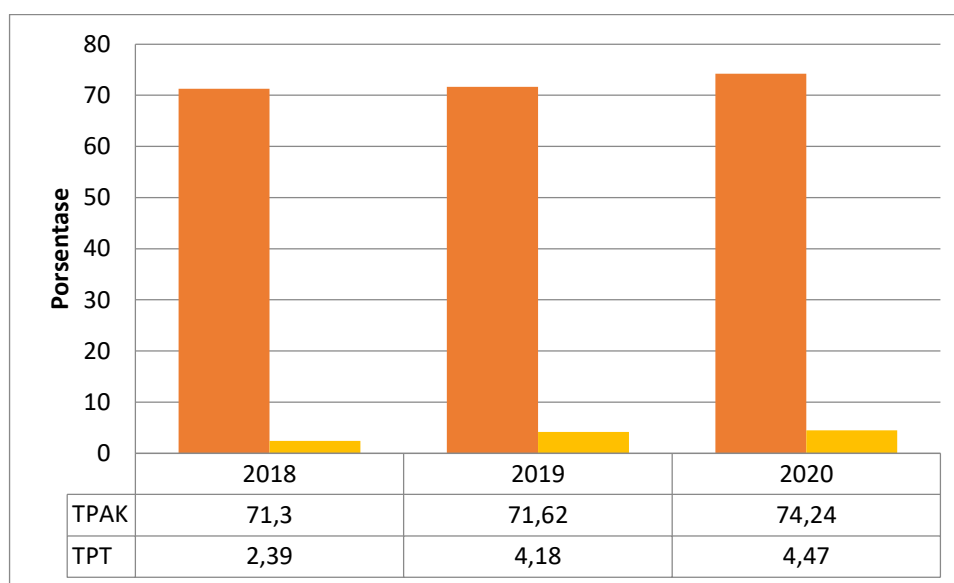
dengan tahun 2019 sebesar 71,62 persen. Proporsi angkatan kerja yang menganggur dikenal dengan nama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Indikator ini dapat menggambarkan secara umum mengenai tingkat pengangguran di suatu wilayah dari waktu ke waktu. TPT Kota Bima tahun 2020 sebesar 4,47 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 4,18 persen. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk berumur 15 tahun ke atas sebagai buruh/karyawan memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 38,54 sedangkan persentase terendah adalah pekerja bebas yaitu sebesar 6,50 persen.

Tabel 2.1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bima Tahun 2018-2020
(Porsentase)

| Tahun | Keterlibatan Penduduk Usia 15 tahun ke atas Dalam Kegiatan Ekonomi | |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------|
| | TPAK | TPT |
| 2018 | 71,30 | 2,39 |
| 2019 | 71,62 | 4,18 |
| 2020 | 74,24 | 4,47 |

Sumber : Statistik Daerah Kota Bima, 2021



Grafik 2.1.3 Keterlibatan Penduduk Usia 15 tahun ke atas Dalam Kegiatan Ekonomi
Kota Bima Tahun 2018-2020

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia memiliki peranan yang sangat penting di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Pengukuran terhadap indikator pembangunan manusia sangatlah kompleks. Walaupun demikian beberapa indikator dianggap dapat merefleksikan aspek-aspek pembangunan manusia. Aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia dapat dilihat dengan menggunakan ukuran indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan Indeks Komposit yang dipakai untuk mengukur tingkat pencapaian

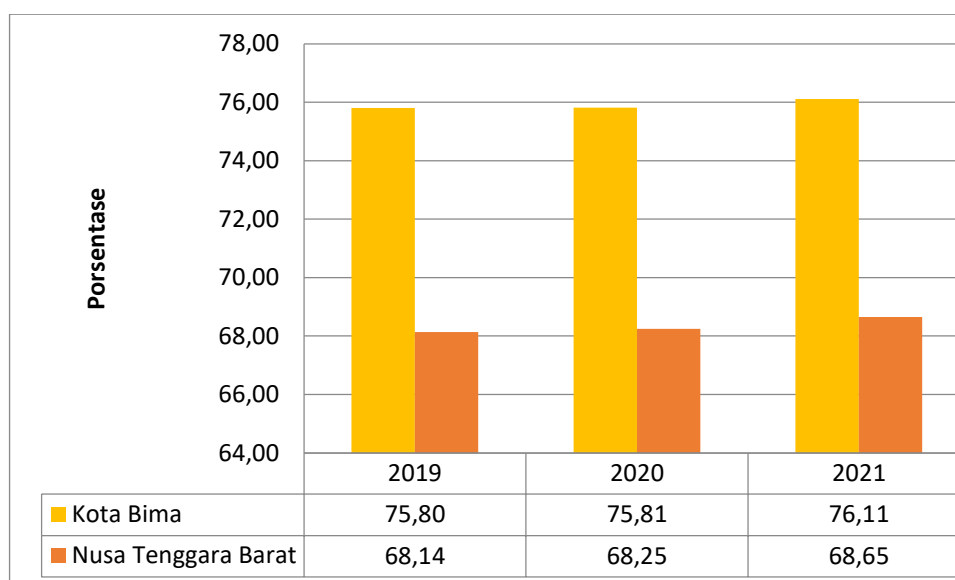
upaya pembangunan manusia dari tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah umur panjang dan sehat yang dicerminkan oleh Indeks Harapan Hidup, pengetahuan dan ketrampilan yang dicerminkan oleh Indeks Pendidikan dan kehidupan yang layak yang dicerminkan oleh Indeks Pendapatan.

IPM merupakan ukuran ringkas rata-rata yang menempatkan Kota Bima pada posisi kedua tertinggi dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di NTB. IPM Kota Bima pada tahun 2021 adalah sebesar 76,11. Angka ini cukup tinggi dibandingkan nilai IPM NTB sendiri yang sebesar 68,65.

Tabel 2.1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bima Tahun 2019 – 2021

| Kabupaten/Kota | [Metode Baru] IPM Kabupaten/Kota | | |
|---------------------|----------------------------------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kota Bima | 75,80 | 75,81 | 76,11 |
| Nusa Tenggara Barat | 68,14 | 68,25 | 68,65 |

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, 2021



Grafik 2.1.4 Tingkat IPM Kota Bima Tahun 2019-2021

2.1.4 LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)

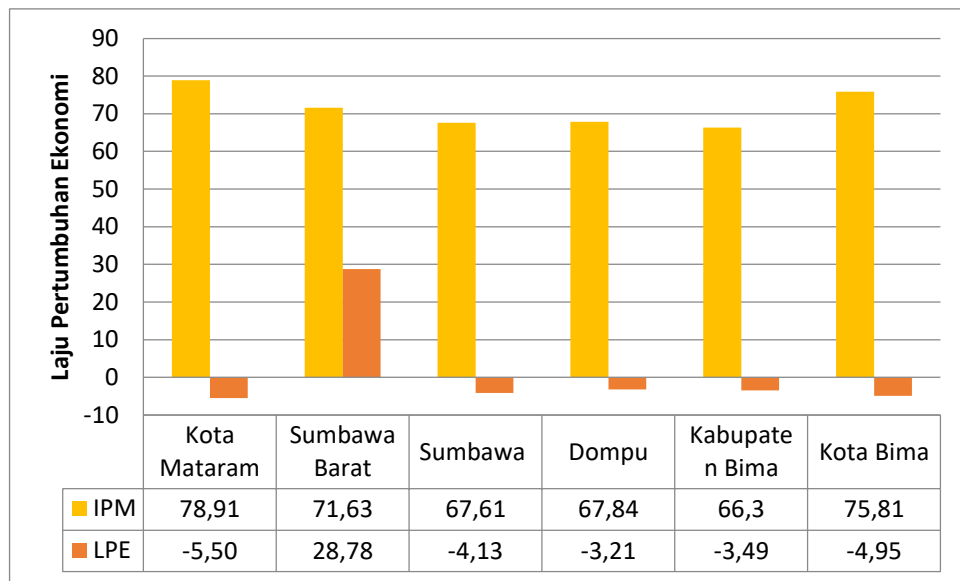
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Di tahun 2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan LPE menunjukkan bahwa terjadi penurunan aktivitas ekonomi, ditandai dengan menurunnya output agregat tersebut. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi korona yang melanda secara global. Melemahnya perekonomian Kota Bima pada tahun 2020 ini juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang bernilai negative yakni sebesar -4,95 persen

Tabel 2.1.5
Bandingan IPM dengan LPE Kab/Kota Provinsi NTB Tahun 2020

| No | Daerah | IPM | LPE |
|----|----------------|-------|-------|
| 1 | Kota Mataram | 78,91 | -5,50 |
| 2 | Sumbawa Barat | 71,63 | 28,78 |
| 3 | Sumbawa | 67,61 | -4,13 |
| 4 | Dompu | 67,84 | -3,21 |
| 5 | Kabupaten Bima | 66,30 | -3,49 |
| 6 | Kota Bima | 75,81 | -4,95 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2021



Grafik 2.1.5 Perbandingan Angka IPM dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5 Inflasi

Inflasi sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen (IHK). IHK merupakan angka perbandingan harga yang terjadi pada suatu saat dari satu kelompok barang/jasa pada suatu periode waktu dengan periode tertentu (tahun dasar). Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang.

Pada Bulan Desember 2021, Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,57 persen atau terjadi peningkatan Indeks harga Konsumen (IHK) dari 105,89 pada bulan November 2021 menjadi 106,49 pada bulan Desember 2021. Kondisi ini sejalan dengan kondisi nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,57 persen di bulan Desember 2021.

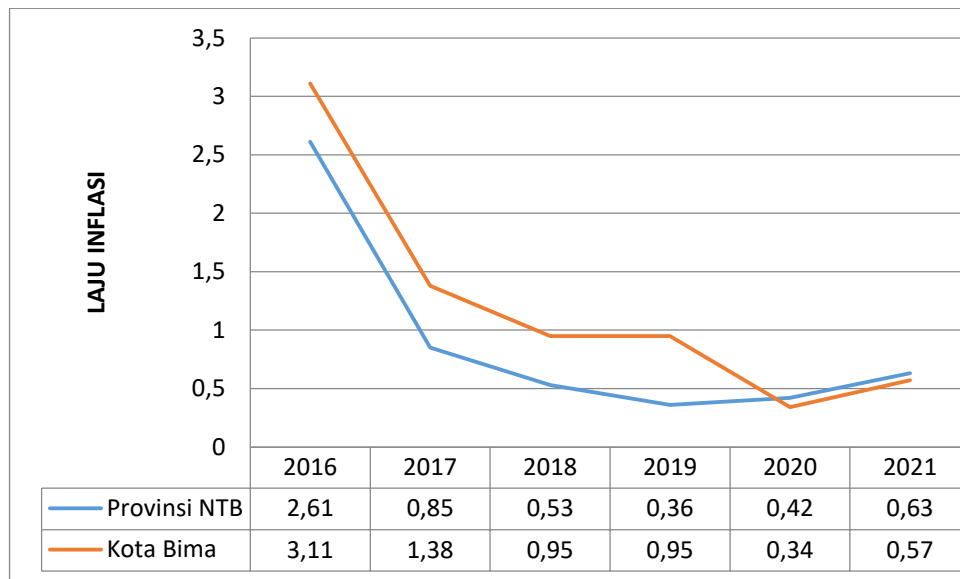
Inflasi di Kota Bima Pada bulan Desember 2021 sebesar 1,57 persen. beberapa kelompok komoditas tercatat mengalami inflasi, yaitu makanan, minuman dan tembakau

sebesar 1,23 persen merupakan inflasi tertinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok komoditas lainnya.

Tabel 2.1.6
Angka Inflasi Kota Bima Tahun 2015-2021

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Provinsi NTB | 2,61 | 0,85 | 0,53 | 0,36 | 0,42 | 0,63 |
| Kota Bima | 3,11 | 1,38 | 0,95 | 0,95 | 0,34 | 0,57 |

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, 2021



Grafik 2.1.6 Tingkat Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2016-2021

2.1.6 Pertumbuhan PDRB

Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Tren pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dapat dilihat salah satunya berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang didalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun).

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa Yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2020, perekonomian Kota Bima mengalami kontraksi hampir sebesar 5%. Kontraksi terbesar terjadi pada Transportasi dan Pergudangan, kemudian disusul konstruksi. Kondisi ini sebagai akibat dari pandemi covid-19. Meskipun begitu, akibat pandemi produksi pada Informasi dan Komunikasi meningkat drastis karena penggunaan sistem belajar daring sebesar 13,48 persen.

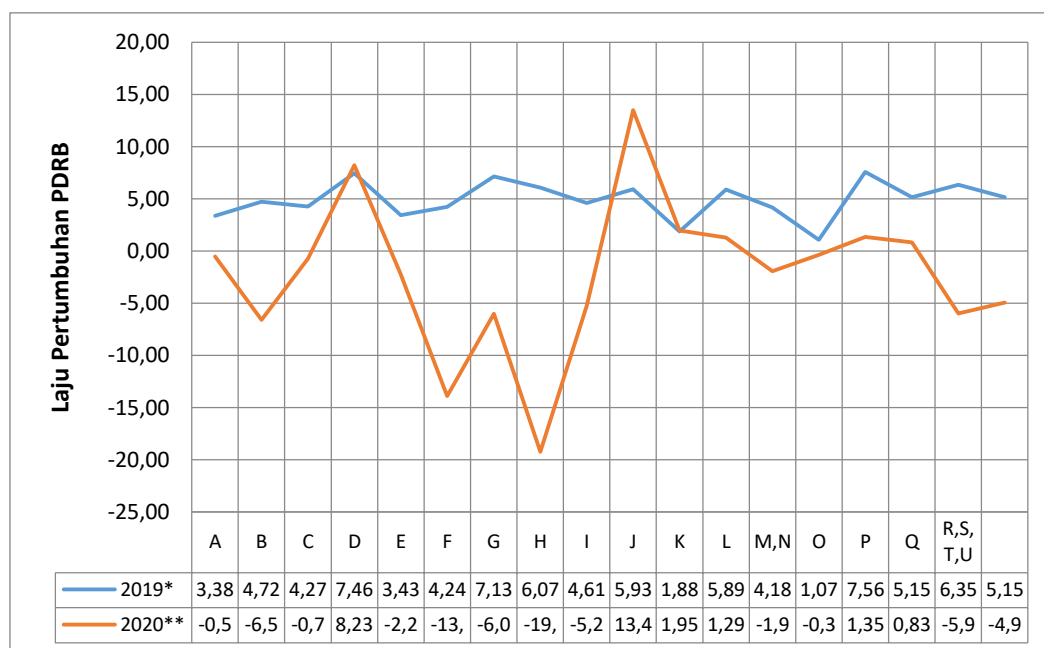
Gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor PDRB (lapangan usaha) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.7
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen/Percent) Tahun 2016-2020

| | Kategori | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|---|---------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|--------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,07 | 4,84 | 3,08 | 3,38 | -0,53 |
| B | Pertambangan dan Penggalan | 6,22 | 7,85 | 5,05 | 4,72 | -6,59 |
| C | Industri Pengolahan | 5,82 | 5,50 | 3,52 | 4,27 | -0,73 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 17,35 | 3,49 | 1,93 | 7,46 | 8,23 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,58 | 5,01 | 0,41 | 3,43 | -2,23 |
| F | Konstruksi | 8,25 | 9,62 | 4,93 | 4,24 | -13,90 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,89 | 8,55 | 5,99 | 7,13 | -6,01 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 5,48 | 7,52 | 4,21 | 6,07 | -19,22 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8,32 | 6,70 | 5,86 | 4,61 | -5,24 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 8,04 | 7,52 | 6,62 | 5,93 | 13,48 |

| | Kategori | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,18 | 9,50 | 6,18 | 1,88 | 1,95 |
| L | Real Estate | 5,85 | 5,74 | 5,74 | 5,89 | 1,29 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 5,35 | 5,07 | 7,40 | 4,18 | -1,94 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,64 | 1,70 | 0,98 | 1,07 | -0,38 |
| P | Jasa Pendidikan | 5,95 | 6,17 | 5,53 | 7,56 | 1,35 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5,89 | 5,44 | 7,86 | 5,15 | 0,83 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 6,44 | 7,75 | 5,71 | 6,35 | -5,97 |
| | PDRB | 5,79 | 6,65 | 4,70 | 5,15 | -4,95 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2021 *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara



Grafik 2.1.7 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2019-2020

Pendapatan Regional merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perkembangan PDRB Kota Bima, struktur perekonomian, pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional mengalami perubahan akibat berbagai perubahan skala ekonomi, teknologi, dan SDM dalam memproduksi barang dan jasa.

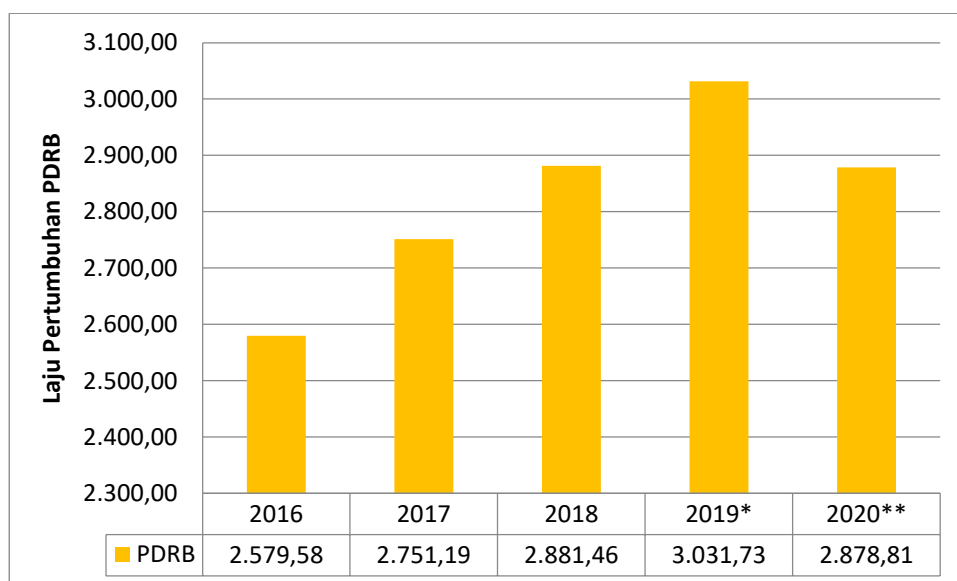
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Bima 2020 didasari pada Tahun Dasar 2010. Pada tahun 2020, terjadi penurunan secara massif akibat kondisi pandemic covid-19, laju pertumbuhan PDRB di Kota Bima yaitu dari 5,15 persen di tahun 2019 menjadi -4,95 persen pada tahun 2020. Untuk sektor yang memiliki peningkatan paling

besar pada PDRB Kota Bima adalah Informasi dan Komunikasi, selain itu sektor yang memiliki penurunan secara signifikan adalah pada sektor Transportasi dan Pergudangan.

Tabel 2.1.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2016-2020

| | Kategori | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 370,22 | 388,14 | 400,11 | 413,64 | 411,46 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 10,89 | 11,74 | 12,40 | 12,99 | 12,06 |
| C | Industri Pengolahan | 91,29 | 96,31 | 100,13 | 104,65 | 103,20 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 6,26 | 6,47 | 6,60 | 7,09 | 7,68 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 8,70 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 959,20 |
| F | Konstruksi | 274,93 | 277,81 | 291,52 | 303,87 | 261,63 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 600,85 | 652,23 | 691,30 | 740,62 | 696,11 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 274,93 | 295,61 | 308,29 | 327,34 | 263,93 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 66,07 | 70,50 | 74,63 | 78,08 | 73,98 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 47,36 | 50,91 | 54,28 | 57,50 | 65,04 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 60,75 | 66,51 | 70,70 | 72,09 | 73,36 |
| L | Real Estate | 129,99 | 137,45 | 145,34 | 153,89 | 155,88 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 8,99 | 9,44 | 10,13 | 10,56 | 10,35 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 269,73 | 274,31 | 276,99 | 279,95 | 278,89 |
| P | Jasa Pendidikan | 200,29 | 212,64 | 224,40 | 241,35 | 244,61 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 88,71 | 93,53 | 100,96 | 106,26 | 106,96 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 98,98 | 106,65 | 112,74 | 119,91 | 112,75 |
| | PDRB | 2.579,58 | 2.751,19 | 2.881,46 | 3.031,73 | 2.878,81 |

Sumber : PDRB Kota Bima, 2016-2020 *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara



Grafik 2.1.8 Persentase Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2016-2020

Selama Tahun 2020, ada 5 (Lima) Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bima yang dihasilkan oleh lapangan usaha antara lain Transportasi dan Perdagangan sebesar 263,93 persen, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 696,11 persen, Konstruksi sebesar 261,63 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 73,98 persen. Dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari PDRB tersebut, pengelolaan pembangunan ekonomi di Kota Bima secara umum menunjukkan pertumbuhannya yang negatif akibat adanya pandemi covid-19 yang melanda sehingga pergeseran pola hidup berubah secara masif.

2.1.7 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu tahun. PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang melebihi angka inflasi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat lebih baik, dan sebaliknya pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dari inflasi mencerminkan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Pertumbuhan PDRB dapat terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB.

Tabel 2.1.9
PDRB Per Kapita Kota Bima Tahun 2016– 2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I. Atas Dasar Harga Berlaku | | | | | |
| PDRB Perkapita (Ribu Rp) | 20.229 | 21.831 | 23.272 | 24.660 | 23.430 |
| Pertumbuhan (%) | 3,60 | 4,53 | 2,69 | 3,04 | -6,79 |

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bima Tahun 2016-2020

Dari tabel di atas terlihat pertumbuhan PDRB perkapita Kota Bima cenderung mengalami fluktuatif selama periode 2016-2020. Tahun yang mengalami peningkatan terjadi pada tahun 2016, 2017 dan 2019 dengan masing masing pertumbuhan sebesar 3,60 persen (2016) dan 4,53 persen (2017) dan 3,13 persen tahun 2019 sehingga bisa dikatakan tahun 2017 tercatat sebagai pertumbuhan PDRB perkapita tertinggi selama periode 2016-2020. Penurunan pertumbuhan terjadi di tahun 2018 sebesar 2,69 persen dan mencapai titik terendah di tahun 2020 dengan nilai -6,79 persen, hal ini sangat berkaitan dengan nilai PDRB ADH Berlaku Kota Bima yang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

2.1.8 Indeks Harga Implisit

Tingkat harga merupakan variabel penting yang berpengaruh terhadap peningkatan PDRB dan daya beli (*purchasing power*) masyarakat terhadap barang dan jasa. Sementara itu daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diterima dan tingkat harga atas barang dan jasa. Untuk melihat terjadinya perubahan harga pada suatu waktu, indikator yang digunakan adalah Indeks Harga Implisit (IHI).

IHI adalah suatu indeks harga yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing sektor/sub sektor dalam kurun waktu satu tahun dan dikalikan 100. Perubahan indeks harga implisit menggambarkan perubahan harga ditingkat produsen dari seluruh komoditi baik barang maupun jasa dari seluruh kegiatan ekonomi mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa-jasa yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.1.10
IHI dan Perubahan IHI Kota Bima Tahun 2016–2020

| Tahun | Indeks Harga Implisit (IHI) | Laju IHI (%) |
|--------|-----------------------------|--------------|
| 2016 | 127,91 | 4,17 |
| 2017 | 132,25 | 3,24 |
| 2018 | 136,98 | 3,74 |
| 2019* | 140,89 | 2,85 |
| 2020** | 143,60 | 1,92 |

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Selama kurun waktu 2016–2020, laju perubahan IHI selalu lebih rendah dibandingkan laju perubahan PDRB per kapita. Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat selama periode tersebut mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Bima dilihat dari PDRB per kapita meningkat selama tahun 2020.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang

pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu:

1. Dalam konteks kebijakan anggaran, memberikan arah kebijakan perekonomian, dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat;
2. Untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; dan
3. Sebagai sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dalam suatu daerah.

Pembangunan di Kota Bima dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan umum anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 yang memuat berbagai strategi dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat dimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kota Bima Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021, maka RKPD dimaksudkan sebagai upaya-upaya pemerintah daerah secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan dari visi dan misi daerah. Untuk itu RKPD tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai penentu kebijakan dan menetapkan kerangka regulasi guna mendorong partisipasi masyarakat di daerah.

Dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Bima tahun 2020 serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati, terdapat lima program prioritas pembangunan dalam tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2020 adalah pembangunan ekonomi berbasiskan perekonomian lokal, yaitu :

1. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia, sehingga menghasilkan produk yang unggul secara komparatif maupun secara kompetitif;
2. Meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan masyarakat dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan skala kecil maupun skala menengah dengan memberikan kemudahan dan insentif yang sifatnya penggulangan, sehingga hal ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi para pencari kerja;
3. Menciptakan/memperluas jaringan pasar bagi produk masyarakat, sehingga produk tersebut layak dan berdaya saing di pasar yang pada gilirannya masyarakat memperoleh pendapatan;
4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, pemberian paket insentif, dan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dalam rangka mendukung Kota Bima sebagai Kota Perdagangan dan Jasa;

5. Penetapan kawasan/lahan abadi untuk produksi pertanian dalam rangka mempertahankan ketahanan dan kestabilan produksi pangan, serta mengembangkan usaha agrobisnis.

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bima, selama tahun 2021 diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah;
2. Kebijakan Belanja Daerah; dan
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Pemerintah Kota Bima adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021, ditempuh arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut.

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan peningkatan PAD harus tetap memperhatikan prinsip agar pajak dan retribusi tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat yang dapat berakibat pada terhambatnya iklim usaha yang baik untuk pengembangan ekonomi lokal. Dan sebaliknya perlu upaya dan langkah-langkah strategis untuk memberikan paket insentif dan disinsentif maupun stimulus agar terus bertumbuhkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat tetap stabil dan terus meningkat. Disamping itu dalam hal pengelolaan juga perlu penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, dan sosialisasi untuk terus meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi daerah perlu terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada.

Dalam menetapkan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hendaknya dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2021 diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan dana perimbangan yang ditargetkan pada tahun 2021 khususnya pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat seiring asumsi peningkatan gaji pegawai.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021 juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan dengan pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2021.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Pemerintah Kota Bima pada tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, Pemerintah Kota Bima sangat menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan penghematan serta diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bima dalam berbagai kebijakannya selalu memberikan perhatian khusus terhadap program prioritas daerah baik dalam rangka pencapaian visi dan misi pada tahun yang berjalan maupun bagi pencapaian pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*) sebagai perwujudan atas terlaksananya otonomi daerah. Pemerintah Kota Bima memberdayakan seluruh elemen kebijakan yang sudah terimplementasikan pada semua Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan pada program/kegiatan. Pemerintah Kota Bima tetap menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas belanja dengan memanfaatkan sumber pendapatan secara maksimal.

Arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Kebijakan Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, dan penambahan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) telah diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, serta estimasi alokasi untuk pembayaran gaji ke-13 dan gaji ke -14 PNSD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

- b) Untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan calon PNSD (CPNSD) sesuai formasi Penyuluh Lapangan tahun 2019 serta pengangkatan CPNSD alumni STPDN tahun 2018;
- c) Penyediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan jaminan kesehatan (Askes) bagi PNSD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- d) Penganggaran belanja pegawai untuk Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah senilai 5% dari target pajak daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Penganggaran belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD;
- f) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD dalam upaya peningkatan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi;
- g) Dasar penghitungan besaran honorarium bagi PNSD disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima, dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja; dan
- h) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi pemerintah.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
- b) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang TA 2021. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan beban pekerjaan;
- c) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif dan terdapat pembatasan frekuensi dan jumlah hari;
- d) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
- e) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, *workshop*, seminar, dan lokakarya agar dibatasi; dan
- f) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga

Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan belanja hibah antara lain :

- a) Penganggaran belanja hibah dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Partai Politik, Perusahaan daerah, dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah, dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c) Pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Disamping itu, penetapan besaran bantuan tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; dan
- d) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, telah diupayakan pembatasan terhadap jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dan format pertanggungjawabannya telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Belanja Modal

1. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
2. Penganggaran belanja modal tidak hanya senilai harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

C. Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2021 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2021.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam menetapkan SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.

2. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bima dialokasikan jika diperkirakan surplus anggaran. Pemanfaatan sisa lebih anggaran (surplus) digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja APBD daerah, sehingga Pemerintah Kota Bima memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam TA 2021. Penetapan capaian kinerja APBD untuk tahun 2021 dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021. Tabel berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2021.

2.3.1 APBD dan Perubahannya

APBD dan perubahan APBD serta realisasi APBD tahun 2021 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

Tabel 2.1.11

APBD, Perubahan APBD dan Realisasi APBD Kota Bima Tahun 2021

| No | Uraian | APBD | Perubahan APBD | Realisasi APBD | % |
|----|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| 1. | Pendapatan | 751.247.135.434,00 | 745.404.518.907,00 | 729.687.511.750,67 | 97,89 |
| 2. | Belanja | 764.747.135.434,00 | 754.078.303.532,00 | 716.700.153.286,42 | 95,04 |
| | Surplus / (Defisit) | (13.500.000.000,00) | (8.673.784.625,00) | 12.987.358.464,25 | (149,73) |
| 3. | Pembiayaan | 13.500.000.000,00 | 8.673.784.625,00 | 8.974.821.367,93 | 103,47 |
| a. | Penerimaan Pembiayaan | 16.000.000.000,00 | 10.973.784.625,00 | 10.974.821.367,93 | 100,01 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan | 2.500.000.000,00 | 2.300.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 86,96 |
| | SILPA | 0,00 | 0,00 | 21.962.179.832,18 | 0,00 |

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2021, diolah

Dari data tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan anggaran pendapatan pada perubahan APBD senilai Rp5.842.616.527 atau senilai 0,78%. Penurunan pendapatan ini diakibatkan karena estimasi kebutuhan yang terjadi karena adanya pandemi covid 19 sehingga dilakukan pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. total anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Bima pada tahun 2021 setelah perubahan senilai Rp754.078.303.532 mengalami penurunan senilai

Rp10.668.831.902 atau senilai 1,41% dibanding total anggaran belanja sebelum perubahan senilai Rp764.747.135.434.

2.3.2 Realisasi APBD

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2021 senilai Rp729.687.511.750,67 atau 97,89% dari target yang ditetapkan senilai Rp745.404.518.907 sehingga terdapat sisa Anggaran senilai Rp15.717.007.156,33 atau senilai 2,11%.

Realisasi belanja tahun 2021 senilai Rp716.700.153.286,42 atau senilai 95,04 % dari yang ditargetkan senilai Rp754.078.303.532, sehingga masih terdapat sisa anggaran senilai Rp37.393.946.942,58 atau 4,96%. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dalam pengeluaran total belanja secara umum yang mencakup belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Realisasi pendapatan dikurangi belanja pada tahun 2021 mengalami surplus senilai Rp12.987.358.464,25 sementara realisasi pembiayaan netto adalah senilai Rp8.974.821.367,93 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp10.974.821.367,93 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp2.000.000.000,00 sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) senilai Rp21.962.179.832,18.

Tabel 2.1.12
Rekapitulasi Belanja Daerah Per Program Kegiatan Tahun 2021

(dalam rupiah)

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.422.778.790,00 | 1.158.272.694,00 | (264.506.096,00) | 81,41 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 433.911.280,00 | 321.158.144,00 | (112.753.136,00) | 74,01 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 136.863.034,00 | 114.403.700,00 | (22.459.334,00) | 83,59 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 102.797.800,00 | 94.664.300,00 | (8.133.500,00) | 92,09 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 66.929.000,00 | 63.913.500,00 | (3.015.500,00) | 95,49 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 73.858.426,00 | 63.728.500,00 | (10.129.926,00) | 86,28 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 208.543.600,00 | 194.508.200,00 | (14.035.400,00) | 93,27 |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 399.875.650,00 | 305.896.350,00 | (93.979.300,00) | 76,50 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.616.895.070,00 | 2.453.051.042,00 | (163.844.028,00) | 93,74 |
| 8 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 242.968.800,00 | 239.610.755,00 | (3.358.045,00) | 98,62 |
| 9 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | 1.885.781.270,00 | 1.738.034.864,00 | (147.746.406,00) | 92,17 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SKPD | | | | |
| 10 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 23.315.100,00 | 23.276.100,00 | (39.000,00) | 99,83 |
| 11 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 124.873.600,00 | 122.570.800,00 | (2.302.800,00) | 98,16 |
| 12 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 145.940.200,00 | 142.368.123,00 | (3.572.077,00) | 97,55 |
| 13 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 138.778.100,00 | 132.371.100,00 | (6.407.000,00) | 95,38 |
| 14 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 55.238.000,00 | 54.819.300,00 | (418.700,00) | 99,24 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 877.392.800,00 | 850.008.000,00 | (27.384.800,00) | 96,88 |
| 15 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 33.200.000,00 | 33.098.000,00 | (102.000,00) | 99,69 |
| 17 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.680.000,00 | 1.080.000,00 | (600.000,00) | 64,29 |
| 18 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.847.200,00 | 6.842.000,00 | (5.200,00) | 99,92 |
| 19 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 21.803.900,00 | 21.726.500,00 | (77.400,00) | 99,65 |
| 20 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 812.381.700,00 | 785.781.500,00 | (26.600.200,00) | 96,73 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 6.673.164.200,00 | 6.356.821.034,00 | (316.343.166,00) | 95,26 |
| 21 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5.305.798.400,00 | 5.194.064.400,00 | (111.734.000,00) | 97,89 |
| 22 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 38.005.800,00 | 38.005.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 23 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 113.118.000,00 | 107.703.000,00 | (5.415.000,00) | 95,21 |
| 24 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 592.121.600,00 | 515.400.234,00 | (76.721.366,00) | 87,04 |
| 25 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 624.120.400,00 | 501.647.600,00 | (122.472.800,00) | 80,38 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 14.102.791.313,00 | 13.346.545.791,00 | (756.245.522,00) | 94,64 |
| 26 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 262.330.690,00 | 253.182.925,00 | (9.147.765,00) | 96,51 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.438.926.569,00 | 1.420.519.080,00 | (18.407.489,00) | 98,72 |
| 28 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 42.161.900,00 | 27.613.480,00 | (14.548.420,00) | 65,49 |
| 29 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.048.583.710,00 | 1.006.052.796,00 | (42.530.914,00) | 95,94 |
| 30 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 1.414.047.586,00 | 1.301.107.340,00 | (112.940.246,00) | 92,01 |
| 31 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 534.566.000,00 | 475.050.800,00 | (59.515.200,00) | 88,87 |
| 32 | Penyediaan Bahan/Material | 1.177.000,00 | 1.177.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.258.790.550,00 | 1.255.832.920,00 | (2.957.630,00) | 99,77 |
| 34 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7.909.633.908,00 | 7.428.304.050,00 | (481.329.858,00) | 93,91 |
| 35 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 166.936.000,00 | 152.068.000,00 | (14.868.000,00) | 91,09 |
| 36 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 25.637.400,00 | 25.637.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.845.691.935,00 | 2.688.412.367,00 | (157.279.568,00) | 94,47 |
| 37 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.500.400.000,00 | 1.500.400.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38 | Pengadaan Mebel | 205.878.800,00 | 57.306.000,00 | (148.572.800,00) | 27,83 |
| 39 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 679.963.635,00 | 671.542.170,00 | (8.421.465,00) | 98,76 |
| 40 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 399.800.000,00 | 399.642.597,00 | (157.403,00) | 99,96 |
| 41 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 59.649.500,00 | 59.521.600,00 | (127.900,00) | 99,79 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15.675.778.788,00 | 14.550.759.614,00 | (1.125.019.174,00) | 92,82 |
| 42 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.195.252.100,00 | 3.105.260.300,00 | (89.991.800,00) | 97,18 |
| 43 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.682.796.915,00 | 4.018.919.118,00 | (663.877.797,00) | 85,82 |
| 44 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 381.495.995,00 | 347.291.528,00 | (34.204.467,00) | 91,03 |
| 45 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7.416.233.778,00 | 7.079.288.668,00 | (336.945.110,00) | 95,46 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.534.019.700,00 | 6.924.714.550,18 | (609.305.149,82) | 91,91 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.629.644.150,00 | 1.441.111.656,00 | (188.532.494,00) | 88,43 |
| 47 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.559.549.466,00 | 2.240.744.037,00 | (318.805.429,00) | 87,54 |
| 48 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 582.235.402,00 | 569.502.215,00 | (12.733.187,00) | 97,81 |
| 49 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 514.633.800,00 | 486.348.900,00 | (28.284.900,00) | 94,50 |
| 50 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.002.781.282,00 | 1.966.454.092,18 | (36.327.189,82) | 98,19 |
| 51 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 169.830.600,00 | 151.808.650,00 | (18.021.950,00) | 89,39 |
| 52 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 75.345.000,00 | 68.745.000,00 | (6.600.000,00) | 91,24 |
| | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 261.000.000,00 | 179.027.500,00 | (81.972.500,00) | 68,59 |
| 53 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 54 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 180.000.000,00 | 98.027.500,00 | (81.972.500,00) | 54,46 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.516.197.200,00 | 1.439.334.273,00 | (76.862.927,00) | 94,93 |
| 55 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 51.690.000,00 | 51.133.550,00 | (556.450,00) | 98,92 |
| 56 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 50.300.000,00 | 49.399.000,00 | (901.000,00) | 98,21 |
| 57 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 192.067.200,00 | 201.814.200,00 | 9.747.000,00 | 105,07 |
| 58 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 196.870.000,00 | 195.429.700,00 | (1.440.300,00) | 99,27 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 59 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 137.770.000,00 | 138.069.823,00 | 299.823,00 | 100,22 |
| 60 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 708.650.000,00 | 632.877.000,00 | (75.773.000,00) | 89,31 |
| 61 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 178.850.000,00 | 170.611.000,00 | (8.239.000,00) | 95,39 |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 210.836.000,00 | 208.422.200,00 | (2.413.800,00) | 98,86 |
| 62 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 104.717.600,00 | 104.307.200,00 | (410.400,00) | 99,61 |
| 63 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 106.118.400,00 | 104.115.000,00 | (2.003.400,00) | 98,11 |
| | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 60.197.100,00 | 60.184.100,00 | (13.000,00) | 99,98 |
| 64 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 20.497.100,00 | 20.484.100,00 | (13.000,00) | 99,94 |
| 65 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 66 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 48.297.400,00 | 48.297.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 67 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 48.297.400,00 | 48.297.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 96.865.700,00 | 95.331.700,00 | (1.534.000,00) | 98,42 |
| 68 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 6.631.700,00 | 6.631.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 69 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | 90.234.000,00 | 88.700.000,00 | (1.534.000,00) | 98,30 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 1.105.231.300,00 | 1.080.205.717,00 | (25.025.583,00) | 97,74 |
| 70 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 663.220.000,00 | 658.255.756,00 | (4.964.244,00) | 99,25 |
| 71 | Pembahasan Rancangan Perda | 398.866.300,00 | 395.884.961,00 | (2.981.339,00) | 99,25 |
| 72 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 18.755.000,00 | 2.015.000,00 | (16.740.000,00) | 10,74 |
| 73 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | 19.040.000,00 | 18.700.000,00 | (340.000,00) | 98,21 |
| 74 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 102.460.000,00 | 70.008.000,00 | (32.452.000,00) | 68,33 |
| 75 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | 21.460.000,00 | 21.460.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 76 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | 81.000.000,00 | 48.548.000,00 | (32.452.000,00) | 59,94 |
| | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 189.889.900,00 | 189.204.300,00 | (685.600,00) | 99,64 |
| 77 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah | 115.360.000,00 | 115.359.700,00 | (300,00) | 100,00 |
| 78 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 79 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 64.529.900,00 | 63.844.600,00 | (685.300,00) | 98,94 |
| | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 150.392.425,00 | 149.768.425,00 | (624.000,00) | 99,59 |
| 80 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 150.392.425,00 | 149.768.425,00 | (624.000,00) | 99,59 |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 45.441.000,00 | 45.400.027,00 | (40.973,00) | 99,91 |
| 81 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 45.441.000,00 | 45.400.027,00 | (40.973,00) | 99,91 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 943.142.000,00 | 883.652.000,00 | (59.490.000,00) | 93,69 |
| 82 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 943.142.000,00 | 883.652.000,00 | (59.490.000,00) | 93,69 |
| | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 423.761.300,00 | 321.565.600,00 | (102.195.700,00) | 75,88 |
| 83 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | 286.979.300,00 | 205.528.200,00 | (81.451.100,00) | 71,62 |
| 84 | Evaluasi Pemberhentian ASN | 66.538.000,00 | 56.516.800,00 | (10.021.200,00) | 84,94 |
| 85 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 25.156.000,00 | 25.152.000,00 | (4.000,00) | 99,98 |
| 86 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 45.088.000,00 | 34.368.600,00 | (10.719.400,00) | 76,23 |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 321.600.960,00 | 314.141.125,00 | (7.459.835,00) | 97,68 |
| 87 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 155.031.460,00 | 152.071.625,00 | (2.959.835,00) | 98,09 |
| 88 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 166.569.500,00 | 162.069.500,00 | (4.500.000,00) | 97,30 |
| | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 11.522.000,00 | 11.397.000,00 | (125.000,00) | 98,92 |
| 89 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 90 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 640.000,00 | 515.000,00 | (125.000,00) | 80,47 |
| 91 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 106.632.200,00 | 101.240.400,00 | (5.391.800,00) | 94,94 |
| 92 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 57.177.000,00 | 56.884.000,00 | (293.000,00) | 99,49 |
| 93 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 49.455.200,00 | 44.356.400,00 | (5.098.800,00) | 89,69 |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.437.545.150,00 | 1.430.024.188,00 | (7.520.962,00) | 99,48 |
| 94 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 9.015.000,00 | 9.004.500,00 | (10.500,00) | 99,88 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 95 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 5.522.600,00 | 5.522.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 96 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 56.269.200,00 | 54.306.598,00 | (1.962.602,00) | 96,51 |
| 97 | Layanan Hubungan Media | 1.156.785.000,00 | 1.155.920.200,00 | (864.800,00) | 99,93 |
| 98 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 18.350.000,00 | 18.150.000,00 | (200.000,00) | 98,91 |
| 99 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 100 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 189.533.350,00 | 185.050.290,00 | (4.483.060,00) | 97,63 |
| | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 69.802.000,00 | 69.602.000,00 | (200.000,00) | 99,71 |
| 101 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 69.802.000,00 | 69.602.000,00 | (200.000,00) | 99,71 |
| | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1.031.779.535,00 | 1.002.725.263,00 | (29.054.272,00) | 97,18 |
| 102 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 388.765.000,00 | 380.463.000,00 | (8.302.000,00) | 97,86 |
| 103 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 643.014.535,00 | 622.262.263,00 | (20.752.272,00) | 96,77 |
| | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 25.348.172.088,00 | 25.263.575.906,49 | (108.008.078,51) | 99,57 |
| 104 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 400.000.000,00 | 399.072.000,00 | (928.000,00) | 99,77 |
| 105 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 76.546.000,00 | 76.300.000,00 | (246.000,00) | 99,68 |
| 106 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 4.490.827.999,00 | 4.386.709.000,00 | (104.118.999,00) | 97,68 |
| 107 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 2.639.683.992,00 | 2.617.469.089,00 | (22.214.903,00) | 99,16 |
| 108 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 119.990.000,00 | 119.248.000,00 | (742.000,00) | 99,38 |
| 109 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 5.255.000.000,00 | 5.254.464.668,00 | (535.332,00) | 99,99 |
| 110 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 111 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | 25.311.600,00 | 25.311.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 112 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 3.784.800,00 | 2.074.900,00 | (1.709.900,00) | 54,82 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 113 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 87.332.400,00 | 85.382.400,00 | (1.950.000,00) | 97,77 |
| 114 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 12.243.495.297,00 | 12.291.344.249,49 | 24.437.055,49 | 100,20 |
| | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 635.175.500,00 | 634.035.900,00 | (1.139.600,00) | 99,82 |
| 115 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 100.000.000,00 | 99.800.000,00 | (200.000,00) | 99,80 |
| 116 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 752.000,00 | 752.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 117 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 782.500,00 | 782.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 118 | Pengembangan Bahan Pustaka | 527.600.000,00 | 526.660.400,00 | (939.600,00) | 99,82 |
| 119 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 6.041.000,00 | 6.041.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.884.992.342,42 | 5.861.409.492,42 | (23.582.850,00) | 99,60 |
| 120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 640.085.300,00 | 626.513.650,00 | (13.571.650,00) | 97,88 |
| 121 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 235.017.000,00 | 233.639.000,00 | (1.378.000,00) | 99,41 |
| 122 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 1.218.302.425,00 | 1.214.951.425,00 | (3.351.000,00) | 99,72 |
| 123 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 99.680.000,00 | 98.279.000,00 | (1.401.000,00) | 98,59 |
| 124 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 3.171.196.417,42 | 3.170.641.417,42 | (555.000,00) | 99,98 |
| 125 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 442.168.000,00 | 440.536.000,00 | (1.632.000,00) | 99,63 |
| 126 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 78.543.200,00 | 76.849.000,00 | (1.694.200,00) | 97,84 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 520.480.900,00 | 493.815.500,00 | (26.665.400,00) | 94,88 |
| 127 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 520.480.900,00 | 493.815.500,00 | (26.665.400,00) | 94,88 |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 31.642.227.448,00 | 30.401.919.295,00 | (1.240.308.153,00) | 96,08 |
| 128 | Pembangunan Puskesmas | 9.796.096.818,00 | 9.742.738.000,00 | (53.358.818,00) | 99,46 |
| 129 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.050.000.000,00 | 1.025.597.800,00 | (24.402.200,00) | 97,68 |
| 130 | Pengembangan Rumah Sakit | 2.479.607.346,00 | 1.641.359.906,00 | (838.247.440,00) | 66,19 |
| 131 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 2.258.617.600,00 | 2.040.134.427,00 | (218.483.173,00) | 90,33 |
| 132 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 9.243.350.219,00 | 9.199.031.814,00 | (44.318.405,00) | 99,52 |
| 133 | Pengadaan Obat, Vaksin | 1.373.458.544,00 | 1.362.172.422,00 | (11.286.122,00) | 99,18 |
| 134 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 5.441.096.921,00 | 5.390.884.926,00 | (50.211.995,00) | 99,08 |
| | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 585.472.000,00 | 584.572.599,00 | (899.401,00) | 99,85 |
| 135 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 228.609.800,00 | 228.423.599,00 | (186.201,00) | 99,92 |
| 136 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 11.636.000,00 | 11.628.000,00 | (8.000,00) | 99,93 |
| 137 | Reviu Laporan Kinerja | 147.663.400,00 | 147.458.000,00 | (205.400,00) | 99,86 |
| 138 | Reviu Laporan Keuangan | 20.228.600,00 | 19.773.000,00 | (455.600,00) | 97,75 |
| 139 | Kerjasama Pengawasan Internal | 27.524.200,00 | 27.520.000,00 | (4.200,00) | 99,98 |
| 140 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 149.810.000,00 | 149.770.000,00 | (40.000,00) | 99,97 |
| | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 61.836.900,00 | 47.828.801,00 | (14.008.099,00) | 77,35 |
| 141 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 10.897.000,00 | 9.170.750,00 | (1.726.250,00) | 84,16 |
| 142 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 21.361.900,00 | 17.090.301,00 | (4.271.599,00) | 80,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 143 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 17.925.000,00 | 10.883.750,00 | (7.041.250,00) | 60,72 |
| 144 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 11.653.000,00 | 10.684.000,00 | (969.000,00) | 91,68 |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 184.659.000,00 | 145.777.300,00 | (38.881.700,00) | 78,94 |
| 145 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 96.064.800,00 | 76.190.100,00 | (19.874.700,00) | 79,31 |
| 146 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 59.109.000,00 | 53.058.200,00 | (6.050.800,00) | 89,76 |
| 147 | Pengembangan Infrastruktur | 29.485.200,00 | 16.529.000,00 | (12.956.200,00) | 56,06 |
| | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 99.889.000,00 | 81.627.000,00 | (18.262.000,00) | 81,72 |
| 148 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | 26.590.000,00 | 21.740.000,00 | (4.850.000,00) | 81,76 |
| 149 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 30.724.000,00 | 30.345.000,00 | (379.000,00) | 98,77 |
| 150 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 42.575.000,00 | 29.542.000,00 | (13.033.000,00) | 69,39 |
| | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | 77.885.000,00 | 75.505.000,00 | (2.380.000,00) | 96,94 |
| 151 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 77.885.000,00 | 75.505.000,00 | (2.380.000,00) | 96,94 |
| | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 72.000.000,00 | 31.974.000,00 | (40.026.000,00) | 44,41 |
| 152 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 72.000.000,00 | 31.974.000,00 | (40.026.000,00) | 44,41 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 126.931.800,00 | 124.485.600,00 | (2.446.200,00) | 98,07 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 153 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 45.306.600,00 | 42.860.400,00 | (2.446.200,00) | 94,60 |
| 154 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter | 81.625.200,00 | 81.625.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 124.598.150,00 | 122.325.000,00 | (2.273.150,00) | 98,18 |
| 155 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 124.598.150,00 | 122.325.000,00 | (2.273.150,00) | 98,18 |
| | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 1.965.714.900,00 | 1.963.465.656,00 | (2.249.244,00) | 99,89 |
| 156 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 1.025.808.000,00 | 1.024.531.956,00 | (1.276.044,00) | 99,88 |
| 157 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 777.404.000,00 | 776.631.700,00 | (772.300,00) | 99,90 |
| 158 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 162.502.900,00 | 162.302.000,00 | (200.900,00) | 99,88 |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 390.711.900,00 | 418.468.342,00 | 27.756.442,00 | 107,10 |
| 159 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 46.817.000,00 | 45.321.683,00 | (1.495.317,00) | 96,81 |
| 160 | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 91.347.000,00 | 90.274.039,00 | (1.072.961,00) | 98,83 |
| 161 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 65.706.000,00 | 62.754.358,00 | (2.951.642,00) | 95,51 |
| 162 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 72.043.000,00 | 121.152.762,00 | 49.109.762,00 | 168,17 |
| 163 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 89.847.900,00 | 86.389.500,00 | (3.458.400,00) | 96,15 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 164 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 24.951.000,00 | 12.576.000,00 | (12.375.000,00) | 50,40 |
| | Mutasi dan Promosi ASN | 390.254.300,00 | 283.857.335,00 | (106.396.965,00) | 72,74 |
| 165 | Pengelolaan Mutasi ASN | 284.821.800,00 | 207.121.290,00 | (77.700.510,00) | 72,72 |
| 166 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 105.432.500,00 | 76.736.045,00 | (28.696.455,00) | 72,78 |
| | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 405.946.700,00 | 401.326.400,00 | (4.620.300,00) | 98,86 |
| 167 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 405.946.700,00 | 401.326.400,00 | (4.620.300,00) | 98,86 |
| | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 62.384.600,00 | 61.334.000,00 | (1.050.600,00) | 98,32 |
| 168 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 36.196.600,00 | 35.146.000,00 | (1.050.600,00) | 97,10 |
| 169 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 26.188.000,00 | 26.188.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 438.800.000,00 | 312.468.215,00 | (126.331.785,00) | 71,21 |
| 170 | Pembahasan KUA dan PPAS | 136.600.000,00 | 134.504.700,00 | (2.095.300,00) | 98,47 |
| 171 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 172 | Pembahasan APBD | 136.750.000,00 | 135.923.515,00 | (826.485,00) | 99,40 |
| 173 | Pembahasan APBD Perubahan | 135.000.000,00 | 11.590.000,00 | (123.410.000,00) | 8,59 |
| 174 | Pembahasan Laporan Semester | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 175 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 62.364.100,00 | 55.966.100,00 | (6.398.000,00) | 89,74 |
| 176 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 25.087.700,00 | 20.187.700,00 | (4.900.000,00) | 80,47 |
| 177 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 17.921.700,00 | 17.423.700,00 | (498.000,00) | 97,22 |
| 178 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 19.354.700,00 | 18.354.700,00 | (1.000.000,00) | 94,83 |
| | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 18.943.400,00 | 18.743.400,00 | (200.000,00) | 98,94 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 179 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 18.943.400,00 | 18.743.400,00 | (200.000,00) | 98,94 |
| | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 10.932.706.838,00 | 10.784.285.150,00 | (148.421.688,00) | 98,64 |
| 180 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 10.575.500,00 | 10.575.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 181 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 10.886.162.838,00 | 10.737.741.150,00 | (148.421.688,00) | 98,64 |
| 182 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 27.375.000,00 | 27.375.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 183 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 343.500,00 | 343.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 184 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 274.368.000,00 | 272.121.418,00 | (2.246.582,00) | 99,18 |
| 185 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 176.802.000,00 | 174.555.418,00 | (2.246.582,00) | 98,73 |
| 186 | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | 25.121.000,00 | 25.121.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 187 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 70.935.000,00 | 70.935.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 188 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penataan Pendaftaran Penduduk | 526.900.000,00 | 515.027.000,00 | (11.873.000,00) | 97,75 |
| 189 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | 526.900.000,00 | 515.027.000,00 | (11.873.000,00) | 97,75 |
| | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 2.361.328.000,00 | 2.335.868.000,00 | (25.460.000,00) | 98,92 |
| 190 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 13.280.000,00 | 13.280.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 191 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 2.348.048.000,00 | 2.322.588.000,00 | (25.460.000,00) | 98,92 |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 38.251.000,00 | 32.850.000,00 | (5.401.000,00) | 85,88 |
| 192 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 38.251.000,00 | 32.850.000,00 | (5.401.000,00) | 85,88 |
| | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 80.499.000,00 | 70.285.882,00 | (10.213.118,00) | 87,31 |
| 193 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 80.499.000,00 | 70.285.882,00 | (10.213.118,00) | 87,31 |
| | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | 12.855.000,00 | 11.265.000,00 | (1.590.000,00) | 87,63 |
| 194 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | 7.575.000,00 | 7.245.000,00 | (330.000,00) | 95,64 |
| 195 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 5.280.000,00 | 4.020.000,00 | (1.260.000,00) | 76,14 |
| | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 397.713.510,00 | 373.398.759,00 | (24.314.751,00) | 93,89 |
| 196 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 397.713.510,00 | 373.398.759,00 | (24.314.751,00) | 93,89 |
| | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 9.905.197.798,00 | 9.851.707.962,00 | (84.943.311,00) | 99,14 |
| 197 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 497.753.048,00 | 477.550.000,00 | (20.203.048,00) | 95,94 |
| 198 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 2.413.242.950,00 | 2.396.978.974,00 | (16.263.976,00) | 99,33 |
| 199 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 124.878.000,00 | 124.120.000,00 | (758.000,00) | 99,39 |
| 200 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 1.188.940.000,00 | 1.127.454.800,00 | (61.485.200,00) | 94,83 |
| 201 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 202 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 15.706.100,00 | 15.701.900,00 | (4.200,00) | 99,97 |
| 203 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 3.128.900,00 | 1.958.900,00 | (1.170.000,00) | 62,61 |
| 204 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 72.698.800,00 | 71.762.800,00 | (936.000,00) | 98,71 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 205 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 5.584.950.000,00 | 5.632.280.588,00 | 15.877.113,00 | 100,28 |
| | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 206 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 6.007.700,00 | 6.007.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.336.870.330,00 | 1.285.106.000,00 | (51.764.330,00) | 96,13 |
| 207 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 1.336.870.330,00 | 1.285.106.000,00 | (51.764.330,00) | 96,13 |
| | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 208 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 147.153.200,00 | 136.129.878,00 | (11.023.322,00) | 92,51 |
| 209 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 50.476.400,00 | 48.384.100,00 | (2.092.300,00) | 95,85 |
| 210 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 16.034.800,00 | 15.402.800,00 | (632.000,00) | 96,06 |
| 211 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 51.556.500,00 | 47.017.328,00 | (4.539.172,00) | 91,20 |
| 212 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | 29.085.500,00 | 25.325.650,00 | (3.759.850,00) | 87,07 |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 38.060.726.414,00 | 31.578.173.594,00 | (6.482.552.820,00) | 82,97 |
| 213 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 303.106.900,00 | 248.415.800,00 | (54.691.100,00) | 81,96 |
| 214 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 648.732.000,00 | 217.986.650,00 | (430.745.350,00) | 33,60 |
| 215 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 66.749.400,00 | 66.522.398,00 | (227.002,00) | 99,66 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 216 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 180.360.800,00 | 135.588.400,00 | (44.772.400,00) | 75,18 |
| 217 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 96.560.500,00 | 67.503.200,00 | (29.057.300,00) | 69,91 |
| 218 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 63.530.000,00 | 52.218.800,00 | (11.311.200,00) | 82,20 |
| 219 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 71.180.000,00 | 57.750.000,00 | (13.430.000,00) | 81,13 |
| 220 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 42.539.500,00 | 27.080.000,00 | (15.459.500,00) | 63,66 |
| 221 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 38.738.600,00 | 25.635.000,00 | (13.103.600,00) | 66,17 |
| 222 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 43.683.300,00 | 23.600.000,00 | (20.083.300,00) | 54,03 |
| 223 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 215.498.000,00 | 189.198.000,00 | (26.300.000,00) | 87,80 |
| 224 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 68.028.600,00 | 64.153.200,00 | (3.875.400,00) | 94,30 |
| 225 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 336.413.100,00 | 163.981.200,00 | (172.431.900,00) | 48,74 |
| 226 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 516.091.054,00 | 486.740.400,00 | (29.350.654,00) | 94,31 |
| 227 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 103.934.000,00 | 54.673.400,00 | (49.260.600,00) | 52,60 |
| 228 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 639.729.344,00 | 252.296.500,00 | (387.432.844,00) | 39,44 |
| 229 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 501.310.416,00 | 380.771.950,00 | (120.538.466,00) | 75,96 |
| 230 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 36.908.900,00 | 32.403.100,00 | (4.505.800,00) | 87,79 |
| 231 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 438.559.001,00 | 199.733.200,00 | (238.825.801,00) | 45,54 |
| 232 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 36.310.600,00 | 5.655.900,00 | (30.654.700,00) | 15,58 |
| 233 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 23.682.400,00 | 6.321.800,00 | (17.360.600,00) | 26,69 |
| 234 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | 287.860.000,00 | 273.633.800,00 | (14.226.200,00) | 95,06 |
| 235 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1.152.163.900,00 | 893.577.185,00 | (258.586.715,00) | 77,56 |
| 236 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 18.490.725.643,00 | 15.877.770.713,00 | (2.612.954.930,00) | 85,87 |
| 237 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | 22.369.800,00 | 360.000,00 | (22.009.800,00) | 1,61 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 238 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 2.550.000,00 | 0,00 | (2.550.000,00) | 0,00 |
| 239 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 11.898.788.269,00 | 10.304.452.250,00 | (1.594.336.019,00) | 86,60 |
| 240 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 718.988.323,00 | 491.808.100,00 | (227.180.223,00) | 68,40 |
| 241 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 417.038.445,00 | 412.188.348,00 | (4.850.097,00) | 98,84 |
| 242 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 545.360.219,00 | 520.369.600,00 | (24.990.619,00) | 95,42 |
| 243 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 53.235.400,00 | 45.784.700,00 | (7.450.700,00) | 86,00 |
| | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 5.693.067.052,00 | 5.538.490.753,00 | (154.576.299,00) | 97,28 |
| 244 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 1.087.492.425,00 | 1.060.067.900,00 | (27.424.525,00) | 97,48 |
| 245 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 4.605.574.627,00 | 4.478.422.853,00 | (127.151.774,00) | 97,24 |
| | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 53.020.000,00 | 52.980.000,00 | 0,00 | 99,92 |
| 246 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 2.528.000,00 | 2.528.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 247 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 50.492.000,00 | 50.452.000,00 | (40.000,00) | 99,92 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | 153.595.400,00 | 146.635.400,00 | (6.960.000,00) | 95,47 |
| 248 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | 153.595.400,00 | 146.635.400,00 | (6.960.000,00) | 95,47 |
| | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 1.602.630.880,00 | 1.535.858.831,00 | (66.772.049,00) | 95,83 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 249 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fu | 15.523.700,00 | 9.884.000,00 | (5.639.700,00) | 63,67 |
| 250 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1.587.107.180,00 | 1.525.974.831,00 | (61.132.349,00) | 96,15 |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 512.823.630,00 | 475.834.201,00 | (36.989.429,00) | 92,79 |
| 251 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 5.773.020,00 | 3.847.800,00 | (1.925.220,00) | 66,65 |
| 252 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 29.330.820,00 | 23.510.719,00 | (5.820.101,00) | 80,16 |
| 253 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 24.841.000,00 | 23.967.000,00 | (874.000,00) | 96,48 |
| 254 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 111.291.119,00 | 111.001.211,00 | (289.908,00) | 99,74 |
| 255 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran | 62.903.281,00 | 60.909.281,00 | (1.994.000,00) | 96,83 |
| 256 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 4.983.000,00 | 4.295.000,00 | (688.000,00) | 86,19 |
| 257 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 251.857.700,00 | 230.724.000,00 | (21.133.700,00) | 91,61 |
| 258 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 3.577.750,00 | 3.456.250,00 | (121.500,00) | 96,60 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 259 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 4.323.000,00 | 2.266.000,00 | (2.057.000,00) | 52,42 |
| 260 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 2.713.700,00 | 2.486.700,00 | (227.000,00) | 91,64 |
| 261 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 10.162.240,00 | 9.062.240,00 | (1.100.000,00) | 89,18 |
| 262 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | 1.067.000,00 | 308.000,00 | (759.000,00) | 28,87 |
| | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 263 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 153.204.700,00 | 153.006.000,00 | (198.700,00) | 99,87 |
| 264 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | 123.000.000,00 | 123.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 265 | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK | 30.204.700,00 | 30.006.000,00 | (198.700,00) | 99,34 |
| | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 58.609.100,00 | 55.161.100,00 | (3.448.000,00) | 94,12 |
| 266 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 29.698.600,00 | 26.250.600,00 | (3.448.000,00) | 88,39 |
| 267 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 28.910.500,00 | 28.910.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 20.402.900,00 | 18.287.700,00 | (2.115.200,00) | 89,63 |
| 268 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 20.402.900,00 | 18.287.700,00 | (2.115.200,00) | 89,63 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 19.353.500,00 | 17.599.000,00 | (1.754.500,00) | 90,93 |
| 269 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 19.353.500,00 | 17.599.000,00 | (1.754.500,00) | 90,93 |
| | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 17.280.000,00 | 17.280.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 270 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 17.280.000,00 | 17.280.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penataan Organisasi | 453.900.500,00 | 440.757.270,00 | (13.143.230,00) | 97,10 |
| 271 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 147.785.970,00 | 141.009.970,00 | (6.776.000,00) | 95,41 |
| 272 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 113.832.530,00 | 112.658.500,00 | (1.174.030,00) | 98,97 |
| 273 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 70.280.000,00 | 68.239.000,00 | (2.041.000,00) | 97,10 |
| 274 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 57.013.000,00 | 56.070.000,00 | (943.000,00) | 98,35 |
| 275 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 64.989.000,00 | 62.779.800,00 | (2.209.200,00) | 96,60 |
| | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 107.142.900,00 | 77.138.820,00 | (30.004.080,00) | 72,00 |
| 276 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 55.874.600,00 | 26.066.120,00 | (29.808.480,00) | 46,65 |
| 277 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 51.268.300,00 | 51.072.700,00 | (195.600,00) | 99,62 |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 249.540.000,00 | 229.261.385,00 | (20.278.615,00) | 91,87 |
| 278 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | 9.270.000,00 | 8.730.000,00 | (540.000,00) | 94,17 |
| 279 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 12.420.000,00 | 11.565.000,00 | (855.000,00) | 93,12 |
| 280 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 18.540.000,00 | 15.225.000,00 | (3.315.000,00) | 82,12 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 281 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 12.420.000,00 | 9.585.000,00 | (2.835.000,00) | 77,17 |
| 282 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 6.210.000,00 | 5.955.000,00 | (255.000,00) | 95,89 |
| 283 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 6.210.000,00 | 3.630.000,00 | (2.580.000,00) | 58,45 |
| 284 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 184.470.000,00 | 174.571.385,00 | (9.898.615,00) | 94,63 |
| | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 228.261.980,00 | 204.369.065,00 | (23.892.915,00) | 89,53 |
| 285 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 32.041.000,00 | 25.295.365,00 | (6.745.635,00) | 78,95 |
| 286 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 17.742.500,00 | 16.684.500,00 | (1.058.000,00) | 94,04 |
| 287 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 158.760.000,00 | 146.137.500,00 | (12.622.500,00) | 92,05 |
| 288 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 19.718.480,00 | 16.251.700,00 | (3.466.780,00) | 82,42 |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 6.946.205.537,00 | 6.690.170.698,50 | (256.034.838,50) | 96,31 |
| 289 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 237.588.800,00 | 236.538.800,00 | (1.050.000,00) | 99,56 |
| 290 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | 88.976.800,00 | 88.976.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 291 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 1.829.457.400,00 | 1.637.042.400,00 | (192.415.000,00) | 89,48 |
| 292 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 4.222.044.000,00 | 4.175.144.900,00 | (46.899.100,00) | 98,89 |
| 293 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri | 104.824.680,00 | 104.824.680,00 | 0,00 | 100,00 |
| 294 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 19.109.100,00 | 19.109.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 295 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | 444.204.757,00 | 428.534.018,50 | (15.670.738,50) | 96,47 |
| | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 2.492.955.875,00 | 2.478.639.794,00 | (14.316.081,00) | 99,43 |
| 296 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 2.492.955.875,00 | 2.478.639.794,00 | (14.316.081,00) | 99,43 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.539.260.419,00 | 1.067.390.315,00 | (471.870.104,00) | 69,34 |
| 297 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 41.134.550,00 | 37.461.850,00 | (3.672.700,00) | 91,07 |
| 298 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 82.375.000,00 | 73.118.636,00 | (9.256.364,00) | 88,76 |
| 299 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 537.975.669,00 | 144.103.669,00 | (393.872.000,00) | 26,79 |
| 300 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | 12.507.000,00 | 6.303.000,00 | (6.204.000,00) | 50,40 |
| 301 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 828.301.000,00 | 769.536.000,00 | (58.765.000,00) | 92,91 |
| 302 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 36.967.200,00 | 36.867.160,00 | (100.040,00) | 99,73 |
| | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 5.322.996.043,00 | 5.242.763.732,00 | (80.232.311,00) | 98,49 |
| 303 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 1.118.566.200,00 | 1.114.729.000,00 | (3.837.200,00) | 99,66 |
| 304 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1.559.561.803,00 | 1.555.614.000,00 | (3.947.803,00) | 99,75 |
| 305 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 1.295.284.000,00 | 1.289.877.792,00 | (5.406.208,00) | 99,58 |
| 306 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 97.256.000,00 | 96.710.000,00 | (546.000,00) | 99,44 |
| 307 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 60.325.300,00 | 59.041.300,00 | (1.284.000,00) | 97,87 |
| 308 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | 12.431.100,00 | 5.400.000,00 | (7.031.100,00) | 43,44 |
| 309 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 9.507.600,00 | 9.507.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 310 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 126.319.040,00 | 125.959.040,00 | (360.000,00) | 99,72 |
| 311 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 26.745.000,00 | 24.425.000,00 | (2.320.000,00) | 91,33 |
| 312 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 1.017.000.000,00 | 961.500.000,00 | (55.500.000,00) | 94,54 |
| | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | 337.500,00 | 337.500,00 | 0,00 | 100,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 313 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 337.500,00 | 337.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 147.760.000,00 | 147.760.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 314 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 147.760.000,00 | 147.760.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengembangan Kompetensi ASN | 466.562.000,00 | 333.197.800,00 | (133.364.200,00) | 71,42 |
| 315 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 448.666.000,00 | 320.766.000,00 | (127.900.000,00) | 71,49 |
| 316 | Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | 17.896.000,00 | 12.431.800,00 | (5.464.200,00) | 69,47 |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 39.040.000,00 | 20.955.900,00 | (18.084.100,00) | 53,68 |
| 317 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 39.040.000,00 | 20.955.900,00 | (18.084.100,00) | 53,68 |
| | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 150.100.500,00 | 113.120.514,00 | (36.979.986,00) | 75,36 |
| 318 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 27.788.235,00 | 18.405.235,00 | (9.383.000,00) | 66,23 |
| 319 | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | 33.105.500,00 | 26.201.879,00 | (6.903.621,00) | 79,15 |
| 320 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 89.206.765,00 | 68.513.400,00 | (20.693.365,00) | 76,80 |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.775.834.222,00 | 808.622.250,00 | (967.211.972,00) | 45,53 |
| 321 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.520.284.250,00 | 665.581.050,00 | (854.703.200,00) | 43,78 |
| 322 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 255.549.972,00 | 143.041.200,00 | (112.508.772,00) | 55,97 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 22.293.000,00 | 21.600.000,00 | (693.000,00) | 96,89 |
| 323 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | 22.293.000,00 | 21.600.000,00 | (693.000,00) | 96,89 |
| | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 13.362.300,00 | 13.362.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 324 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 13.362.300,00 | 13.362.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 41.693.800,00 | 39.889.600,00 | (1.804.200,00) | 95,67 |
| 325 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 41.693.800,00 | 39.889.600,00 | (1.804.200,00) | 95,67 |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 69.836.495,00 | 60.481.300,00 | (9.355.195,00) | 86,60 |
| 326 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 1.050.000,00 | 0,00 | (1.050.000,00) | 0,00 |
| 327 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 23.665.500,00 | 17.279.300,00 | (6.386.200,00) | 73,01 |
| 328 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | 45.120.995,00 | 43.202.000,00 | (1.918.995,00) | 95,75 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 44.381.200,00 | 19.909.200,00 | (24.472.000,00) | 44,86 |
| 329 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 44.381.200,00 | 19.909.200,00 | (24.472.000,00) | 44,86 |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 363.373.500,00 | 269.552.597,00 | (93.820.903,00) | 74,18 |
| 330 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 51.278.000,00 | 42.442.275,00 | (8.835.725,00) | 82,77 |
| 331 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 33.814.000,00 | 25.991.000,00 | (7.823.000,00) | 76,86 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 332 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 22.810.000,00 | 17.170.000,00 | (5.640.000,00) | 75,27 |
| 333 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 39.453.500,00 | 33.267.752,00 | (6.185.748,00) | 84,32 |
| 334 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 103.184.000,00 | 60.049.789,00 | (43.134.211,00) | 58,20 |
| 335 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 23.474.500,00 | 10.599.913,00 | (12.874.587,00) | 45,16 |
| 336 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 22.810.000,00 | 15.617.000,00 | (7.193.000,00) | 68,47 |
| 337 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 66.549.500,00 | 64.414.868,00 | (2.134.632,00) | 96,79 |
| | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 3.626.240.550,00 | 3.622.302.950,00 | (3.937.600,00) | 99,89 |
| 338 | Fasilitasi Keprotokolan | 1.772.015.200,00 | 1.771.737.500,00 | (277.700,00) | 99,98 |
| 339 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1.179.969.800,00 | 1.178.932.150,00 | (1.037.650,00) | 99,91 |
| 340 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 674.255.550,00 | 671.633.300,00 | (2.622.250,00) | 99,61 |
| | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 130.183.500,00 | 128.098.900,00 | (2.084.600,00) | 98,40 |
| 341 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 85.681.000,00 | 85.227.100,00 | (453.900,00) | 99,47 |
| 342 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 14.206.000,00 | 14.205.900,00 | (100,00) | 100,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 343 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 30.296.500,00 | 28.665.900,00 | (1.630.600,00) | 94,62 |
| | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | 10.124.000,00 | 10.124.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 344 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 345 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | 9.804.000,00 | 9.804.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 19.497.000,00 | 19.497.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 346 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 19.497.000,00 | 19.497.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 51.097.500,00 | 50.739.500,00 | (358.000,00) | 99,30 |
| 347 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 51.097.500,00 | 50.739.500,00 | (358.000,00) | 99,30 |
| | Pendampingan dan Asistensi | 35.849.000,00 | 35.803.000,00 | (46.000,00) | 99,87 |
| 348 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 15.566.600,00 | 15.543.000,00 | (23.600,00) | 99,85 |
| 349 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 11.591.600,00 | 11.585.000,00 | (6.600,00) | 99,94 |
| 350 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 8.690.800,00 | 8.675.000,00 | (15.800,00) | 99,82 |
| | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 189.000.000,00 | 189.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 351 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 189.000.000,00 | 189.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 197.532.000,00 | 169.782.000,00 | (27.750.000,00) | 85,95 |
| 352 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 197.532.000,00 | 169.782.000,00 | (27.750.000,00) | 85,95 |
| | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 854.290.520,00 | 547.982.358,00 | (306.308.162,00) | 64,14 |
| 353 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 18.693.720,00 | 9.472.400,00 | (9.221.320,00) | 50,67 |
| 354 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 718.721.800,00 | 436.509.958,00 | (282.211.842,00) | 60,73 |
| 355 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 116.875.000,00 | 102.000.000,00 | (14.875.000,00) | 87,27 |
| | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 19.840.200,00 | 14.814.200,00 | (5.026.000,00) | 74,67 |
| 356 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | 19.840.200,00 | 14.814.200,00 | (5.026.000,00) | 74,67 |
| | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 144.237.100,00 | 63.640.000,00 | (80.597.100,00) | 44,12 |
| 357 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 13.167.300,00 | 0,00 | (13.167.300,00) | 0,00 |
| 358 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 6.739.100,00 | 0,00 | (6.739.100,00) | 0,00 |
| 359 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 14.330.700,00 | 8.640.000,00 | (5.690.700,00) | 60,29 |
| 360 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 110.000.000,00 | 55.000.000,00 | (55.000.000,00) | 50,00 |
| | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 373.662.800,00 | 201.439.295,00 | (172.223.505,00) | 53,91 |
| 361 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 205.963.400,00 | 146.193.000,00 | (59.770.400,00) | 70,98 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 362 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 30.900.000,00 | 30.243.402,00 | (656.598,00) | 97,88 |
| 363 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | 126.539.400,00 | 15.616.000,00 | (110.923.400,00) | 12,34 |
| 364 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 10.260.000,00 | 9.386.893,00 | (873.107,00) | 91,49 |
| | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 58.026.800,00 | 46.250.300,00 | (11.776.500,00) | 79,71 |
| 365 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 44.985.800,00 | 33.318.300,00 | (11.667.500,00) | 74,06 |
| 366 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | 13.041.000,00 | 12.932.000,00 | (109.000,00) | 99,16 |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | 1.628.526.722,00 | 1.576.916.455,00 | (51.610.267,00) | 96,83 |
| 367 | Pendalaman Tugas DPRD | 1.036.126.722,00 | 985.755.055,00 | (50.371.667,00) | 95,14 |
| 368 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 448.400.000,00 | 447.161.400,00 | (1.238.600,00) | 99,72 |
| 369 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 370 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 41.017.000,00 | 40.327.000,00 | (690.000,00) | 98,32 |
| 371 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 41.017.000,00 | 40.327.000,00 | (690.000,00) | 98,32 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 164.929.600,00 | 151.104.200,00 | (13.825.400,00) | 91,62 |
| 372 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 48.464.000,00 | 47.414.000,00 | (1.050.000,00) | 97,83 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 373 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 116.465.600,00 | 103.690.200,00 | (12.775.400,00) | 89,03 |
| | Administrasi Tata Pemerintahan | 25.997.727.790,00 | 25.870.871.786,00 | (126.856.004,00) | 99,51 |
| 374 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 24.861.585.000,00 | 24.834.168.500,00 | (27.416.500,00) | 99,89 |
| 375 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 770.860.690,00 | 747.866.082,00 | (22.994.608,00) | 97,02 |
| 376 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 365.282.100,00 | 288.837.204,00 | (76.444.896,00) | 79,07 |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 110.342.800,00 | 110.342.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 377 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 110.342.800,00 | 110.342.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 413.302.800,00 | 338.645.772,00 | (74.657.028,00) | 81,94 |
| 378 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 133.582.500,00 | 119.080.117,00 | (14.502.383,00) | 89,14 |
| 379 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 56.084.400,00 | 44.927.766,00 | (11.156.634,00) | 80,11 |
| 380 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 29.132.800,00 | 17.522.000,00 | (11.610.800,00) | 60,15 |
| 381 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 126.877.100,00 | 106.878.430,00 | (19.998.670,00) | 84,24 |
| 382 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 47.728.000,00 | 37.391.459,00 | (10.336.541,00) | 78,34 |
| 383 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 19.898.000,00 | 12.846.000,00 | (7.052.000,00) | 64,56 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 725.129.200,00 | 662.726.000,00 | (62.403.200,00) | 91,39 |
| 384 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | 89.617.200,00 | 53.496.100,00 | (36.121.100,00) | 59,69 |
| 385 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 635.512.000,00 | 609.229.900,00 | (26.282.100,00) | 95,86 |
| | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 48.497.000,00 | 39.997.000,00 | (8.500.000,00) | 82,47 |
| 386 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | 48.497.000,00 | 39.997.000,00 | (8.500.000,00) | 82,47 |
| | Pelayanan Pencatatan Sipil | 70.358.800,00 | 70.258.800,00 | (100.000,00) | 99,86 |
| 387 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 15.410.000,00 | 15.410.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 388 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 45.124.000,00 | 45.024.000,00 | (100.000,00) | 99,78 |
| 389 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | 9.824.800,00 | 9.824.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 336.328.360,00 | 294.181.558,00 | (42.146.802,00) | 87,47 |
| 390 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 147.041.000,00 | 127.577.278,00 | (19.463.722,00) | 86,76 |
| 391 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 131.070.960,00 | 128.921.620,00 | (2.149.340,00) | 98,36 |
| 392 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 58.216.400,00 | 37.682.660,00 | (20.533.740,00) | 64,73 |
| | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | 86.917.000,00 | 23.837.000,00 | (63.080.000,00) | 27,43 |
| 393 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 18.275.000,00 | 4.061.000,00 | (14.214.000,00) | 22,22 |
| 394 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 68.642.000,00 | 19.776.000,00 | (48.866.000,00) | 28,81 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 23.711.950,00 | 19.903.000,00 | (3.808.950,00) | 83,94 |
| 395 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | 23.711.950,00 | 19.903.000,00 | (3.808.950,00) | 83,94 |
| | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 165.466.100,00 | 145.800.400,00 | (19.665.700,00) | 88,11 |
| 396 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 165.466.100,00 | 145.800.400,00 | (19.665.700,00) | 88,11 |
| | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 31.849.500,00 | 27.669.500,00 | (4.180.000,00) | 86,88 |
| 397 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | 31.849.500,00 | 27.669.500,00 | (4.180.000,00) | 86,88 |
| | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 223.366.800,00 | 213.824.000,00 | (9.542.800,00) | 95,73 |
| 398 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 223.366.800,00 | 213.824.000,00 | (9.542.800,00) | 95,73 |
| | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 43.845.000,00 | 43.845.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 399 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 43.845.000,00 | 43.845.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3.037.093.643,00 | 2.971.935.766,38 | (65.157.876,62) | 97,85 |
| 400 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 123.510.972,00 | 59.275.600,00 | (64.235.372,00) | 47,99 |
| 401 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 2.879.019.547,00 | 2.879.019.356,38 | (190,62) | 100,00 |
| 402 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 22.574.800,00 | 22.574.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 403 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 11.988.324,00 | 11.066.010,00 | (922.314,00) | 92,31 |
| | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 179.068.300,00 | 157.758.200,00 | (21.310.100,00) | 88,10 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 404 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 179.068.300,00 | 157.758.200,00 | (21.310.100,00) | 88,10 |
| | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 1.180.840.300,00 | 927.413.600,00 | (253.426.700,00) | 78,54 |
| 405 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 113.347.200,00 | 108.496.000,00 | (4.851.200,00) | 95,72 |
| 406 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 13.536.000,00 | 13.536.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 407 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 651.750.000,00 | 435.490.000,00 | (216.260.000,00) | 66,82 |
| 408 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 35.200.000,00 | 34.650.000,00 | (550.000,00) | 98,44 |
| 409 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 367.007.100,00 | 335.241.600,00 | (31.765.500,00) | 91,34 |
| | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5.654.000,00 | 5.654.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 410 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | 5.654.000,00 | 5.654.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 365.406.400,00 | 364.387.281,00 | (1.019.119,00) | 99,72 |
| 411 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 68.813.400,00 | 67.818.281,00 | (995.119,00) | 98,55 |
| 412 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 202.153.000,00 | 202.152.000,00 | (1.000,00) | 100,00 |
| 413 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 94.440.000,00 | 94.417.000,00 | (23.000,00) | 99,98 |
| | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1.015.876.000,00 | 990.136.000,00 | (25.740.000,00) | 97,47 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 414 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 605.590.000,00 | 585.894.000,00 | (19.696.000,00) | 96,75 |
| 415 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 94.500.000,00 | 91.500.000,00 | (3.000.000,00) | 96,83 |
| 416 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 315.786.000,00 | 312.742.000,00 | (3.044.000,00) | 99,04 |
| | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 128.487.600,00 | 50.505.200,00 | (77.982.400,00) | 39,31 |
| 417 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 9.107.200,00 | 9.105.200,00 | (2.000,00) | 99,98 |
| 418 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 119.380.400,00 | 41.400.000,00 | (77.980.400,00) | 34,68 |
| | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.197.985.265,00 | 969.785.300,00 | (228.199.965,00) | 80,95 |
| 419 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.197.985.265,00 | 969.785.300,00 | (228.199.965,00) | 80,95 |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 2.449.105.000,00 | 2.447.905.000,00 | (1.200.000,00) | 99,95 |
| 420 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 5.620.000,00 | 5.620.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 421 | Pelaksanaan Reses | 2.443.485.000,00 | 2.442.285.000,00 | (1.200.000,00) | 99,95 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 920.362.600,00 | 892.042.100,00 | (28.320.500,00) | 96,92 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta | 334.870.200,00 | 330.497.300,00 | (4.372.900,00) | 98,69 |
| 423 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 54.378.400,00 | 53.978.800,00 | (399.600,00) | 99,27 |
| 424 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 531.114.000,00 | 507.566.000,00 | (23.548.000,00) | 95,57 |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 619.944.119,00 | 559.033.300,00 | (60.910.819,00) | 90,17 |
| 425 | Penyediaan Sandang | 214.802.600,00 | 210.570.900,00 | (4.231.700,00) | 98,03 |
| 426 | Penyediaan Alat Bantu | 61.655.000,00 | 61.369.000,00 | (286.000,00) | 99,54 |
| 427 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 64.457.050,00 | 61.945.850,00 | (2.511.200,00) | 96,10 |
| 428 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 27.453.000,00 | 24.419.000,00 | (3.034.000,00) | 88,95 |
| 429 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 251.576.469,00 | 200.728.550,00 | (50.847.919,00) | 79,79 |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 23.282.014.015,00 | 20.702.180.134,00 | (2.579.833.881,00) | 88,92 |
| 430 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 420.265.200,00 | 396.671.000,00 | (23.594.200,00) | 94,39 |
| 431 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 22.695.173.315,00 | 20.173.218.834,00 | (2.521.954.481,00) | 88,89 |
| 432 | Evaluasi Kelurahan | 166.575.500,00 | 132.290.300,00 | (34.285.200,00) | 79,42 |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 580.592.700,00 | 493.073.271,00 | (87.519.429,00) | 84,93 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 433 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 297.559.000,00 | 247.026.548,00 | (50.532.452,00) | 83,02 |
| 434 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 49.776.500,00 | 41.750.864,00 | (8.025.636,00) | 83,88 |
| 435 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 21.395.400,00 | 14.307.600,00 | (7.087.800,00) | 66,87 |
| 436 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 49.782.500,00 | 48.369.332,00 | (1.413.168,00) | 97,16 |
| 437 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 141.059.500,00 | 128.148.927,00 | (12.910.573,00) | 90,85 |
| 438 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 21.019.800,00 | 13.470.000,00 | (7.549.800,00) | 64,08 |
| | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 274.900.000,00 | 268.853.452,00 | (6.046.548,00) | 97,80 |
| 439 | Penyusunan Kode Etik DPRD | 268.950.000,00 | 268.853.452,00 | (96.548,00) | 99,96 |
| 440 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 5.950.000,00 | 0,00 | (5.950.000,00) | 0,00 |
| | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 1.888.117.650,00 | 1.877.248.201,00 | (10.869.449,00) | 99,42 |
| 441 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1.642.937.275,00 | 1.635.866.901,00 | (7.070.374,00) | 99,57 |
| 442 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 191.484.175,00 | 187.847.100,00 | (3.637.075,00) | 98,10 |
| 443 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 53.696.200,00 | 53.534.200,00 | (162.000,00) | 99,70 |
| | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 8.640.000,00 | 8.632.000,00 | (8.000,00) | 99,91 |
| 444 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 8.640.000,00 | 8.632.000,00 | (8.000,00) | 99,91 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 729.279.541,00 | 543.514.441,00 | (185.765.100,00) | 74,53 |
| 445 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 169.743.000,00 | 59.656.500,00 | (110.086.500,00) | 35,15 |
| 446 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 176.173.400,00 | 165.141.000,00 | (11.032.400,00) | 93,74 |
| 447 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 240.711.590,00 | 233.701.590,00 | (7.010.000,00) | 97,09 |
| 448 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 142.651.551,00 | 85.015.351,00 | (57.636.200,00) | 59,60 |
| | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 139.350.000,00 | 139.150.000,00 | (200.000,00) | 99,86 |
| 449 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | 139.350.000,00 | 139.150.000,00 | (200.000,00) | 99,86 |
| | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 450 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 49.017.600,00 | 48.316.100,00 | (701.500,00) | 98,57 |
| 451 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | 49.017.600,00 | 48.316.100,00 | (701.500,00) | 98,57 |
| | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 433.545.700,00 | 397.453.848,00 | (36.091.852,00) | 91,68 |
| 452 | Penyusunan Standar Harga | 59.493.000,00 | 53.067.000,00 | (6.426.000,00) | 89,20 |
| 453 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1.805.000,00 | 1.319.800,00 | (485.200,00) | 73,12 |
| 454 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 23.150.000,00 | 22.427.750,00 | (722.250,00) | 96,88 |
| 455 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.000.000,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | 0,00 |
| 456 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 27.502.500,00 | 26.156.800,00 | (1.345.700,00) | 95,11 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 457 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 1.000.000,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | 0,00 |
| 458 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 109.236.200,00 | 102.280.300,00 | (6.955.900,00) | 93,63 |
| 459 | Penilaian Barang Milik Daerah | 24.990.000,00 | 20.487.500,00 | (4.502.500,00) | 81,98 |
| 460 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 461 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 83.667.000,00 | 80.411.598,00 | (3.255.402,00) | 96,11 |
| 462 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 67.132.000,00 | 59.882.100,00 | (7.249.900,00) | 89,20 |
| 463 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 1.000.000,00 | 997.500,00 | (2.500,00) | 99,75 |
| 464 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 32.570.000,00 | 29.423.500,00 | (3.146.500,00) | 90,34 |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 6.224.992.694,00 | 6.221.554.981,89 | (3.437.712,11) | 99,94 |
| 465 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | 474.529.500,00 | 473.847.000,00 | (682.500,00) | 99,86 |
| 466 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 3.813.045.161,00 | 3.813.020.981,89 | (24.179,11) | 100,00 |
| 467 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | 1.937.418.033,00 | 1.934.687.000,00 | (2.731.033,00) | 99,86 |
| | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15.075.000,00 | 15.075.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 468 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 15.075.000,00 | 15.075.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 3.764.944.855,00 | 3.589.820.450,00 | (175.124.405,00) | 95,35 |
| 469 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 13.260.000,00 | 7.860.000,00 | (5.400.000,00) | 59,28 |
| 470 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | 23.236.250,00 | 20.000.000,00 | (3.236.250,00) | 86,07 |
| 471 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 3.728.448.605,00 | 3.561.960.450,00 | (166.488.155,00) | 95,53 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | 374.147.000,00 | 360.069.800,00 | (14.077.200,00) | 96,24 |
| 472 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 374.147.000,00 | 360.069.800,00 | (14.077.200,00) | 96,24 |
| | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 473 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 34.364.300,00 | 34.293.300,00 | (71.000,00) | 99,79 |
| 474 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | 19.256.000,00 | 19.256.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 475 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | 15.108.300,00 | 15.037.300,00 | (71.000,00) | 99,53 |
| | Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 3.004.447.143,00 | 2.074.720.286,00 | (929.726.857,00) | 69,05 |
| 476 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 42.275.900,00 | 23.633.714,00 | (18.642.186,00) | 55,90 |
| 477 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | 2.948.064.143,00 | 2.051.086.572,00 | (896.977.571,00) | 69,57 |
| 478 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 14.107.100,00 | 0,00 | (14.107.100,00) | 0,00 |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 50.967.000,00 | 39.162.000,00 | (11.805.000,00) | 76,84 |
| 479 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 13.050.000,00 | 10.350.000,00 | (2.700.000,00) | 79,31 |
| 480 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | 13.050.000,00 | 9.945.000,00 | (3.105.000,00) | 76,21 |
| 481 | Pemberian Layanan Rujukan | 24.867.000,00 | 18.867.000,00 | (6.000.000,00) | 75,87 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 382.928.000,00 | 378.139.940,00 | (4.788.060,00) | 98,75 |
| 482 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 221.576.160,00 | 220.490.800,00 | (1.085.360,00) | 99,51 |
| 483 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 106.726.840,00 | 106.546.840,00 | (180.000,00) | 99,83 |
| 484 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 54.625.000,00 | 51.102.300,00 | (3.522.700,00) | 93,55 |
| | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | 1.445.986.289,00 | 1.136.773.114,00 | (309.213.175,00) | 78,62 |
| 485 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | 23.000.000,00 | 20.390.500,00 | (2.609.500,00) | 88,65 |
| 486 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | 3.890.000,00 | 3.885.750,00 | (4.250,00) | 99,89 |
| 487 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 81.936.500,00 | 81.936.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 488 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 152.470.000,00 | 150.271.939,00 | (2.198.061,00) | 98,56 |
| 489 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 276.357.000,00 | 212.921.866,00 | (63.435.134,00) | 77,05 |
| 490 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 108.443.500,00 | 104.738.211,00 | (3.705.289,00) | 96,58 |
| 491 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 35.790.000,00 | 32.589.564,00 | (3.200.436,00) | 91,06 |
| 492 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 31.271.000,00 | 26.165.433,00 | (5.105.567,00) | 83,67 |
| 493 | Penagihan Pajak Daerah | 572.630.689,00 | 356.418.401,00 | (216.212.288,00) | 62,24 |
| 494 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 44.568.000,00 | 41.165.000,00 | (3.403.000,00) | 92,36 |
| 495 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 66.389.600,00 | 58.029.950,00 | (8.359.650,00) | 87,41 |
| 496 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 49.240.000,00 | 48.260.000,00 | (980.000,00) | 98,01 |
| | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 181.585.650,00 | 180.685.650,00 | (900.000,00) | 99,50 |
| 497 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberda | 19.615.100,00 | 19.615.100,00 | 0,00 | 100,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 498 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 27.787.650,00 | 27.787.650,00 | 0,00 | 100,00 |
| 499 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 6.256.200,00 | 6.256.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 500 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 6.936.700,00 | 6.936.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 501 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 10.090.000,00 | 9.190.000,00 | (900.000,00) | 91,08 |
| 502 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 110.900.000,00 | 110.900.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 20.587.600,00 | 20.587.500,00 | (100,00) | 100,00 |
| 503 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | 20.587.600,00 | 20.587.500,00 | (100,00) | 100,00 |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 163.783.904,00 | 157.268.904,00 | (6.515.000,00) | 96,02 |
| 504 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 35.221.000,00 | 35.187.000,00 | (34.000,00) | 99,90 |
| 505 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 128.562.904,00 | 122.081.904,00 | (6.481.000,00) | 94,96 |
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 16.256.500,00 | 11.340.000,00 | (4.916.500,00) | 69,76 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 506 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 16.256.500,00 | 11.340.000,00 | (4.916.500,00) | 69,76 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | 71.340.000,00 | 70.970.000,00 | (370.000,00) | 99,48 |
| 507 | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | 71.340.000,00 | 70.970.000,00 | (370.000,00) | 99,48 |
| | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 115.543.000,00 | 113.228.200,00 | (2.314.800,00) | 98,00 |
| 508 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 115.543.000,00 | 113.228.200,00 | (2.314.800,00) | 98,00 |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 24.725.799,00 | 24.279.999,00 | (445.800,00) | 98,20 |
| 509 | Pengembangan Cagar Budaya | 10.408.999,00 | 9.963.199,00 | (445.800,00) | 95,72 |
| 510 | Pemanfaatan Cagar Budaya | 14.316.800,00 | 14.316.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pengembangan Prasarana Pertanian | 15.414.000,00 | 15.234.000,00 | (180.000,00) | 98,83 |
| 511 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | 15.414.000,00 | 15.234.000,00 | (180.000,00) | 98,83 |
| | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 8.346.783.955,49 | 8.341.796.019,49 | (4.987.936,00) | 99,94 |
| 512 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 8.346.783.955,49 | 8.341.796.019,49 | (4.987.936,00) | 99,94 |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | 2.411.000.000,00 | 2.375.510.868,00 | (35.489.132,00) | 98,53 |
| 513 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 2.411.000.000,00 | 2.375.510.868,00 | (35.489.132,00) | 98,53 |
| | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 63.412.000,00 | 49.140.000,00 | (14.272.000,00) | 77,49 |
| 514 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 58.008.000,00 | 49.140.000,00 | (8.868.000,00) | 84,71 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 515 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 5.404.000,00 | 0,00 | (5.404.000,00) | 0,00 |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 377.464.000,00 | 367.476.100,00 | (9.987.900,00) | 97,35 |
| 516 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 59.139.000,00 | 58.948.000,00 | (191.000,00) | 99,68 |
| 517 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 99.857.000,00 | 97.640.000,00 | (2.217.000,00) | 97,78 |
| 518 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata untuk Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | 218.468.000,00 | 210.888.100,00 | (7.579.900,00) | 96,53 |
| | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 247.262.520,00 | 220.549.800,00 | (26.712.720,00) | 89,20 |
| 519 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 229.980.520,00 | 203.585.800,00 | (26.394.720,00) | 88,52 |
| 520 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 17.282.000,00 | 16.964.000,00 | (318.000,00) | 98,16 |
| | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 316.174.900,00 | 264.088.034,00 | (52.086.866,00) | 83,53 |
| 521 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 264.916.000,00 | 231.806.500,00 | (33.109.500,00) | 87,50 |
| 522 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 51.258.900,00 | 32.281.534,00 | (18.977.366,00) | 62,98 |
| | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 78.381.300,00 | 45.382.249,00 | (32.999.051,00) | 57,90 |
| 523 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | 78.381.300,00 | 45.382.249,00 | (32.999.051,00) | 57,90 |
| | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | 11.350.000,00 | 11.350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang | 11.350.000,00 | 11.350.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 18.492.500,00 | 17.862.500,00 | (630.000,00) | 96,59 |
| 525 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | 18.492.500,00 | 17.862.500,00 | (630.000,00) | 96,59 |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 99.250.200,00 | 62.288.000,00 | (36.962.200,00) | 62,76 |
| 526 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 99.250.200,00 | 62.288.000,00 | (36.962.200,00) | 62,76 |
| | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | 1.067.633.800,00 | 1.065.447.000,00 | (2.186.800,00) | 99,80 |
| 527 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1.067.633.800,00 | 1.065.447.000,00 | (2.186.800,00) | 99,80 |
| | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 7.032.000,00 | 7.031.000,00 | (1.000,00) | 99,99 |
| 528 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 7.032.000,00 | 7.031.000,00 | (1.000,00) | 99,99 |
| | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 231.710.294,00 | 211.592.500,00 | (20.117.794,00) | 91,32 |
| 529 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 231.710.294,00 | 211.592.500,00 | (20.117.794,00) | 91,32 |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 231.059.000,00 | 230.564.000,00 | (495.000,00) | 99,79 |
| 530 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 55.515.000,00 | 55.020.000,00 | (495.000,00) | 99,11 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 531 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****) | 25.544.000,00 | 25.544.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 532 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 533 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 161.662.000,00 | 142.451.800,00 | (19.210.200,00) | 88,12 |
| 534 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 86.662.000,00 | 67.451.800,00 | (19.210.200,00) | 77,83 |
| 535 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 325.154.000,00 | 314.412.100,00 | (10.741.900,00) | 96,70 |
| 536 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 34.682.000,00 | 34.558.200,00 | (123.800,00) | 99,64 |
| 537 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 103.191.600,00 | 93.413.700,00 | (9.777.900,00) | 90,52 |
| 538 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | 58.860.400,00 | 58.584.500,00 | (275.900,00) | 99,53 |
| 539 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 80.566.000,00 | 80.366.500,00 | (199.500,00) | 99,75 |
| 540 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 47.854.000,00 | 47.489.200,00 | (364.800,00) | 99,24 |
| | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 24.156.000,00 | 23.876.000,00 | (280.000,00) | 98,84 |
| 541 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 24.156.000,00 | 23.876.000,00 | (280.000,00) | 98,84 |
| | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 136.258.200,00 | 135.208.200,00 | (1.050.000,00) | 99,23 |
| 542 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 110.206.900,00 | 109.906.900,00 | (300.000,00) | 99,73 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 543 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 15.248.600,00 | 15.248.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 544 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | 10.802.700,00 | 10.052.700,00 | (750.000,00) | 93,06 |
| | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 545 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 416.543.950,00 | 378.325.500,00 | (38.218.450,00) | 90,82 |
| 546 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 416.543.950,00 | 378.325.500,00 | (38.218.450,00) | 90,82 |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 7.782.100,00 | 0,00 | (7.782.100,00) | 0,00 |
| 547 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 7.782.100,00 | 0,00 | (7.782.100,00) | 0,00 |
| | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 6.068.242.074,00 | 6.066.974.573,56 | (1.267.500,44) | 99,98 |
| 548 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 6.068.242.074,00 | 6.066.974.573,56 | (1.267.500,44) | 99,98 |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 26.265.000,00 | 14.755.000,00 | (11.510.000,00) | 56,18 |
| 549 | Penyediaan Makanan | 16.265.000,00 | 4.755.000,00 | (11.510.000,00) | 29,23 |
| 550 | Penyediaan Sandang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | 72.991.000,00 | 72.955.000,00 | (36.000,00) | 99,95 |
| 551 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 72.991.000,00 | 72.955.000,00 | (36.000,00) | 99,95 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Layanan Administrasi DPRD | 310.275.000,00 | 310.275.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 552 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 310.275.000,00 | 310.275.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 162.237.000,00 | 157.656.000,00 | (4.581.000,00) | 97,18 |
| 553 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 162.237.000,00 | 157.656.000,00 | (4.581.000,00) | 97,18 |
| | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 523.352.784,00 | 513.168.500,00 | (10.184.284,00) | 98,05 |
| 554 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 35.780.200,00 | 35.395.500,00 | (384.700,00) | 98,92 |
| 555 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 397.348.000,00 | 394.733.000,00 | (2.615.000,00) | 99,34 |
| 556 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 90.224.584,00 | 83.040.000,00 | (7.184.584,00) | 92,04 |
| | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 20.488.500,00 | 19.391.500,00 | (1.097.000,00) | 94,65 |
| 557 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 20.488.500,00 | 19.391.500,00 | (1.097.000,00) | 94,65 |
| | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 155.960.700,00 | 148.676.356,00 | (7.284.344,00) | 95,33 |
| 558 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | 155.960.700,00 | 148.676.356,00 | (7.284.344,00) | 95,33 |
| | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 86.015.000,00 | 15.845.000,00 | (70.170.000,00) | 18,42 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 559 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 86.015.000,00 | 15.845.000,00 | (70.170.000,00) | 18,42 |
| | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 411.370.000,00 | 362.265.300,00 | (49.104.700,00) | 88,06 |
| 560 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 321.236.200,00 | 293.502.500,00 | (27.733.700,00) | 91,37 |
| 561 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 48.955.300,00 | 33.958.300,00 | (14.997.000,00) | 69,37 |
| 562 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 19.612.000,00 | 17.758.000,00 | (1.854.000,00) | 90,55 |
| 563 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 21.566.500,00 | 17.046.500,00 | (4.520.000,00) | 79,04 |
| | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 14.534.500,00 | 14.514.500,00 | (20.000,00) | 99,86 |
| 564 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 10.988.000,00 | 10.986.000,00 | (2.000,00) | 99,98 |
| 565 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.546.500,00 | 3.528.500,00 | (18.000,00) | 99,49 |
| | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 3.461.768.500,00 | 3.455.266.400,00 | (6.502.100,00) | 99,81 |
| 566 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 3.279.549.900,00 | 3.279.368.900,00 | (181.000,00) | 99,99 |
| 567 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 154.634.400,00 | 148.313.300,00 | (6.321.100,00) | 95,91 |
| 568 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | 27.584.200,00 | 27.584.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 14.756.712.511,00 | 14.696.234.724,96 | (60.477.786,04) | 99,59 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 569 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 708.574.000,00 | 708.239.000,00 | (335.000,00) | 99,95 |
| 570 | Pengelolaan Leger Jalan | 10.284.000,00 | 7.075.000,00 | (3.209.000,00) | 68,80 |
| 571 | Survei Kondisi Jalan/Jembatan | 131.584.500,00 | 131.371.500,00 | (213.000,00) | 99,84 |
| 572 | Pembangunan Jalan | 2.768.178.700,00 | 2.765.543.000,00 | (2.635.700,00) | 99,90 |
| 573 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | 1.525.847.750,00 | 1.525.847.750,00 | 0,00 | 100,00 |
| 574 | Rekonstruksi Jalan | 5.936.248.000,00 | 5.885.011.914,09 | (51.236.085,91) | 99,14 |
| 575 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 1.447.351.988,00 | 1.445.223.988,39 | (2.127.999,61) | 99,85 |
| 576 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 383.778.000,00 | 383.057.000,00 | (721.000,00) | 99,81 |
| 577 | Pembangunan Jembatan | 1.844.865.573,00 | 1.844.865.572,48 | (0,52) | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 49.056.700,00 | 44.908.000,00 | (4.148.700,00) | 91,54 |
| 578 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | 4.475.500,00 | 3.960.000,00 | (515.500,00) | 88,48 |
| 579 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 44.581.200,00 | 40.948.000,00 | (3.633.200,00) | 91,85 |
| | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 336.180.900,00 | 333.834.900,00 | (2.346.000,00) | 99,30 |
| 580 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 304.206.900,00 | 301.956.900,00 | (2.250.000,00) | 99,26 |
| 581 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 10.326.000,00 | 10.230.000,00 | (96.000,00) | 99,07 |
| 582 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 18.398.000,00 | 18.398.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 583 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****) | 230.850.000,00 | 227.690.000,00 | (3.160.000,00) | 98,63 |
| 584 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****) | 230.850.000,00 | 227.690.000,00 | (3.160.000,00) | 98,63 |
| | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 130.421.300,00 | 119.079.500,00 | (11.341.800,00) | 91,30 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 585 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 53.105.600,00 | 53.103.800,00 | (1.800,00) | 100,00 |
| 586 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 77.315.700,00 | 65.975.700,00 | (11.340.000,00) | 85,33 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 7.622.400,00 | 7.622.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 587 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 7.622.400,00 | 7.622.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 469.030.074,00 | 462.571.950,00 | (6.458.124,00) | 98,62 |
| 588 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 67.387.000,00 | 65.858.100,00 | (1.528.900,00) | 97,73 |
| 589 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 267.376.074,00 | 263.135.100,00 | (4.240.974,00) | 98,41 |
| 590 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 134.267.000,00 | 133.578.750,00 | (688.250,00) | 99,49 |
| | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 54.141.445,00 | 53.638.450,00 | (502.995,00) | 99,07 |
| 591 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 45.012.445,00 | 44.627.950,00 | (384.495,00) | 99,15 |
| 592 | Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 9.129.000,00 | 9.010.500,00 | (118.500,00) | 98,70 |
| | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 23.924.400,00 | 22.465.000,00 | (1.459.400,00) | 93,90 |
| 593 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 23.924.400,00 | 22.465.000,00 | (1.459.400,00) | 93,90 |
| | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 117.109.470,00 | 117.044.970,00 | (64.500,00) | 99,94 |
| 594 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 22.728.000,00 | 22.728.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 595 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 31.737.000,00 | 31.672.500,00 | (64.500,00) | 99,80 |
| 596 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 62.644.470,00 | 62.644.470,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 130.015.000,00 | 101.912.100,00 | (28.102.900,00) | 78,38 |
| 597 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 130.015.000,00 | 101.912.100,00 | (28.102.900,00) | 78,38 |
| | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 81.884.800,00 | 76.868.800,00 | (5.016.000,00) | 93,87 |
| 598 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 81.884.800,00 | 76.868.800,00 | (5.016.000,00) | 93,87 |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 29.861.000,00 | 29.861.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 599 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 29.861.000,00 | 29.861.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 42.797.400,00 | 32.313.400,00 | (10.484.000,00) | 75,50 |
| 600 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 5.614.400,00 | 0,00 | (5.614.400,00) | 0,00 |
| 601 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 37.183.000,00 | 32.313.400,00 | (4.869.600,00) | 86,90 |
| | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12.050.600,00 | 11.295.000,00 | (755.600,00) | 93,73 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 602 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 12.050.600,00 | 11.295.000,00 | (755.600,00) | 93,73 |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 51.401.000,00 | 51.368.000,00 | (33.000,00) | 99,94 |
| 603 | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | 51.401.000,00 | 51.368.000,00 | (33.000,00) | 99,94 |
| | Penyusunan Profil Kependudukan | 13.262.000,00 | 13.262.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 604 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 6.274.000,00 | 6.274.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 605 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 6.988.000,00 | 6.988.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 33.405.000,00 | 19.725.000,00 | (13.680.000,00) | 59,05 |
| 606 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 33.405.000,00 | 19.725.000,00 | (13.680.000,00) | 59,05 |
| | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 54.261.600,00 | 47.701.400,00 | (6.560.200,00) | 87,91 |
| 607 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 54.261.600,00 | 47.701.400,00 | (6.560.200,00) | 87,91 |
| | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 189.026.200,00 | 15.930.000,00 | (173.096.200,00) | 8,43 |
| 608 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 88.959.000,00 | 15.930.000,00 | (73.029.000,00) | 17,91 |
| 609 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | 100.067.200,00 | 0,00 | (100.067.200,00) | 0,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 54.706.000,00 | 41.389.500,00 | (13.316.500,00) | 75,66 |
| 610 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 19.015.000,00 | 16.889.500,00 | (2.125.500,00) | 88,82 |
| 611 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 17.260.000,00 | 15.098.000,00 | (2.162.000,00) | 87,47 |
| 612 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 18.431.000,00 | 9.402.000,00 | (9.029.000,00) | 51,01 |
| | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 28.972.200,00 | 28.972.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 613 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 28.972.200,00 | 28.972.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 7.785.740,00 | 7.785.740,00 | 0,00 | 100,00 |
| 614 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 7.785.740,00 | 7.785.740,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 18.642.500,00 | 18.642.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 615 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | 18.642.500,00 | 18.642.500,00 | 0,00 | 100,00 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 199.073.400,00 | 198.539.400,00 | (534.000,00) | 99,73 |
| 616 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 199.073.400,00 | 198.539.400,00 | (534.000,00) | 99,73 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 47.224.000,00 | 47.224.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 617 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 47.224.000,00 | 47.224.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 97.810.000,00 | 50.554.000,00 | (47.256.000,00) | 51,69 |
| 618 | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang | 97.810.000,00 | 50.554.000,00 | (47.256.000,00) | 51,69 |
| | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 56.007.000,00 | 55.407.000,00 | (600.000,00) | 98,93 |
| 619 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 15.797.000,00 | 15.797.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 620 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 40.210.000,00 | 39.610.000,00 | (600.000,00) | 98,51 |
| | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 715.358.150,00 | 705.044.600,00 | (10.313.550,00) | 98,56 |
| 620 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 51.103.500,00 | 45.469.300,00 | (5.634.200,00) | 88,97 |
| 621 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 664.254.650,00 | 659.575.300,00 | (4.679.350,00) | 99,30 |
| | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan | 270.184.600,00 | 144.125.800,00 | (126.058.800,00) | 53,34 |
| 622 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25.475.000,00 | 21.829.800,00 | (3.645.200,00) | 85,69 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 623 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 244.709.600,00 | 122.296.000,00 | (122.413.600,00) | 49,98 |
| | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5.693.000,00 | 0,00 | (5.693.000,00) | 0,00 |
| 624 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 5.693.000,00 | 0,00 | (5.693.000,00) | 0,00 |
| | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 325.272.040,00 | 315.614.800,00 | (9.657.240,00) | 97,03 |
| 625 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 306.094.120,00 | 297.836.600,00 | (8.257.520,00) | 97,30 |
| 626 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang | 19.177.920,00 | 17.778.200,00 | (1.399.720,00) | 92,70 |
| | Pengelolaan Sampah | 3.262.585.200,00 | 3.160.022.350,00 | (102.562.850,00) | 96,86 |
| 627 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 3.175.671.500,00 | 3.121.942.350,00 | (53.729.150,00) | 98,31 |
| 628 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 63.823.700,00 | 28.650.000,00 | (35.173.700,00) | 44,89 |
| 629 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 23.090.000,00 | 9.430.000,00 | (13.660.000,00) | 40,84 |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 47.614.200,00 | 43.717.200,00 | (3.897.000,00) | 91,82 |
| 630 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 24.961.800,00 | 24.854.800,00 | (107.000,00) | 99,57 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 631 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 22.652.400,00 | 18.862.400,00 | (3.790.000,00) | 83,27 |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 16.495.800,00 | 16.453.800,00 | (42.000,00) | 99,75 |
| 632 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 16.495.800,00 | 16.453.800,00 | (42.000,00) | 99,75 |
| | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 525.555.360,00 | 502.465.100,00 | (23.090.260,00) | 95,61 |
| 633 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 20.813.200,00 | 14.447.700,00 | (6.365.500,00) | 69,42 |
| 634 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 504.742.160,00 | 488.017.400,00 | (16.724.760,00) | 96,69 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 84.387.290,00 | 29.253.200,00 | (55.134.090,00) | 34,67 |
| 635 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 23.083.720,00 | 483.200,00 | (22.600.520,00) | 2,09 |
| 636 | Sistem Informasi Penataan Ruang | 61.303.570,00 | 28.770.000,00 | (32.533.570,00) | 46,93 |
| | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 36.479.400,00 | 32.169.200,00 | (4.310.200,00) | 88,18 |
| 637 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | 16.918.600,00 | 14.299.000,00 | (2.619.600,00) | 84,52 |
| 638 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | 19.560.800,00 | 17.870.200,00 | (1.690.600,00) | 91,36 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 102.847.400,00 | 93.201.400,00 | (9.646.000,00) | 90,62 |
| 639 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 102.847.400,00 | 93.201.400,00 | (9.646.000,00) | 90,62 |

| NO | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 75.108.400,00 | 74.903.900,00 | (204.500,00) | 99,73 |
| 640 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 19.898.200,00 | 19.864.700,00 | (33.500,00) | 99,83 |
| 641 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 15.331.200,00 | 15.331.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 642 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 32.656.000,00 | 32.491.000,00 | (165.000,00) | 99,49 |
| 643 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 7.223.000,00 | 7.217.000,00 | (6.000,00) | 99,92 |
| | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 53.505.000,00 | 53.493.000,00 | (12.000,00) | 99,98 |
| 644 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | 53.505.000,00 | 53.493.000,00 | (12.000,00) | 99,98 |
| JUMLAH | | 360.900.009.933,91 | 338.593.952.698,87 | (22.306.057.235,04) | 93,82 |

Sumber Data : BPKAD Kota Bima Tahun Anggaran 2021, Diolah

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bima telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Bima pada TA 2021 senilai Rp745.404.518.907,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp58.906.077.013,00, Pendapatan Transfer senilai Rp668.730.441.894,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp17.768.000.000,00.

Sedangkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Bima pada TA 2020 senilai Rp736.298.044.130,13, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp53.995.874.355,63, Dana Perimbangan senilai Rp598.430.733.255,00, Bagi Hasil Pajak Provinsi senilai Rp46.617.667.519,50, Dana Penyesuaian senilai Rp19.485.769.000,00, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah senilai Rp17.768.000.000,00.

Realisasi Pendapatan pada TA 2021 adalah senilai Rp 729.687.511.750,67 atau (97,89%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp46.997.373.754,67 (79,78%), Pendapatan Transfer senilai Rp664.762.654.304,00 (99,41%) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp17.931.340.700,00 (100,92%).

Sedangkan Realisasi Pendapatan pada TA 2020 adalah senilai Rp 715.383.787.682,95 atau (97,16%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp47.279.817.936,69 (87,56%), Dana Perimbangan senilai Rp587.547.659.216,00 (98,18%), Bagi Hasil Pajak Provinsi senilai Rp41.304.094.690,00 (88,60%), Dana Penyesuaian senilai Rp19.485.769.000,00 (100,00%) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah senilai Rp19.766.446.840,26 (111,25%).

Anggaran Belanja pada TA 2021 senilai Rp754.078.303.532,00 dan TA 2020 senilai Rp828.544.477.771,84. Sedangkan realisasi Belanja TA 2021 adalah senilai Rp716.700.153.286,42 dan TA 2020 senilai Rp796.653.090.963,73 yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi TA 2021 senilai Rp575.787.111.971,68, Belanja Modal senilai Rp138.378.990.564,74 dan Belanja Tak Terduga senilai Rp2.534.050.750,00, sedangkan realisasi TA 2020 terdiri dari realisasi belanja tidak langsung senilai Rp401.844.478.289,78 dan Belanja Langsung/Program TA 2020 senilai Rp426.699.999.482,06.

Realisasi Pendapatan pada TA 2021 senilai Rp729.687.511.750,67, bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja TA 2021 senilai Rp716.700.153.286,42 maka terjadi surplus senilai Rp12.987.358.464,25 Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp10.974.821.367,93 dan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp2.000.000.000,00 sehingga menghasilkan SILPA TA 2021 senilai Rp21.962.179.832,18.

Realisasi Pendapatan pada TA 2020 senilai Rp715.383.787.682,95, bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja TA 2020 senilai Rp 796.653.090.963,73 maka terjadi defisit senilai 81.269.303.280,78 Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp93.243.087.895,71 dan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp1.000.000.000,00 sehingga menghasilkan SILPA TA 2020 senilai Rp10.973.784.614,93.

Realisasi APBD Kota Bima Tahun 2021 dan 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.1
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun Anggaran 2021

| No. | Komponen | Tahun 2021 (Rp) | | % |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.1 | Pendapatan Daerah | | | |
| 5.1.1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 58.906.077.013,00 | 46.993.516.746,67 | 79,78 |
| 5.1.1.1.1 | Pajak Daerah | 23.131.077.198,00 | 19.507.819.782,88 | 84,34 |
| 5.1.1.1.2 | Retribusi Daerah | 18.928.026.700,00 | 15.196.689.454,00 | 80,29 |
| 5.1.1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.650.003.101,00 | 1.284.388.411,79 | 77,84 |
| 5.1.1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 15.196.970.014,00 | 11.004.619.098,00 | 72,41 |
| 5.1.1.2 | Pendapatan Transfer | 668.730.441.894,00 | 664.762.654.304,00 | 99,41 |
| 5.1.1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 620.414.753.762,00 | 624.035.340.074,00 | 100,58 |
| 5.1.1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 48.315.688.132,00 | 40.727.314.230,00 | 84,29 |
| 5.1.1.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 17.768.000.000,00 | 17.931.340.700,00 | 100,92 |
| 5.1.1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 17.768.000.000,00 | 17.931.340.700,00 | 100,92 |
| Jumlah Pendapatan | | 745.404.518.907,00 | 729.687.511.750,67 | 97,89 |
| 5.1.2.1 | Belanja Daerah | | | |
| 5.1.2.1 | Belanja Operasi | 609.884.155.790,55 | 575.787.111.971,68 | 94,41 |
| 5.1.2.1.1 | Belanja Pegawai | 370.292.078.078,09 | 357.437.167.837,55 | 96,53 |
| 5.1.2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 219.942.245.712,46 | 200.214.962.134,13 | 91,03 |
| 5.1.2.1.3 | Belanja Hibah | 18.200.332.000,00 | 16.712.982.000,00 | 91,83 |
| 5.1.2.1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 1.449.500.000,00 | 1.422.000.000,00 | 98,10 |
| 5.1.2.2 | Belanja Modal | 140.957.764.221,45 | 138.378.990.564,74 | 98,17 |
| 5.1.2.2.1 | Belanja Modal Tanah | 915.000.000,00 | 737.365.000,00 | 80,59 |
| 5.1.2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 29.747.070.650,00 | 28.081.390.647,00 | 94,40 |
| 5.1.2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 67.300.654.312,03 | 66.975.887.199,03 | 99,52 |
| 5.1.2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 41.243.019.909,42 | 40.902.636.451,71 | 99,17 |
| 5.1.2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.752.019.350,00 | 1.681.711.267,00 | 95,99 |

| No. | Komponen | Tahun 2021 (Rp) | | % |
|---------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.2.3 | Belanja Tidak Terduga | 3.236.383.520,00 | 2.534.050.750,00 | 78,30 |
| 5.1.2.3 | Belanja Tidak Terduga | 3.236.383.520,00 | 2.534.050.750,00 | 78,30 |
| | Jumlah Belanja | 754.078.303.532,00 | 716.700.153.286,42 | 95,04 |
| | SUPLUS/ (DEFISIT) | (8.673.784.625,00) | 12.987.358.464,25 | (149,73) |
| 5.1.3 | Pembiayaan | | | |
| 5.1.3.1 | Penerimaan | 10.973.784.625,00 | 10.974.821.367,93 | 100,01 |
| 5.1.3.2 | Pengeluaran | 2.300.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 86,96 |
| | Jumlah Pembiayaan | 8.673.784.625,00 | 8.974.821.367,93 | 103,47 |
| | SILPA | 0,00 | 21.962.179.832,18 | 0,00 |

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2021, diolah

Tabel 3.1.2.
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun Anggaran 2020

| No. | Komponen | Tahun 2020 (Rp) | | % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pendapatan Daerah | | | |
| 01.01 | Pendapatan Asli Daerah | 53.995.874.355,63 | 47.279.817.936,69 | 87,56 |
| 01.01.01 | Pajak Daerah | 19.719.858.600,00 | 18.558.631.974,13 | 94,11 |
| 01.01.02 | Retribusi Daerah | 13.747.340.985,00 | 11.151.090.529,36 | 81,11 |
| 01.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.650.003.101,00 | 1.579.915.958,62 | 95,75 |
| 01.01.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 18.878.671.669,63 | 15.990.179.474,58 | 84,70 |
| 01.02 | Dana Perimbangan | 598.430.733.255,00 | 587.547.659.216,00 | 98,18 |
| 01.02.01 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 34.640.574.255,00 | 26.793.098.072,00 | 77,35 |
| 01.02.02 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 442.038.321.000,00 | 439.644.557.000,00 | 99,46 |
| 01.02.03 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 121.751.838.000,00 | 121.110.004.144,00 | 99,47 |
| 01.03 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 83.871.436.519,50 | 80.556.310.530,26 | 96,05 |
| 01.03.01 | Pendapatan Hibah | 17.768.000.000,00 | 19.766.446.840,26 | 111,25 |
| 01.03.03 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 46.617.667.519,50 | 41.304.094.690,00 | 88,60 |
| 01.03.04 | Dana Penyesuaian | 19.485.769.000,00 | 19.485.769.000,00 | 100,00 |
| 01.03.05 | Pendapatan lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 736.298.044.130,13 | 715.383.787.682,95 | 97,16 |
| 2 | Belanja Daerah | | | |
| 02.01 | Belanja Tidak Langsung | 401.844.478.289,78 | 391.516.398.792,29 | 97,43 |
| 02.01.01 | Belanja Pegawai | 310.826.429.717,52 | 305.096.499.469,29 | 98,16 |
| 02.01.02 | Belanja Hibah | 28.003.091.026,00 | 25.661.343.500,00 | 91,64 |
| 02.01.03 | Belanja Bantuan Sosial | 34.612.728.546,26 | 34.489.500.000,00 | 99,64 |

| No. | Komponen | Tahun 2020 (Rp) | | % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02.01.04 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.05 | Belanja Tidak Terduga | 28.402.229.000,00 | 26.269.055.823,00 | 92,49 |
| 02.02 | Belanja Langsung | 426.699.999.482,06 | 405.136.692.171,44 | 94,95 |
| 02.02.01 | Belanja Pegawai | 58.133.382.500,00 | 55.816.551.997,00 | 96,01 |
| 02.02.02 | Belanja Barang dan Jasa | 196.158.147.165,90 | 183.598.764.699,42 | 93,60 |
| 02.02.03 | Belanja Modal | 172.408.469.816,16 | 165.721.375.475,02 | 96,12 |
| | Jumlah Belanja | 828.544.477.771,84 | 796.653.090.963,73 | 96,15 |
| | SUPLUS/ (DEFISIT) | (92.246.433.641,71) | (81.269.303.280,78) | 88,10 |
| 3 | Pembiayaan | | | |
| 03.01 | Penerimaan | 93.246.433.641,71 | 93.243.087.895,71 | 100,00 |
| 03.02 | Pengeluaran | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00 |
| | Jumlah Pembiayaan | 92.246.433.641,71 | 92.243.087.895,71 | 100,00 |
| | SILPA | 0,00 | 10.973.784.614,93 | 0,00 |

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2020, diolah

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

3.2.1 Penjelasan Terkait Capaian Target Pendapatan

Penjelasan terkait belum tercapainya target pendapatan pada beberapa SKPD selama tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.1.3
Rekapitulasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima Berdasarkan SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) | % |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 150.000.000,00 | 144.000.000,00 | 96,00 | 70.000.000,00 | 117.000.000,00 | 167,14 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 19.375.344.300,00 | 17.506.127.632,00 | 90,35 | 18.854.697.460,00 | 15.000.679.651,89 | 79,56 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.300.000.000,00 | 1.232.749.438,00 | 94,83 | 777.750.000,00 | 615.644.660,00 | 79,16 |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup | 400.000.000,00 | 291.095.000,00 | 72,77 | 326.980.000,00 | 275.565.000,00 | 84,28 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 1.250.000.000,00 | 297.965.000,00 | 23,84 | 394.509.000,00 | 306.076.000,00 | 77,58 |
| 6 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 197.284.000,00 | 187.738.000,00 | 95,16 | 187.738.000,00 | 203.750.017,36 | 108,53 |
| 7 | Dinas Koperindag | 2.805.332.400,00 | 1.417.779.537,00 | 50,54 | 1.148.733.525,00 | 1.184.454.609,00 | 103,11 |
| 8 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 236.000.000,00 | 131.650.000,00 | 55,78 | 151.000.000,00 | 114.400.000,00 | 75,76 |
| 9 | Dinas Pariwisata | 1.517.820.000,00 | 574.745.000,00 | 37,87 | 578.618.000,00 | 690.478.000,00 | 119,33 |
| 10 | Dinas Pertanian | 250.000.000,00 | 207.786.000,00 | 83,11 | 106.450.000,00 | 111.103.950,00 | 104,37 |
| 11 | Sekretariat Daerah | 561.675.000,00 | 361.970.000,00 | 64,44 | 291.294.000,00 | 176.250.000,00 | 60,51 |
| 12 | Bagian Ekonomi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 13 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) | 717.361.063.207,00 | 707.333.906.143,67 | 98,60 | 22.220.221.701,00 | 19.762.846.004,13 | 88,94 |
| 14 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.190.052.444,13 | 676.825.535.790,57 | 97,92 |
| JUMLAH | | 728.853.581.407,00 | 729.687.511.750,67 | 97,16 | 736.298.044.130,13 | 715.383.787.682,95 | 97,16 |

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020, diolah

Hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bima untuk mencapai target pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.4

Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi SKPD untuk mencapai Target Pendapatan dan Belanja

| NO | SKPD | Faktor Pendukung | | Faktor Penghambat | |
|----|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1 | Adanya kordinasi yang baik antara semua elemen pada Dinas PUPR Kota Bima. | 1 | Masih kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai alat untuk mempermudah kegiatan pencairan dan penyerapan anggaran |
| | | 2 | Percepatan dalam proses pelaksanaan pekerjaan terutama pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh rekanan/pihak ke tiga. | 2 | Kondisi iklim dan cuaca yang menghambat pekerjaan fisik dan lapangan sehingga menghambat pula progres kemajuan fisik pekerjaan dan realissi keuangan. |
| | | 3 | Proses pencairan anggaran yang semakin efektif dan efisien. | 3 | Keterlambatan start pelaksanaan pekerjaan karena adanya refocusing anggaran untuk keperluan penanganan covid-19 sehingga berdampak pada terlambatnya proses tender atau pelelangan serta pelaksanaan kegiatan. |
| | | 4 | System pelaporan realisasi fisik dan keuangan yang semakin baik sehingga menghadirkan sistem pencairan dan penyerapan anggaran yang semkain baik juga.mal; | 4 | Pelaksanaan Pembuatan Kontrak dengan System Online sehingga adanya kendala dalam penginputan data terkait masalah jaringan dan lain-lain. |
| 2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 | Tersedianya tenaga yang memahami pengelolaan keuangan pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima . | 1 | Banyak Kegiatan yang direncanakan pada awal tahun tidak bisa dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid-19. |
| | | 2 | Terpenuhinya SDM pada semua struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, Sehingga sebagian besar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. | 2 | Pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan terutama kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan keterlibatan dan semangat peserta tidak maksimal disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan protokol kesehatan. |
| | | 3 | Adanya program kerjasama dengan mitra pemerintah (stakeholder) seperti Oxfam, LP2DER, Forum PRB, FTSB Kota Bima, MDMC Muhammadiyah, SAR Bima, Bank NTB Cabang Bima dan BAZNAS Kota Bim, yang melaksanakan kegiatan BNPB. | 3 | Adanya kendala pencarian dana APBD atau dana transfer menyebabkan senua pembayaran kegiatan yang dilaksanakan diakhir tahun (bulan november-desember) yang dilaksanakan OPD dibatasi dengan keluarnya surat edaran walikota tentang batas akhir pengajuan GU/TU/Nihil, sehingga banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi tidak dibayarkan sampai dengan akhir tahun. |

| NO | SKPD | Faktor Pendukung | | Faktor Penghambat | |
|----|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 3 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja/realisasi APBD/DPA karena optimalisasi pencapaian kinerja dan manajemen yang baik dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. | | Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja/realisasi APBD/DPA karena adanya refocusing anggaran 2021 dampak dari pandemi corona virus Disease 2019 (COVID-19) |
| 4 | DINAS SOSIAL | 1 | Lengkapya fasilitas peralatan kantor yang ada pada dinas sosial kota bima sehingga mempermudah dalam pengerjaan laporan keuangan. | 1 | Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan Anggaran di Triwulan IV pada bulan Oktober tahun 2021. |
| | | 2 | Dukungan dengan aplikasi SIMDA yang sangat membantu dalam pengolahan data keuangan. | 2 | Terbatasnya tenaga yang memahami pengelolaan keuangan pada Dinas Sosial Kota Bima. |
| | | | | 3 | Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal. |
| 5 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 1 | Faktor pendukung pencapaian target pada dinas ketahanan pangan Kota Bima yaitu adanya ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan. | 1 | Faktor penghambat pencapaian target pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu masih kurangnya SDM, kurangnya koordinasi antara bidang-bidang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada dokumen anggaran, serta adanya kondisi wabah COVID19 yang menyebabkan anggaran kegiatan terpengang serata adanya keadaan dimana proses GU tidak lancar karena disebabkan ada penggantian kepala dinas serta prosedur-prosedur penghambat di keuangan yang membuat tidak semua kegiatan biasa dicairkan pada akhir tahun |
| 6 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 | SDM yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas didukung dengan manajerial yang baik menjadi faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja/realisasi APBD/DPA di dinas lingkungan hidup Kota Bima pada tahun 2021 | 1 | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar jasa pelayanan persampahan . |
| | | | | 2 | Armada pengangkut sampah perlu ditambah, karena armada tersebut banyak yang sudah tua |
| | | | | 3 | Masih kurangnya staf yang memahami pengelolaan keuangan/SIMDA SKPD. |
| | | | | 4 | Peralatan dan mesin untuk penataan taman masih dirasakan kurang |
| | | | | 5 | Ternak yang masih banyak berkeliaran di tiap-tiap sudut kota |
| | | | | 6 | Peralatan kerja yang secara umum yang kurang memadai |
| 7 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | Peran dan dukungan perangkat organisasi yang cukup tinggi | 1 | Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan dalam pencapaian target. |

| NO | SKPD | Faktor Pendukung | | Faktor Penghambat | |
|----|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 8 | DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 | Adanya sumber PAD (PASAR) sebagai penyumbang pendapatan asli daerah; | 1 | Banyaknya tunggakan Pajak tahun-tahun sebelumnya; |
| | | 2 | Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima terkait pelaksanaan Pemungutan PAD. | 2 | Tidak adanya penghargaan (reward) yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan PAD. |
| 9 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 1 | Perencanaan dan target awal tertuang jelas dan terarah | 1 | Sarana ruang kerja yang tidak kondusif |
| | | 2 | Kinerja bidang pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran bagus dan tepat waktu | 2 | Dinas perpustakaan dan arsip daerah Kota Bima adalah dinas tipe A. Ada 4 bidang dan satu sekretaris tentunya dibutuhkan anggaran yang cukup untuk menunjang kegiatan dan kemajuan pada Dinas perpustakaan dan Arsip daerah Kota Bima sangat kurang bahkan tidak jauh beda pada saat masih berstatus kantor. Sehingga hal ini yang menyebabkan terlambatnya capaian kegiatan pada dinas tersebut. |
| | | 3 | Pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sesuai perencanaan | | |
| 10 | DINAS PARIWISATA | 1 | Kelengkapan peralatan kantor yang memadai sehingga mendukung kelancaran setiap kegiatan; | 1 | Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial |
| | | 2 | Jaringan internet yang mendukung; | 2 | Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan Anggaran pada bulan Oktober tahun 2021. |
| | | 3 | SDM pada sekretariat yang bisa diandalkan sehingga mempermudah dalam merealisasikan setiap kegiatan yang telah direncanakan. | 3 | Bidang yang kurang paham dalam melengkapi surat pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan. |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | Komitmen OPD untuk merealisasikan semua target yang telah ditetapkan didukung dengan ASN untuk bekerja maksimal dengan APBD yang memadai. | 1 | Kondisi covid 19 sedikit tidaknya sangat mengganggu mobilitas OPD untuk pencapaian target. |
| 12 | DINAS PERTANIAN | 1 | Adanya dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif dalam pemanfaatan anggaran guna mengembangkan komoditas strategis daerah; | 1 | masih adanya wajib retribusi yang kurang sadar dalam memenuhi kewajiban. |
| | | 2 | Optimalnya sumber daya manusia [petugas] dalam memanfaatkan ketersediaan anggaran secara efisien dan pemanfaatan sumber daya alam dalam pengembangan komoditas sektor pertanian sesuai permintaan pasar; | 2 | terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga potensi pendapatan belum digali secara efektif. |

| NO | SKPD | Faktor Pendukung | | Faktor Penghambat | |
|----|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| | | 3 | Adanya sumber daya manusia /tenaga yang memadai dalam memanfaatkan potensi yang ada guna peningkatan produksi dan produktifitas produk sektor (tanaman pangan, Hortikura,perkebunan dan peternakan); | 3 | Kepekaan dan kemampuan sumber daya manusia yang kurang memadai pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan. |
| | | 4 | Net working,yaitu dukungan para stakeholders dengan membuat jaringan kerjasama yang aktif dan efisien, maupun dengan pihak ketiga. | 4 | Perangkat keras untuk mendukung pengelolaan keuangan yang tersedia masih terbatas. |
| | | 5 | Penerapan dan pemanfaatan secara optimal semua sumberdaya dan prasarana yang ada dalam upaya pengembangan komoditas sektor pertanian yang strategis dan prioritas; | 5 | Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan,sehingga menghambat dalam proses SID (Survey Identifikasi dan Desig) kegiatan dan pelaksanaan Kegiatan. |
| | | | | 6 | Terlambatnya proses perubahan anggaran (bulan Oktober) sehingga menghambat realisasi pelaksanaan kegiatan yang masuk dianggaran perubahan. |
| 13 | KECAMATAN RASANA'E BARAT | 1 | Tersedianya aperatur yang melaksanakan kegiatan | 1 | Kualitas SDM masih rendah; |
| | | 2 | Terlaksananya kegiatan yang direncanakan | 2 | Anggaran yang tersedia belum memadai |
| | | 3 | Peran serta masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan | | |
| 14 | KECAMATAN RASANA'E TIMUR | 1 | Tersedianya anggaran yang mencukupi | 1 | Ketidak sesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dengan pengalokasian anggaran |
| | | 2 | Dukungan dan kerjasama dari SKPD terkait | 2 | Adanya ketidaksesuaian jumlah Personil yang ada dalam SK kegiatan dengan jumlah yang ada dalam DPA |
| 15 | KECAMATAN MPUNDA | 1 | TerLibatnya semua unsur dalam OPD Kecamatan Mpunda sehingga dengan mudah dalam mencapai semua target. | 1 | Terbatasnya tenaga yang memahami pengelolaan keuangan OPD |
| | | | | 2 | Terdapat masing-masing disetiap kelurahan yang kurag aka pegawai staf ASN sehigga terdampak terhdap personil bendahara pengeluaran pembantu |
| | | | | 3 | Minimnya pemahaman pengelolaan keuangan bagi para pejabat PA/KPA,PPKEU,dan PPTK. |
| | | | | 4 | Kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan keuangan OPD |
| 16 | KECAMATAN ASAKOTA | 1 | Terlibatnya semua unsur dalam Kecamatan asakota Sehingga dengan mudah dalam mencapai semua Target. | 1 | Terbatasnya tenaga yang memahami pengelolaan Keuangan Kecamatan Asakota, terutama dalam pengelolaan Anggaran Dana Kelurahan. |

| NO | SKPD | Faktor Pendukung | | Faktor Penghambat | |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN | 1 | Faktor pendukung adalah kinerja tim yang bagus dan profesional walau secara bertahap untuk mencapai target bisa terlaksana, faktor kecukupan dana yang mendukung. | 1 | Faktor penghambat yang mungkin mempengaruhi pencapaian target adalah karena adanya pandemi covid-19 sehingga menyulitkan untuk merealisasikan belanja |
| 18 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BIMA | 1 | Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja/realisasi APBD/DPA karena optimalisasi pencapaian kinerja manajemen yang baik dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. | 1 | Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja/realisasi APBD/DPA karena adanya refocusing anggaran 2021 dan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dampak dari pandemi corona Virus Disease 2019 (COVID-19). |
| 19 | DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | Komitmen OPD untuk merealisasikan semua target yang telah ditetapkan didukung dengan semangat ASN untuk bekerja maksimal dengan APBD yang memadai. | 1 | Kondisi Covid -19 sedikit tidaknya sangat mengganggu mobilitas OPD untuk pencapaian target. |
| 20 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA | 1 | Tersedianya sarana dan pasaran yang cukup memadai yang dapat menunjang pencapaian target kinerja | 1 | Perencanaan anggaran kegiatan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih ada yang tidak sinkron dengan kebutuhan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
| | | | | 2 | Terbatasnya tenaga yang memahami pengelola keuangan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
| 21 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA | 1 | Peran kepala SKPD selaku pengguna anggaran, pejabat struktural lainnya dan staf pada DPMPTSP Kota Bima yang memberikan kontribusi berupa waktu yang diperlukan dan pendekatan positif dengan berbagai upaya untuk mencapai target penyerapan anggaran yang maksimal | 1 | Lemahnya koordinasi antara perencanaan awal alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan, sehingga menciptakan iklim angka penyerapan anggaran menjadi lebih rendah |
| | | 2 | SDM aparatur pada DPMPTSP Kota Bima yang memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan secara tepat waktu serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien | 2 | Terlambatnya proses penyusunan perubahan anggaran sebagai revisi/evaluasi atas penganggaran awal, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan yang merupakan perubahan anggaran tidak maksimal/tidak efektif. |

| NO | SKPD | Faktor Pendukung | | Faktor Penghambat | |
|----|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 22 | INSPEKTORAT | 1 | Telah terencanya program dan kegiatan yang ada di inspektorat Kota Bima dengan baik. | 1 | Ada kegiatan yang tidak mampu diprediksi secara baik, antara lain : kegiatan pembentukan unit khusus penanganan, pengaduan masyarakat dimana inspektorat kota bima dalam menangani pengaduan masyarakat berdasarkan pada surat pengaduan yang dilayangkan oleh pihak luar/masyarakat untuk dilakukan pemeriksaan khusus. karena hal tersebut diatas tidak dapat diprediksi secara pasti, dan hanya bisa dilakukan sesuai dengan tren jumlah surat pengaduan yang masuk pada inspektorat Kota Bima setiap tahunnya |
| | | 2 | Telah terciptanya suatu sistem kerja dan mengendalikan secara baik. | 2 | Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu program/kegiatan. |
| | | 3 | Sistem Administrasi, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan yang telah memadai. | | |
| | | 4 | Pemahaman akan fungsi dan tugas setiap aparatur semakin meningkat. | | |
| 23 | BPKAD | 1 | Struktur organisasi sudah maksimal. | 1 | Gedung kantor/ruang kerja masih menumpang pada kantor sekertariat Daerah Kota Bima. |
| | | 2 | Anggaran yang tersedia sudah cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan. | 2 | Adanya perbedaan antara nomor rekening yang ada pada SIPD dengan SIMPDA |
| | | 3 | Kinerja staff BPKAD sudah cukup baik. | 3 | Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah |
| | | 4 | Adanya penghargaan berupa insentif yang diberikan apabila realisasi PAD mencapai target | 4 | Wajib pajak tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap omset yang mereka miliki |
| | | 5 | Standar operasional prosedur (SOP) sudah cukup maksimal. | | |

3.2.2 Penjelasan Terkait Capaian Target Belanja

Pencapaian target belanja dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima per SKPD
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

| No. | SKPD | Tahun 2021 (Rp) | | % | Realisasi 2020 |
|-----|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 195.001.904.113,00 | 189.769.427.251,49 | 97,32 | 190.536.960.321,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 136.375.912.112,00 | 120.741.822.133,00 | 88,54 | 105.088.330.725,00 |

| No. | SKPD | Tahun 2021 (Rp) | | % | Realisasi 2020 |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 62.731.681.920,00 | 62.085.318.689,20 | 98,97 | 75.033.473.744,05 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 9.780.798.323,00 | 9.467.183.456,00 | 96,79 | 10.231.600.536,00 |
| 5 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 8.294.170.240,00 | 7.959.113.776,00 | 95,96 | 10.966.384.710,00 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.652.146.197,00 | 3.864.858.086,00 | 83,08 | 33.271.234.906,04 |
| 7 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 4.157.683.668,00 | 4.451.016.324,00 | 107,06 | 0,00 |
| 8 | Dinas Sosial | 5.207.650.838,00 | 4.950.296.618,00 | 95,06 | 4.331.814.451,00 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | 3.987.600.658,00 | 3.920.688.657,00 | 98,32 | 3.101.614.358,57 |
| 10 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6.837.956.618,00 | 5.505.386.721,00 | 80,51 | 3.465.208.237,00 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 3.941.078.779,00 | 3.685.657.232,00 | 93,52 | 3.299.590.453,00 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 18.109.905.889,00 | 17.367.521.501,00 | 95,90 | 17.728.008.623,00 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 4.954.109.429,00 | 4.873.300.984,00 | 98,37 | 4.517.271.858,00 |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6.804.358.124,00 | 6.509.687.272,00 | 95,67 | 5.941.559.110,72 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 12.010.302.504,00 | 11.573.762.496,00 | 96,37 | 4.571.603.070,00 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 9.016.427.145,00 | 8.315.823.608,00 | 92,23 | 17.457.637.611,00 |
| 17 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 8.335.084.189,00 | 7.910.763.833,18 | 94,91 | 10.230.058.202,00 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.593.956.832,00 | 3.534.599.593,00 | 98,35 | 3.625.521.346,00 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 15.419.948.360,00 | 15.154.802.319,00 | 98,28 | 3.587.285.503,00 |
| 20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6.091.909.786,00 | 5.872.147.312,00 | 96,39 | 6.265.859.557,06 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 9.882.546.942,00 | 9.473.989.591,00 | 95,87 | 7.654.678.901,00 |
| 22 | Dinas Pertanian | 12.884.474.003,00 | 12.632.868.186,00 | 98,05 | 12.942.507.722,00 |
| 23 | Sekretariat Daerah | 68.320.397.234,00 | 67.066.968.351,55 | 98,17 | 38.428.150.993,00 |
| 24 | Inspektorat | 7.399.431.556,00 | 25.944.494.677,00 | 350,63 | 8.117.503.091,00 |
| 25 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 6.424.384.015,00 | 9.417.624.024,00 | 146,59 | 7.619.449.927,00 |
| 26 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) | 18.841.622.532,00 | 11.188.098.248,00 | 59,38 | 19.193.294.228,29 |
| 27 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 6.701.357.845,00 | 9.956.524.212,00 | 148,57 | 4.973.243.664,00 |
| 28 | Sekretariat DPRD | 27.324.472.014,00 | 14.791.121.314,00 | 54,13 | 26.514.047.424,00 |
| 29 | Kecamatan RasanaE Barat | 10.062.011.023,00 | 17.567.800.298,00 | 174,60 | 9.834.556.862,00 |
| 30 | Kecamatan RasanaE Timur | 11.927.901.787,00 | 7.341.721.190,00 | 61,55 | 11.354.652.445,00 |
| 31 | Kecamatan Asakota | 10.451.103.017,00 | 5.823.356.297,00 | 55,72 | 10.221.935.323,00 |
| 32 | Kecamatan Mpunda | 15.654.040.303,00 | 17.238.465.970,00 | 110,12 | 15.634.992.841,00 |
| 33 | Kecamatan Raba | 18.209.611.163,00 | 6.210.727.211,00 | 34,11 | 19.024.299.376,00 |
| 34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4.690.364.374,00 | 4.533.215.855,00 | 96,65 | 5.468.861.521,00 |
| JUMLAH | | 754.078.303.532,00 | 716.700.153.286,42 | 95,04 | 796.653.090.963,73 |

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020, diolah

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kota Bima Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin-Buletin Teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bima, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Kesiambungan Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya / berkesinambungan.
3. Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah.

Periode akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kota Bima secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 ini disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data-data keuangan lainnya.

SKPKD merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima. SKPD merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kota Bima dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. SKPD tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Parawisata;
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
15. Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Sekretariat Daerah;
17. Sekretariat DPRD;
18. Inspektorat;
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Dinas Ketahanan Pangan;
24. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
25. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
26. Dinas Pertanian;
27. Dinas Tenaga Kerja;
28. Dinas Kelautan dan Perikanan;
29. Kecamatan Rasanae Barat;
30. Kecamatan Rasanae Timur;
31. Kecamatan Asakota;
32. Kecamatan Mpunda;
33. Kecamatan Raba;
34. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional (LO) dan Pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.

Basis akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, LO, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD atau pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara

kas diterima atau dibayar, dan bahwa pendapatan dalam LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), disamping kemandirian entitas dan kesinambungan entitas. Hal ini berarti laporan keuangan Pemerintah Kota Bima harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran berhubungan dengan pengakuan suatu kejadian dan jumlah nilai yang dicatat dalam catatan akuntansi dan disajikan dalam laporan keuangan sehubungan dengan kejadian tersebut. Basis pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pengukuran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu sebesar kas yang diterima di Kas Daerah atas pendapatan atau penerimaan pembiayaan tersebut.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.2 Pengukuran Pos-Pos Laporan Operasional

A. Pengukuran Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment system* dicatat sebesar nilai pajak terutang yang dicantumkan dalam rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
2. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak/Retribusi (SKP/SKR) Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKP/SKR Daerah mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Bima;
3. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO sebesar hak Pemerintah Kota Bima;
4. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual", bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut;
5. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO Bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
6. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran

- harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
7. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
 8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
 9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
 10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
 11. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- B. Pengukuran beban yaitu sebesar harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila tidak ada harga perolehan, maka beban diukur berdasarkan taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

4.3.3 Pengukuran Pos-Pos Neraca

- A. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut.
1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
 2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar:
 - a. Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
 - b. Nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan. Apabila tidak ada nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
 - c. Nilai nominal, apabila Investasi Jangka Pendek dalam bentuk bukan surat berharga.
 3. Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 5. Investasi jangka panjang dicatat sebesar:

- a. Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
 - b. Biaya perolehan, apabila investasi jangka panjang yang bersifat permanen;
 - c. Nilai perolehan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan;
 - d. Nilai bersih yang dapat direalisasikan, apabila investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian;
 - e. Biaya pembangunan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah; dan
 - f. Harga perolehan, apabila investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah, atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.
6. Investasi Non Permanen Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir;
 7. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
 8. Aset Lainnya dicatat sebesar:
 - a. Nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan untuk piutang dari tagihan penjualan angsuran. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - b. Nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak untuk Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi;
 - c. Harga perolehan untuk aset tak berwujud; dan
 - d. Nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian untuk aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan dan nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan untuk aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya.
 - B. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - C. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Pendapatan-LRA

- A. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
- B. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar;
- C. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;
- D. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - 1. Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;
 - 2. Diterima di SKPD;
 - 3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
 - 4. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
 - 5. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyetor;
 - 6. Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari tiga bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
 - 7. Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;
 - 8. Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kota Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui Pendapatan-LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Kota Bima;
 - 9. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA;
 - 10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama;

11. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang SAL pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;
 12. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 13. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- E. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.4.2 Belanja

- A. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- B. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- C. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- D. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- E. Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas;
- F. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci terdapat dalam Bagan Akun Standar;
- G. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- H. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama;
- I. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA);
- J. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;

- K. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- L. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
- M. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - 1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - 3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 4. Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan;
- N. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.3 Pembiayaan

- A. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- B. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan;
- C. Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah;
- D. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah;
- E. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- F. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD;
- G. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;

- H. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
- I. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;
- J. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- K. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- L. Pembiayaan disajikan dalam LRA sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

4.4.4 Pendapatan-LO

- A. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- B. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- C. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
- D. Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- E. Pendapatan-LO pada SKPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan;
 - 1. PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan penetapan;
 - 2. PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan;
- F. Pendapatan-LO disajikan sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan;

4.4.5 Beban

- A. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- B. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- C. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
- D. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- E. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- F. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

4.4.6 Aset/Aktiva

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.6.1. Aset Lancar

- 1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- 2. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3-12 bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

3. Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
4. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) tanggal perolehannya.
5. Kas diakui pada saat diterima oleh BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi SKPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK SKPD.
6. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3-12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
7. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu 3-12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
8. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
10. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
11. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
12. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
13. Pengukuran Berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
14. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
15. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

16. Persediaan dapat terdiri atas: alat tulis kantor, alat listrik, material/bahan, benda pos, bahan bakar, dan bahan makanan pokok.
17. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

4.4.6.2. Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - a. Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa pembelian SUN dengan jatuh tempo lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat (dana bergulir), dan investasi non permanen lainnya.
 - b. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
3. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria berikut, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
4. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
5. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai bersih yang direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat non permanen.
6. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

7. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam LRA maupun LAK.
8. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen - Dana Bergulir.
9. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

4.4.6.3. Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
3. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
5. Peralatan dan Mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.
6. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.
7. Jalan Irigasi dan Jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
8. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

10. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
11. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
12. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
13. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
14. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
15. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.4.6.4. Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

4.4.6.5. Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
3. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.

4. Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersih.
5. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
6. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
7. Piutang dari TGR diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
8. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
9. ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
10. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.
11. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
12. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.
13. Jumlah yang dapat diamortisasi dari ATB harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat ATB adalah 20 tahun sejak perolehan ATB.
14. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. ATB dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.
15. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
16. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

17. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama bangun serah guna (BSG), diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
18. Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
19. Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
20. Pengakuan Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.4.7 Kewajiban

- A. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- B. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- C. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- D. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
- E. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- F. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- G. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- H. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.8 Ekuitas

- A. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima pada tanggal laporan.
- B. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang diperoleh dari LPE dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

- C. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke Neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
- D. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Arus Kas.

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bima yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

5.1.1. PENDAPATAN

Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

| | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.1 | Pendapatan | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 745.404.518.907,00 | 729.687.511.750,67 | 715.383.787.682,95 |

Pendapatan Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp745.404.518.907,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 236) dan terealisasi senilai Rp729.687.511.750,67 atau 97,89%. Jika dibandingkan realisasi pendapatan Tahun 2020 senilai Rp715.383.787.682,95 maka realisasi pendapatan Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp14.303.724.067,72 atau 1,96%.

Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana yang terdapat pada ikhtisar dibawah ini :

Tabel 5.1.1
Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| | PENDAPATAN | | | | |
| | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 23.131.077.198,00 | 19.507.819.782,88 | 84,34 | 18.558.631.974,13 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 18.928.026.700,00 | 15.196.689.454,00 | 80,29 | 11.151.090.529,36 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.650.003.101,00 | 1.284.388.411,79 | 77,84 | 1.579.915.958,62 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 15.196.970.014,00 | 11.004.619.098,00 | 72,41 | 15.990.179.474,58 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 58.906.077.013,00 | 46.993.516.746,67 | 79,78 | 47.279.817.936,69 |
| | Pendapatan Transfer | | | | |
| | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | | | | |
| 1 | Bagi Hasil Pajak | 29.661.472.762,00 | 37.344.039.204,00 | 125,90 | 13.627.373.324,00 |
| 2 | Dana Alokasi Umum | 432.159.814.000,00 | 432.159.814.000,00 | 100,00 | 439.644.557.000,00 |
| 3 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | 69.117.431.000,00 | 68.320.563.668,00 | 98,85 | 63.487.181.845,00 |
| 4 | Dana Alokasi Khusus – Non Fisik | 59.450.893.000,00 | 56.185.780.202,00 | 94,51 | 57.622.822.299,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | 590.389.610.762,00 | 594.010.197.074,00 | 100,61 | 587.547.659.216,00 |
| | Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | | | | |
| 1 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 30.025.143.000,00 | 30.025.143.000,00 | 100,00 | 19.485.769.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | 30.025.143.000,00 | 30.025.143.000,00 | 100,00 | 19.485.769.000,00 |
| | Transfer Pemerintah Propinsi | | | | |
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 48.315.688.132,00 | 40.727.314.230,00 | 84,29 | 41.304.094.690,00 |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | | 48.315.688.132,00 | 40.727.314.230,00 | 84,29 | 41.304.094.690,00 |
| Total Pendapatan Transfer | | 668.730.441.894,00 | 664.762.654.304,00 | 99,41 | 648.337.522.906,00 |
| | Lain-lain Pendapatan yang Sah | | | | |
| 1 | Pendapatan Hibah | 17.768.000.000,00 | 17.911.340.000,00 | 100,81 | 19.766.446.840,26 |
| 2 | Pendapatan Lainnya | 0,00 | 20.000.700,00 | 0,00 | 0 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | | 17.768.000.000,00 | 17.931.340.700,00 | 100,92 | 19.766.446.840,26 |
| TOTAL | | 745.404.518.907,00 | 729.687.511.750,67 | 97,89 | 715.383.787.682,95 |

Rekapitulasi Pendapatan Daerah berdasarkan SKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.2
Rekapitulasi Pendapatan Daerah Berdasarkan SKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) | % |
|----|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 150.000.000,00 | 144.000.000,00 | 96,00 | 70.000.000,00 | 117.000.000,00 | 167,14 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 19.375.344.300,00 | 17.506.127.632,00 | 90,35 | 18.854.697.460,00 | 15.000.679.651,89 | 79,56 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.300.000.000,00 | 1.232.749.438,00 | 94,83 | 777.750.000,00 | 615.644.660,00 | 79,16 |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup | 400.000.000,00 | 291.095.000,00 | 72,77 | 326.980.000,00 | 275.565.000,00 | 84,28 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 1.250.000.000,00 | 297.965.000,00 | 23,84 | 394.509.000,00 | 306.076.000,00 | 77,58 |

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) | % |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 197.284.000,00 | 187.738.000,00 | 95,16 | 187.738.000,00 | 203.750.017,36 | 108,53 |
| 7 | Dinas Koperindag | 2.805.332.400,00 | 1.417.779.537,00 | 50,54 | 1.148.733.525,00 | 1.184.454.609,00 | 103,11 |
| 8 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 236.000.000,00 | 131.650.000,00 | 55,78 | 151.000.000,00 | 114.400.000,00 | 75,76 |
| 9 | Dinas Pariwisata | 1.517.820.000,00 | 574.745.000,00 | 37,87 | 578.618.000,00 | 690.478.000,00 | 119,33 |
| 10 | Dinas Pertanian | 250.000.000,00 | 207.786.000,00 | 83,11 | 106.450.000,00 | 111.103.950,00 | 104,37 |
| 11 | Sekretariat Daerah | 561.675.000,00 | 361.970.000,00 | 64,44 | 291.294.000,00 | 176.250.000,00 | 60,51 |
| 12 | Bagian Ekonomi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 13 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) | 717.361.063.207,00 | 707.333.906.143,67 | 98,60 | 22.220.221.701,00 | 19.762.846.004,13 | 88,94 |
| 14 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.190.052.444,13 | 676.825.535.790,57 | 97,92 |
| JUMLAH | | 745.404.518.907,00 | 729.687.511.750,67 | 97,16 | 736.298.044.130,13 | 715.383.787.682,95 | 97,16 |

| | | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5.1.1.1 | Pendapatan Asli Daerah | Anggaran 2021 (Rp) 58.906.077.013,00 | Realisasi 2021 (Rp) 46.993.516.746,67 | Realisasi 2020 (Rp) 47.279.817.936,69 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bima bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan target pada Tahun 2021 senilai Rp58.906.077.013,00 dan terealisasi senilai Rp46.993.516.746,67 atau 79,78%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2020 senilai Rp47.279.817.936,69 maka terjadi penurunan senilai Rp286.301.190,02 atau 0,61%.

Tabel 5.1.3
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | PENDAPATAN | | | | |
| | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 23.131.077.198,00 | 19.507.819.782,88 | 84,34 | 18.558.631.974,13 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 18.928.026.700,00 | 15.196.689.454,00 | 80,29 | 11.151.090.529,36 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.650.003.101,00 | 1.284.388.411,79 | 77,84 | 1.579.915.958,62 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 15.196.970.014,00 | 11.004.619.098,00 | 72,41 | 15.990.179.474,58 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 58.906.077.013,00 | 46.993.516.746,67 | 79,78 | 47.279.817.936,69 |

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5.1.1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | Anggaran 2021 (Rp) 23.131.077.198,00 | Realisasi 2021 (Rp) 19.507.819.782,88 | Realisasi 2020 (Rp) 18.558.631.974,13 |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp23.131.077.198,00 dan terealisasi senilai Rp19.507.819.782,88 atau 84,34%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp18.558.631.974,13 maka realisasi pendapatan Pajak Daerah

Tahun 2021 menunjukkan peningkatan yaitu senilai Rp949.187.808,75 atau 4,10% yang dipengaruhi oleh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral, Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan BPHTB.

Pendapatan Pajak Daerah diperoleh dari :

Tabel 5.1.4
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Pajak Daerah - LRA | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Hotel | 536.000.000,00 | 415.017.422,00 | 77,43 | 200.630.863,50 |
| 2 | Restoran | 2.212.886.948,00 | 1.255.900.981,20 | 56,75 | 1.326.384.079,71 |
| 3 | Hiburan | 23.750.000,00 | 19.426.900,00 | 81,80 | 24.028.240,00 |
| 4 | Reklame | 774.440.250,00 | 567.980.156,75 | 73,34 | 593.788.492,25 |
| 5 | Penerangan Jalan | 9.250.000.000,00 | 8.463.177.492,00 | 91,49 | 8.339.356.068,00 |
| 6 | Pajak Parkir | 160.000.000,00 | 114.736.000,00 | 71,71 | 92.195.500,00 |
| 7 | Air Tanah | 54.000.000,00 | 46.170.792,18 | 85,50 | 46.406.476,42 |
| 8 | Sarang Burung Walet | 30.000.000,00 | 11.500.000,00 | 38,33 | 31.500.000,00 |
| 9 | Mineral Bukan Logam dan Batuan | 500.000.000,00 | 207.879.473,75 | 41,58 | 361.976.516,25 |
| 10 | Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 5.300.000.000,00 | 3.633.609.655,00 | 68,56 | 3.939.839.288,00 |
| 11 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 4.290.000.000,00 | 4.772.420.910,00 | 111,25 | 3.602.526.450,00 |
| Jumlah | | 23.131.077.198,00 | 19.507.819.782,88 | 84,34 | 18.558.631.974,13 |

Secara rinci anggaran dan realisasi pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.1.5
Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Pajak Daerah | Anggaran 2021 (Rp) | Realiasi 2021 (Rp) | % | Realiasi 2020 (Rp) |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Pajak Hotel | | | | | |
| 1 | Hotel | 441.800.000,00 | 377.505.977,00 | 85,45 | 169.439.613,50 |
| 2 | Rumah Penginapan dan Sejenisnya | 33.600.000,00 | 29.427.975,00 | 87,58 | 18.261.250,00 |
| 3 | Rumah Kos | 60.600.000,00 | 8.083.470,00 | 13,34 | 12.930.000,00 |
| Jumlah | | 536.000.000,00 | 415.017.422,00 | 77,43 | 200.630.863,50 |
| Pajak Restoran | | | | | |
| 1 | Restoran | 1.050.000.000,00 | 569.871.164,00 | 54,27 | 614.540.894,90 |
| 2 | Rumah Makan | 600.000.000,00 | 165.634.014,00 | 27,61 | 166.010.500,50 |
| 3 | Kafetaria | 60.000.000,00 | 90.469.676,20 | 150,78 | 67.350.913,60 |
| 4 | Kantin | 2.886.948,00 | 8.741.706,00 | 302,80 | 8.633.381,55 |
| 5 | Warung | 250.000.000,00 | 177.019.248,00 | 70,81 | 218.671.058,65 |
| 6 | Jasa Boga/Katering | 250.000.000,00 | 244.165.173,00 | 97,67 | 251.177.330,51 |
| Jumlah | | 2.212.886.948,00 | 1.255.900.981,20 | 56,75 | 1.326.384.079,71 |

| No | Pajak Daerah | Anggaran 2021 (Rp) | Realiasi 2021 (Rp) | % | Realiasi 2020 (Rp) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Pajak Hiburan | | | | | |
| 1 | Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Diskotik,Karaoke,Klub Malam dan Sejenisnya | 14.500.000,00 | 5.486.800,00 | 37,84 | 8.660.040,00 |
| 3 | Permainan Bilyar, Golf, Bowling | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan | 7.675.000,00 | 13.940.100,00 | 181,63 | 4.250.000,00 |
| 5 | Panti Pijat, Refleksi,Mandi Uap/Spa dan pusat kebugaran (fitnes Center) | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 6 | Hiburan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.593.200,00 |
| Jumlah | | 23.750.000,00 | 19.426.900,00 | 81,80 | 24.028.240,00 |
| Pajak Reklame | | | | | |
| 1 | Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 600.000.000,00 | 412.859.531,75 | 68,81 | 496.939.079,75 |
| 2 | Reklame Kain | 71.440.250,00 | 143.762.250,00 | 201,23 | 44.815.000,00 |
| 3 | Reklame Berjalan | 103.000.000,00 | 11.358.375,00 | 11,03 | 52.034.412,50 |
| 4 | Reklame Cat | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 774.440.250,00 | 567.980.156,75 | 73,34 | 593.788.492,25 |
| Pajak Penerangan Jalan | | | | | |
| 1 | Pajak Penerangan Jalan PLN | 9.250.000.000,00 | 8.463.177.492,00 | 91,49 | 8.339.356.068,00 |
| Jumlah | | 9.250.000.000,00 | 8.463.177.492,00 | 91,49 | 8.339.356.068,00 |
| Pajak Parkir | | | | | |
| 1 | Pajak Parkir | 160.000.000,00 | 114.736.000,00 | 71,71 | 92.195.500,00 |
| Jumlah | | 160.000.000,00 | 114.736.000,00 | 71,71 | 92.195.500,00 |
| Pajak Air Tanah | | | | | |
| 1 | Air Tanah | 54.000.000,00 | 46.170.792,18 | 85,50 | 46.406.476,42 |
| Jumlah | | 54.000.000,00 | 46.170.792,18 | 85,50 | 46.406.476,42 |
| Pajak Sarang Burung Walet | | | | | |
| 1 | Sarang Burung Walet | 30.000.000,00 | 11.500.000,00 | 38,33 | 31.500.000,00 |
| Jumlah | | 30.000.000,00 | 11.500.000,00 | 38,33 | 31.500.000,00 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | | |
| 1 | Pasir dan kerikil | 266.380.000,00 | 86.731.362,50 | 32,56 | 59.964.018,75 |
| 2 | Kerikil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.733.550,00 |
| 3 | Batu Gunung/Kali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.915.612,50 |
| 4 | Pasir Batu/Sirtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.507.225,00 |
| 5 | Tanah Liat | 21.800.000,00 | 7.503.875,00 | 34,42 | 5.216.000,00 |
| 6 | Tanah Urug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.640.110,00 |
| 7 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 211.820.000,00 | 113.644.236,25 | 53,65 | 0,00 |
| Jumlah | | 500.000.000,00 | 207.879.473,75 | 41,58 | 361.976.516,25 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | |
| 1 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 5.300.000.000,00 | 3.633.609.655,00 | 68,56 | 3.939.839.288,00 |
| Jumlah | | 5.300.000.000,00 | 3.633.609.655,00 | 68,56 | 3.939.839.288,00 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | | | | | |
| 1 | BPHTB – Pemindahan Hak | 4.290.000.000,00 | 4.772.420.910,00 | 111,25 | 3.602.526.450,00 |

| No | Pajak Daerah | Anggaran 2021 (Rp) | Realiasi 2021 (Rp) | % | Realiasi 2020 (Rp) |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | Jumlah | 4.290.000.000,00 | 4.772.420.910,00 | 111,25 | 3.602.526.450,00 |
| | Total Pajak Daerah | 23.131.077.198,00 | 19.507.819.782,88 | 84,34 | 18.558.631.974,13 |

| 5.1.1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | 18.928.026.700,00 | 15.196.689.454,00 | 11.151.090.529,36 |

Retribusi Daerah Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp18.928.026.700,00 dan terealisasi senilai Rp15.196.689.454,00 atau 80,29%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2020 senilai Rp11.151.090.529,36 maka realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 menunjukkan kenaikan senilai Rp4.045.598.924,64 atau 21,37% yang dipengaruhi oleh Retribusi Jasa Umum.

Untuk Pendapatan Retribusi tersebut dapat dirinci secara kelompok sebagai berikut :

Tabel 5.1.6
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Retribusi Daerah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|-----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 12.968.659.300,00 | 11.553.009.479,00 | 89,08 | 8.368.462.760,36 |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha | 4.809.367.400,00 | 2.694.455.537,00 | 56,03 | 2.289.713.109,00 |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu | 1.150.000.000,00 | 949.224.438,00 | 82,54 | 492.914.660,00 |
| | Jumlah Retribusi Daerah | 18.928.026.700,00 | 15.196.689.454,00 | 80,29 | 11.151.090.529,36 |

Secara rinci Retribusi Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.1.7
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realiasi 2021 (Rp) | % | Realiasi 2020 (Rp) |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Retribusi Jasa Umum | | | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan | 9.994.695.300,00 | 10.106.612.479,00 | 101,12 | 7.105.913.743,00 |
| 2 | Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.028.280.000,00 | 869.616.000,00 | 84,57 | 281.565.000,00 |
| 3 | Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 784.050.000,00 | 227.542.000,00 | 29,02 | 203.670.000,00 |
| 4 | Pelayanan Pasar | 763.350.000,00 | 89.801.000,00 | 11,76 | 505.599.000,00 |
| 5 | Pengujian Kendaraan Bermotor | 201.000.000,00 | 24.475.000,00 | 12,18 | 67.965.000,00 |
| 6 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 0,00 | 47.225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pengendalian Menara Telekomunikasi | 197.284.000,00 | 187.738.000,00 | 95,16 | 203.750.017,36 |
| | Jumlah | 12.968.659.300,00 | 11.553.009.479,00 | 89,08 | 8.368.462.760,36 |
| Retribusi Jasa Usaha | | | | | |
| 1 | Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.785.105.000,00 | 1.339.855.000,00 | 75,06 | 909.015.000,00 |

| No. | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realiasi 2021 (Rp) | % | Realiasi 2020 (Rp) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 2 | Pasar Grosir/Pertokoan | 952.487.400,00 | 720.099.537,00 | 75,60 | 647.418.109,00 |
| 3 | Terminal | 18.740.000,00 | 11.350.000,00 | 60,57 | 7.646.000,00 |
| 4 | Tempat Khusus Parkir | 780.660.000,00 | 206.356.000,00 | 26,43 | 211.476.000,00 |
| 5 | Rumah Potong Hewan | 83.625.000,00 | 23.400.000,00 | 27,98 | 19.545.000,00 |
| 6 | Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1.188.750.000,00 | 393.395.000,00 | 33,09 | 494.613.000,00 |
| Jumlah | | 4.809.367.400,00 | 2.694.455.537,00 | 56,03 | 2.289.713.109,00 |
| Retribusi Perizinan Tertentu | | | | | |
| 1 | Izin Mendirikan Bangunan | 1.000.000.000,00 | 932.224.438,00 | 93,22 | 470.164.660,00 |
| 2 | Izin Trayek | 150.000.000,00 | 17.000.000,00 | 11,33 | 22.750.000,00 |
| 3 | Izin Usaha Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 1.150.000.000,00 | 949.224.438,00 | 82,54 | 492.914.660,00 |
| Total Retribusi Daerah | | 18.928.026.700,00 | 15.196.689.454,00 | 80,29 | 11.151.090.529,36 |

| 5.1.1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 1.650.003.101,00 | 1.284.388.411,79 | 1.579.915.958,62 |

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD. Pada Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp1.650.003.101,20 dan terealisasi senilai Rp1.284.388.411,79 atau 77,84%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2020 senilai Rp1.579.915.958,62 maka realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan senilai Rp295.527.546,83 atau 17,91%.

Rincian Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut :

Tabel 5.1.8
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | BUMD | Anggaran 2021 (Rp) | Realiasi 2021 (Rp) | % | Realiasi 2020 (Rp) |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | PT. Bank NTB | 1.508.129.846,00 | 1.069.057.966,00 | 70,89 | 1.403.055.467,00 |
| 2 | PT Jamkrida NTB Bersaing | 20.552.125,00 | 23.932.217,79 | 116,4 | 26.090.966,62 |
| 3 | PD. BPR NTB Bima | 103.598.760,00 | 180.014.359,00 | 173,8 | 150.769.525,00 |
| 4 | KPN Sabua Ade | 17.722.370,00 | 11.383.869,00 | 64,23 | 0,00 |
| Jumlah | | 1.650.003.101,00 | 1.284.388.411,79 | 77,84 | 1.579.915.958,62 |

| 5.1.1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 15.196.970.014,00 | 11.004.619.098,00 | 15.990.179.474,58 |

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp15.196.970.014 dan terealisasi senilai Rp11.004.619.098 atau 72,41%. Jika

dibandingkan Realisasi Tahun 2020 senilai Rp15.990.179.474,58 maka realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp4.985.560.376,58 atau 32,81%.

Tabel 5.1.9
Obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2021 dan tahun 2020

| No | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan | 475.000.000,00 | 21.434.000,00 | 4,51 | 868.752.300,00 |
| 2 | Penerimaan jasa giro | 747.227.877,00 | 688.317.761,77 | 92,12 | 1.339.340.650,48 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 5.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Penerimaan bunga deposito | 1.151.862.441,00 | 1.737.013.060,61 | 150,80 | 4.476.325.686,58 |
| 4 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | 3.314.090.696,00 | 789.079.651,20 | 23,81 | 194.225.250,00 |
| 5 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 68.896.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan | 0,00 | 27.868.961,50 | 0,00 | 31.663.338,00 |
| 7 | Pendapatan denda pajak | 0,00 | 279.305,92 | 0,00 | 2.002.954,00 |
| 8 | Pendapatan Denda Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.516.520,00 |
| 9 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 98.878.818,00 | 0,00 | 1.052.537.659,52 |
| 10 | Lain-Lain PAD yang Sah lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.323.778,00 |
| 11 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari kelompok masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| 12 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 9.503.424.000,00 | 7.572.851.153,00 | 79,69 | 7.948.415.838,00 |
| Jumlah | | 15.196.970.014,00 | 11.004.619.098,00 | 72,41 | 15.990.179.474,58 |

Rincian Obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.1.10
Rincian Obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 dan tahun 2020

| No | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Anggaran 2021 (Rp) | Realiasi 2021 (Rp) | % | Realiasi 2020 (Rp) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | | | | | |
| 1 | Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.030.000,00 |
| 2 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.487.300,00 |
| 4 | Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.235.000,00 |
| 5 | Hasil Penjualan Aset Lainnya | 75.000.000,00 | 21.434.000,00 | 28,58 | 0,00 |
| Jumlah | | 475.000.000,00 | 21.434.000,00 | 4,51 | 868.752.300,00 |
| Penerimaan Jasa Giro | | | | | |
| 1 | Jasa Giro Kas Daerah | 728.362.757,00 | 660.328.488,75 | 90,66 | 1.276.917.376,43 |
| 2 | Jasa Giro Pemegang Kas | 18.865.120,00 | 27.989.273,02 | 148,37 | 62.423.274,05 |
| Jumlah | | 747.227.877,00 | 688.317.761,77 | 92,12 | 1.339.340.650,48 |
| Penerimaan Bunga Deposito | | | | | |
| 1 | Rekening Deposito Pada Bank NTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882.207.787,72 |
| 2 | Rekening Deposito Pada Bank BRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.487.741,00 |

| No | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Anggaran 2021 (Rp) | Realiasi 2021 (Rp) | % | Realiasi 2020 (Rp) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 3 | Rekening Deposito Pada Bank BNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599.328.788,00 |
| 4 | Rekening Deposito Pada Bank Mandiri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.301.369,86 |
| 5 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 1.151.862.441,00 | 1.737.013.060,61 | 150,80 | 0,00 |
| Jumlah | | 1.151.862.441,00 | 1.737.013.060,61 | 150,80 | 4.476.325.686,58 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | | | | | |
| 1 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan/Kerugian Uang | 3.314.090.696,00 | 65.322.980,00 | 1,97 | 194.817.750,00 |
| 2 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan/Kerugian Barang | 0,00 | 723.756.671,20 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 3.314.090.696,00 | 789.079.651,20 | 23,81 | 194.817.750,00 |
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | | | | | |
| 1 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 68.896.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 68.896.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | | | | | |
| 1 | Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.751.243,00 |
| 2 | Bidang Pekerjaan Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.149.320,00 |
| 3 | Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Bidang Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483.594,00 |
| 6 | Bidang Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.279.181,00 |
| 7 | Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Bidang Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Bidang Ketahanan Pangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pengadaan Pakaian Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 27.868.961,50 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 27.868.961,50 | 0,00 | 31.663.338,00 |
| Pendapatan Denda Pajak | | | | | |
| 1 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0,00 | 279.305,92 | 0,00 | 2.002.954,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 279.305,92 | 0,00 | 2.002.954,00 |
| Pendapatan Denda Retribusi | | | | | |
| 1 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.516.520,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.516.520,00 |
| Pendapatan Dari Pengembalian | | | | | |
| 1 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 0,00 | 55.126.218,00 | 0,00 | 24.139.734,00 |
| 2 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 0,00 | 43.752.600,00 | 0,00 | 201.935.017,00 |
| 3 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Saku /Transport Peserta Rapat Koordinasi/Rapat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |

| No | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Anggaran 2021 (Rp) | Realiasi 2021 (Rp) | % | Realiasi 2020 (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 4 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pembayaran Terhadap Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.775.335,00 |
| 5 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kelebihan SP2D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 6 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sertifikasi Guru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Denda Keterlambatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.220.790,57 |
| 8 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.793.432,95 |
| 9 | Pendapatan dari Pengembalian Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 10 | Pendapatan dari Pengembalian Belanja Jasa Konsultansi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian Belanja Honorarium PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.630.850,00 |
| 12 | Pendapatan dari Pengembalian Belanja Honorarium Non PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 13 | Pendapatan dari Pengembalian Uang Lembur PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 15 | Pendapatan dari Pengembalian Belanja ATK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Pendapatan dari Pengembalian Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Pendapatan dari Pengembalian Belanja Makanan dan Minuman Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Pendapatan dari Pengembalian Belanja Jasa Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Pendapatan dari Pengembalian Belanja Cetak dan Pengadaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Pendapatan dari Pengembalian Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 98.878.818,00 | 0,00 | 1.051.945.159,52 |
| Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat | | | | | |
| 1 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa/Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat | 5.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| Jumlah | | 5.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya | | | | | |
| 1 | Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.778,00 |
| 2 | Penerimaan Honor Tim CMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200.000,00 |
| 3 | Dana Pembinaan dari PD. BPR NTB BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.323.778,00 |
| Pendapatan Dana Kapitasi JKN | | | | | |
| 1 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 9.503.424.000,00 | 7.572.851.153,00 | 79,69 | 7.948.415.838,00 |

| No | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Anggaran 2021 (Rp) | Realiasi 2021 (Rp) | % | Realiasi 2020 (Rp) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Jumlah | | 9.503.424.000,00 | 7.572.851.153,00 | 79,69 | 7.948.415.838,00 |
| Pendapatan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri | | | | | |
| 1 | Pendapatan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | | 15.196.970.014,00 | 11.004.619.098,00 | 72,41 | 15.990.179.474,58 |

Penerimaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan yang terdapat pada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP di tujuh Puskesmas Kota Bima Tahun 2021 sebesar Rp7.572.851.153,00 terdiri dari :

Tabel 5.1.11

Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No | Puskesmas | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | PKM Mpunda | 1.746.675.899,00 | 1.747.938.000,00 |
| 2 | PKM Rasanae Timur | 730.217.100,00 | 772.321.200,00 |
| 3 | PKM Paruga | 1.335.810.336,00 | 1.425.822.300,00 |
| 4 | PKM Penanae | 1.775.705.699,00 | 1.849.869.388,00 |
| 5 | PKM Kolo | 342.821.986,00 | 322.155.050,00 |
| 6 | PKM Kumbe | 342.679.554,00 | 340.782.900,00 |
| 7 | PKM Jatibaru | 1.298.940.579,00 | 1.489.527.000,00 |
| Jumlah | | 7.572.851.153,00 | 7.948.415.838,00 |

| | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.1.2 | Pendapatan Transfer | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 668.730.441.894,00 | 664.762.654.304,00 | 648.337.522.906,00 |

Pendapatan Transfer Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp668.730.441.894,00 dan terealisasi senilai Rp664.762.654.304,00 atau 99,41%. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp16.425.131.398,00 atau 2,46% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp648.337.522.906,00.

Pendapatan Dana Transfer diperoleh dari :

Tabel 5.1.12

Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Pendapatan Transfer | Anggaran 2021 (Rp) | Realiasi 2021 (Rp) | % | Realiasi 2020 (Rp) |
|----|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 590.389.610.762,00 | 594.010.197.074,00 | 100,61 | 587.547.659.216,00 |
| 2 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 30.025.143.000,00 | 30.025.143.000,00 | 100,00 | 19.485.769.000,00 |

| No | Pendapatan Transfer | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 3 | Transfer Pemerintah Antar Daerah | 48.315.688.132,00 | 40.727.314.230,00 | 84,29 | 41.304.094.690,00 |
| Jumlah | | 668.730.441.894,00 | 664.762.654.304,00 | 99,41 | 648.337.522.906,00 |

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 590.389.610.762,00 | 594.010.197.074,00 | 587.547.659.216,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp590.389.610.762,00 dan terealisasi senilai Rp594.010.197.074,00 atau 100,61%. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp6.462.537.858,00 atau 1,09% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp587.547.659.216,00.

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan diperoleh dari :

Tabel 5.1.13
Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 29.661.472.762,00 | 37.344.039.204,00 | 125,90 | 26.793.098.072,00 |
| 2 | Dana Alokasi Umum | 432.159.814.000,00 | 432.159.814.000,00 | 100,00 | 439.644.557.000,00 |
| 3 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | 69.117.431.000,00 | 68.320.563.668,00 | 98,85 | 63.487.181.845,00 |
| 4 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 59.450.893.000,00 | 56.185.780.202,00 | 94,51 | 57.622.822.299,00 |
| Jumlah | | 590.389.610.762,00 | 594.010.197.074,00 | 100,61 | 587.547.659.216,00 |

| | | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 29.661.472.762,00 | 37.344.039.204,00 | 26.793.098.072,00 |

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp29.661.472.762,00 dan terealisasi senilai Rp37.344.039.204,00 atau 125,90%. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp10.550.941.132,00 atau 28,25% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp26.793.098.072.

Secara rincian obyek Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

Tabel 5.1.14
Rincian Obyek Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Dana Bagi Hasil Pajak | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 1 | Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan | 4.987.711.419,00 | 5.727.066.197,00 | 114,82 | 3.438.438.356,00 |

| No | Dana Bagi Hasil Pajak | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 2 | Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 | 7.996.600.600,00 | 7.996.600.600,00 | 100,00 | 7.837.655.066,00 |
| 3 | Cukai Hasil Tembakau | 2.584.943.006,00 | 2.488.943.050,00 | 96,29 | 2.351.279.902,00 |
| 4 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 12.636.893.350,00 | 19.660.036.703,00 | 155,58 | 12.305.081.913,00 |
| 5 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 97.705.237,00 | 113.773.504,00 | 116,45 | 72.366.546,00 |
| 6 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.357.619.150,00 | 1.357.619.150,00 | 100,00 | 788.276.289,00 |
| 7 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 29.661.472.762,00 | 37.344.039.204,00 | 125,90 | 26.793.098.072,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | 432.159.814.000,00 | 432.159.814.000,00 | 439.644.557.000,00 |

Dana Alokasi Umum Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp432.159.814.000,00 dengan rincian Dana Alokasi Umum sebesar Rp432.159.814.000,00 dan terealisasi sebesar Rp432.159.814.000,00 atau 100,00%.

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | 128.568.324.000,00 | 124.506.343.870,00 | 121.110.004.144,00 |

Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp128.568.324.000,00 dan terealisasi senilai Rp124.506.343.870,00 atau 96,84%. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp3.396.339.726,00 atau 2,64% dibandingkan realisasi Tahun 2020 senilai Rp121.110.004.144,00.

Secara rincian obyek Dana Alokasi Khusus terdiri dari :

Tabel 5.1.15
Rincian obyek Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | | |
| 1 | DAK Bidang Pendidikan | 27.143.349.000,00 | 26.882.745.323,00 | 99,04 | 12.668.368.723,00 |
| 2 | DAK Bidang | 24.435.898.000,00 | 24.049.799.703,00 | 98,42 | 32.671.252.448,00 |

| No | Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Kesehatan | | | | |
| 3 | DAK Bidang Infrastruktur Jalan | 5.936.248.000,00 | 5.885.011.914,00 | 99,14 | 2.624.134.000,00 |
| 4 | DAK Bidang Infrastruktur Air Minum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.667.000,00 |
| 6 | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | DAK Bidang Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | DAK Bidang Keluarga Berencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DAK Bidang Kehutanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DAK Bidang Perdagangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DAK IPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | DAK AFIRMASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 3.150.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.529.562.000,00 |
| 16 | DAK Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | DAK Penugasan | 8.451.341.000,00 | 11.503.006.728,00 | 136,11 | 9.643.197.674,00 |
| 18 | DAK Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (Damkar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | DAK Prioritas Daerah/Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik | 69.117.431.000,00 | 68.320.563.668,00 | 98,85 | 63.487.181.845,00 |
| Dana Alokasi Khusus NonFisik | | | | | |
| 1 | Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD | 3.712.800.000,00 | 3.703.500.000,00 | 99,75 | 3.396.400.000,00 |
| 2 | Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 42.213.111.000,00 | 42.213.111.000,00 | 100,00 | 39.361.215.000,00 |
| 3 | Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD | 432.000.000,00 | 432.000.000,00 | 100,00 | 540.750.000,00 |
| 4 | Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM | 390.304.000,00 | 361.347.600,00 | 92,58 | 408.962.193,00 |
| 5 | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | 5.217.236.000,00 | 5.073.270.071,00 | 97,24 | 8.837.846.500,00 |

| No | Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 6 | Akreditasi Puskesmas | 423.817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 357.905.000,00 |
| 7 | Jaminan Persalinan | 664.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 791.457.000,00 |
| 8 | Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 1.441.137.000,00 | 1.264.393.269,00 | 87,74 | 1.368.704.630,00 |
| 9 | Pelayanan Administrasi Kependudukan | 941.151.000,00 | 892.665.262,00 | 94,85 | 642.287.876,00 |
| 10 | Akreditasi Labkesda - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Penugasan - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Pengawasan Obat dan Makanan | 489.559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.328.500,00 |
| 13 | Dana Pelayanan Kepariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.015.600,00 |
| 14 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | 2.203.300.000,00 | 923.200.000,00 | 41,90 | 1.428.950.000,00 |
| 15 | Dana Bantuan BLPS | 1.322.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Fasilitasi Penanaman Modal | 0,00 | 343.813.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,00 | 417.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,00 | 561.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 59.450.893.000,00 | 56.185.780.202,00 | 94,51 | 57.622.822.299,00 |
| | Total Dana DAK | 128.568.324.000,00 | 124.506.343.870,00 | 96,84 | 121.110.004.144,00 |

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5.1.1.2.1.3.1 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | Anggaran 2021 (Rp) 69.117.431.000,00 | Realisasi 2021 (Rp) 68.320.563.668,00 | Realisasi 2020 (Rp) 63.487.181.845,00 |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Dana Alokasi Khusus – Fisik Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp69.117.431.000,00 dan terealisasi senilai Rp68.320.563.668,00 atau 98,85%. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp4.833.381.823,00 atau 1,15% dibandingkan realisasi Tahun 2020 senilai Rp63.487.181.845,00.

| | | | | |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5.1.1.2.1.3.2 | Dana Alokasi Khusus – Non Fisik | Anggaran 2021 (Rp) 59.450.893.000,00 | Realisasi 2021 (Rp) 56.185.780.202,00 | Realisasi 2020 (Rp) 57.622.822.299,00 |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp59.450.893.000,00 dan terealisasi senilai Rp56.185.780.202,00 atau 94,51%. Realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp1.437.042.097,00 atau 5,49% dibandingkan realisasi Tahun 2020 senilai Rp57.622.822.299,00.

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 30.025.143.000,00 | 30.025.143.000,00 | 19.485.769.000,00 |

Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya Tahun 2021 merupakan Dana Insentif Daerah yang dianggarkan senilai Rp30.025.0143.000,00 dan terealisasi senilai Rp30.025.143.000,00 atau 100%. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp10.539.374.000,00 atau 35,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp19.485.769.000,00.

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 48.315.688.132,00 | 40.727.314.230,00 | 41.304.094.690,00 |

Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp48.315.688.132,00 dan terealisasi senilai Rp40.727.314.230,00 atau 84,89%. Realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp576.780.460,00 atau 1,19% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp41.304.094.690,00.

Secara rinci Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kota Bima dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.16
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah daerah lainnya | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 9.846.846.224,00 | 6.672.660.345,00 | 67,76 | 6.971.358.360,00 |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 8.342.973.195,00 | 5.374.685.550,50 | 64,42 | 5.377.488.832,50 |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 14.265.965.078,00 | 12.130.057.966,50 | 85,03 | 11.705.278.407,50 |
| 4 | Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 36.755.944,00 | 34.749.404,00 | 94,54 | 28.826.544,00 |
| 5 | Pajak Rokok | 15.823.147.691,00 | 16.515.160.964,00 | 104,37 | 17.221.142.546,00 |
| Jumlah | | 48.315.688.132,00 | 40.727.314.230,00 | 84,29 | 41.304.094.690,00 |

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.1.3 | Lain-Lain Pendapatan yang Sah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 17.768.000.000,00 | 17.931.340.700,00 | 19.766.446.840,26 |

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp17.768.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp17.931.340.700,00 atau 100,92%, terdiri dari pendapatan hibah Dana BOS dan pendapatan atas Pengembalian Hibah.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan. Lain-lain PAD yang Sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan

memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kota Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.17
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Lain-Lain Pendapatan yang Sah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Pendapatan Hibah | | | | | |
| 1 | Pendapatan Hibah dari Luar Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016.230.835,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri | 17.768.000.000,00 | 17.911.340.000,00 | 100,81 | 17.750.216.005,26 |
| Jumlah | | 17.768.000.000,00 | 17.911.340.000,00 | 100,81 | 19.766.446.840,26 |
| Pendapatan Lainnya | | | | | |
| 1 | Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia | 0,00 | 20.000.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 20.000.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah | | 17.768.000.000,00 | 17.931.340.700,00 | 100,92 | 19.766.446.840,26 |

| | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.1.3.1 | Lain-Lain Pendapatan yang Sah - Pendapatan Hibah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 17.768.000.000,00 | 17.911.340.000,00 | 19.766.446.840,26 |

Lain-Lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Hibah Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp17.768.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp17.911.340.000,00 atau 100,81%. Realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp1.855.106.840,26 atau 10,44% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp19.766.446.840,26. Pendapatan Hibah ini merupakan Hibah dari Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri.

| | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.1.3.2 | Lain-Lain pendapatan yang Sah -Pendapatan Lainnya | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 0,00 | 20.000.700,00 | 0,00 |

Lain-Lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Lainnya Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp20.000.700,00 atau 0,00%. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp20.000.700,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp0,00. Pendapatan Hibah ini merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia.

5.1.2. BELANJA DAN TRANSFER

| 5.1.2 | Belanja dan Transfer | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
|-------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | 754.078.303.532,00 | 716.700.153.286,42 | 796.653.090.963,73 |

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Pemerintah Kota Bima meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja aset Tetap Lainnya, selain itu juga terdapat Belanja Tak Terduga.

Secara umum Belanja dan Transfer Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp754.078.303.532,00 dan terealisasi senilai Rp716.700.153.286,42 atau 95,04%, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp37.378.150.245,58 atau 4,96%. Terdapat penurunan realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2021 senilai Rp79.952.937.677,31 atau 10,60% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp796.653.090.963,73 yang dipengaruhi oleh Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja dan Transfer Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.1.18
Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Belanja dan Transfer | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Operasi | 609.884.155.790,55 | 575.787.111.971,68 | 94,41 | 604.662.659.665,71 |
| 2 | Belanja Modal | 140.957.764.221,45 | 138.378.990.564,74 | 98,17 | 165.721.375.475,02 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 3.236.383.520,00 | 2.534.050.750,00 | 78,30 | 26.269.055.823,00 |
| 4 | Transfer Bantuan Keuangan Partai Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 754.078.303.532,00 | 716.700.153.286,42 | 95,04 | 796.653.090.963,73 |

Laporan ikhtisar atas realisasi belanja Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.1.19
Rincian Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Belanja dan Transfer | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| A | Belanja Operasi | | | | |
| 1 | Belanja Pegawai | 370.292.078.078,09 | 357.437.167.837,55 | 96,53 | 360.913.051.466,29 |
| 2 | Belanja Barang & Jasa | 219.942.245.712,46 | 200.214.962.134,13 | 91,03 | 146.888.810.652,00 |
| 3 | Belanja Hibah | 18.200.332.000,00 | 16.712.982.000,00 | 91,83 | 35.979.307.432,36 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 1.449.500.000,00 | 1.422.000.000,00 | 98,10 | 60.881.490.115,06 |
| | Jumlah Belanja Operasi | 609.884.155.790,55 | 575.787.111.971,68 | 94,41 | 604.662.659.665,71 |
| B | Belanja Modal | | | | |
| 1 | Belanja Tanah | 915.000.000,00 | 737.365.000,00 | 80,59 | 1.325.411.000,00 |
| 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 29.747.070.650,00 | 28.081.390.647,00 | 94,40 | 49.272.656.662,00 |
| 3 | Belanja Bangunan dan | 67.300.654.312,03 | 66.975.887.199,03 | 99,52 | 29.214.336.894,29 |

| No | Belanja dan Transfer | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Gedung | | | | |
| 4 | Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan | 41.243.019.909,42 | 40.902.636.451,71 | 99,17 | 74.078.224.366,82 |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 1.752.019.350,00 | 1.681.711.267,00 | 95,99 | 11.830.746.551,91 |
| Jumlah Belanja Modal | | 140.957.764.221,45 | 138.378.990.564,74 | 98,17 | 165.721.375.475,02 |
| C | Belanja Tak Terduga | | | | |
| 1 | Belanja Tak Terduga | 3.236.383.520,00 | 2.534.050.750,00 | 78,30 | 26.269.055.823,00 |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | | 3.236.383.520,00 | 2.534.050.750,00 | 78,30 | 26.269.055.823,00 |
| Jumlah Belanja | | 754.078.303.532,00 | 716.700.153.286,42 | 95,04 | 796.653.090.963,73 |
| D | Belanja Transfer | | | | |
| 1 | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Transfer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | | 754.078.303.532,00 | 716.700.153.286,42 | 95,04 | 796.653.090.963,73 |

Rekapitulasi Belanja Daerah masing-masing SKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.20
Rekapitulasi Belanja masing-masing SKPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 195.001.904.113,00 | 189.769.427.251,49 | 97,32 | 190.536.960.321,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 136.375.912.112,00 | 120.741.822.133,00 | 88,54 | 105.088.330.725,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 62.731.681.920,00 | 62.085.318.689,20 | 98,97 | 75.033.473.744,05 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 9.780.798.323,00 | 9.467.183.456,00 | 96,79 | 10.231.600.536,00 |
| 5 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 8.294.170.240,00 | 7.959.113.776,00 | 95,96 | 10.966.384.710,00 |
| 6 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 4.157.683.668,00 | 3.864.858.086,00 | 92,96 | 0,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.652.146.197,00 | 4.451.016.324,00 | 95,68 | 33.271.234.906,04 |
| 8 | Dinas Sosial | 5.207.650.838,00 | 4.950.296.618,00 | 95,06 | 4.331.814.451,00 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | 3.987.600.658,00 | 3.920.688.657,00 | 98,32 | 3.101.614.358,57 |
| 10 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6.837.956.618,00 | 5.505.386.721,00 | 80,51 | 3.465.208.237,00 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 3.941.078.779,00 | 3.685.657.232,00 | 93,52 | 3.299.590.453,00 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 18.109.905.889,00 | 17.367.521.501,00 | 95,90 | 17.728.008.623,00 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 4.954.109.429,00 | 4.873.300.984,00 | 98,37 | 4.517.271.858,00 |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6.804.358.124,00 | 6.509.687.272,00 | 95,67 | 5.941.559.110,72 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 12.010.302.504,00 | 11.573.762.496,00 | 96,37 | 4.571.603.070,00 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 9.016.427.145,00 | 8.315.823.608,00 | 92,23 | 17.457.637.611,00 |
| 17 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 8.335.084.189,00 | 7.910.763.833,18 | 94,91 | 10.230.058.202,00 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.593.956.832,00 | 3.534.599.593,00 | 98,35 | 3.625.521.346,00 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 15.419.948.360,00 | 15.154.802.319,00 | 98,28 | 3.587.285.503,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6.091.909.786,00 | 5.872.147.312,00 | 96,39 | 6.265.859.557,06 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 9.882.546.942,00 | 9.473.989.591,00 | 95,87 | 7.654.678.901,00 |
| 22 | Dinas Pertanian | 12.884.474.003,00 | 12.632.868.186,00 | 98,05 | 12.942.507.722,00 |
| 23 | Sekretariat Daerah | 68.320.397.234,00 | 67.066.968.351,55 | 98,17 | 38.428.150.993,00 |
| 24 | Sekretariat DPRD | 27.324.472.014,00 | 25.944.494.677,00 | 94,95 | 26.514.047.424,00 |
| 25 | Kecamatan Rasanae Barat | 10.062.011.023,00 | 9.417.624.024,00 | 93,60 | 9.834.556.862,00 |
| 26 | Kecamatan Rasanae Timur | 11.927.901.787,00 | 11.188.098.248,00 | 93,80 | 11.354.652.445,00 |
| 27 | Kecamatan Asakota | 10.451.103.017,00 | 9.956.524.212,00 | 95,27 | 10.221.935.323,00 |
| 28 | Kecamatan Mpunda | 15.654.040.303,00 | 14.791.121.314,00 | 94,49 | 15.634.992.841,00 |
| 29 | Kecamatan Raba | 18.209.611.163,00 | 17.567.800.298,00 | 96,48 | 19.024.299.376,00 |
| 30 | Inspektorat | 7.399.431.556,00 | 7.341.721.190,00 | 99,22 | 8.117.503.091,00 |
| 31 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 6.424.384.015,00 | 5.823.356.297,00 | 90,64 | 7.619.449.927,00 |
| 32 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) | 18.841.622.532,00 | 17.238.465.970,00 | 91,49 | 105.613.193.551,29 |
| 33 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 6.701.357.845,00 | 6.210.727.211,00 | 92,68 | 4.973.243.664,00 |
| 34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4.690.364.374,00 | 4.533.215.855,00 | 96,65 | 5.468.861.521,00 |
| JUMLAH | | 754.078.303.532,00 | 716.700.153.286,42 | 95,04 | 796.653.090.963,73 |

| | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.2.1 | Belanja Operasi | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 609.884.155.790,55 | 575.787.111.971,68 | 604.662.659.665,71 |

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp609.884.155.790,55 dan terealisasi senilai Rp575.787.111.971,68 atau 94,41%, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp34.097.043.818,87 atau 5,59%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp604.662.659.665,71 maka realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 menunjukkan penurunan senilai Rp28.875.547.694,03 atau 4,73%.

Belanja Operasi Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.1.21
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Belanja dan Transfer | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 370.292.078.078,09 | 357.437.167.837,55 | 96,53 | 360.913.051.466,29 |
| 2 | Belanja Barang & Jasa | 219.942.245.712,46 | 200.214.962.134,13 | 91,03 | 146.888.810.652,00 |
| 3 | Belanja Hibah | 18.200.332.000,00 | 16.712.982.000,00 | 91,83 | 35.979.307.432,36 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 1.449.500.000,00 | 1.422.000.000,00 | 98,10 | 60.881.490.115,06 |
| Jumlah | | 609.884.155.790,55 | 575.787.111.971,68 | 94,41 | 604.662.659.665,71 |

| | | | | |
|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.2.1.1 | Belanja Pegawai | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 370.292.078.078,09 | 357.437.167.837,55 | 360.913.051.466,29 |

Belanja Pegawai adalah belanja pegawai pada Belanja Operasi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp370.292.078.078,09 dan direalisasikan senilai Rp357.437.167.837,55 atau 96,53%. Dibandingkan realisasi Tahun 2020 Rp360.913.051.466,29 maka realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp3.475.883.628,74 atau 0,94%.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.22
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Belanja dan Transfer | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 237.210.846.795,09 | 235.774.822.363,00 | 99,39 | 285.525.897.136,00 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 50.438.642.477,00 | 49.051.880.569,00 | 97,25 | 16.680.888.000,00 |
| 3 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 11.809.015.871,00 | 10.689.387.060,55 | 90,52 | 2.289.999.600,00 |
| 4 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 70.833.572.935,00 | 61.921.077.845,00 | 87,42 | 0,00 |
| 5 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.999.999,64 |
| 6 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.714.733,65 |
| 7 | Uang Lembur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Honorarium PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.180.920.047,00 |
| 9 | Uang Saku dan Transport Peserta PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.859.000,00 |
| 10 | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.393.000,00 |
| 12 | Honorarium Non PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.656.379.950,00 |
| Jumlah | | 370.292.078.078,09 | 357.437.167.837,55 | 96,53 | 360.913.051.466,29 |

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 219.942.245.712,46 | 200.214.962.134,13 | 146.888.810.652,00 |

Belanja Barang adalah belanja barang pada Belanja Operasi yang terdiri dari belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilisasi, belanja

sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makan dan minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas.

Dalam APBD Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp219.942.245.712,46 dan direalisasikan senilai Rp200.214.962.134,13 atau 91,03%. Dibandingkan realisasi Tahun 2020 Rp146.888.810.652,00 maka realisasi belanja barang Tahun 2021 menunjukkan peningkatan senilai Rp53.326.151.482,13 atau 24,25% yang dipengaruhi oleh Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Cetak, Belanja Pakaian Dinas, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa konsultasi, Belanja Kursus pelatihan dan Belanja Yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.23
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020

| | Belanja dan Transfer | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Belanja Barang Pakai Habis | 68.852.642.335,46 | 60.990.992.601,64 | 88,58 | 13.421.975.136,00 |
| 2 | Belanja Bahan/Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.219.880.774,00 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 69.597.036.679,00 | 62.767.798.096,00 | 90,19 | 55.002.356.412,00 |
| 4 | Belanja Premi Asuransi | 10.362.618.000,00 | 10.243.588.750,00 | 98,85 | 0,00 |
| 5 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.404.431.572,00 |
| 6 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.581.247.899,00 |
| 7 | Belanja Sewa Tanah | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 564.217.000,00 | 503.077.000,00 | 89,16 | 0,00 |
| 9 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.246.662.000,00 | 1.039.541.400,00 | 83,39 | 1.137.859.836,00 |
| 10 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.500.000,00 |
| 11 | Belanja Sewa Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.885.000,00 |
| 13 | Belanja Makanan Dan Minuman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299.842.097,00 |
| 14 | Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.800.200,00 |
| 15 | Belanja Pakaian Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.465.950,00 |
| 16 | Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.475.240,00 |
| 17 | Belanja Perjalanan Dinas | 34.130.216.906,00 | 30.335.287.243,00 | 0,00 | 23.696.361.659,00 |
| 18 | Belanja Pemeliharaan | 5.759.031.295,00 | 5.152.232.663,00 | 0,00 | 4.607.993.360,00 |
| 19 | Belanja Jasa Konsultansi | 7.731.007.778,00 | 7.572.331.882,00 | 97,95 | 3.354.662.850,00 |
| 20 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 415.000.000,00 | 315.000.000,00 | 75,90 | 170.000.000,00 |
| 21 | Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS | 1.049.485.000,00 | 1.029.811.000,00 | 98,13 | 683.575.000,00 |

| Belanja dan Transfer | | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 22 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 253.988.459,00 | 117.759.820,00 | 46,36 | 0,00 |
| 23 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | Belanja Barang Dana BOS | 15.778.896.035,00 | 16.006.852.578,49 | 101,44 | 11.351.528.467,00 |
| 25 | Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Belanja Hadiah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.965.000,00 |
| 27 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.754.200,00 |
| 28 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Non PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250.000,00 |
| 29 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 4.198.944.225,00 | 4.138.689.100,00 | 98,56 | 0,00 |
| Jumlah | | 219.942.245.712,46 | 200.214.962.134,13 | 91,03 | 146.888.810.652,00 |

| | | | | |
|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.2.1.3 | Belanja Hibah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 18.200.332.000,00 | 16.712.982.000,00 | 35.979.307.432,36 |

Belanja Hibah untuk Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp18.200.332.000, dan direalisasikan senilai Rp16.712.982.000,00 atau 91,83%. Dibandingkan realisasi Tahun 2020 senilai Rp35.979.307.432,36 maka realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp19.266.325.432,36 atau 105,86%.

Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.24
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020

| NO | BELANJA HIBAH | ANGGARAN 2021 (Rp) | REALISASI 2021 (Rp) | % | REALISASI 2020 (Rp) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| A | BELANJA HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1.303.800.000,00 | 1.210.000.000,00 | 92,81 | 2.200.000.000,00 |
| 1 | BOP KESETARAAN | 91.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | FPRB KOTA BIMA | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 100.000.000,00 |
| 3 | KONI | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00 | 2.000.000.000,00 |
| 4 | PERGURUAN BELADIRI PENCAK SILAT BANTARAN ANGIN | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM BIMA | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 100,00 | 100.000.000,00 |

| NO | BELANJA HIBAH | ANGGARAN 2021 (Rp) | REALISASI 2021 (Rp) | % | REALISASI 2020 (Rp) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 6 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM KSATRIA BIMA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | POSBAKUMADIN PA BIMA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| B | BELANJA HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR | 926.000.000,00 | 791.000.000,00 | 85,42 | 543.000.000,00 |
| 1 | YYS KARTIKA SARI SLB DWP KOBİ | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 200.000.000,00 |
| 2 | PANTI ASUHAN NURUL IHSAN KOTA BIMA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | LEGIUN VETERAN RI KOTA BIMA | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000,00 |
| 4 | PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA BIMA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | GERAKAN PEMUDA ANSOR KOTA BIMA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000,00 |
| 7 | HALO BUGAR SAMBINA | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KOTA BIMA | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 9 | KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA BIMA | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 | 75.000.000,00 |
| 10 | MAHASISWA DAMAI PENCINTA ALAM STISIP MBOJO BIMA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MAHASISWA PENCINTA ALAM LONDA STKIP BIMA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPİ KOTA BIMA | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BIMA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG BIMA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLISI REPUBLIK INDONESIA (PP POLRI) BIMA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH BIMA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | DEWAN PIMPINAN DAERAH WAHDAH ISLAMİYAH KOTA BIMA | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | YAYASAN AL JUMHURIAH | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | PENGURUS CABANG MUSLIMAT NW KOTA BIMA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | PENGURUS CABANG MUSLIMAT NU KOTA BIMA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| NO | BELANJA HIBAH | ANGGARAN 2021 (Rp) | REALISASI 2021 (Rp) | % | REALISASI 2020 (Rp) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 23 | KOMUNITAS PECINTA ALAM KAPENTA (KAPAK) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | K BIMA CREATIVE DIGITAL | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | GERAKAN PERSATUAN PEMUDA DAN MAHASISWA KOTA BIMA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26 | FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA BIMA CIPUTAT RAYA | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | BADAN MUSYARAWAH MASYARAKAT BIMA | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | LEMBAGA PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN KINERJA PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 29 | LEMBAGA PEMANTAU PENGAWASAN KORUPSI NUSA TENGGARA BARAT | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 30 | LEMBAGA PENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN Keadilan Kota Bima | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 31 | LSM PUSAT PEMANTAU KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN Keadilan Kota Nima | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 32 | LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KIPANG NTB | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LKPM-NTB | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 34 | PEMUDA PANCA WARGA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 35 | LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 36 | KELOMPOK MASYARAKAT LAINNYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000.000,00 |
| C | BELANJA HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN | 15.848.300.000,00 | 14.589.750.000,00 | 92,06 | 21.918.343.500,00 |
| 1 | DEWAN PENDIDIKAN KOTA BIMA | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 125.000.000,00 |
| 2 | BANTUAN HIBAH KEPADA PKBM (DAK NON FISIK BOP KESETARAAN) | 2.001.500.000,00 | 1.000.750.000,00 | 50,00 | 808.200.000,00 |
| 3 | FORUM OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN SELURUH INDONESIA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA BIMA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | SANGGAR SENI DAN BUDAYA GONG 96 STKIP BIMA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | SANGGAR TARI SAMADA ANGI | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | FOREIGN LANGUAGEINSTITUTE KOTA BIMA | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 100,00 | 75.000.000,00 |
| 8 | BANTUAN HIBAH KEPADAPAUD/TK (DAK NON FISIK BOP PAUD) | 2.606.100.000,00 | 2.580.000.000,00 | 99,00 | 2.597.100.000,00 |

| NO | BELANJA HIBAH | ANGGARAN 2021 (Rp) | REALISASI 2021 (Rp) | % | REALISASI 2020 (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 9 | PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KOTA BIMA | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100,00 | 250.000.000,00 |
| 10 | HIBAH DANA BOP SWASTA KOTA BIMA | 89.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA BIMA | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 100,00 | 75.000.000,00 |
| 12 | PERHIMPUNAN BULAN SABIT MERAH INDONESIA KOTA BIMA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (IAKMI) KOTA BIMA | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) KOTA BIMA | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 25.000.000,00 |
| 15 | IKATAN DOKTER INDONESIA | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) KOTA BIMA | 50.000.000,00 | 35.000.000,00 | 70,00 | 25.000.000,00 |
| 17 | PEMUDA TANGGUH TANGGAP BENCANA | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | DHARMAWANITA PERSATUAN KOTA BIMA | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 600.000.000,00 |
| 19 | FORUM PUSPA MAJA LABO DAHU KOTA | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW) KOTA BIMA | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 400.000.000,00 |
| 21 | TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN DAN KELUARGA (PKK) | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | 100,00 | 850.000.000,00 |
| 22 | LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KOTA BIMA | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100,00 | 75.000.000,00 |
| 23 | BANTUAN LANGSUNG KEMASYARAKATAN (USAHA BAKULAN) | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 100,00 | 588.000.000,00 |
| 24 | BEM STISIP MBOJO BIMA | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | BEM STIH MUHAMMADIYAH BIMA | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26 | IKATAN MAHASISWA KOTA BIMA-MALANG | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 28 | HIBAH KEPADA MASJID DAN MUSHALA SE KOTA BIMA | 6.070.000.000,00 | 6.070.000.000,00 | 100,00 | 2.765.000.000,00 |
| 29 | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 300.000.000,00 |
| 30 | BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA KOTA BIMA | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 31 | BADAN KONTAK MAJELIS TA'LIM KOTA BIMA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000,00 |
| 32 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNNK) BIMA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | BADAN WAQAF INDONESIA (BWI) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000,00 |

| NO | BELANJA HIBAH | ANGGARAN 2021 (Rp) | REALISASI 2021 (Rp) | % | REALISASI 2020 (Rp) |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| 34 | DEWAN MASJID INDONESIA (DMI) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100,00 | 75.000.000,00 |
| 35 | DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA SENI QASIDAH INDONESIA KOTA BIMA | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 100,00 | 200.000.000,00 |
| 36 | FORUM KOMUNIKASI GEREJA KRISTEN | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 | 25.000.000,00 |
| 37 | MAJELIS TAKLIM USWATUN HASANAH | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 250.000.000,00 |
| 38 | MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA | 530.000.000,00 | 530.000.000,00 | 100,00 | 750.000.000,00 |
| 39 | PENGURUS CABANG NADHLATUL ULAMA (NU) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000,00 |
| 40 | PENGURUS DAERAH NAHDLATUL WATHAN KOTA BIMA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 41 | HIBAH KEPADA PONDOK PESANTREN DI KOTA BIMA | 720.000.000,00 | 680.000.000,00 | 94,44 | 550.000.000,00 |
| 42 | KOMITE PENDIRIAN INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI BIMA | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 43 | MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 44 | KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA BIMA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000,00 |
| 45 | ORGANISASI PROFESI LAINNYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 46 | ORGANISASI LAINNYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| 47 | HIBAH KEPADA ASRAMA BIMA DI LUAR DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| 48 | PERGURUAN TINGGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 |
| 49 | PENGELOLA BKSPJK SHARING PELAYANAN PERSALINAN PROPINSI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943.039.500,00 |
| 50 | BPJS KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354.004.000,00 |
| 51 | DEKRANASDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 |
| 52 | DPD LPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| D | BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK | 122.232.000,00 | 122.232.000,00 | 100,00 | 1.000.000.000,00 |
| 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 18.306.000,00 | 18.306.000,00 | 100,00 | 149.764.382,00 |
| 2 | PARTAI BULAN BINTANG | 12.066.000,00 | 12.066.000,00 | 100,00 | 98.713.921,00 |
| 3 | PARTAI DEMOKRAT | 11.928.000,00 | 11.928.000,00 | 100,00 | 97.584.920,00 |
| 4 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 11.179.500,00 | 11.179.500,00 | 100,00 | 91.461.319,00 |
| 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 20.520.000,00 | 20.520.000,00 | 100,00 | 167.877.479,00 |
| 6 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 8.013.000,00 | 8.013.000,00 | 100,00 | 65.555.665,00 |
| 7 | PARTAI Keadilan Sejahtera | 8.476.500,00 | 8.476.500,00 | 100,00 | 69.347.634,00 |
| 8 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 7.383.000,00 | 7.383.000,00 | 100,00 | 60.401.532,00 |
| 9 | PARTAI NASDEM | 8.664.000,00 | 8.664.000,00 | 100,00 | 70.881.603,00 |
| 10 | PARTAI PERINDO | 6.153.000,00 | 6.153.000,00 | 100,00 | 50.338.700,00 |
| 11 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 9.543.000,00 | 9.543.000,00 | 100,00 | 78.072.845,00 |

| NO | BELANJA HIBAH | ANGGARAN 2021 (Rp) | REALISASI 2021 (Rp) | % | REALISASI 2020 (Rp) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| E | BELANJA HIBAH BARANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.317.963.932,36 |
| 1 | HIBAH BARANG KEPADA MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.644.000,00 |
| 2 | HIBAH BARANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.443.751.284,36 |
| 3 | HIBAH BARANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 4 | HIBAH BARANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.568.648,00 |
| 5 | HIBAH BARANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| TOTAL | | 18.200.332.000,00 | 16.712.982.000,00 | 91,83 | 35.979.307.432,36 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5.1.2.1.4 | Belanja Bantuan Sosial | Anggaran 2021 (Rp) 1.449.500.000,00 | Realisasi 2021 (Rp) 1.422.000.000,00 | Realisasi 2020 (Rp) 60.881.490.115,06 |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Belanja Bantuan Sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat untuk Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp1.449.500.000,00 dan direalisasi senilai Rp1.422.000.000,00 atau 98,10%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 Rp27.500.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp59.459.490.115,00 atau 4.102,07%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.25
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020

| NO. | URAIAN | ANGGARAN 2021 (Rp) | REALISASI 2021 (Rp) | % | REALISASI 2020 (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Bantuan Pendidikan) | 114.500.000,00 | 87.000.000,00 | 75,98 | 76.500.000,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat (Rumah Tidak Layak Huni) | 1.255.000.000,00 | 1.255.000.000,00 | 100,00 | 1.392.670.031,00 |
| 3 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) RUMAH SINGGAH IKA MKOBI-MATARAM | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000,00 |
| 4 | Kelompok Masyarakat Lainnya (Erhab Rekon) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.120.000.000,00 |
| 5 | Bantuan Sosial kemasyarakatan kepada anggota masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243.000.000,00 |
| 6 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.950.800,00 |

| NO. | URAIAN | ANGGARAN 2021 (Rp) | REALISASI 2021 (Rp) | % | REALISASI 2020 (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 7 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.603.280.000,00 |
| 8 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.731.000,00 |
| 9 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.723.500,00 |
| 10 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.720.000,00 |
| 11 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.761.600,00 |
| 12 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.880.000,00 |
| 13 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.297.800,00 |
| 14 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580.258.084,06 |
| 15 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755.157.300,00 |
| 16 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.860.000,00 |
| 17 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.050.000,00 |
| 18 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.707.600,00 |
| 19 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.902.500,00 |
| 20 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.585.800,00 |
| 21 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.700.950,00 |
| 22 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023.570.150,00 |
| 23 | Belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.183.000,00 |
| 24 | Belanja Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360.000.000,00 |
| | TOTAL | 1.449.500.000,00 | 1.422.000.000,00 | 98,10 | 60.881.490.115,06 |

Berdasarkan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 senilai Rp1.422.000.000,00 sudah termasuk realisasi Belanja Bantuan Pendidikan dan Rumah Tidak Layak Huni dan dianggarkan pada 3 SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.1.26
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Tahun 2020 dan Tahun 2019

| NO. | SKPD/ KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN 2021 (Rp) | REALISASI 2021 (Rp) | % |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Bantuan Pendidikan) | 114.500.000,00 | 87.000.000,00 | 75,98 |
| 2 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat (Rumah Tidak Layak Huni) | 1.255.000.000,00 | 1.255.000.000,00 | 100,00 |
| 3 | SEKRETARIAT DAERAH | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) RUMAH SINGGAH IKA MKOBI-MATARAM | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 100,00 |
| | | TOTAL | 1.449.500.000,00 | 1.422.000.000,00 | 98,10 |

| | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5.1.2.2 | Belanja Modal | <u>Anggaran 2021 (Rp)</u> | <u>Realisasi 2021 (Rp)</u> | <u>Realisasi 2020 (Rp)</u> |
| | | 140.957.764.221,45 | 138.378.990.564,74 | 165.721.375.475,02 |

Belanja Modal Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp140.957.764.221,45 dan terealisasi senilai Rp138.378.990.564,74 atau 98,17%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp165.721.375.475,02 maka realisasi Belanja Modal Tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp27.342.384.910,28 atau 19,40%.

Belanja Modal Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.1.27
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Belanja Modal | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Tanah | 915.000.000,00 | 737.365.000,00 | 80,59 | 1.325.411.000,00 |
| 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 29.747.070.650,00 | 28.081.390.647,00 | 94,40 | 49.272.656.662,00 |
| 3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 67.300.654.312,03 | 66.975.887.199,03 | 99,52 | 29.214.336.894,29 |
| 4 | Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan | 41.243.019.909,42 | 40.902.636.451,71 | 99,17 | 74.078.224.366,82 |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 1.752.019.350,00 | 1.681.711.267,00 | 95,99 | 11.830.746.551,91 |
| | Jumlah | 140.957.764.221,45 | 138.378.990.564,74 | 98,17 | 165.721.375.475,02 |

| | | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5.1.2.2.1 | Belanja Modal Tanah | <u>Anggaran 2021 (Rp)</u> | <u>Realisasi 2021 (Rp)</u> | <u>Realisasi 2020 (Rp)</u> |
| | | 915.000.000,00 | 737.365.000,00 | 1.325.411.000,00 |

Belanja Modal Tanah Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp915.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp737.365.000,00 atau 80,59%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp1.325.411.000,00 maka realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp588.046.000,00 atau 64,27%. Realisasi Belanja Modal Tanah terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Belanja Modal Tanah Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.1.28
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Belanja Modal Tanah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.411.000,00 |
| 2 | Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal | 895.000.000,00 | 717.400.000,00 | 80,16 | 0,00 |
| 3 | Belanja Modal Tanah Lapangan Lainnya | 20.000.000,00 | 19.965.000,00 | 99,83 | 0,00 |
| Jumlah | | 915.000.000,00 | 737.365.000,00 | 80,59 | 1.325.411.000,00 |

| | | | | |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 29.747.070.650,00 | 28.081.390.647,00 | 49.272.656.662,00 |

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp29.747.070.650,00 dan terealisasi senilai Rp28.081.390.647,00 atau 94,40%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp49.272.656.662,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp21.191.266.015,00 atau 71,24%.

Tabel 5.1.29
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin SKPD Tahun 2020

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|----|------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 8.498.601.912,00 | 8.263.722.860,00 | 97,24 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 11.568.839.876,00 | 11.052.537.997,00 | 95,54 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 75.709.450,00 | 63.990.000,00 | 84,52 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 55.120.100,00 | 49.638.500,00 | 90,06 |
| 5 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 104.952.460,00 | 101.546.500,00 | 96,75 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 17.000.000,00 | 16.830.000,00 | 99,00 |
| 8 | Dinas Sosial | 114.005.960,00 | 76.028.000,00 | 66,69 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | 11.229.100,00 | 11.229.100,00 | 100,00 |

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 10 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 44.177.900,00 | 44.130.000,00 | 99,89 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 15.748.950,00 | 15.748.950,00 | 100,00 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 79.153.250,00 | 77.032.200,00 | 97,32 |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.051.483.125,00 | 834.513.900,00 | 79,37 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 264.139.525,00 | 255.344.000,00 | 96,67 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.288.667.150,00 | 882.894.490,00 | 68,51 |
| 17 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 103.523.200,00 | 103.415.500,00 | 99,90 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 790.546.058,00 | 785.375.750,00 | 99,35 |
| 20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 23.368.180,00 | 21.300.000,00 | 91,15 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 695.876.000,00 | 695.374.000,00 | 99,93 |
| 22 | Dinas Pertanian | 22.236.500,00 | 22.110.000,00 | 99,43 |
| 23 | Sekretariat Daerah | 2.231.122.304,00 | 2.078.445.100,00 | 93,16 |
| 24 | Sekretariat DPRD | 359.544.600,00 | 357.180.000,00 | 99,34 |
| 25 | Kecamatan Rasanae Barat | 318.533.000,00 | 317.943.750,00 | 99,82 |
| 26 | Kecamatan Rasanae Timur | 315.748.000,00 | 306.604.850,00 | 97,10 |
| 27 | Kecamatan Asakota | 336.436.000,00 | 296.115.600,00 | 88,02 |
| 28 | Kecamatan Mpunda | 394.896.000,00 | 394.531.200,00 | 99,91 |
| 29 | Kecamatan Raba | 472.806.050,00 | 470.510.300,00 | 99,51 |
| 30 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 100.819.000,00 | 95.899.100,00 | 95,12 |
| 32 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) | 376.287.000,00 | 374.899.000,00 | 99,63 |
| 33 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 100,00 |
| 34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 29.747.070.650,00 | 28.081.390.647,00 | 94,40 |

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020 terdiri dari :

Tabel 5.1.30
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Belanja Modal Tanah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 1 | Alat-alat Bantu | 27.655.200,00 | 22.200.000,00 | 80,27 | 787.000.000,00 |
| 2 | Alat-Alat Besar Darat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.950.000,00 |
| 3 | Alat Angkut Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 2.005.979.000,00 | 1.973.125.000,00 | 98,36 | 0,00 |
| 4 | Alat Angkut Apung Bermotor | 345.042.500,00 | 345.042.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 41.302.000,00 | 41.200.000,00 | 99,75 | 0,00 |

| No | Belanja Modal Tanah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 6 | Alat Bengkel Bermesin | 5.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Alat Ukur | 256.350.000,00 | 239.174.000,00 | 93,30 | 626.000.000,00 |
| 8 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850.000,00 |
| 9 | Peralatan Kantor | 487.469.250,00 | 456.684.250,00 | 93,68 | 7.896.924.520,00 |
| 10 | Alat Rumah Tangga | 1.257.969.829,00 | 831.250.600,00 | 66,08 | 1.379.459.275,00 |
| 11 | Pengadaan Komputer | 4.130.665.051,00 | 3.986.610.732,00 | 96,51 | 3.262.073.800,00 |
| 12 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 806.583.530,00 | 637.575.050,00 | 79,05 | 543.011.000,00 |
| 13 | Alat-Alat Studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.957.941.140,00 |
| 14 | Alat-Alat Komunikasi | 1.274.000.000,00 | 1.267.411.200,00 | 99,48 | 508.736.625,00 |
| 15 | Alat-Alat Kedokteran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.465.721.452,00 |
| 16 | Alat Kesehatan | 11.410.714.290,00 | 10.755.397.847,00 | 94,26 | 0,00 |
| 17 | Unit-Unit Laboratorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 7.569.940.000,00 | 7.398.419.468,00 | 97,73 | 6.131.601.100,00 |
| 19 | Alat Pengeboran Mesin | 125.000.000,00 | 124.800.000,00 | 99,84 | 0,00 |
| 20 | Alat Bantu Eksplorasi | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.070.000,00 |
| 23 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956.344.000,00 |
| 24 | Pengadaan Alat Pengolahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.973.750,00 |
| Jumlah | | 29.747.070.650,00 | 28.081.390.647,00 | 94,40 | 49.272.656.662,00 |

| | | | | |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.2.2.3 | Belanja Modal Bangunan dan Gedung | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 67.300.654.312,03 | 66.975.887.199,03 | 29.214.336.894,29 |

Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp67.300.654.312,03 dan terealisasi senilai Rp66.975.887.199,03 atau 99,52%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp29.214.336.894,29 maka realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2021 menunjukkan kenaikan senilai Rp37.761.550.304,74 atau 56,11%.

Tabel 5.1.31
Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung SKPD Tahun 2021

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|----|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 13.898.291.744,00 | 13.771.133.855,00 | 99,09 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 11.462.988.391,00 | 11.424.648.000,00 | 99,67 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.220.773.377,03 | 3.220.351.377,03 | 99,99 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 5 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dinas Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | 150.000.000,00 | 149.843.847,00 | 99,90 |
| 10 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 2.399.977.800,00 | 2.392.716.000,00 | 99,70 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 411.125.000,00 | 406.741.420,00 | 98,93 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 227.100.000,00 | 224.907.000,00 | 99,03 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 9.941.000.000,00 | 9.798.000.000,00 | 98,56 |
| 20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 1.375.005.000,00 | 1.373.356.000,00 | 99,88 |
| 22 | Dinas Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sekretariat Daerah | 24.214.393.000,00 | 24.214.189.700,00 | 100,00 |
| 24 | Sekretariat DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Kecamatan Rasanae Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Kecamatan Rasanae Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Kecamatan Asakota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Kecamatan Mpunda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Kecamatan Raba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 32 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 67.300.654.312,03 | 66.975.887.199,03 | 99,52 |

Belanja Modal Bangunan dan Gedung tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.1.32

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Belanja Modal Bangunan dan Gedung | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja/Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 66.175.649.312,03 | 65.852.131.199,03 | 99,51 | 25.597.630.694,29 |
| 2 | Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 1.125.005.000,00 | 1.123.756.000,00 | 99,89 | 12.900.000,00 |
| 3 | Bangunan Bersejarah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Bangunan Tugu Peringatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839.191.000,00 |
| 5 | Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764.615.200,00 |
| 6 | Bangunan Rambu-Rambu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 67.300.654.312,03 | 66.975.887.199,03 | 99,52 | 29.214.336.894,29 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 41.243.019.909,42 | 40.902.636.451,71 | 74.078.224.366,82 |

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp41.243.019.909,42 dan terealisasi senilai Rp40.902.636.451,71 atau 99,17%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp74.078.224.366,82 maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp33.175.587.915,11 atau 80,44%.

Tabel 5.1.33

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan SKPD Tahun 2020

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|----|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 39.784.369.909,42 | 39.464.276.451,71 | 99,20 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 5 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dinas Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 1.076.340.000,00 | 1.056.850.000,00 | 98,19 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 382.310.000,00 | 381.510.000,00 | 99,79 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Dinas Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sekretariat DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Kecamatan Rasanae Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Kecamatan Rasanae Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Kecamatan Asakota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Kecamatan Mpunda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Kecamatan Raba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 33 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 41.243.019.909,42 | 40.902.636.451,71 | 99,17 |

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 terdiri dari :

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dan Tahun 2019

| No | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Jalan/Konstruksi Jalan | 17.495.190.762,00 | 17.439.702.676,04 | 99,68 | 34.475.489.991,25 |
| 2 | Jembatan | 1.623.051.573,00 | 1.623.051.572,48 | 100,00 | 2.316.846.486,73 |
| 3 | Bangunan Air Irigasi | 1.511.965.080,00 | 1.491.430.000,00 | 98,64 | 801.258.000,00 |
| 4 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA | 1.656.385.000,00 | 1.653.773.000,00 | 99,84 | 921.798.000,00 |
| 5 | Bangunan Air Kotor | 8.666.641.064,00 | 8.663.056.873,27 | 99,96 | 13.051.850.200,00 |
| 6 | Instalasi Air Kotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.400.000,00 |
| 7 | Instalasi Air Minum/Air Bersih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.520.000,00 |
| 8 | Bangunan Air Bersih/Baku | 6.272.948.013,00 | 6.033.633.912,50 | 96,18 | 395.092.000,00 |
| 9 | Instalasi Pengolahan Sampah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Instalasi Gardu Induk Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.105.350,00 |
| 12 | Pengadaan Jaringan Listrik | 1.004.850.000,00 | 986.000.000,00 | 98,12 | 5.558.210.666,60 |
| 13 | Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 3.011.988.417,42 | 3.011.988.417,42 | 100,00 | 3.729.166.000,00 |
| 14 | Pengadaan Jaringan Air Minum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.130.487.672,24 |
| Jumlah | | 41.243.019.909,42 | 40.902.636.451,71 | 99,17 | 74.078.224.366,82 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 1.752.019.350,00 | 1.681.711.267,00 | 11.830.746.551,91 |

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp1.752.019.350,00 dan terealisasi senilai Rp1.681.711.267,00 atau 95,11%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp11.830.746.551,91 maka realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp10.149.035.284,91 atau 579,28%.

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya SKPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | SKPD | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.124.419.350,00 | 1.055.250.867,00 | 93,85 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dinas Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 627.600.000,00 | 626.460.400,00 | 99,82 |
| 20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Dinas Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sekretariat DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Kecamatan Rasanae Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Kecamatan Rasanae Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Kecamatan Asakota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Kecamatan Mpunda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Kecamatan Raba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 1.752.019.350,00 | 1.681.711.267,00 | 95,99 |

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.1.36
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Bahan Perpustakaan Tercetak | 1.651.719.350,00 | 1.581.611.267,00 | 95,76 | 0,00 |
| 2 | Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 100.000.000,00 | 99.800.000,00 | 99,80 | 0,00 |
| 3 | Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.253.318,00 |
| 4 | Terbitan | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Barang-Barang Perpustakaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.197.123,00 |
| 6 | Barang Bercorak Kebudayaan | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 70.000.000,00 |
| 7 | Aset Tetap Renovasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.476.296.110,91 |
| 8 | Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pengadaan Hewan | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 1.752.019.350,00 | 1.681.711.267,00 | 95,99 | 11.830.746.551,91 |

| | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.2.3 | Belanja Tak Terduga | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
| | | 3.236.383.520,00 | 2.534.050.750,00 | 26.269.055.823,00 |

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tak Terduga tahun 2021 dianggarkan senilai Rp3.236.383.520 dan terealisasi senilai Rp2.534.050.750,00 atau 78,30%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp26.269.055.823,00 maka realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021 menunjukkan penurunan yang sangat tinggi yaitu sebesar senilai Rp26.269.055.823,00 atau 733,38%.

Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.1.37
Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021

| NO | TANGGAL SP2D | NO. SP2D | NAMA PENERIMA | URAIAN | JUMLAH |
|----------|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I | PENANGANAN COVID-19 | | | | 788.062.000,00 |
| 1 | 10/11/2021 | 6311/TU NIHIL/2021 | RSUD KOTA BIMA | BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGANAN KEPERLUAN MENDESAK PENDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 MELALUI PENGADAAN OKSIGEN CENTRAL DI RSUD KOTA BIMA TAHUN 2021 KEPADA RSUD KOTA BIMA SESUAI PROPOSAL TERLAMPIR | 141.000.000,00 |
| 2 | 21/12/2021 | 8087/TU NIHIL/2021 | DINAS SOSIAL KOTA BIMA | BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) SETARA KOTA BIMA KEPADA DINAS SOSIAL KOTA BIMA SESUAI PROPOSAL TERLAMPIR | 647.062.000,00 |

| NO | TANGGAL SP2D | NO. SP2D | NAMA PENERIMA | URAIAN | JUMLAH |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| II | PENANGANAN TANGGAP DARURAT | | | | 731.988.750,00 |
| 1 | 29/06/2021 | 2435/TU NIHIL/2021 | BPBD KOTA BIMA | BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN KEPERLUAN MENDESAK SIAGA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KOTA BIMA TAHUN 2021 KEPADA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BIMA SESUAI PROPOSAL TERLAMPIR | 112.850.000,00 |
| 2 | 31/12/2021 | 9168/TU NIHIL/2021 | BPBD KOTA BIMA | BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KOTA BIMA KEPADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BIMA SESUAI PROPOSAL TERLAMPIR | 50.000.000,00 |
| 3 | 31/12/2021 | 9169/TU NIHIL/2021 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN REHABILITASI KORBAN KEBAKARAN DI KOTA BIMA TAHUN 2021 KEPADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BIMA SESUAI PROPOSAL TERLAMPIR | 320.000.000,00 |
| 4 | 31/12/2021 | 9170/TU NIHIL/2021 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BIMA | BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KOTA BIMA KEPADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BIMA SESUAI PROPOSAL TERLAMPIR | 50.000.000,00 |
| 5 | 31/12/2021 | 9171/TU NIHIL/2021 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BIMA | BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KOTA BIMA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BIMA SESUAI PROPOSAL TERLAMPIR | 49.893.750,00 |
| 6 | 31/12/2021 | 9172/TU NIHIL/2021 | DINAS PU DAN TATARUANG KOTA BIMA | BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KOTA BIMA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BIMA SESUAI PROPOSAL TERLAMPIR | 149.245.000,00 |
| III | PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT | | | | 1.014.000.000,00 |
| TOTAL PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021 | | | | | 2.534.050.750,00 |

5.1.3. PEMBIAYAAN

| 5.1.3 | Pembiayaan Daerah | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) |
|-------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 10.973.784.625,00 | 10.974.821.367,93 | 92.243.087.895,71 |

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Netto Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp10.973.784.625,00 dan terealisasi senilai Rp10.974.821.367,93 atau 100,01%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp92.243.087.895,71 maka realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp81.269.303.280,78 atau 740,58%.

Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.1.38
Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| A | Penerimaan Pembiayaan Daerah | | | | |
| 1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 10.973.784.625,00 | 10.974.821.367,93 | 100,01 | 93.241.433.641,71 |
| | Koreksi SiLPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek berupa Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654.254,00 |
| | Jumlah Penerimaan | 10.973.784.625,00 | 10.974.821.367,93 | 100,01 | 93.243.087.895,71 |
| B | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | | |
| 1 | Penyertaan Modal BUMD | 2.300.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 86,96 | 1.000.000.000,00 |
| | Jumlah Pengeluaran | 2.300.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 86,96 | 1.000.000.000,00 |
| | TOTAL PEMBIAYAAN | 8.673.784.625,00 | 8.974.821.367,93 | 103,47 | 92.243.087.895,71 |

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5.1.3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | Anggaran 2021 (Rp) 10.973.784.625,00 | Realisasi 2021 (Rp) 10.974.821.367,93 | Realisasi 2020 (Rp) 93.243.087.895,71 |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp10.973.784.625,00 dan terealisasi senilai Rp10.974.821.367,93 atau 100,01%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp93.243.087.895,71 maka realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 mengalami penurunan signifikan senilai Rp82.269.303.280,78 atau 749,68%.

Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2021 terdapat pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu senilai Rp10.973.784.625,00.

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 5.1.3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Anggaran 2021 (Rp) 2.300.000.000,00 | Realisasi 2021 (Rp) 2.000.000.000,00 | Realisasi 2020 (Rp) 500.000.000,00 |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp2.300.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.000.000.000,00 atau 86,96%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp500.000.000,00 maka realisasi Tahun 2021 menunjukkan kenaikan senilai Rp1.500.000.000,00 atau 65,22%.

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5.1.4 | SiLPA Tahun Berjalan | Realisasi 2021 (Rp) 21.962.179.832,18 | Realisasi 2020 (Rp) 10.973.784.614,93 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 senilai Rp21.962.179.832,18 dan Tahun 2020 senilai Rp10.973.784.614,93 terdiri dari :

Tabel 5.1.39
Nilai SiLPA Tahun Berjalan Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Kas di Daerah | 21.804.706.778,67 | 10.735.155.328,67 |
| 2 | Kas Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 113.613.390,00 |
| 3 | Kas Dana BOS | 151.753.053,51 | 125.015.896,26 |
| 4 | Kas Bendahara Pengeluaran | 5.720.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 21.962.179.832,18 | 10.973.784.614,93 |

5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Laporan Perubahan SAL Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | 10.973.784.614,93 | 93.241.433.641,71 |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 10.973.784.614,93 | 93.241.433.641,71 |
| 3 | Subtotal (1 - 2) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | 21.962.179.832,18 | 10.973.784.614,93 |
| 5 | Subtotal (3 + 4) | 21.962.179.832,18 | 10.973.784.614,93 |
| 6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 0 | 0 |
| 7 | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6) | 21.962.179.832,18 | 10.973.784.614,93 |

| | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.2.1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | 2021 (Rp) 10.973.784.614,93 | 2020 (Rp) 93.241.433.641,71 |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yaitu senilai RP 10.973.784.614,93. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp 93.241.433.641,71 maka terjadi penurunan senilai Rp 82.267.433.641,71 atau 88,23% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.2
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 dan 2020

| NO | URAIAN | 2021 | 2020 |
|----|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Pendapatan | 729.687.511.750,67 | 715.383.787.682,95 |
| 2 | Belanja dan Transfer | 716.700.153.286,418 | 796.653.090.963,73 |

| NO | URAIAN | 2021 | 2020 |
|----|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | Surplus/Defisit | 12.987.358.464,25 | (81.269.303.280,78) |
| 4 | Penerimaan Pembiayaan | 10.974.821.367,93 | 93.243.087.895,71 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 2.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 6 | Pembiayaan Netto | 8.974.821.367,93 | 92.243.087.895,71 |
| 7 | Saldo Anggaran Lebih Awal | 21.962.179.832,18 | 10.973.784.614,93 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.2.2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan | 2021 (Rp) 10.973.784.614,93 | 2020 (Rp) 93.241.433.641,71 |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 senilai Rp 10.974.821.367,93. Jika dibandingkan tahun 2020 senilai Rp93.243.087.895,71 sehingga terjadi penurunan senilai Rp 82.268.266.527,78 atau 88,23%.

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.2.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 2021 (Rp) 21.962.179.832,18 | 2020 (Rp) 10.973.784.614,93 |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 senilai Rp 21.962.179.832,18. Jika dibandingkan tahun 2020 Rp 10.973.784.614,93 maka terjadi kenaikan senilai Rp10.988.395.217,25 atau 100,13 %.

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5.2.4 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 2021 (Rp) 0,00 | 2020 (Rp) 0,00 |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Tidak Terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 2021 begitu juga dengan Tahun 2020.

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.2.5 | Saldo Anggaran Lebih Akhir | 2021 (Rp) 21.962.179.832,18 | 2020 (Rp) 10.973.784.614,93 |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2021 senilai Rp Rp 21.962.179.832,18 jika dibandingkan tahun 2020 Rp 10.973.784.614,93 maka terjadi Kenaikan senilai Rp10.988.395.217,25 atau 100,13 %.

Tabel 5.2.3
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | 10.973.784.614,93 | 93.241.433.641,71 |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 10.973.784.614,93 | 93.241.433.641,71 |
| 3 | Subtotal (1 - 2) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | 21.962.179.832,18 | 10.973.784.614,93 |
| 5 | Subtotal (3 + 4) | 21.962.179.832,18 | 10.973.784.614,93 |

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6) | 21.962.179.832,18 | 10.973.784.614,93 |

5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO), berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima, menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel 5.3.1
Laporan Operasional – LO Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 20.964.219.184,94 | 19.262.607.962,13 | 1.701.611.222,81 | 8,83 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 15.132.006.221,00 | 11.019.857.776,33 | 4.112.148.444,67 | 37,32 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.284.388.411,79 | 1.579.915.958,62 | (295.527.546,83) | (18,71) |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 10.907.930.231,82 | 15.795.970.799,68 | (4.888.040.567,86) | (30,94) |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) | 48.288.544.049,55 | 47.658.352.496,76 | 630.191.552,79 | 1,32 |
| 8 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 9 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 10 | Dana Bagi Hasil | 24.988.937.000,00 | 27.250.790.590,00 | (2.261.853.590,00) | (8,30) |
| 11 | Dana Alokasi Umum | 432.159.814.000,00 | 439.644.557.000,00 | (7.484.743.000,00) | (1,70) |
| 12 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | 68.320.563.668,00 | 63.487.181.845,00 | 4.833.381.823,00 | 7,61 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 56.185.780.202,00 | 57.622.822.299,00 | (1.437.042.097,00) | (2,49) |
| 14 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13) | 581.655.094.870,00 | 588.005.351.734,00 | (6.350.256.864,00) | (1,08) |
| 15 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA | | | | |
| 16 | Dana Insentif Daerah | 30.025.143.000,00 | 19.485.769.000,00 | 10.539.374.000,00 | 54,09 |
| 17 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (16) | 30.025.143.000,00 | 19.485.769.000,00 | 10.539.374.000,00 | 54,09 |
| 18 | TRANSFER ANTAR DAERAH | | | | |
| 19 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 42.282.192.857,00 | 41.807.835.182,00 | 474.357.675,00 | 1,13 |
| 20 | Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (19) | 42.282.192.857,00 | 41.807.835.182,00 | 474.357.675,00 | 1,13 |
| 21 | Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 17 + 20) | 653.962.430.727,00 | 649.298.955.916,00 | 4.663.474.811,00 | 0,72 |
| 22 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 23 | Pendapatan Hibah | 8.106.996.664,00 | 27.097.078.862,26 | (18.990.082.198,26) | (70,08) |

| No | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 24 | Pendapatan Lainnya | 17.931.340.700,00 | 0,00 | 17.931.340.700,00 | 0,00 |
| 25 | Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (23 s.d 24) | 26.038.337.364,00 | 27.097.078.862,26 | (1.058.741.498,26) | (3,91) |
| 26 | JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 25) | 728.289.312.140,55 | 724.054.387.275,02 | 4.234.924.865,53 | 0,58 |
| 27 | BEBAN | | | | |
| 28 | BEBAN OPERASI | | | | |
| 29 | Beban Pegawai | 355.177.717.132,55 | 362.957.107.840,29 | (7.779.390.707,74) | (2,14) |
| 30 | Beban Barang dan Jasa | 191.518.612.942,45 | 143.878.432.847,41 | 47.640.180.095,04 | 33,11 |
| 31 | Beban Hibah | 28.319.224.111,60 | 28.821.813.531,00 | (502.589.419,40) | (1,74) |
| 32 | Beban Bantuan Sosial | 3.526.290.000,00 | 58.783.286.115,06 | (55.256.996.115,06) | (94,00) |
| 33 | Beban Penyisihan Piutang | 1.844.994.095,22 | 1.753.844.418,85 | 91.149.676,37 | 5,20 |
| 34 | Jumlah Beban Operasi (29 s/d 34) | 580.386.838.281,82 | 596.194.484.752,61 | (15.807.646.470,79) | (2,65) |
| 35 | BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | | | | |
| 36 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 36.433.909.419,01 | 26.813.999.616,63 | 9.619.909.802,38 | 35,88 |
| 37 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 16.209.583.416,00 | 13.875.295.574,00 | 2.334.287.842,00 | 16,82 |
| 38 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 80.252.331.928,00 | 76.705.873.277,00 | 3.546.458.651,00 | 4,62 |
| 39 | Beban Amortisasi Aset tak Berwujud | 128.098.926,78 | 125.778.426,78 | 2.320.500,00 | 1,84 |
| 40 | Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (36 s.d 39) | 133.023.923.689,79 | 117.520.946.894,41 | 15.502.976.795,38 | 13,19 |
| 41 | BEBAN TRANSFER | | | | |
| 42 | Beban Bagi Hasil Pajak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Beban Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Jumlah Beban Transfer (42 s.d 43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | BEBAN TAK TERDUGA | | | | |
| 46 | Beban Tak Terduga | 2.534.050.750,00 | 0,00 | 2.534.050.750,00 | 0,00 |
| 47 | Jumlah Beban Tak Terduga (46) | 2.534.050.750,00 | 0,00 | 2.534.050.750,00 | 0,00 |
| 48 | JUMLAH BEBAN (34+ 40 + 44 + 47) | 715.944.812.721,61 | 713.715.431.647,02 | 2.229.381.074,59 | 0,31 |
| 49 | SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI (26- 48) | 12.344.499.418,94 | 10.338.955.628,00 | 2.005.543.790,94 | 19,40 |
| 50 | SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| 51 | Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | | |
| 52 | Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 71.577.028,13 | 121.516.535,21 | (49.939.507,08) | (41,10) |
| 55 | JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL (52 s.d 54) | 71.577.028,13 | 121.516.535,21 | (49.939.507,08) | (41,10) |
| 56 | DEFISIT NON OPERASIONAL | | | | |
| 57 | Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 60 | JUMLAH DEFISIT DARI NON OPERASIONAL (57 s.d 59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (55-60) | 71.577.028,13 | 121.516.535,21 | (49.939.507,08) | (41,10) |
| 62 | SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (49 + 61) | 12.416.076.447,07 | 10.460.472.163,21 | 1.955.604.283,86 | 18,70 |
| 63 | POS LUAR BIASA | | | | |
| 64 | PENDAPATAN LUAR BIASA | | | | |
| 65 | Pendapatan Luar Biasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Jumlah Pendapatan Luar Biasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | BEBAN LUAR BIASA | | | | |
| 68 | Beban Luar Biasa | 0,00 | 26.269.055.823,00 | (26.269.055.823,00) | (100,00) |
| 69 | Jumlah Beban Luar Biasa | 0,00 | 26.269.055.823,00 | (26.269.055.823,00) | (100,00) |
| 70 | POS LUAR BIASA (50 - 51) | 0,00 | (26.269.055.823,00) | 26.269.055.823,00 | (100,00) |
| 71 | SURPLUS/(DEFISIT) – LO (62 + 70) | 12.416.076.447,07 | (15.808.583.659,79) | 28.224.660.106,86 | (178,54) |

Penjelasan Laporan Operasional tahun 2021 adalah sebagai berikut.

$$5.3.1 \quad \text{Pendapatan} - \text{LO} \quad \frac{2021 \text{ (Rp)}}{728.289.312.140,55} \quad \frac{2020 \text{ (Rp)}}{724.054.387.275,02}$$

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kota Bima yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih tahun 2021 senilai Rp 728.289.312.140,55 dan tahun 2020 senilai Rp724.054.387.275,02, sehingga hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih mengalami peningkatan senilai Rp4.234.924.865,53 atau 0,58 %.

Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.2
Laporan Pendapatan –LO Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 20.964.219.184,94 | 19.262.607.962,13 | 1.701.611.222,81 | 8,83 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 15.132.006.221,00 | 11.019.857.776,33 | 4.112.148.444,67 | 37,32 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.284.388.411,79 | 1.579.915.958,62 | (295.527.546,83) | (18,71) |

| No | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 10.907.930.231,82 | 15.795.970.799,68 | (4.888.040.567,86) | (30,94) |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) | 48.288.544.049,55 | 47.658.352.496,76 | 630.191.552,79 | 1,32 |
| 8 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 9 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 10 | Dana Bagi Hasil | 24.988.937.000,00 | 27.250.790.590,00 | (2.261.853.590,00) | (8,30) |
| 11 | Dana Alokasi Umum | 432.159.814.000,00 | 439.644.557.000,00 | (7.484.743.000,00) | (1,70) |
| 12 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | 68.320.563.668,00 | 63.487.181.845,00 | 4.833.381.823,00 | 7,61 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 56.185.780.202,00 | 57.622.822.299,00 | (1.437.042.097,00) | (2,49) |
| 14 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13) | 581.655.094.870,00 | 588.005.351.734,00 | (6.350.256.864,00) | (1,08) |
| 15 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA | | | | |
| 16 | Dana Insentif Daerah | 30.025.143.000,00 | 19.485.769.000,00 | 10.539.374.000,00 | 54,09 |
| 17 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (16) | 30.025.143.000,00 | 19.485.769.000,00 | 10.539.374.000,00 | 54,09 |
| 18 | TRANSFER ANTAR DAERAH | | | | |
| 19 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 42.282.192.857,00 | 41.807.835.182,00 | 474.357.675,00 | 1,13 |
| 20 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Povinsi (19) | 42.282.192.857,00 | 41.807.835.182,00 | 474.357.675,00 | 1,13 |
| 21 | Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 17 + 20) | 653.962.430.727,00 | 649.298.955.916,00 | 4.663.474.811,00 | 0,72 |
| 22 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 23 | Pendapatan Hibah | 8.106.996.664,00 | 27.097.078.862,26 | (18.990.082.198,26) | (70,08) |
| 24 | Pendapatan Lainnya | 17.931.340.700,00 | 0,00 | 17.931.340.700,00 | 0,00 |
| 25 | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 26.038.337.364,00 | 27.097.078.862,26 | (1.058.741.498,26) | (3,91) |
| 26 | JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 25) | 728.289.312.140,55 | 724.054.387.275,02 | 4.234.924.865,53 | 0,58 |

Adapun Pendapatan-LO masing-masing SKPD tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.3
Laporan Pendapatan – LO SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No. | SKPD | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 364.000.000,00 | 457.000.000,00 | (93.000.000,00) | (20,35) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 17.313.791.936,00 | 14.876.407.268,99 | 2.437.384.667,01 | 16,38 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.025.954.438,00 | 822.439.660,00 | 203.514.778,00 | 24,75 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 297.965.000,00 | 306.076.000,00 | (8.111.000,00) | (2,65) |
| 6 | Dinas Lingkungan Hidup | 291.095.000,00 | 372.883.500,00 | (81.788.500,00) | (21,93) |
| 7 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 2.042.571.504,00 | 1.526.091.240,00 | 516.480.264,00 | 33,84 |
| 8 | Dinas Pariwisata | 574.745.000,00 | 690.478.000,00 | (115.733.000,00) | (16,76) |
| 9 | Sekretariat Daerah | 7.026.914.000,00 | 176.254.000,00 | 6.850.660.000,00 | 3886,81 |

| No. | SKPD | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 697.869.653.102,55 | 698.701.595.542,70 | (831.942.440,15) | (0,12) |
| 11 | Dinas Pertanian | 207.786.000,00 | 111.103.950,00 | 96.682.050,00 | 87,02 |
| 12 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 206.000.000,00 | 163.833.333,33 | 42.166.666,67 | 25,74 |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 686.552.160,00 | 680.719.280,00 | 5.832.880,00 | 0,86 |
| 14 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 1.467.724.500,00 | (1.467.724.500,00) | (100,00) |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 197.284.000,00 | 194.102.000,00 | 3.182.000,00 | 1,64 |
| 16 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0,00 | 2.665.000.000,00 | (2.665.000.000,00) | (100,00) |
| 17 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 83.680.000,00 | (83.680.000,00) | (100,00) |
| 18 | Dinas Sosial | 0,00 | 108.149.000,00 | (108.149.000,00) | (100,00) |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 0,00 | 585.850.000,00 | (585.850.000,00) | (100,00) |
| 20 | Kecamatan Rasanae Barat | 185.000.000,00 | 0,00 | 185.000.000,00 | 0,00 |
| 21 | Kecamatan Raba | 0,00 | 65.000.000,00 | (65.000.000,00) | (100,00) |
| JUMLAH | | 728.289.312.140,55 | 724.054.387.275,02 | 4.234.924.865,53 | 0,58 |

| | | | |
|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.3.1.1 | Pendapatan Asli | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | Daerah-LO | 48.288.544.049,55 | 47.658.352.496,76 |

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang diakui menjadi hak Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp48.288.544.049,55 dan tahun 2020 senilai Rp47.658.352.496,76 sehingga hak Pemerintah Kota Bima yang menambah ekuitas mengalami Peningkatan senilai Rp630.191.552,79 atau 1,32% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.4
Laporan Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2021 dan 2020

| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| Pendapatan Pajak Daerah | 20.964.219.184,94 | 19.262.607.962,13 | 1.701.611.222,81 | 8,83 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 15.132.006.221,00 | 11.019.857.776,33 | 4.112.148.444,67 | 37,32 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.284.388.411,79 | 1.579.915.958,62 | (295.527.546,83) | (18,71) |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 10.907.930.231,82 | 15.795.970.799,68 | (4.888.040.567,86) | (30,94) |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 48.288.544.049,55 | 47.658.352.496,76 | 630.191.552,79 | 1,32 |

Adapun masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

| | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.3.1.1.1 | Pendapatan Pajak | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | Daerah-LO | 20.964.219.184,94 | 19.262.607.962,13 |

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional untuk tahun 2021 senilai Rp20.964.219.184,94 dan tahun 2020 senilai Rp19.262.607.962,13 sehingga hak Pemerintah Kota Bima yang menambah ekuitas mengalami peningkatan senilai Rp1.701.611.222,81 atau 8,83% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.5
Laporan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pajak Daerah - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan/ Penurunan | (%) |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Pajak Hotel | 415.716.422,00 | 200.404.363,50 | 215.312.058,50 | 107,44 |
| 2 | Pajak Restoran | 1.269.300.346,20 | 1.329.504.079,71 | (60.203.733,51) | (4,53) |
| 3 | Pajak Hiburan | 19.426.900,00 | 24.028.240,00 | (4.601.340,00) | (19,15) |
| 4 | Pajak Reklame | 567.828.129,81 | 206.091.077,25 | 361.737.052,56 | 175,52 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 8.463.177.492,00 | 8.339.326.068,00 | 123.851.424,00 | 1,49 |
| 6 | Pajak Parkir | 113.586.000,00 | 93.016.750,00 | 20.569.250,00 | 22,11 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 45.769.896,18 | 41.060.428,42 | 4.709.467,76 | 11,47 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 11.500.000,00 | 26.500.000,00 | (15.000.000,00) | (56,60) |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 207.879.473,75 | 361.976.516,25 | (154.097.042,50) | (42,57) |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 5.199.104.615,00 | 4.865.632.514,00 | 333.472.101,00 | 6,85 |
| 11 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 4.650.929.910,00 | 3.775.067.925,00 | 875.861.985,00 | 23,20 |
| Jumlah | | 20.964.219.184,94 | 19.262.607.962,13 | 1.701.611.222,81 | 8,83 |

Secara rinci Pendapatan Pajak – LO Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Laporan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pajak Daerah - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Pajak Hotel | | | | | |
| 1 | Hotel - LO | 378.204.977,00 | 169.213.113,50 | 208.991.863,50 | 123,51 |
| 2 | Losmen - LO | 29.427.975,00 | 18.261.250,00 | 11.166.725,00 | 61,15 |
| 3 | Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO | 8.083.470,00 | 12.930.000,00 | (4.846.530,00) | (37,48) |
| Jumlah | | 415.716.422,00 | 200.404.363,50 | 215.312.058,50 | 107,44 |
| Pajak Restoran | | | | | |
| 1 | Restoran- LO | 583.270.529,00 | 617.660.894,90 | (34.390.365,90) | (5,57) |
| 2 | Rumah makan- LO | 165.634.014,00 | 166.010.500,50 | (376.486,50) | (0,23) |
| 3 | Kafetaria- LO | 90.469.676,20 | 67.350.913,60 | 23.118.762,60 | 34,33 |
| 4 | Kantin- LO | 8.741.706,00 | 8.633.381,55 | 108.324,45 | 1,25 |
| 5 | Warung- LO | 177.019.248,00 | 218.671.058,65 | (41.651.810,65) | (19,05) |
| 6 | Jasa boga/katering- LO | 244.165.173,00 | 251.177.330,51 | (7.012.157,51) | (2,79) |
| Jumlah | | 1.269.300.346,20 | 1.329.504.079,71 | (60.203.733,51) | (4,53) |
| Pajak Hiburan | | | | | |
| 1 | Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya- LO | 5.486.800,00 | 8.660.040,00 | (3.173.240,00) | (36,64) |
| 3 | Permainan bilyar, golf, bowling- LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan - LO | 13.940.100,00 | 4.250.000,00 | 9.690.100,00 | 228,00 |

| No. | Pajak Daerah - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 5 | Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitnes center</i>)- LO | 0,00 | 525.000,00 | (525.000,00) | (100,00) |
| 6 | Hiburan anak- LO | 0,00 | 10.593.200,00 | (10.593.200,00) | (100,00) |
| | Jumlah | 19.426.900,00 | 24.028.240,00 | (4.601.340,00) | (19,15) |
| | Pajak Reklame | | | | |
| 1 | Reklame papan/bill board/videotron/megatron- LO | 418.616.119,39 | 108.071.414,75 | 310.544.704,64 | 287,35 |
| 2 | Reklame kain- LO | 143.312.250,00 | 23.807.750,00 | 119.504.500,00 | 501,96 |
| 3 | Reklame berjalan- LO | 5.899.760,42 | 74.211.912,50 | (68.312.152,08) | (92,05) |
| | Jumlah | 567.828.129,81 | 206.091.077,25 | 361.737.052,56 | 175,52 |
| | Pajak Penerangan Jalan | | | | |
| 1 | Pajak Penerangan Jalan PLN- LO | 8.463.177.492,00 | 8.339.326.068,00 | 123.851.424,00 | 1,49 |
| | Jumlah | 8.463.177.492,00 | 8.339.326.068,00 | 123.851.424,00 | 1,49 |
| | Pajak Parkir | | | | |
| 1 | Pajak Parkir - LO | 113.586.000,00 | 93.016.750,00 | 20.569.250,00 | 22,11 |
| | Jumlah | 113.586.000,00 | 93.016.750,00 | 20.569.250,00 | 22,11 |
| | Pajak Air Tanah | | | | |
| 1 | Pajak Air Tanah - LO | 45.769.896,18 | 41.060.428,42 | 4.709.467,76 | 11,47 |
| | Jumlah | 45.769.896,18 | 41.060.428,42 | 4.709.467,76 | 11,47 |
| | Pajak Sarang Burung Walet | | | | |
| 1 | Pajak Sarang Burung Walet - LO | 11.500.000,00 | 26.500.000,00 | (15.000.000,00) | (56,60) |
| | Jumlah | 11.500.000,00 | 26.500.000,00 | (15.000.000,00) | (56,60) |
| | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | |
| 1 | Pasir dan kerikil- LO | 86.731.362,50 | 106.697.568,75 | (19.966.206,25) | (18,71) |
| 2 | Tanah liat- LO | 7.503.875,00 | 5.216.000,00 | 2.287.875,00 | 43,86 |
| 3 | Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO | 113.644.236,25 | 250.062.947,50 | (136.418.711,25) | (54,55) |
| | Jumlah | 207.879.473,75 | 361.976.516,25 | (154.097.042,50) | (42,57) |
| | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | |
| 1 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan- LO | 5.199.104.615,00 | 4.865.632.514,00 | 333.472.101,00 | 6,85 |
| | Jumlah | 5.199.104.615,00 | 4.865.632.514,00 | 333.472.101,00 | 6,85 |
| | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | | | | |
| 1 | BPHTB- LO | 4.650.929.910,00 | 3.775.067.925,00 | 875.861.985,00 | 23,20 |
| | Jumlah | 4.650.929.910,00 | 3.775.067.925,00 | 875.861.985,00 | 23,20 |
| | Total Pajak daerah | 20.964.219.184,94 | 19.262.607.962,13 | 1.701.611.222,81 | 8,83 |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.3.1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 15.132.006.221,00 | 11.019.857.776,33 |

Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bima atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp15.132.006.221,00 dan Rp11.019.857.776,33 sehingga hak Pemerintah Kota Bima yang menambah ekuitas mengalami peningkatan senilai Rp4.112.148.444,67 atau 37,32% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.7
Pendapatan Retribusi – LO SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 1 | Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO | 1.256.238.400,00 | 6.359.239.043,00 | (5.103.000.643,00) | (80,25) |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO | 7.984.098.072,00 | 0,00 | 7.984.098.079,00 | 0,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO | 323.439.800,00 | 0,00 | 323.439.800,00 | 0,00 |
| 4 | Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO | 0,00 | 281.565.000,00 | (281.565.000,00) | (100,00) |
| 5 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO | 869.616.000,00 | 0,00 | 869.616.000,00 | 0,00 |
| 6 | Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO | 227.542.000,00 | 203.670.000,00 | 23.872.000,00 | 11,72 |
| 7 | Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO | 78.751.000,00 | 505.599.000,00 | (426.848.000,00) | (84,42) |
| 8 | Retribusi Los-LO | 11.050.000,00 | 0,00 | 11.050.000,00 | 0,00 |
| 9 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO | 24.475.000,00 | 0,00 | 24.475.000,00 | 0,00 |
| 10 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO | 47.225.000,00 | 0,00 | 47.225.000,00 | 0,00 |
| 11 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO | 197.284.000,00 | 0,00 | 197.284.000,00 | 0,00 |
| 12 | Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO | 0,00 | 67.965.000,00 | (67.965.000,00) | (100,00) |
| 13 | Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO | 0,00 | 194.102.000,00 | (194.102.000,00) | (100,00) |
| 14 | Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO | 489.280.000,00 | 985.673.333,33 | (496.393.333,33) | (50,36) |
| 15 | Retribusi Penyewaan Tanah-LO | 62.220.000,00 | 0,00 | 62.220.000,00 | 0,00 |
| 16 | Retribusi Penyewaan Bangunan-LO | 72.000.000,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 0,00 |
| 17 | Retribusi Pemakaian Ruangan-LO | 144.000.000,00 | 0,00 | 144.000.000,00 | 0,00 |
| 18 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO | 243.015.000,00 | 0,00 | 243.015.000,00 | 0,00 |
| 19 | Retribusi Pemakaian Alat-LO | 379.950.000,00 | 0,00 | 379.950.000,00 | 0,00 |
| 20 | Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO | 0,00 | 647.418.109,00 | (647.418.109,00) | (100,00) |
| 21 | Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO | 1.344.891.504,00 | 341.636.631,00 | 1.003.254.873,00 | 293,66 |

| No. | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 22 | Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO | 1.416.000,00 | 7.646.000,00 | (6.230.000,00) | (81,48) |
| 23 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO | 9.934.000,00 | 0,00 | 9.934.000,00 | 0,00 |
| 24 | Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO | 206.356.000,00 | 211.476.000,00 | (5.120.000,00) | (2,42) |
| 25 | Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO | 23.400.000,00 | 19.545.000,00 | 3.855.000,00 | 19,72 |
| 26 | Pelayanan Tempat Rekreasi - LO | 393.395.000,00 | 494.613.000,00 | (101.218.000,00) | (20,46) |
| 27 | Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO | 725.429.438,00 | 676.959.660,00 | 48.469.778,00 | 7,16 |
| 28 | Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO | 0,00 | 22.750.000,00 | (22.750.000,00) | (100,00) |
| 29 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 |
| Total Retribusi Daerah | | 15.132.006.214,00 | 11.019.857.776,33 | 4.112.148.444,67 | 37,32 |

Pendapatan Retribusi - LO senilai Tahun 2021 Rp15.132.006.221,00 dikelola oleh 12 (Dua Belas) SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.8
Pendapatan Retribusi – LO SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 144.000.000,00 | 117.000.000,00 | 27.000.000,00 | 23,08 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 9.390.440.279,00 | 6.277.505.093,00 | 3.112.935.186,00 | 49,59 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.025.954.438,00 | 822.439.660,00 | 203.514.778,00 | 24,75 |
| 4 | Dinas Perhubungan | 297.965.000,00 | 306.076.000,00 | (8.111.000,00) | (2,65) |
| 5 | Dinas Lingkungan Hidup | 291.095.000,00 | 275.565.000,00 | 15.530.000,00 | 5,64 |
| 6 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 2.042.571.504,00 | 1.526.019.740,00 | 516.551.764,00 | 33,85 |
| 7 | Dinas Pariwisata | 574.745.000,00 | 690.478.000,00 | (115.733.000,00) | (16,76) |
| 8 | Bagian Umum | 361.970.000,00 | 176.250.000,00 | 185.720.000,00 | 105,37 |
| 9 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 392.195.000,00 | 359.485.000,00 | 32.710.000,00 | 9,10 |
| 10 | Dinas Pertanian | 207.786.000,00 | 111.103.950,00 | 96.682.050,00 | 87,02 |
| 11 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 206.000.000,00 | 163.833.333,33 | 42.166.666,67 | 25,74 |
| 12 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 197.284.000,00 | 194.102.000,00 | 3.182.000,00 | 1,64 |
| JUMLAH | | 15.132.006.221,00 | 11.019.857.776,33 | 4.112.148.444,67 | 37,32 |

| 5.3.1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 1.284.388.411,79 | 1.579.915.958,62 |

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 bersumber dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bima pada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Bank NTB, PD BPR NTB, PT Jamkrida NTB Bersaing dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kasabua Ade senilai Rp1.284.388.411,79 dan pada tahun 2020 senilai Rp1.579.915.958,62 terjadi penurunan senilai Rp295.527.546,83 atau 18,71% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan – LO Tahun 2021 dan 2020

| No. | Nama Perusahaan | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------|
| 1 | PT. Bank NTB | 1.069.057.966,00 | 1.403.055.467,00 | (333.997.501,00) | (23,81) |
| 2 | PD. BPR NTB | 180.014.359,00 | 150.769.525,00 | 29.244.834,00 | 19,40 |
| 3 | PT.Jamkrida NTB Bersaing | 23.932.217,79 | 26.090.966,62 | (2.158.748,83) | (8,27) |
| 4 | KPN Kasabua Ade | 11.383.869,00 | 0,00 | 11.383.869,00 | 0,00 |
| Total | | 1.284.388.411,79 | 1.579.915.958,62 | (295.527.546,83) | (18,71) |

| 5.3.1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 10.907.930.231,82 | 15.795.970.799,68 |

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp10.907.930.231,82 dan 2020 senilai Rp15.795.970.799,68 sehingga mengalami penurunan senilai Rp4.888.040.567,86 atau 30,94% terdiri dari :

Tabel 5.3.10
Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------|
| 1 | Hasil penjualan peralatan/mesin - LO | 0,00 | 828.517.300,00 | (828.517.300,00) | (100,00) |
| 2 | Hasil penjualan gedung dan bangunan - LO | 0,00 | 40.235.000,00 | (40.235.000,00) | (100,00) |
| 3 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO | 21.434.000,00 | 0,00 | 21.434.000,00 | 0,00 |
| 4 | Jasa giro kas daerah - LO | 660.328.488,75 | 1.276.917.376,43 | (616.588.887,68) | (48,29) |
| 5 | Jasa giro kas bendahara - LO | 27.989.273,02 | 62.439.849,15 | (34.450.576,13) | (55,17) |
| 6 | Pendapatan bunga deposito - LO | 1.737.013.060,61 | 4.476.325.686,58 | (2.739.312.625,97) | (61,20) |
| 7 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO | 692.390.785,02 | 0,00 | 692.390.785,02 | 0,00 |
| 8 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO | 68.896.386,00 | 0,00 | 68.896.386,00 | 0,00 |

| No. | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 9 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 27.868.961,50 | 31.663.338,00 | (3.794.376,50) | (11,98) |
| 10 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO | 0,00 | 27.516.520,00 | (27.516.520,00) | (100,00) |
| 11 | Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan - LO | 279.305,92 | 2.002.954,00 | (1.723.648,08) | (86,06) |
| 12 | Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan - LO | 55.126.218,00 | 24.139.734,00 | 30.986.484,00 | 128,36 |
| 13 | Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas - LO | 43.752.600,00 | 201.935.017,00 | (158.182.417,00) | (78,33) |
| 14 | Pendapatan Dari Pengembalian Uang Saku /Transport Peserta Rapat Koordinasi/Rapat - LO | 0,00 | 850.000,00 | (850.000,00) | (100,00) |
| 15 | Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Terhadap Pihak Ketiga - LO | 0,00 | 235.775.335,00 | (235.775.335,00) | (100,00) |
| 16 | Pendapatan dari pengembalian kelebihan SP2D - LO | 0,00 | 4.000.000,00 | (4.000.000,00) | (100,00) |
| 17 | Pendapatan dari Pengembalian Denda Keterlambatan - LO | 0,00 | 343.220.790,57 | (343.220.790,57) | (100,00) |
| 18 | Pendapatan dari Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan - LO | 0,00 | 121.793.432,95 | (121.793.432,95) | (100,00) |
| 19 | Pendapatan Dari Pengembalian Sewa Ruang Rapat Pertemuan - LO | 0,00 | 1.500.000,00 | (1.500.000,00) | (100,00) |
| 20 | Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Jasa Konsultansi - LO | 0,00 | 15.000.000,00 | (15.000.000,00) | (100,00) |
| 21 | Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Honorarium PNS - LO | 0,00 | 101.723.350,00 | (101.723.350,00) | (100,00) |
| 22 | Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO | 0,00 | 2.600.000,00 | (2.600.000,00) | (100,00) |
| 23 | Lain-lain PAD yang sah lainnya - LO | 0,00 | 123.778,00 | (123.778,00) | (100,00) |
| 24 | Penerimaan Honor Tim CMS | 0,00 | 49.200.000,00 | (49.200.000,00) | (100,00) |
| 25 | Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LO | 0,00 | 75.500,00 | (75.500,00) | (100,00) |
| 26 | Pendapatan dana kapitasi JKN - LO | 7.572.851.153,00 | 7.948.415.838,00 | (375.564.685,00) | (4,73) |
| Total | | 10.907.930.231,82 | 15.795.970.799,68 | (4.888.040.567,86) | (30,94) |

5.3.1.2 Pendapatan Transfer – LO **2021 (Rp)** **2020 (Rp)**
653.962.430.727,00 **649.298.955.916,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bima adalah Pendapatan tahun 2021 senilai Rp653.962.430.727,00 dan 2020 Rp649.298.955.916,00 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp4.663.474.811,00 atau 0,72% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.11

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan/(Penurunan) | (%) |
|----|-----------------------------------------------------|------|------|----------------------|-----|
| 1 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 2 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |

| No | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan/(Penurunan) | (%) |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 3 | Dana Bagi Hasil Pajak | 12.307.792.000,00 | 13.846.101.420,00 | (1.538.309.420,00) | (11,11) |
| 4 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 12.681.145.000,00 | 13.404.689.170,00 | (723.544.170,00) | (5,40) |
| 5 | Dana Alokasi Umum | 432.159.814.000,00 | 439.644.557.000,00 | (7.484.743.000,00) | (1,70) |
| 6 | Dana Alokasi Khusus | 124.506.343.870,00 | 121.110.004.144,00 | 3.396.339.726,00 | 2,80 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (3 s/d 6) | 581.655.094.870,00 | 588.005.351.734,00 | (6.350.256.864,00) | (1,08) |
| 8 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| 9 | Dana Penyesuaian | 30.025.143.000,00 | 19.485.769.000,00 | 10.539.374.000,00 | 54,09 |
| 10 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (9) | 30.025.143.000,00 | 19.485.769.000,00 | 10.539.374.000,00 | 54,09 |
| 11 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | | |
| 12 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 42.282.192.857,00 | 41.807.835.182,00 | 474.357.675,00 | 1,13 |
| 13 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Povinsi (12) | 42.282.192.857,00 | 41.807.835.182,00 | 474.357.675,00 | 1,13 |
| 14 | Total Pendapatan Transfer (7+10+13) | 653.962.430.727,00 | 649.298.955.916,00 | 4.663.474.811,00 | 0,72 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.3.1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 581.655.094.870,00 | 588.005.351.734,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2021 senilai Rp581.655.094.870,00 dan 2020 senilai Rp588.005.351.734,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp6.350.256.864,00 atau 1,08%.

Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Bagi Hasil Pajak | | | | |
| | Pajak Bumi dan Bangunan | 3.620.315.000,00 | 2.926.367.847,00 | 693.947.153,00 | 23,71 |
| | Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 | 6.377.993.000,00 | 8.547.896.719,00 | (2.169.903.719,00) | (25,39) |
| | Cukai Hasil Tembakau | 2.309.484.000,00 | 2.371.836.854,00 | (62.352.854,00) | (2,63) |
| | Jumlah | 12.307.792.000,00 | 13.846.101.420,00 | (1.538.309.420,00) | (11,11) |
| 2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | | | | |
| | Provisi Sumber Daya Hutan | 23.016.000,00 | 85.796.720,00 | (62.780.720,00) | (73,17) |
| | Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) | 11.529.810.000,00 | 12.304.993.300,00 | (775.183.300,00) | (6,30) |
| | Pungutan Hasil Perikanan | 1.128.319.000,00 | 1.013.899.150,00 | 114.419.850,00 | 11,29 |
| | Jumlah | 12.681.145.000,00 | 13.404.689.170,00 | (723.544.170,00) | (5,40) |
| 3 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 432.159.814.000,00 | 439.644.557.000,00 | (7.484.743.000,00) | (1,70) |
| 4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | | | | |

| No. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | DAK Bidang Infrastruktur Jalan | 5.885.011.914,00 | 2.624.134.000,00 | 3.260.877.914,00 | 124,26 |
| | DAK Bidang Infrastruktur Air Minum | 4.030.742.000,00 | 0,00 | 4.030.742.000,00 | 0,00 |
| | DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi | 1.844.456.000,00 | 2.350.667.000,00 | (506.211.000,00) | (21,53) |
| | DAK Bidang Irigasi-Penugasan | 1.115.590.000,00 | 0,00 | 1.115.590.000,00 | 0,00 |
| | DAK Bidang Keluarga Berencana | 21.061.946.020,00 | 0,00 | 21.061.946.020,00 | 0,00 |
| | DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 3.150.595.000,00 | 3.529.562.000,00 | (378.967.000,00) | (10,74) |
| | DAK Bidang Kesehatan | 2.987.853.683,00 | 32.671.252.448,00 | (29.683.398.765,00) | (90,85) |
| | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan | 1.361.623.728,00 | 0,00 | 1.361.623.728,00 | 0,00 |
| | DAK Bidang Pendidikan | 26.882.745.323,00 | 12.668.368.723,00 | 14.214.376.600,00 | 112,20 |
| | DAK Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DAK Bidang Penugasan | 0,00 | 9.643.197.674,00 | (9.643.197.674,00) | (100,00) |
| | DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD | 3.703.500.000,00 | 3.396.400.000,00 | 307.100.000,00 | 9,04 |
| | DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 42.213.111.000,00 | 39.361.215.000,00 | 2.851.896.000,00 | 7,25 |
| | DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD | 432.000.000,00 | 540.750.000,00 | (108.750.000,00) | (20,11) |
| | DAK Non Fisik Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM | 361.347.600,00 | 408.962.193,00 | (47.614.593,00) | (11,64) |
| | DAK Non Fisik Proyek Bantuan Operasional Kesehatan | 5.073.270.071,00 | 8.837.846.500,00 | (3.764.576.429,00) | (42,60) |
| | DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas | 0,00 | 357.905.000,00 | (357.905.000,00) | (100,00) |
| | DAK Non Fisik Jaminan Persalinan | 0,00 | 791.457.000,00 | (791.457.000,00) | (100,00) |
| | DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 1.264.393.269,00 | 1.368.704.630,00 | (104.311.361,00) | (7,62) |
| | DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO | 892.665.262,00 | 642.287.876,00 | 250.377.386,00 | 38,98 |
| | DAK Akreditasi Labkesda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata | 0,00 | 331.015.600,00 | (331.015.600,00) | (100,00) |
| | DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | 923.200.000,00 | 1.428.950.000,00 | (505.750.000,00) | (35,39) |
| | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO | 343.813.000,00 | 0,00 | 343.813.000,00 | 0,00 |
| | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO | 417.230.000,00 | 0,00 | 417.230.000,00 | 0,00 |
| | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO | 561.250.000,00 | 0,00 | 561.250.000,00 | 0,00 |
| | DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan - LO | 0,00 | 157.328.500,00 | (157.328.500,00) | (100,00) |
| | Jumlah | 124.506.343.870,00 | 121.110.004.144,00 | 3.396.339.726,00 | 2,80 |
| | Total | 581.655.094.870,00 | 588.005.351.734,00 | (6.350.256.864,00) | (1,08) |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.3.1.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 30.025.143.000,00 | 19.485.769.000,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2021 senilai Rp30.025.143.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah dan tahun 2020 senilai Rp19.485.769.000,00, sehingga mengalami peningkatan senilai Rp10.539.374.000,00 atau 54,09%.

| | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.3.1.2.3 | Pendapatan Transfer | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | Pemerintah Daerah Lainnya | 42.282.192.857,00 | 41.807.835.182,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 senilai Rp42.282.192.857,00 dan 2020 senilai Rp41.807.835.182,00, sehingga mengalami peningkatan senilai Rp474.357.675,00 atau 1,13 % merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi NTB dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.13
Pendapatan DBH Provinsi – LO Tahun 2021 dan 2020

| No. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| A | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | | | |
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 7.120.769.264,00 | 7.159.533.177,00 | (38.763.913,00) | (0,54) |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 5.604.703.473,00 | 5.471.588.246,00 | 133.115.227,00 | 2,43 |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 13.004.005.655,00 | 11.924.829.104,00 | 1.079.176.551,00 | 9,05 |
| 4 | Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 37.553.501,00 | 30.742.109,00 | 6.811.392,00 | 22,16 |
| 5 | Pajak Rokok | 16.515.160.964,00 | 17.221.142.546,00 | (705.981.582,00) | (4,10) |
| | Total A | 42.282.192.857,00 | 41.807.835.182,00 | 474.357.675,00 | 1,13 |
| B | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | Olah Sampah Tuntas (Osamtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penerangan Jalan Umum (PJU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pembangunan Infrastruktur Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total A + B | 42.282.192.857,00 | 41.807.835.182,00 | 474.357.675,00 | 1,13 |

| | | | |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.3.1.3 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 26.038.337.364,00 | 27.097.078.862,26 |

Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Pemerintah Kota Bima bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Bantuan dari Provinsi pada tahun 2021 senilai Rp26.038.337.364,00 dan 2020 senilai Rp27.097.078.862,26 sehingga mengalami penurunan senilai Rp1.058.741.498,26 atau 3,91%.

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2021 dan 2020 terdiri dari:

Tabel 5.3.14
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 2021 dan 2020

| No. | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Pendapatan hibah | 8.106.996.664,00 | 27.097.078.862,26 | (18.990.082.198,26) | (70,08) |
| 2 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 17.931.340.700,00 | 0,00 | 17.931.340.700,00 | 0,00 |
| Total | | 26.038.337.364,00 | 27.097.078.862,26 | (1.058.741.498,26) | (3,91) |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5.3.1.3.1 Pendapatan Hibah | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | 8.106.996.664,00 | 27.097.078.862,26 |

Pendapatan Hibah Pemerintah Kota Bima bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tahun 2021 senilai Rp8.106.996.664,00 dan tahun 2020 senilai Rp27.097.078.862,26 sehingga mengalami penurunan senilai Rp18.990.082.198,26 atau 70,08% .

Rincian Pendapatan Hibah tahun 2021 terdiri dari.

Tabel 5.3.15
Pendapatan Hibah Tahun 2021

| No. | SKPD | Keterangan | Nilai |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Bantuan dari Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan | 220.000.000,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Hibah Obat dari Pemerintah Provinsi | 350.500.504,00 |
| 3 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | Hibah Obat dari Pemerintah Provinsi | 686.552.160,00 |
| 4 | Sekretariat Daerah | Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten Bima | 6.664.944.000,00 |
| 5 | Kecamatan Rasanae Barat | Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten Bima | 185.000.000,00 |
| Jumlah | | | 8.106.996.664,00 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 5.3.1.3.2 Pendapatan Lainnya | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | 17.931.340.700,00 | 0,00 |

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO adalah sebesar Rp 17.931.340.700,00 yang merupakan Pendapatan Dana Bos sebesar Rp17.911.340.000,00 dan Pendapatan atas pengembalian Hibah PKK tahun 2020 sebesar Rp20.000.700,00

| | | | |
|--------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.3.2 | Beban – LO | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 715.944.812.721,61 | 713.715.431.647,02 |

Beban LO merupakan beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Pada tahun 2021 Beban – LO Pemerintah Kota Bima senilai Rp715.944.812.721,61 dan 2020 senilai Rp713.715.431.647,02. Jika dibanding

tahun 2020 beban tahun 2021 mengalami peningkatan senilai Rp2.229.381.074,59 atau 0,31%.

Adapun Beban-LO masing-masing SKPD tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.16
Laporan Beban SKPD Tahun 2021 dan 2020

| No. | SKPD | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 177.370.109.325,33 | 183.482.882.387,00 | (6.112.773.061,67) | (3,33) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 106.886.272.103,50 | 76.376.592.211,13 | 30.509.679.892,37 | 39,95 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 93.592.333.453,77 | 90.451.126.945,35 | 3.141.206.508,42 | 3,47 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 8.704.864.151,00 | 8.998.370.821,00 | (293.506.670,00) | (3,26) |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 8.384.129.605,90 | 11.496.420.748,00 | (3.112.291.142,10) | (27,07) |
| 6 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 7.919.297.548,91 | 0,00 | 7.919.297.548,91 | 0,00 |
| 7 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 4.633.144.780,00 | 5.543.294.486,00 | (910.149.706,00) | (16,42) |
| 8 | Dinas Sosial | 5.043.390.137,00 | 4.487.854.691,38 | 555.535.445,62 | 12,38 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | 4.983.727.173,00 | 3.056.313.283,31 | 1.927.413.889,69 | 63,06 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5.657.673.630,85 | 3.390.501.724,68 | 2.267.171.906,17 | 66,87 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 3.930.672.912,99 | 3.555.905.708,00 | 374.767.204,99 | 10,54 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 16.800.931.630,67 | 16.768.255.667,12 | 32.675.963,55 | 0,19 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.968.067.095,00 | 4.803.249.723,12 | 164.817.371,88 | 3,43 |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6.502.019.186,00 | 6.193.459.105,00 | 308.560.081,00 | 4,98 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 15.508.030.023,40 | 6.263.440.097,31 | 9.244.589.926,09 | 147,60 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 9.853.147.220,12 | 9.687.223.072,93 | 165.924.147,19 | 1,71 |
| 17 | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan | 10.401.536.702,28 | 8.712.004.989,19 | 1.689.531.713,09 | 19,39 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.651.518.391,20 | 3.577.674.590,49 | 73.843.800,71 | 2,06 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 4.175.728.890,31 | 3.461.851.534,99 | 713.877.355,32 | 20,62 |
| 20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6.925.962.494,33 | 7.816.902.814,06 | (890.940.319,73) | (11,40) |
| 21 | Dinas Pariwisata | 8.533.063.411,56 | 6.783.847.601,00 | 1.749.215.810,56 | 25,79 |
| 22 | Dinas Pertanian | 16.801.204.416,83 | 16.835.475.428,67 | (34.271.011,84) | (0,20) |
| 23 | Sekretariat Daerah | 45.858.396.122,34 | 51.593.753.510,96 | (5.735.357.388,62) | (11,12) |
| 24 | Sekretariat DPRD | 26.180.641.752,00 | 16.790.691.719,00 | 9.389.950.033,00 | 55,92 |
| 25 | Kec. Rasanae Barat | 9.503.581.200,96 | 7.981.589.044,31 | 1.521.992.156,65 | 19,07 |
| 26 | Kec. Rasanae Timur | 11.336.684.014,00 | 9.314.288.428,54 | 2.022.395.585,46 | 21,71 |
| 27 | Kec. Asakota | 10.807.966.195,00 | 7.858.326.978,00 | 2.949.639.217,00 | 37,54 |
| 28 | Kec. Mpunda | 15.112.610.115,00 | 12.342.204.550,53 | 2.770.405.564,47 | 22,45 |
| 29 | Kec. Raba | 17.825.779.419,00 | 15.106.810.996,93 | 2.718.968.422,07 | 18,00 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 10.042.859.545,00 | 9.494.856.114,82 | 548.003.430,18 | 5,77 |
| 31 | Inspektorat | 7.437.958.314,00 | 8.132.188.661,54 | (694.230.347,54) | (8,54) |
| 32 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 5.840.269.860,00 | 7.679.722.322,00 | (1.839.452.462,00) | (23,95) |
| 33 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 18.447.714.845,36 | 80.547.277.977,19 | (62.099.563.131,83) | (77,10) |
| 34 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 6.323.527.055,00 | 5.131.073.713,47 | 1.192.453.341,53 | 23,24 |
| JUMLAH | | 715.944.812.721,61 | 713.715.431.647,02 | 2.229.381.074,59 | 0,31 |

Penjelasan Beban – LO adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.17
Beban - LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No. | Beban | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Beban Pegawai | 355.177.717.132,55 | 362.957.107.840,29 | (7.779.390.707,74) | (2,14) |
| 2 | Beban Barang dan Jasa | 191.518.612.942,45 | 143.878.432.847,41 | 47.640.180.095,04 | 33,11 |
| 3 | Beban Hibah | 28.319.224.111,60 | 28.821.813.531,00 | (502.589.419,40) | (1,74) |
| 4 | Beban Bantuan Sosial | 3.526.290.000,00 | 58.783.286.115,06 | (55.256.996.115,06) | (94,00) |
| 5 | Beban Penyisihan Piutang | 1.844.994.095,22 | 1.753.844.418,85 | 91.149.676,37 | 5,20 |
| 6 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 133.023.923.689,79 | 117.520.946.894,41 | 15.502.976.795,38 | 13,19 |
| 7 | Beban Tak Terduga | 2.534.050.750,00 | 0,00 | 2.534.050.750,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 715.944.812.721,61 | 713.715.431.647,02 | 2.229.381.074,59 | 0,31 |

| | | | |
|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.3.2.1 | Beban Operasi | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 580.386.838.281,82 | 596.194.484.752,61 |

Beban Operasi tahun 2021 adalah senilai Rp580.386.838.281,82 dan tahun 2020 senilai Rp596.194.484.752,61 sehingga mengalami penurunan senilai Rp15.807.646.470,79 atau 2,65% dibandingkan tahun 2020.

Adapun rincian Beban operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.18
Beban - LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No. | Beban Operasi | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Beban Pegawai | 355.177.717.132,55 | 362.957.107.840,29 | (7.779.390.707,74) | (2,14) |
| 2 | Beban Barang dan Jasa | 191.518.612.942,45 | 143.878.432.847,41 | 47.640.180.095,04 | 33,11 |
| 3 | Beban Hibah | 28.319.224.111,60 | 28.821.813.531,00 | (502.589.419,40) | (1,74) |
| 4 | Beban Bantuan Sosial | 3.526.290.000,00 | 58.783.286.115,06 | (55.256.996.115,06) | (94,00) |
| 5 | Beban Penyisihan Piutang | 1.844.994.095,22 | 1.753.844.418,85 | 91.149.676,37 | 5,20 |
| JUMLAH | | 580.386.838.281,82 | 596.194.484.752,61 | (15.807.646.470,79) | (2,65) |

| | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.3.2.1.1 | Beban Pegawai – LO | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 355.177.717.132,55 | 362.957.107.840,29 |

Beban Pegawai - LO tahun 2021 adalah senilai Rp355.177.717.132,55 dan tahun 2020 senilai Rp362.957.107.840,29 sehingga mengalami penurunan senilai Rp7.779.390.707,74 atau 2,14% dibandingkan tahun 2020.

Adapun Beban Pegawai – LO tahun 2021 dan 2020 beserta kenaikan/penurunannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.3.19
Beban Pegawai – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No. | Beban Pegawai - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|
| 1 | Gaji Pokok ASN | 180.528.835.210,00 | 182.808.237.982,00 | (2.279.402.772,00) | (1,25) |
| 2 | Tunjangan Keluarga - LO | 15.508.463.792,00 | 15.760.940.015,60 | (252.476.223,60) | (1,60) |
| 3 | Tunjangan Jabatan - LO | 7.317.750.026,00 | 8.087.129.000,00 | (769.378.974,00) | (9,51) |
| 4 | Tunjangan Fungsional - LO | 9.911.758.000,00 | 10.370.129.400,00 | (458.371.400,00) | (4,42) |
| 5 | Tunjangan Fungsional Umum - LO | 2.934.555.000,00 | 2.655.294.982,00 | 279.260.018,00 | 10,52 |
| 6 | Tunjangan Beras - LO | 10.054.501.131,00 | 8.737.111.586,00 | 1.317.389.545,00 | 15,08 |
| 7 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO | 604.586.776,00 | 690.441.482,00 | (85.854.706,00) | (12,43) |
| 8 | Pembulatan Gaji - LO | 2.549.779,00 | 2.440.394,00 | 109.385,00 | 4,48 |
| 9 | Iuran Jaminan Kesehatan ASN - LO | 7.403.926.005,00 | 7.624.898.382,00 | (220.972.377,00) | (2,90) |
| 10 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 369.796.478,00 | 0,00 | 369.796.478,00 | 0,00 |
| 11 | Beban Iuran Jaminan Kematian ASN | 1.110.712.661,00 | 0,00 | 1.110.712.661,00 | 0,00 |
| 12 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 16.411.358.908,00 | 0,00 | 16.411.358.908,00 | 0,00 |
| 13 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 6.227.567.775,00 | 0,00 | 6.227.567.775,00 | 0,00 |
| 14 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 115.813.161,00 | 0,00 | 115.813.161,00 | 0,00 |
| 15 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 26.297.140.725,00 | 0,00 | 26.297.140.725,00 | 0,00 |
| 16 | Uang Paket - LO | 48.132.000,00 | 48.132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Beban Uang Representasi DPRD | 561.540.000,00 | 0,00 | 561.540.000,00 | 0,00 |
| 18 | Beban Tunjangan Keluarga DPRD | 53.350.500,00 | 0,00 | 53.350.500,00 | 0,00 |
| 19 | Beban Tunjangan Beras DPRD | 77.897.550,00 | 0,00 | 77.897.550,00 | 0,00 |
| 20 | Beban Tunjangan Jabatan DPRD | 814.233.000,00 | 0,00 | 814.233.000,00 | 0,00 |
| 21 | Tunjangan Badan Musyawarah – LO | | 16.260.300,00 | (16.260.300,00) | (100,00) |
| 22 | Tunjangan Komisi - LO | 0,00 | 32.337.900,00 | (32.337.900,00) | (100,00) |
| 23 | Tunjangan Badan Anggaran - LO | 0,00 | 16.260.300,00 | (16.260.300,00) | (100,00) |
| 24 | Tunjangan Badan Kehormatan - LO | 0,00 | 5.663.700,00 | (5.663.700,00) | (100,00) |
| 25 | Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 64.858.500,00 | 0,00 | 64.858.500,00 | 0,00 |
| 26 | Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 19.000.800,00 | 1.020.075,00 | 17.980.725,00 | 1.762,69 |

| No. | Beban Pegawai - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|
| | DPRD | | | | |
| 27 | Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.890.000.000,00 | 0,00 | 1.890.000.000,00 | 0,00 |
| 28 | Tunjangan Perumahan - LO | 0,00 | 3.024.000.000,00 | (3.024.000.000,00) | (100,00) |
| 29 | Beban Uang Jasa Pengabdian - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO | 100.800.000,00 | 100.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Tunjangan Badan Legislatif | 0,00 | 11.312.175,00 | (11.312.175,00) | (100,00) |
| 32 | Beban Tunjangan Reses | 472.500.000,00 | 466.200.000,00 | 6.300.000,00 | 1,35 |
| 33 | Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan | 248.794,00 | 0,00 | 248.794,00 | 0,00 |
| 34 | Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 3.161.100.672,00 | 0,00 | 3.161.100.672,00 | 0,00 |
| 35 | Beban Tunjangan Transportasi | 2.772.000.000,00 | 2.772.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Beban Jaminan Kecelakaan Kerja | 0,00 | 375.965.419,00 | (375.965.419,00) | (100,00) |
| 37 | Beban Jaminan Kematian | 0,00 | 1.127.898.257,40 | (1.127.898.257,40) | (100,00) |
| 38 | Tunjangan Profesi Guru PNSD | 37.745.244.340,00 | 42.091.850.160,00 | (4.346.605.820,00) | (10,33) |
| 39 | Tambahan Penghasilan Guru PNSD | 704.250.000,00 | 616.500.000,00 | 87.750.000,00 | 14,23 |
| 40 | Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 13.484.739.135,00 | 0,00 | 13.484.739.135,00 | 0,00 |
| 41 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kerja- LO | 0,00 | 265.206.250,00 | (265.206.250,00) | (100,00) |
| 42 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO | 0,00 | 39.808.000,00 | (39.808.000,00) | (100,00) |
| 43 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Pen. Kesejahteraan Umum Peg) | 0,00 | 16.375.873.750,00 | (16.375.873.750,00) | (100,00) |
| 44 | Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO | 0,00 | 1.890.000.000,00 | (1.890.000.000,00) | (100,00) |
| 45 | Beban Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.639.000,00 | 0,00 | 54.639.000,00 | 0,00 |
| 46 | Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 7.140.000,00 | 0,00 | 7.140.000,00 | 0,00 |
| 47 | Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 98.280.000,00 | 0,00 | 98.280.000,00 | 0,00 |
| 48 | Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH | 7.097.160,00 | 0,00 | 7.097.160,00 | 0,00 |
| 49 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 1.571.150,00 | 0,00 | 1.571.150,00 | 0,00 |

| No. | Beban Pegawai - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 50 | Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 51 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH | 5.486.400,00 | 0,00 | 5.486.400,00 | 0,00 |
| 52 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 112.320,00 | 0,00 | 112.320,00 | 0,00 |
| 53 | Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 336.960,00 | 0,00 | 336.960,00 | 0,00 |
| 54 | Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO | 399.999.600,00 | 399.999.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 525.348.284,55 | 499.999.999,64 | 25.348.284,91 | 5,07 |
| 56 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO | 0,00 | 99.714.733,65 | (99.714.733,65) | (100,00) |
| 57 | Uang Lembur PNS - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Uang Lembur Non PNS - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Honorarium | 7.308.493.500,00 | 53.964.429.997,00 | (46.655.936.497,00) | (86,46) |
| 60 | Beban Uang Saku Peserta PNS | 0,00 | 474.039.000,00 | (474.039.000,00) | (100,00) |
| 61 | Beban Uang Transport Peserta PNS | 0,00 | 502.820.000,00 | (502.820.000,00) | (100,00) |
| 62 | Beban Uang Saku Peserta Non PNS | 0,00 | 471.363.000,00 | (471.363.000,00) | (100,00) |
| 63 | Beban Uang Transport Peserta Non PNS | 0,00 | 531.030.000,00 | (531.030.000,00) | (100,00) |
| 64 | Uang untuk diberikan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 355.177.717.132,55 | 362.957.107.840,29 | (7.779.390.707,74) | (2,14) |

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

2021 (Rp)

191.518.612.942,45

2020 (Rp)

143.878.432.847,41

Beban Persediaan Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp191.518.612.942,45 dan 2020 senilai Rp143.878.432.847,41 sehingga ada peningkatan senilai Rp47.640.180.095,04 atau 33,11% dibandingkan tahun 2020.

Adapun rincian beban barang dan Jasa Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

5.3.2.1.2.1 Beban Persediaan- LO

2021 (Rp)

64.013.838.126,45

2020 (Rp)

47.761.090.655,41

Beban Persediaan Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp64.013.838.126,45 dan 2020 senilai Rp47.761.090.655,41 sehingga ada peningkatan senilai Rp16.252.747.471,04 atau 34,03% dibandingkan tahun 2020.

Rincian Beban Persediaan sesuai rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.20
Beban Persediaan Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No. | Beban Persediaan - LO | 2020 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Bahan Pakai Habis | 64.013.838.126,45 | 16.008.269.325,31 | 48.005.568.801,14 | 299,88 |
| 2 | Bahan/Material | 0,00 | 8.719.700.590,72 | (8.719.700.590,72) | (100,00) |
| 3 | Perawatan Kendaraan Bermotor | 0,00 | 4.986.808.589,00 | (4.986.808.589,00) | (100,00) |
| 4 | Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 5.271.685.184,38 | (5.271.685.184,38) | (100,00) |
| 5 | Makanan dan Minuman | 0,00 | 11.052.235.276,00 | (11.052.235.276,00) | (100,00) |
| 6 | Pakaian Dinas dan Atributnya | 0,00 | 333.800.200,00 | (333.800.200,00) | (100,00) |
| 7 | Pakaian Kerja | 0,00 | 275.365.950,00 | (275.365.950,00) | (100,00) |
| 8 | Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 0,00 | 444.260.540,00 | (444.260.540,00) | (100,00) |
| 9 | Hadiah | 0,00 | 668.965.000,00 | (668.965.000,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 64.013.838.126,45 | 47.761.090.655,41 | 16.252.747.471,04 | 34,03 |

Beban Persediaan – LO sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas sudah termasuk beban persediaan atas Dana bantuan dari Pemerintah Pusat senilai Rp59.195.900,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.3.2.1.2.2 Beban Jasa- LO | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | 81.697.814.521,00 | 63.651.032.348,00 |

Jumlah Beban Jasa - LO Pemerintah Kota Bima pada tahun 2021 senilai Rp81.697.814.521,00 dan 2020 senilai Rp63.651.032.348,00 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp18.046.782.173,00 atau 28,35% dibandingkan tahun 2020.

Rincian Beban Jasa - LO sesuai rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.21
Beban Jasa - LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No. | Beban Jasa - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 1 | Beban Jasa Kantor | | | | |
| | Telepon | 39.883.057,00 | 482.027.381,00 | (442.144.324,00) | (91,73) |
| | Air | 78.991.310,00 | 181.395.664,00 | (102.404.354,00) | (56,45) |
| | Listrik | 6.094.247.432,00 | 2.885.277.003,00 | 3.208.970.429,00 | 111,22 |
| | Surat Kabar/Majalah | 485.704.045,00 | 752.736.843,00 | (267.032.798,00) | (35,47) |
| | Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 2.408.523.227,00 | 2.551.995.206,00 | (143.471.979,00) | (5,62) |
| | Paket/Pengiriman | 26.143.350,00 | 64.538.000,00 | (38.394.650,00) | (59,49) |
| | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 106.214.136,00 | 0,00 | 106.214.136,00 | 0,00 |
| | Sertifikasi | 0,00 | 16.976.730,00 | (16.976.730,00) | (100,00) |
| | Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum | 0,00 | 3.246.090.485,00 | (3.246.090.485,00) | (100,00) |
| | Jasa Non Pegawai | 0,00 | 25.862.189.517,00 | (25.862.189.517,00) | (100,00) |
| | Jasa Penanganan Perkara | 0,00 | 41.750.000,00 | (41.750.000,00) | (100,00) |

| No. | Beban Jasa - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
| | Jasa Perawatan Halaman Kantor | 0,00 | 487.557.996,00 | (487.557.996,00) | (100,00) |
| | Jasa Perawatan AC | 0,00 | 143.360.000,00 | (143.360.000,00) | (100,00) |
| | Jasa Perawatan Komputer | 0,00 | 350.380.001,00 | (350.380.001,00) | (100,00) |
| | Jasa Perawatan Non Komputer/Elektronik/Meubelair | 0,00 | 142.472.500,00 | (142.472.500,00) | (100,00) |
| | Jasa Pengujian Laboratorium | 0,00 | 65.890.000,00 | (65.890.000,00) | (100,00) |
| | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 1.656.111.400,00 | 1.374.214.000,00 | 281.897.400,00 | 20,51 |
| | Pajak Barang Milik Daerah | 0,00 | 1.405.303,00 | (1.405.303,00) | (100,00) |
| | Penggantian Jasa Pelayanan Publik | 0,00 | 17.998.167.300,00 | (17.998.167.300,00) | (100,00) |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.199.004.100,00 | 0,00 | 2.199.004.100,00 | 0,00 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3.525.026.000,00 | 0,00 | 3.525.026.000,00 | 0,00 |
| | Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 |
| | Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 414.350.000,00 | 0,00 | 414.350.000,00 | 0,00 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan | 32.800.000,00 | 0,00 | 32.800.000,00 | 0,00 |
| | Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 67.300.000,00 | 0,00 | 67.300.000,00 | 0,00 |
| | Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 295.295.000,00 | 0,00 | 295.295.000,00 | 0,00 |
| | Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 605.600.000,00 | 0,00 | 605.600.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Pendidikan | 9.424.702.371,00 | 0,00 | 9.424.702.371,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Kesehatan | 8.602.504.346,00 | 0,00 | 8.602.504.346,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 242.666.800,00 | 0,00 | 242.666.800,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2.952.190.000,00 | 0,00 | 2.952.190.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 265.500.000,00 | 0,00 | 265.500.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana | 163.200.000,00 | 0,00 | 163.200.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 6.330.175.000,00 | 0,00 | 6.330.175.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi | 5.106.407.830,00 | 0,00 | 5.106.407.830,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Operator Komputer | 231.300.000,00 | 0,00 | 231.300.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 5.277.763.414,00 | 0,00 | 5.277.763.414,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Ahli | 600.820.000,00 | 0,00 | 600.820.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 4.692.075.000,00 | 0,00 | 4.692.075.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan | 839.658.000,00 | 0,00 | 839.658.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Caraka | 753.000.000,00 | 0,00 | 753.000.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Supir | 354.750.000,00 | 0,00 | 354.750.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 416.600.000,00 | 0,00 | 416.600.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tata Rias | 16.800.000,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 563.581.000,00 | 0,00 | 563.581.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 89.572.500,00 | 0,00 | 89.572.500,00 | 0,00 |

| No. | Beban Jasa - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | Beban Jasa Pelayanan Kearsipan | 269.850.000,00 | 0,00 | 269.850.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | 610.655.000,00 | 0,00 | 610.655.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Kontribusi Asosiasi | 670.000.000,00 | 0,00 | 670.000.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Kalibrasi | 55.543.885,00 | 0,00 | 55.543.885,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Pengolahan Sampah | 281.003.041,00 | 0,00 | 281.003.041,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 3.504.100,00 | 0,00 | 3.504.100,00 | 0,00 |
| | Beban Lembur | 559.339.000,00 | 0,00 | 559.339.000,00 | 0,00 |
| | Beban Medical Check Up | 173.027.500,00 | 0,00 | 173.027.500,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 67.683.481.844,00 | 56.648.423.929,00 | 11.035.057.915,00 | 19,48 |
| 2 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | | | | |
| | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 | 10.061.339.550,00 | 0,00 | 10.061.339.550,00 | 0,00 |
| | Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 | 182.249.200,00 | 0,00 | 182.249.200,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 10.243.588.750,00 | 0,00 | 10.243.588.750,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | | | | |
| | Jasa Service | 0,00 | 1.133.263.872,00 | (1.133.263.872,00) | (100,00) |
| | Pajak Kendaraan Bermotor | 0,00 | 228.989.300,00 | (228.989.300,00) | (100,00) |
| | Surat Tanda Nomor Kendaraan | 0,00 | 55.369.811,00 | (55.369.811,00) | (100,00) |
| | Jumlah | 0,00 | 1.417.622.983,00 | (1.417.622.983,00) | (100,00) |
| 4 | Beban Jasa Konsultansi | | | | |
| | Jasa Konsultansi Penelitian | 0,00 | 29.579.000,00 | (29.579.000,00) | (100,00) |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan | 0,00 | 509.608.000,00 | (509.608.000,00) | (100,00) |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan | 0,00 | 223.061.400,00 | (223.061.400,00) | 0,00 |
| | Jasa Konsultansi Teknik | 0,00 | 465.417.750,00 | (465.417.750,00) | (100,00) |
| | Jasa Konsultansi Manajemen | 0,00 | 900.000,00 | (900.000,00) | 100,00 |
| | Jasa Penilai | 0,00 | 24.860.000,00 | (24.860.000,00) | (100,00) |
| | Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 134.251.625,00 | 0,00 | 134.251.625,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 543.989.582,00 | 0,00 | 543.989.582,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 678.241.207,00 | 1.253.426.150,00 | (575.184.943,00) | (45,89) |
| 5 | Beban Sewa | | | | |
| | Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas | 0,00 | 667.548.200,00 | (667.548.200,00) | (100,00) |
| | Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 8.232.000,00 | 0,00 | 8.232.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 27.064.000,00 | 0,00 | 27.064.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 10.600.000,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 24.600.000,00 | 0,00 | 24.600.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Alat Kantor Lainnya | 3.311.700,00 | 0,00 | 3.311.700,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Alat Pendingin | 3.660.000,00 | 0,00 | 3.660.000,00 | 0,00 |
| | Sewa Gedung/ Kantor/Tempat | 0,00 | 103.950.000,00 | (103.950.000,00) | (100,00) |
| | Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 0,00 | 94.650.000,00 | (94.650.000,00) | (100,00) |
| | Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sewa Kamar Hotel/Penginapan | 0,00 | 230.211.636,00 | (230.211.636,00) | (100,00) |

| No. | Beban Jasa - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| | Sewa Tempat/Lahan Pertanian | 0,00 | 30.000.000,00 | (30.000.000,00) | (100,00) |
| | Sewa Sarana Mobilitas Darat | 0,00 | 114.000.000,00 | (114.000.000,00) | (100,00) |
| | Sewa Sarana Mobilitas Air | 0,00 | 3.500.000,00 | (3.500.000,00) | (100,00) |
| | Sewa Meja Kursi | 1.000.000,00 | 244.302.000,00 | (243.302.000,00) | (99,59) |
| | Beban Sewa Laboratorium Lingkungan | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Peralatan Umum | 399.641.000,00 | 0,00 | 399.641.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Photo and Film Equipment | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Personal Computer | 4.380.000,00 | 0,00 | 4.380.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Komputer Unit Lainnya | 13.200.000,00 | 0,00 | 13.200.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor | 115.900.000,00 | 0,00 | 115.900.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Bangunan Gudang | 185.250.000,00 | 0,00 | 185.250.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Bangunan Kesehatan | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 64.750.000,00 | 0,00 | 64.750.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 15.970.000,00 | 0,00 | 15.970.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Hotel | 74.350.000,00 | 0,00 | 74.350.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 532.041.400,00 | 0,00 | 532.041.400,00 | 0,00 |
| | Sewa Generator | 0,00 | 1.000.000,00 | (1.000.000,00) | (100,00) |
| | Sewa Tenda | 0,00 | 324.425.000,00 | (324.425.000,00) | (100,00) |
| | Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 0,00 | 1.200.000,00 | (1.200.000,00) | (100,00) |
| | Sewa Sound System | 0,00 | 245.900.000,00 | (245.900.000,00) | (100,00) |
| | Sewa Tanaman Hias | 0,00 | 107.150.000,00 | (107.150.000,00) | (100,00) |
| | Sewa Peralatan Praktek | 0,00 | 7.675.000,00 | (7.675.000,00) | 0,00 |
| | Jumlah | 1.614.650.100,00 | 2.175.511.836,00 | (560.861.736,00) | (25,78) |
| 6 | Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | | | | |
| | Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 0,00 | 1.265.754.200,00 | (1.265.754.200,00) | (100,00) |
| | Jumlah | 0,00 | 1.265.754.200,00 | (1.265.754.200,00) | (100,00) |
| 7 | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | | | | |
| | Beasiswa Tugas Belajar S2 | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00 |
| | Beasiswa Tugas Belajar S3 | 115.000.000,00 | 70.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 315.000.000,00 | 170.000.000,00 | 145.000.000,00 | 85,29 |
| 8 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/Non PNS | | | | |
| | Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 104.151.000,00 | 73.145.000,00 | 31.006.000,00 | 42,39 |
| | Sosialisasi | 0,00 | 30.070.000,00 | (30.070.000,00) | (100,00) |
| | Bimbingan Teknis | 386.651.800,00 | 1.340.000,00 | 385.311.800,00 | 28.754,61 |
| | Kontribusi/Kepersertaan | 0,00 | 615.738.250,00 | (615.738.250,00) | (100,00) |
| | Beban Diklat Kepemimpinan | 552.290.000,00 | 0,00 | 552.290.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 1.043.092.800,00 | 720.293.250,00 | 322.799.550,00 | 44,82 |
| 9 | Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak dan Reribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN | | | | |

| No. | Beban Jasa - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 84.669.820,00 | 0,00 | 84.669.820,00 | 0,00 |
| | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 32.390.000,00 | 0,00 | 32.390.000,00 | 0,00 |
| | Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 119.759.820,00 | 0,00 | 119.759.820,00 | 0,00 |
| | Total | 81.697.814.521,00 | 63.651.032.348,00 | 18.046.782.173,00 | 28,35 |

Beban Jasa - LO sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas sudah termasuk beban Jasa dana bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp83.704.100,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5.3.2.1.2.3 | Beban Pemeliharaan– LO | 2021 (Rp) 6.124.095.137,00 | 2020 (Rp) 5.406.376.755,00 |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bima pada tahun 2021 senilai Rp6.124.095.137,00 dan 2020 senilai Rp5.406.376.755,00 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp717.718.382,00 atau 13,28% jika dibandingkan tahun 2020.

Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.22

Beban Pemeliharaan - LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No. | Beban Pemeliharaan - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 1 | Tanah | 196.504.700,00 | 72.700.000,00 | 123.804.700,00 | 170,30 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 3.473.197.668,00 | 867.884.048,00 | 2.605.313.620,00 | 300,19 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 2.157.165.354,00 | 2.268.856.915,00 | (111.691.561,00) | (4,92) |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 196.279.000,00 | 0,00 | 196.279.000,00 | 0,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 100.948.415,00 | 248.109.180,00 | (147.160.765,00) | (59,31) |
| 6 | Alat Ukur | 0,00 | 21.462.000,00 | (21.462.000,00) | 0,00 |
| 7 | Alat Berat | 0,00 | 379.370.403,00 | (379.370.403,00) | (100,00) |
| 8 | Alat Studio dan Komunikasi | 0,00 | 22.671.173,00 | (22.671.173,00) | 0,00 |
| 9 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | 0,00 | 1.500.000,00 | (1.500.000,00) | (100,00) |
| 10 | Alat Persenjataan/Keamanan | 0,00 | 3.600.000,00 | (3.600.000,00) | (100,00) |
| 12 | Instalasi | 0,00 | 40.896.200 | (40.896.200,00) | (100,00) |
| 13 | Bangunan Air | 0,00 | 166.800.000,00 | (166.800.000,00) | 0,00 |
| 14 | Jaringan | 0,00 | 20.000.000,00 | (20.000.000,00) | (100,00) |
| 15 | Taman dan Penerangan Jalan | 0,00 | 837.267.100 | (837.267.100,00) | (100,00) |
| 16 | Sarana dan Prasarana Lalu Lintas | 0,00 | 10.000.000,00 | (10.000.000,00) | (100,00) |

| No. | Beban Pemeliharaan - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 17 | Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan | 0,00 | 261595805,00 | (261.595.805,00) | (100,00) |
| 18 | Kesehatan | 0,00 | 183.663.931 | (183.663.931,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 6.124.095.137,00 | 5.406.376.755,00 | 717.718.382,00 | 13,28 |

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas – LO

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| 34.835.602.058,00 | 27.059.933.089,00 |

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bima untuk tahun 2021 senilai Rp34.835.602.058,00 dan tahun 2020 senilai Rp27.059.933.089,00 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp7.775.668.969,00 atau 28,73% jika dibandingkan tahun 2020.

Adapun rinciannya sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.23
Beban Perjalanan Dinas- LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No. | Beban Perjalanan Dinas - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 17.866.806.640,00 | 22.074.365.059,00 | (4.207.558.419,00) | (19,06) |
| 2 | Beban Perjalanan Dinas Tetap | 1.367.691.623,00 | 4.985.568.030,00 | (3.617.876.407,00) | (72,57) |
| 3 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.853.447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 10.198.784.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 548.871.980,00 | 0,00 | 548.871.980,00 | 0,00 |
| Total | | 34.835.602.058,00 | 27.059.933.089,00 | 7.775.668.969,00 | 28,73 |

5.3.2.1.3 Beban Hibah – LO

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| 28.319.224.111,60 | 28.821.813.531,00 |

Beban Hibah – LO Pemerintah Kota Bima untuk tahun 2021 senilai Rp28.319.224.111,60 dan 2020 senilai Rp28.821.813.531,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp502.589.419,40 atau 1,74% dibandingkan tahun 2020.

Rincian Beban Hibah – LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.24
Beban Hibah - LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021

| No. | Beban Hibah - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|-----------------------------------------------------|------|------------------|----------------------|----------|
| 1 | Beban Hibah kepada Karang Taruna | 0,00 | 5.000.000,00 | (5.000.000,00) | (100,00) |
| 2 | Beban Hibah kepada Masjid dan Mushola | 0,00 | 2.765.000.000,00 | (2.765.000.000,00) | (100,00) |
| 3 | Beban Hibah Kepada Organisasi Wanita (GOW) | 0,00 | 400.000.000,00 | (400.000.000,00) | (100,00) |
| 4 | Beban Hibah Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | 0,00 | 20.000.000,00 | (20.000.000,00) | (100,00) |

| No. | Beban Hibah - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|----------|
| 5 | Beban Hibah Kepada Dharma Wanita | 0,00 | 600.000.000,00 | (600.000.000,00) | (100,00) |
| 6 | Beban Hibah Kepada Pondok Pesantren | 0,00 | 550.000.000,00 | (550.000.000,00) | (100,00) |
| 7 | Belanja Hibah kepada IBI Kota Bima | 0,00 | 25.000.000,00 | (25.000.000,00) | (100,00) |
| 8 | Beban Hibah Kepada Organisasi Profesi Lainnya | 0,00 | 5.000.000,00 | (5.000.000,00) | (100,00) |
| 9 | Beban Hibah Kepada Anggota Legium Veteran | 0,00 | 50.000.000,00 | (50.000.000,00) | (100,00) |
| 10 | Beban Hibah Kepada Badan Kontak Majelis Ta'alim Kota Bima | 0,00 | 50.000.000,00 | (50.000.000,00) | (100,00) |
| 11 | Beban Hibah Kepada Foreign Language Institute | 0,00 | 75.000.000,00 | (75.000.000,00) | (100,00) |
| 12 | Beban Hibah Kepada Organisasi Lainnya | 0,00 | 2.376.257.383,00 | (2.376.257.383,00) | (100,00) |
| 13 | Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Lainnya | 0,00 | 98.000.000,00 | (98.000.000,00) | (100,00) |
| 14 | Beban Hibah Kepada BWI | 0,00 | 50.000.000,00 | (50.000.000,00) | (100,00) |
| 15 | Beban Hibah Kepada Baznas Kota Bima | 0,00 | 300.000.000,00 | (300.000.000,00) | (100,00) |
| 16 | Beban Hibah Kepada DMI | 0,00 | 75.000.000,00 | (75.000.000,00) | (100,00) |
| 17 | Beban Hibah kepada PPNI | 0,00 | 25.000.000,00 | (25.000.000,00) | (100,00) |
| 18 | Beban Hibah Kepada Pengurus Cabang NU | 0,00 | 50.000.000,00 | (50.000.000,00) | (100,00) |
| 19 | Beban Hibah Kepada Majelis Ta'alim Uswatun Hasanah | 0,00 | 250.000.000,00 | (250.000.000,00) | (100,00) |
| 20 | Beban Hibah kepada LASQI | 0,00 | 200.000.000,00 | (200.000.000,00) | (100,00) |
| 21 | Beban Hibah Kepada GP Anshor | 0,00 | 50.000.000,00 | (50.000.000,00) | (100,00) |
| 22 | Beban Hibah BOP Kepada PAUD Swasta (DAK) | 0,00 | 2.597.100.000,00 | (2.597.100.000,00) | (100,00) |
| 23 | Beban Hibah Kepada Asrama Bima di Luar Daerah | 0,00 | 18.000.000,00 | (18.000.000,00) | (100,00) |
| 24 | Beban Hibah kepada KNPI | 0,00 | 50.000.000,00 | (50.000.000,00) | (100,00) |
| 25 | Beban Hibah kepada KONI | 0,00 | 2.000.000.000,00 | (2.000.000.000,00) | (100,00) |
| 26 | Beban Hibah kepada PMI | 0,00 | 572.644.000,00 | (572.644.000,00) | (100,00) |
| 27 | Beban Hibah kepada PRAMUKA | 0,00 | 850.000.000,00 | (850.000.000,00) | (100,00) |
| 28 | Beban Hibah kepada PKK | 0,00 | 75.000.000,00 | (75.000.000,00) | (100,00) |
| 29 | Beban Hibah kepada Pengelola BKSPJK (Sharing Pelayanan Persalinan Propinsi) | 0,00 | 3.943.039.500,00 | (3.943.039.500,00) | (100,00) |
| 30 | Beban Hibah kepada BPJS Kesehatan | 0,00 | 5.354.004.000,00 | (5.354.004.000,00) | (100,00) |
| 31 | Beban Hibah kepada Dewan Pendidikan | 0,00 | 125.000.000,00 | (125.000.000,00) | (100,00) |
| 32 | Beban Hibah kepada Yayasan Kartika SLB Dharmawanita | 0,00 | 200.000.000,00 | (200.000.000,00) | (100,00) |
| 33 | Beban Hibah kepada MUI | 0,00 | 750.000.000,00 | (750.000.000,00) | (100,00) |
| 34 | Beban Hibah kepada Deskranada | 0,00 | 600.000.000,00 | (600.000.000,00) | (100,00) |
| 35 | Beban Hibah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin | 0,00 | 100.000.000,00 | (100.000.000,00) | (100,00) |
| 36 | Beban Hibah kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) | 0,00 | 75.000.000,00 | (75.000.000,00) | (100,00) |
| 37 | Beban Hibah kepada DPD LPM | 0,00 | 50.000.000,00 | (50.000.000,00) | (100,00) |
| 38 | Beban Hibah kepada PGRI Kota Bima | 0,00 | 250.000.000,00 | (250.000.000,00) | (100,00) |
| 39 | Beban Hibah Kepada Partai Politik | 122.232.000,00 | 1.000.000.000,00 | (877.768.000,00) | (87,78) |

| No. | Beban Hibah - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 40 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.210.000.000,00 | 0,00 | 1.210.000.000,00 | 0,00 |
| 41 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 788.000.000,00 | 0,00 | 788.000.000,00 | 0,00 |
| 42 | Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 43 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 14.589.750.000,00 | 0,00 | 14.589.750.000,00 | 0,00 |
| 44 | Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 9.443.751.284,36 | 0,00 | 9.443.751.284,36 | 0,00 |
| 45 | Beban Hibah Kepada PKBM Swasta (DAK Pendidikan Kesetaraan) | 0,00 | 808.200.000,00 | (808.200.000,00) | (100,00) |
| 46 | Beban Hibah kepada Forum Pengurangan Resiko Bencana | 0,00 | 100.000.000,00 | (100.000.000,00) | (100,00) |
| 47 | Beban Hibah Kepada Kelompok Usaha | 0,00 | 588.000.000,00 | (588.000.000,00) | (100,00) |
| 48 | Beban Hibah kepada KORPRI | 0,00 | 50.000.000,00 | (50.000.000,00) | (100,00) |
| 49 | Beban Hibah kepada PERGURUAN TINGGI | 0,00 | 250.000.000,00 | (250.000.000,00) | (100,00) |
| 50 | Beban Hibah kepada Forum Komunikasi Gereja Kristen (FKGK) | 0,00 | 25.000.000,00 | (25.000.000,00) | (100,00) |
| 51 | Beban Hibah Kepada Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kota Bima | 0,00 | 5.000.000,00 | (5.000.000,00) | (100,00) |
| 52 | Beban Hibah Kepada Pengadilan Negeri Raba di Bima | 0,00 | 366.568.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 2.162.490.827,24 | 0,00 | 2.162.490.827,24 | 0,00 |
| Jumlah | | 28.319.224.111,60 | 28.821.813.531,00 | (502.589.419,40) | (1,74) |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5.3.2.1.4 | Beban Bantuan Sosial – LO | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 3.526.290.000,00 | 58.783.286.115,06 |

Beban Bantuan Sosial – LO Pemerintah Kota Bima untuk tahun 2021 senilai Rp3.526.290.000,00 dan 2020 senilai Rp58.783.286.115,06 sehingga mengalami penurunan senilai Rp55.256.996.115,06 atau 94,00% dibandingkan tahun 2020.

Adapun Beban Bantuan Sosial – LO tahun 2021 dan 2020 sesuai tabel berikut ini.

Tabel 5.3.25

Beban Bantuan Sosial – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No. | Beban Bantuan Sosial - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|-----------------------------|------|-------------------|----------------------|----------|
| 1 | Kelompok Masyarakat Lainnya | 0,00 | 33.120.000.000,00 | (33.120.000.000,00) | (100,00) |

| | | | |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5.3.2.2 | Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO | 2021 (Rp) 133.023.923.689,79 | 2020 (Rp) 117.520.946.894,41 |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Pemerintah Kota Bima pada tahun 2021 melakukan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dengan nilai Rp133.023.923.689,79 yang terdiri beban penyusutan aset tetap tahun berjalan senilai Rp132.895.824.763,01 dan amortisasi aset tak berwujud senilai Rp128.098.926,78 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.27
Beban Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bima Tahun 2021

| No. | Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO | 2021 (Rp) |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Beban Penyusutan Alat Besar Darat | 837.073.814,00 |
| 2 | Beban Penyusutan Alat Besar Apung | 4.952.750,00 |
| 3 | Beban Penyusutan Alat Bantu | 110.491.996,00 |
| 4 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor | 9.195.969.673,97 |
| 5 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 475.888.326,00 |
| 6 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor | 1.399.105.607,00 |
| 7 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor | 75.309.734,00 |
| 8 | Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin | 43.242.928,00 |
| 9 | Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin | 46.857.641,00 |
| 10 | Beban Penyusutan Alat Ukur | 259.943.775,00 |
| 11 | Beban Penyusutan Alat Pengolahan | 919.810.453,00 |
| 12 | Beban Penyusutan Alat Kantor | 1.607.654.538,62 |
| 13 | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga | 3.036.204.257,08 |
| 14 | Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 593.486.285,80 |
| 15 | Beban Penyusutan Alat Studio | 2.056.960.911,88 |
| 16 | Beban Penyusutan Alat Komunikasi | 400.811.524,00 |
| 17 | Beban Penyusutan Peralatan Pemancar | 236.638.077,00 |
| 18 | Beban Penyusutan Alat Kedokteran | 5.659.313.260,00 |
| 19 | Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum | 444.102.016,17 |
| 20 | Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium | 1.164.203.644,19 |
| 21 | Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir | 35.235.372,65 |
| 22 | Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah | 1.779.023.131,00 |
| 23 | Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 11.782.793,00 |
| 24 | Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 30.720.983,00 |
| 25 | Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 40.569.550,00 |
| 26 | Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica | 12.101.758,00 |
| 27 | Beban Penyusutan Komputer Unit | 4.130.777.614,43 |
| 28 | Beban Penyusutan Peralatan Komputer | 1.553.893.742,22 |
| 29 | Beban Penyusutan Alat Deteksi | 20.550.524,00 |
| 30 | Beban Penyusutan Alat Pelindung | 10.957.000,00 |
| 31 | Beban Penyusutan Alat SAR | 74.958.328,00 |
| 32 | Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 95.439.667,00 |

| No. | Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO | 2021 (Rp) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 33 | Beban Penyusutan Peralatan Olahraga | 69.877.743,00 |
| 34 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 14.556.099.522,00 |
| 35 | Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal | 63.879.394,00 |
| 36 | Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti | 139.234.185,00 |
| 37 | Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan | 115.469.000,00 |
| 38 | Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas | 1.334.901.315,00 |
| 39 | Beban Penyusutan Jalan | 59.158.674.664,00 |
| 40 | Beban Penyusutan Jembatan | 1.457.123.535,00 |
| 41 | Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi | 2.996.462.593,00 |
| 42 | Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut | 138.932.403,00 |
| 43 | Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder | 120.473.641,00 |
| 44 | Beban Penyusutan Bangunan Pengaman | 6.347.014.218,00 |
| 45 | Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 488.056.367,00 |
| 46 | Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku | 750.388.996,00 |
| 47 | Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor | 965.817.553,00 |
| 48 | Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku | 1.505.376.169,00 |
| 49 | Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor | 134.195.557,00 |
| 50 | Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah | 18.982.000,00 |
| 51 | Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik | 9.295.000,00 |
| 52 | Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik | 430.814.475,00 |
| 53 | Beban Penyusutan Instalasi Pengaman | 1.112.500,00 |
| 54 | Beban Penyusutan Jaringan Air Minum | 1.647.588.248,00 |
| 55 | Beban Penyusutan Jaringan Listrik | 3.710.298.271,00 |
| 56 | Beban Penyusutan Jaringan Telepon | 2.460.000,00 |
| 57 | Beban Penyusutan Jaringan Gas | 369.265.738,00 |
| 58 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 128.098.926,78 |
| Jumlah | | 133.023.923.689,79 |

Tabel 5.3.28
Beban Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bima Tahun 2021

| No. | Beban Penyusutan | 2021 (Rp) |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 36.433.909.419,01 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 16.209.583.416,00 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 80.252.331.928,00 |
| Jumlah | | 132.895.824.763,01 |

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud berupa *software* senilai Rp128.098.926,78 terdapat pada 9 (sembilan) SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.29
Beban Amortisasi ATB – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021

| No. | SKPD | 2021 (Rp) |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 21.804.800,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 9.774.000,00 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.598.013,00 |
| 4 | Dinas Sosial | 500.000,00 |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja | 2.320.500,00 |
| 6 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | 67.471.613,78 |
| 7 | Dinas Pariwisata | 742.500,00 |
| 8 | Sekretariat Daerah | 1.705.000,00 |
| 9 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) | 22.182.500,00 |
| Jumlah | | 128.098.926,78 |

5.3.2.3 Beban Tak Terduga

2021 (Rp)

2.534.050.750,00

2020 (Rp)

0,00

Beban tak terduga Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp2.534.050.750,00 yang terdiri dari:

- Beban tidak terduga untuk kegiatan penanganan keperluan mendesak pandemi corona virus disease 2019 melalui pengadaan oksigen central di rsud kota bima tahun 2021 kepada rsud kota bima senilai Rp141.000.000,00;
- Belanja tidak terduga untuk kegiatan jaring pengaman sosial (JPS) setara kota bima kepada dinas sosial kota bima senilai Rp647.062.000,00;
- Belanja tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak siaga banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di kota bima tahun 2021 kepada badan penaggulangan bencana daerah (BPBD) kota bima senilai Rp112.850.000,00;
- Belanja tidak terduga untuk kegiatan penanganan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di kota bima kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Rp50.000.000,00;
- Belanja tidak terduga untuk kegiatan rehabilitasi korban kebakaran di kota bima tahun 2021 kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima senilai Rp320.000.000,00;
- Belanja tidak terduga untuk kegiatan penanganan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di kota bima kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima senilai Rp50.000.000,00;
- dan angin puting beliung di kota bima kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima senilai Rp49.893.750,00;
- Belanja tidak terduga untuk kegiatan penanganan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di kota bima kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Rp149.245.000,00

- Pemberian santunan kematian kepada masyarakat senilai Rp1.014.000.000,00

| | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5.3.3 | Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | 2021 (Rp) 71.577.028,13 | 2020 (Rp) 121.516.535,21 |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp71.577.028,13 yang terdiri dari:

- Pembayaran atas dana bergulir yang telah disisihkan senilai Rp1.036.753,00;
- Pengakuan piutang retribusi yang telah disisihkan senilai Rp5.021.961,67; dan;
- Pembayaran atas piutang pajak yang telah disisihkan senilai Rp65.518.313,46.

| | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 5.3.4 | Pos Luar Biasa - LO | 2021 (Rp) 0,00 | 2020 (Rp) (26.269.055.823,00) |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2021 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Pos Luar Biasa Pemerintah Kota Bima tahun 2021 senilai Rp0,00 dan 2020 senilai Rp (Rp26.269.055.823,00) sehingga mengalami penurunan senilai Rp 26.269.055.823,00 atau 100,00%.

Rincian Pos Luar Biasa adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.30
Pos Luar Biasa– LO Tahun 2021 dan 2020

| No. | Posa Luar Biasa - LO | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|-----------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Pendapatan Luar Biasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Luar Biasa | 0,00 | 26.269.055.823,00 | (26.269.055.823,00) | (100,00) |
| | Jumlah | 0,00 | (26.269.055.823,00) | 26.269.055.823,00 | (100,00) |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5.3.4.1 | Pendapatan Luar Biasa – LO | 2021 (Rp) 0,00 | 2020 (Rp) 0,00 |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Pendapatan Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Pendapatan Luar Biasa – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp0,00.

| | | | |
|----------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 5.3.4.2 | Beban Luar Biasa - LO | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 0,00 | 26.269.055.823,00 |

Beban Luar Biasa–LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp0,00 dan 2020 senilai Rp26.269.055.823,00, sehingga beban luar biasa mengalami penurunan senilai Rp23.735.005.073,00 atau 100,00%.

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 5.3.5 | Surplus/(Defisit)-LO | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 12.416.076.447,07 | (15.808.583.659,79) |

Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp 12.416.076.447,07 dan 2020 senilai Rp(15.808.583.659,79) sehingga Surplus/(Defisit)-LO mengalami peningkatan senilai Rp 28.224.660.106,86 atau 178,54%.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.1
Laporan Perubahan Ekuitas 2021 dan 2020

| NO | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Ekuitas Awal | 1.920.247.252.438,80 | 1.495.085.421.389,40 |
| 2 | Surplus/Defisit - LO | 12.416.076.447,07 | (15.808.583.659,79) |
| 3 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | 15.426.681.616,87 | 440.970.414.709,19 |
| 4 | Koreksi Ekuitas Lainnya | 15.426.681.616,87 | 440.970.414.709,19 |
| 6 | Penyisihan Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ekuitas Akhir | 1.948.090.010.502,74 | 1.920.247.252.438,80 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.4.1 | Ekuitas Awal | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 1.920.247.252.438,80 | 1.495.085.421.389,40 |

Jumlah ekuitas awal tahun 2021 senilai Rp1.920.247.252.438,80 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020 sementara ekuitas awal 2020 senilai Rp1.495.085.421.389,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Ekuitas Awal 2021

| NO | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Ekuitas Awal | 1.920.247.252.438,80 | 1.495.085.421.389,40 |
| 2 | Surplus/Defisit - LO | 12.416.076.447,07 | (15.808.583.659,79) |
| 3 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | 15.426.681.616,87 | 440.970.414.709,19 |
| 4 | Koreksi Ekuitas Lainnya | 15.426.681.616,87 | 440.970.414.709,19 |
| 6 | Penyisihan Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ekuitas Akhir | 1.948.090.010.502,74 | 1.920.247.252.438,80 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5.4.2 | Surplus/Defisit - LO | 2021 (Rp) 12.416.076.447,07 | 2020 (Rp) (15.808.583.659,79) |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|

Saldo Surplus/Defisit-LO bersumber pada Laporan Operasional tahun 2021 senilai Rp12.416.076.447,07 dan mengalami penurunan senilai Rp28.224.660.106,86 atau 178,54% jika dibandingkan tahun 2020 Rp15.808.583.659,79 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3
Laporan Operasional Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 | 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | |
| 1 | Pendapatan | 728.289.312.140,55 | 724.054.387.275,02 | 4.234.924.865,53 | 0,58 |
| 2 | Beban | 715.944.812.721,61 | 713.715.431.647,02 | 2.229.381.074,59 | 0,31 |
| 3 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi | 12.344.499.418,94 | 10.338.955.628,00 | 2.005.543.790,94 | 19,40 |
| 4 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | 71.577.028,13 | 121.516.535,21 | (49.939.507,08) | (41,10) |
| 5 | Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa - LO | 12.416.076.447,07 | 10.460.472.163,21 | 1.955.604.283,86 | 18,70 |
| 6 | Pos Luar Biasa | 0,00 | (26.269.055.823,00) | (26.269.055.823,00) | 100,00 |
| 7 | Surplus/Defisit - LO | 12.416.076.447,07 | (15.808.583.659,79) | 28.224.660.106,86 | 178,54 |

| | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5.4.3 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | 2021 (Rp) 15.426.681.616,87 | 2020 (Rp) 440.970.414.709,19 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan mendasar pada Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp15.426.681.616,87 dan Tahun 2020 senilai Rp440.970.414.709,19 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.4
Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan mendasar Tahun 2021

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | 15.426.681.616,87 | 440.970.414.709,19 |
| 2 | Koreksi Ekuitas Lainnya | 15.426.681.616,87 | 440.970.414.709,19 |
| 3 | Penyisihan Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 5.4.3.1 | Koreksi Ekuitas Lainnya | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 15.426.681.616,87 | 440.970.414.709,19 |

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan mendasar pada Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 atas pengaruh diberlakukan pencatatan berbasis akrual adalah adanya pos koreksi ekuitas Lainnya senilai Rp 15.426.681.616,87 dan tahun 2020 bernilai positif senilai Rp 440.970.414.709,19.

| | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.4.4 | Ekuitas Akhir | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 1.948.090.010.502,74 | 1.920.247.252.438,80 |

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp1.948.090.010.502,74 dan 2020 Rp1.920.247.252.438,80 yang bersumber dari ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.7
Laporan Perubahan Ekuitas 2021 dan 2020

| NO | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ekuitas Awal | 1.920.247.252.438,80 | 1.495.085.421.389,40 |
| 2 | Surplus/Defisit - LO | 12.416.076.447,07 | (15.808.583.659,79) |
| 3 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | 15.426.681.616,87 | 440.970.414.709,19 |
| 4 | Koreksi Ekuitas Lainnya | 15.426.681.616,87 | 440.970.414.709,19 |
| 6 | Penyisihan Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ekuitas Akhir | 1.948.090.010.502,74 | 1.920.247.252.438,80 |

5.5 PENJELASAN KOMPONEN-KOMPONEN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Kota Bima mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan 2020 secara umum sebagai berikut.

Tabel 5.5.1
Laporan Neraca Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
|----|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | Aset | 1.948.818.658.085,50 | 1.922.503.673.289,20 |
| 2 | Kewajiban | 728.647.582,76 | 2.256.420.850,40 |
| 3 | Ekuitas | 1.948.090.010.502,74 | 1.920.247.252.438,80 |

| | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.5.1 Aset | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | 1.948.818.658.085,50 | 1.922.503.673.289,20 |

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kota Bima terdiri dari Aset lancar, Investasi Jangka panjang, Aset Tetap serta Aset lainnya.

Saldo Aset pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp1.948.818.658.085,50 mengalami peningkatan senilai Rp26.314.984.796,30 atau 1,37% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp1.922.503.673.289,20.

Perbandingan aset Pemerintah Kota Bima periode tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5.2
Rincian Aset Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Aset Lancar | 49.631.824.414,76 | 47.918.992.098,33 |
| 2 | Investasi Jangka Panjang | 14.612.249.186,29 | 13.412.370.394,00 |
| 3 | Aset Tetap | 1.864.964.691.001,61 | 1.841.488.709.197,05 |
| 4 | Aset Lainnya | 19.609.893.482,84 | 19.683.601.599,82 |
| Jumlah | | 1.948.818.658.085,50 | 1.922.503.673.289,20 |

Adapun akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Bima tahun 2021 adalah sebagai berikut.

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.5.1.1 Aset Lancar | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | 49.631.824.414,76 | 47.918.992.098,33 |

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta

berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima yang terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Deviden, Piutang Lain-lain, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Penyisihan Piutang, Belanja Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 terdiri atas Kas, Piutang, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.3
Rincian Aset Lancar Tahun 2021 dan 2020

| No | Aset Lancar | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Kas | 21.962.966.165,30 | 11.186.300.990,05 |
| 2 | Piutang | 17.199.147.353,58 | 19.034.573.512,54 |
| 3 | Persediaan | 10.469.710.895,88 | 17.698.117.595,74 |
| Total | | 49.631.824.414,76 | 47.918.992.098,33 |

Saldo Aset Lancar pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp49.631.824.414,76 mengalami kenaikan senilai Rp1.712.832.316,43 atau 3,57% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp47.918.992.098.

| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.5.1.1.1 Kas | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | 21.962.966.165,30 | 11.186.300.990,05 |

Saldo Kas pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp21.962.966.165,30 mengalami kenaikan senilai Rp10.776.665.175,25 atau 96,34% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp11.186.300.990,05.

Saldo Kas per 31 Desember 2021 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP, Kas di Kas Bendahara Pengeluaran, Kas di Kas Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Kas Dana BOS dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.4
Rincian Kas Tahun 2021 dan 2020

| No | Kas | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Kas di Kas Daerah | 21.804.706.778,67 | 10.735.155.328,67 |
| 2 | Kas di Kas Bendahara Penerimaan | 143.889,12 | 206.938.889,12 |
| 3 | Kas di Kas Bendahara Pengeluaran | 5.720.000,00 | 0,00 |
| 4 | Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP | 0,00 | 113.613.390,00 |
| 5 | Kas di Kas Dana BOS | 151.753.053,51 | 125.015.896,26 |
| 6 | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 642.444,00 | 5.577.486,00 |
| Jumlah | | 21.962.966.165,30 | 11.186.300.990,05 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | 21.804.706.778,67 | 10.735.155.328,67 |

Saldo Kas di Kas Daerah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp21.804.706.778,67 mengalami kenaikan senilai Rp11.069.551.450,00 atau 103,11% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp10.735.155.328,67.

Saldo Kas di Kas Daerah 31 Desember 2021 senilai Rp21.804.706.778, terdiri dari:

Tabel 5.5.5
Rincian Kas Daerah Tahun 2021 dan 2020

| No | Bank/Rekening | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. | PT Bank NTB Syariah | | |
| 1 | Rekening Giro Nomor 005.21.00102.02-5 | 17.804.706.778,67 | 5.735.155.328,67 |
| 2 | Deposito | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 19.804.706.778,67 | 5.735.155.328,67 |
| B. | PT Bank BNI | | |
| 1 | Deposito | 1.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| | Jumlah | 1.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| C. | PT Bank BRI | | |
| 1 | Deposito | 1.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| | Jumlah | 1.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| | Total | 21.804.706.778,67 | 10.735.155.328,67 |

Pemerintah Kota Bima menempatkan dana pada Rekening Deposito yang bersifat *on call* yang dapat diartikan sebagai simpanan yang berjangka waktu antara 3 hari sampai dengan 30 hari atau satu bulan sehingga dapat dicairkan sewaktu-waktu.

| | | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 5.5.1.1.1.2 | Kas di Kas Dana | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | Kapitasi JKN FKTP | 0,00 | 113.613.390,00 |

Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP merupakan Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan.

Saldo Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp113.613.390,00 atau 0,00% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp113.613.390,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.6
Rincian Kas Dana Kapitasi Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
|----|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Puskesmas Mpunda | 0,00 | 24.605.293,00 |
| 2 | Puskesmas RasanaE Timur | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Puskesmas Paruga | 0,00 | 12.087.264,00 |
| 4 | Puskesmas PenanaE | 0,00 | 29.472.001,00 |
| 5 | Puskesmas Kolo | 0,00 | 1.089,00 |

| No | Uraian | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 6 | Puskesmas Kumbe | 0,00 | 1.751.131,00 |
| 7 | Puskesmas Jatibaru | 0,00 | 45.696.612,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 113.613.390,00 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5.5.1.1.1.3 | Kas di Kas Bendahara Penerimaan | 31-12-2021 (Rp) 143.889,12 | 31-12-2020 (Rp) 206.938.889,12 |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima menyatakan bahwa apabila masih ada kas di Bendahara Penerimaan belum disetorkan ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam Neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas di Kas Bendahara Penerimaan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp143.889,12 mengalami penurunan senilai Rp206.795.000,00 atau 99,93% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp206.938.889,12.

Saldo Kas di Kas Bendahara Penerimaan tahun 2021 tersebut di atas merupakan Kas di Kas Penerimaan Bendahara pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Ijin Mendirikan bangunan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sesuai tabel berikut ini.

Tabel 5.5.7
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021

| No | Uraian | 31-12-2021 (Rp) | Tanggal Penyetoran |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Sisa Kas pada Rekening Bendahara Umum RSUD Kota Bima (Bank NTB No. 005.22.20.814103) berupa jasa giro bulan Desember senilai Rp143.889,12. | 143.889,12 | 20 januari 2022 |
| Jumlah | | 143.889,12 | |

Sementara Kas di Kas Bendahara Penerimaan senilai Rp143.889,12 telah disetorkan semua ke Kas Daerah pada tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.5.8
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020

| No | Uraian | 31-12-2020 (Rp) | Tanggal Penyetoran |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Sisa Kas pada Rekening Bendahara Umum RSUD Kota Bima (Bank NTB No. 005.22.20.814103) berupa jasa giro bulan Desember senilai Rp143.889,12. | 143.889,12 | |
| 2 | Setoran Ijin Mendirikan Bangunan (PUPR) | 206.795.000,00 | 15/01/2021 |
| Jumlah | | 206.938.889,12 | |

| | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | Kas di Kas | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| 5.5.1.1.1.4 | Bendahara | 5.720.000,00 | 0,00 |
| | Pengeluaran | | |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 senilai Rp5.720.000,00 mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2020 yang terdapat pada Sekretariat Daerah dan sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Januari 2022.

| | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Kas di Kas Dana | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| 5.5.1.1.1.5 | BOS | 151.753.053,51 | 125.015.896,26 |

Saldo Kas di Kas Dana BOS pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp151.753.053,51 mengalami kenaikan senilai Rp26.737.157,25 atau 21,39% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp125.015.896,26. Karena tidak adanya Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kinerja.

Kas di Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2021 senilai Rp151.753.053,51 dengan rincian:

Tabel 5.5.9
Kas Dana BOS Tahun 2021 dan 2020

| Kas Dana BOS | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Kas Dana BOS | 151.753.053,51 | 125.015.896,26 |

Rincian saldo Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di setiap sekolah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.10
Kas Dana Bos Setiap Sekolah Tahun 2021

| NO | NAMA SEKOLAH | KAS TUNAI BOS | KAS BANK BOS | BOS KINERJA | BUNGAN BANK | SALDO 31 des/12/2021 |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | SD NEGERI 1 MELAYU KOTA BIMA | 6.205.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.205.900,00 |
| 2 | SD NEGERI 2 SUNTU KOTA BIMA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3 | SD NEGERI 3 JATIWANGI KOTA BIMA | 75.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.013,00 |
| 4 | SD NEGERI 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 |
| 5 | SD NEGERI 6 KODO KOTA BIMA | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 6 | SD NEGERI 7 KUMBE KOTA BIMA | 3.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235.000,00 |
| 7 | SD NEGERI 8 PENANAE KOTA BIMA | 4.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590.000,00 |
| 8 | SD NEGERI 10 PENATOI KOTA BIMA | 1.497.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497.913,00 |
| 9 | SD NEGERI 11 MANGGEMACI KOTA BIMA | 51.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.249,00 |
| 10 | SD NEGERI 12 SARAE KOTA BIMA | 3.963.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.963.266,00 |
| 11 | SD NEGERI 13 KOLO KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SD NEGERI 14 SADIA KOTA BIMA | 7.495.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.495.379,00 |

| NO | NAMA SEKOLAH | KAS TUNAI BOS | KAS BANK BOS | BOS KINERJA | BUNGAN BANK | SALDO 31 des/12/2021 |
|----|------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 13 | SD NEGERI 15 NTOBO KOTA BIMA | 368.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.121,00 |
| 14 | SD NEGERI 16 SALAMA KOTA BIMA | 2.165.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.151,00 |
| 15 | SD NEGERI 17 PANE KOTA BIMA | 466.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.029,00 |
| 16 | SD NEGERI 18 DODU KOTA BIMA | 909.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.300,00 |
| 17 | SD NEGERI 19 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | 10.160,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.160,00 |
| 18 | SD NEGERI 20 RABADOMPU TIMUR KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | SD NEGERI 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | 4.531.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.531.732,00 |
| 20 | SD NEGERI 22 JATIBARU KOTA BIMA | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 |
| 21 | SD NEGERI 24 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | SD NEGERI 25 SANTI KOTA BIMA | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| 23 | SD NEGERI 26 RABADOMPU BARAT KOTA BIMA | 338.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.774,00 |
| 24 | SD NEGERI 27 RABADOMPU TIMUR KOTA BIMA | 320.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.008,00 |
| 25 | SD NEGERI 28 MELAYU KOTA BIMA | 2.680.041,00 | 19.959,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 26 | SD NEGERI 29 TANJUNG KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | SD NEGERI 30 NITU KOTA BIMA | 989.584,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.084,00 |
| 28 | SD NEGERI 31 LELAMASE KOTA BIMA | 8.807.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.807.700,00 |
| 29 | SD NEGERI 32 PANGGI KOTA BIMA | 860.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.800,00 |
| 30 | SD NEGERI 33 LAMPE KOTA BIMA | 3.176.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176.706,00 |
| 31 | SD NEGERI 34 BONTO KOTA BIMA | 307.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.389,00 |
| 31 | SD NEGERI 35 NUNGA KOTA BIMA | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 33 | SD NEGERI 36 NGGARALO KOTA BIMA | 7.091.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.091.800,00 |
| 34 | SD NEGERI 37 KENDO KOTA BIMA | 2.215.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215.791,00 |
| 35 | SD NEGERI 39 RABADOMPU BARAT KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | SD NEGERI 40 LEWIRATO KOTA BIMA | 1.191.901,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.901,00 |
| 37 | SD NEGERI 42 MANGGEMACI KOTA BIMA | 283.048,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.048,51 |
| 38 | SD NEGERI 43 MELAYU KOTA BIMA | 824,00 | 20.952,00 | 0,00 | 0,00 | 21.776,00 |
| 39 | SD NEGERI 44 MANDE KOTA BIMA | 170.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.412,00 |
| 40 | SD NEGERI 45 PANE KOTA BIMA | 1.012.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.975,00 |
| 41 | SD NEGERI 46 LELA KOTA BIMA | 4.574.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.574.500,00 |
| 42 | SD NEGERI 47 KODO KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SD NEGERI 48 KUMBE KOTA BIMA | 4.309.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309.800,00 |
| 44 | SD NEGERI 49 RABANGODU SELATAN KOTA BIMA | 1.252.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.663,00 |
| 45 | SD NEGERI 50 PENARAGA KOTA BIMA | 38.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.075,00 |
| 46 | SD NEGERI 51 RITE KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | SD NEGERI 52 BUSU KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NO | NAMA SEKOLAH | KAS TUNAI BOS | KAS BANK BOS | BOS KINERJA | BUNGAN BANK | SALDO 31 des/12/2021 |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 48 | SD NEGERI 53 OI FOO KOTA BIMA | 6.149.800,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189.800,00 |
| 49 | SD NEGERI 54 SANTI KOTA BIMA | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 |
| 50 | SD NEGERI 55 DARA KOTA BIMA | 121.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.430,00 |
| 51 | SD NEGERI 56 TOLOBALI KOTA BIMA | 502.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.179,00 |
| 52 | SD NEGERI 57 WADUMBOLO KOTA BIMA | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,00 |
| 53 | SD NEGERI 58 TAMBANA KOTA BIMA | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 54 | SD NEGERI 59 RASALEWI KOTA BIMA | 134.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.413,00 |
| 55 | SD NEGERI 60 SAMBINA KOTA BIMA | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 |
| 56 | SD NEGERI 61 KARARA KOTA BIMA | 1.539,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.539,00 |
| 57 | SD NEGERI 62 RONTU KOTA BIMA | 4.565.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.565.481,00 |
| 58 | SD NEGERI 63 DODU KOTA BIMA | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 59 | SD NEGERI 64 SORI KOTA BIMA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 60 | SD NEGERI 65 JATIBARU KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | SD NEGERI 66 KUTA KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | SD NEGERI 67 RABANTALA KOTA BIMA | 2.970.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.101,00 |
| 63 | SD NEGERI 68 KOLO KOTA BIMA | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 64 | SD NEGERI 69 KABANTA KOTA BIMA | 313.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.572,00 |
| 65 | SD NEGERI 70 TOLOTONGGA KOTA BIMA | 1.199.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.518,00 |
| 66 | SD NEGERI 71 WENGGO KOTA BIMA | 92.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.244,00 |
| 67 | SD NEGERI 72 NTOBO KOTA BIMA | 304.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.073,00 |
| 68 | SD NEGERI 73 SABALI KOTA BIMA | 5.933.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.933.200,00 |
| 69 | SD NEGERI 74 SONGGELA KOTA BIMA | 2.433.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433.720,00 |
| 70 | SD NEGERI 76 TOLOWERI KOTA BIMA | 828.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.228,00 |
| 71 | SD NEGERI 77 NIU KOTA BIMA | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| | JUMLAH | 108.234.820,51 | 688.411,00 | 0,00 | 0,00 | 108.923.231,51 |
| 72 | SMP NEGERI 1 KOTA BIMA | 4.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015.000,00 |
| 73 | SMP NEGERI 2 KOTA BIMA | 17.618.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.618.975,00 |
| 74 | SMP NEGERI 3 KOTA BIMA | 295.408,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 321.408,00 |
| 75 | SMP NEGERI 4 KOTA BIMA | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.700,00 |
| 76 | SMP NEGERI 5 KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | SMP NEGERI 6 KOTA BIMA | 645.000,00 | 83.970,00 | 0,00 | 0,00 | 728.970,00 |
| 78 | SMP NEGERI 7 KOTA BIMA | 2.609,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209,00 |
| 79 | SMP NEGERI 8 KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | SMP NEGERI 9 KOTA BIMA | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 81 | SMP NEGERI 10 KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | SMP NEGERI 11 KOTA BIMA | 1.261.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.170,00 |
| 83 | SMP NEGERI 12 KOTA BIMA | 69.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.156,00 |

| NO | NAMA SEKOLAH | KAS TUNAI BOS | KAS BANK BOS | BOS KINERJA | BUNGAN BANK | SALDO 31 des/12/2021 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 84 | SMP NEGERI 13 KOTA BIMA | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 85 | SMP NEGERI 14 KOTA BIMA | 6.344.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344.234,00 |
| 86 | SMP NEGERI 15 KOTA BIMA | 5.685.050,00 | 126.350,00 | 0,00 | 0,00 | 5.811.400,00 |
| JUMLAH | | 42.592.902,00 | 236.920,00 | 0,00 | 0,00 | 42.829.822,00 |
| JUMLAH SD & SMP | | 150.827.722,51 | 925.331,00 | 0,00 | 0,00 | 151.753.053,51 |

Sementara Kas Dana BOS tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5.11
Kas Dana Bos Setiap Sekolah Tahun 2021

| No | NAMA SEKOLAH | Kas Tunai | Kas Bank | Bunga Bank | Saldo 31 des/12/2021 |
|----|------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------|
| 1 | SD SDN 1 MELAYU KOTA BIMA | 766.580,00 | 0,00 | 0,00 | 766.580,00 |
| 2 | SDN 2 Suntu Kota Bima | 1.821.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821.600,00 |
| 3 | SDN 3 JATIWANGI KOTA BIMA | 352.263,00 | 69.750,00 | 0,00 | 422.013,00 |
| 4 | SDN 5 Rabangodu Utara KOB | 1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,00 |
| 5 | SDN 6 KODO KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | SDN 7 KUMBE KOTA BIMA | 0,00 | 9.091,00 | 0,00 | 9.091,00 |
| 7 | SDN 8 Penanae KOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | SDN 10 PENATOI KOTA BIMA | 652.512,00 | 14.933.500,00 | 0,00 | 15.586.012,00 |
| 9 | SDN 11 MANGGEMACI KOTA BIMA | 270.609,00 | 0,00 | 0,00 | 270.609,00 |
| 10 | SDN 12 Sarae Kota Bima | 723.266,00 | 0,00 | 0,00 | 723.266,00 |
| 11 | SDN 13 KOLO KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SDN 14 SADIA KOTA BIMA | 808.046,00 | 0,00 | 0,00 | 808.046,00 |
| 13 | SDN 15 Ntobo KOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SDN 16 Salama Kota Bima | 270.289,00 | 0,00 | 0,00 | 270.289,00 |
| 15 | SDN 17 Pane Kota Bima | 40.000,00 | 140.502,00 | 0,00 | 180.502,00 |
| 16 | SDN 18 DODU KOTA BIMA | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 17 | SDN 19 Rabangodu Utara KOB | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| 18 | SDN 20 Rabadompu Timur KOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | SDN 21 Tolomundu Kota Bima | 1.080.096,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.096,00 |
| 20 | SDN 22 JATIBARU KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | SDN 24 Rabangodu Utara KOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | SDN 25 SANTI KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | SDN 26 Rabadompu Barat KOB | 540.272,00 | 0,00 | 0,00 | 540.272,00 |
| 24 | SDN 27 Rabadompu Timur KOB | 141.941,00 | 0,00 | 0,00 | 141.941,00 |
| 25 | SDN 28 MELAYU KOTA BIMA | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 26 | SDN 29 Tanjung Kota Bima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 27 | SDN 30 Nitu KOB | 559.084,00 | 0,00 | 0,00 | 559.084,00 |
| 28 | SDN 31 LELAMASE KOTA BIMA | 932,00 | 6.326.800,00 | 0,00 | 6.327.732,00 |
| 29 | SDN 32 PANGGI KOTA BIMA | 320.800,00 | 0,00 | 0,00 | 320.800,00 |
| 30 | SDN 33 LAMPE KOTA BIMA | 0,00 | 54.906,00 | 0,00 | 54.906,00 |
| 31 | SDN 34 BONTO KOTA BIMA | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 32 | SDN 35 NUNGA KOTA BIMA | 1.850.000,00 | 276.500,00 | 0,00 | 2.126.500,00 |
| 33 | SDN 36 Nggarolo KOB | 3.320.000,00 | 109.400,00 | 96.005,26 | 3.525.405,26 |
| 34 | SDN 37 Kendo KOB | 30.000,00 | 9.438,00 | 0,00 | 39.438,00 |
| 35 | SDN 39 Rabadompu Barat KOB | 31.221,00 | 109.045,00 | 0,00 | 140.266,00 |
| 36 | SDN 40 LEWIRATO KOTA BIMA | 270.706,00 | 41.000,00 | 0,00 | 311.706,00 |

| No | NAMA SEKOLAH | Kas Tunai | Kas Bank | Bunga Bank | Saldo 31 des/12/2021 |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 37 | SDN 42 MANGGEMACI KOTA BIMA | 269.867,00 | 92.600,00 | 0,00 | 362.467,00 |
| 39 | SDN 43 MELAYU KOTA BIMA | 767.624,00 | 20.952,00 | 0,00 | 788.576,00 |
| 38 | SDN 44 MANDE KOTA BIMA | 79.976,00 | 0,00 | 0,00 | 79.976,00 |
| 40 | SDN 45 Pane Kota Bima | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 41 | SDN 46 LELA KOTA BIMA | 1.456.853,00 | 172.400,00 | 0,00 | 1.629.253,00 |
| 42 | SDN 47 KODO KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SDN 48 KUMBE KOTA BIMA | 1.510.400,00 | 24.700,00 | 0,00 | 1.535.100,00 |
| 44 | SDN 49 Rabangodu Selatan KOB | 4.556.545,00 | 764.705,00 | 0,00 | 5.321.250,00 |
| 45 | SDN 50 Penaraga Kobi | 2.520.000,00 | 42.200,00 | 0,00 | 2.562.200,00 |
| 46 | SDN 51 Rite KOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | SDN 52 Busu KOB | 0,00 | 813.900,00 | 0,00 | 813.900,00 |
| 48 | SDN 53 OI FO'O KOTA BIMA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 49 | SDN 54 SANTI KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | SDN 55 Dara Kota Bima | 1.620.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.800,00 |
| 51 | SDN 56 Tolobali Kota Bima | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| 52 | SDN 57 Wadumbolo Kota Bima | 270.000,00 | 827,00 | 0,00 | 270.827,00 |
| 53 | SDN 58 TAMBANA KOTA BIMA | 796.284,00 | 1.680.700,00 | 0,00 | 2.476.984,00 |
| 54 | SDN 59 RASALEWI KOTA BIMA | 518.846,00 | 0,00 | 0,00 | 518.846,00 |
| 55 | SDN 60 SAMBINA KOTA BIMA | 215.900,00 | 0,00 | 0,00 | 215.900,00 |
| 56 | SDN 61 KARARA KOTA BIMA | 1.202,00 | 407.837,00 | 0,00 | 409.039,00 |
| 57 | SDN 62 Rontu KOB | 2.119,00 | 5.683.300,00 | 0,00 | 5.685.419,00 |
| 58 | SDN 63 DODU KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | SDN 64 KUTA KOTA BIMA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 60 | SDN 65 JATIBARU KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | SDN 66 SORI KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | SDN 67 RABANTALA KOTA BIMA | 2.031,00 | 233.244,00 | 0,00 | 235.275,00 |
| 63 | SDN 68 KOLO KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | SDN 69 KABANTA KOTA BIMA | 0,00 | 1.933.572,00 | 0,00 | 1.933.572,00 |
| 65 | SDN 70 TOLOTONGGA KOTA BIMA | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| 66 | SDN 71 Wenggo KOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | SDN 72 Ntobo KOB | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 |
| 68 | SDN 73 SABALI KOTA BIMA | 0,00 | 5.928.700,00 | 0,00 | 5.928.700,00 |
| 69 | SDN 74 SONGGELA KOTA BIMA | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 826,00 |
| 70 | SDN 76 TOLOWERI KOTA BIMA | 398.000,00 | 160.228,00 | 0,00 | 558.228,00 |
| 71 | SDN 77 Niu Kota Bima | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| | Jumlah SD | 31.309.684,00 | 40.169.797,00 | 96.005 | 71.575.486,26 |
| | SMP | | | | |
| 72 | SMPN 1 KOTA BIMA | 2.132.100,00 | 2.763.900,00 | 0,00 | 4.896.000,00 |
| 73 | SMPN 2 KOTA BIMA | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 74 | SMPN 3 KOTA BIMA | 0,00 | 1.446.000,00 | 0,00 | 1.446.000,00 |
| 75 | SMPN 4 KOTA BIMA | 659.754,00 | 73.250,00 | 0,00 | 733.004,00 |
| 76 | SMPN 5 KOTA BIMA | 781.250,00 | 0,00 | 0,00 | 781.250,00 |
| 77 | SMPN 6 KOTA BIMA | 1.516.181,00 | 3.583.970,00 | 0,00 | 5.100.151,00 |
| 78 | SMPN 7 KOTA BIMA | 38.690.820,00 | 600,00 | 0,00 | 38.691.420,00 |
| 79 | SMPN 8 KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | SMPN 9 KOTA BIMA | 3.000,00 | 600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 81 | SMPN10 KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | SMPN 11 KOTA BIMA | 216.200,00 | 160.000,00 | 0,00 | 376.200,00 |
| 83 | SMPN 12 KOTA BIMA | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 |
| 84 | SMPN 13 KOTA BIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | NAMA SEKOLAH | Kas Tunai | Kas Bank | Bunga Bank | Saldo 31 des/12/2021 |
|----|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 85 | SMPN 14 KOTA BIMA | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 86 | SMPN 15 KOTA BIMA | 284.183,00 | 141.350,00 | 0,00 | 425.533,00 |
| | Jumlah SMP | 45.270.740,00 | 8.169.670,00 | 0,00 | 53.440.410,00 |
| | TOTAL | 76.580.424,00 | 48.339.467,00 | 96.005,26 | 125.015.896,26 |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5.5.1.1.1.6 | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 31-12-2021(Rp) 642.444,00 | 31-12-2020 (Rp) 5.577.486,00 |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp642.444,00 sementara per 31 Desember 2020 senilai Rp5.577.486,00.

Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5.12
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021

| NO | SKPD | PPH 21 | PPH 22 | PPH 23 | PPN | Pajak Restoran | Tanggal Penyetoran |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Bappeda Litbang | 0,00 | 41.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 January 2022 |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.571,00 | 25 January 2022 |
| 3 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.810,00 | 25 January 2022 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.545,00 | 21 January 2022 |
| 5 | Puskesmas Paruga | 14.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03 January 2022 |
| | JUMLAH | 14.586,00 | 41.932,00 | 0,00 | 0,00 | 585.926,00 | |

Sementara Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 senilai Rp642.444,00 merupakan utang PFK berupa PPh21, PPh22, dan Pajak Restoran dan semua telah terbayarkan ke Kas Negara pada tahun 2022.

| | | | |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5.5.1.1.2 | Piutang | 31-12-2021 (Rp) 17.199.147.353,58 | 31-12-2020 (Rp) 19.034.573.512,54 |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

Saldo Piutang pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp17.199.147.353,58 mengalami penurunan senilai Rp1.835.426.158,96 atau 9,64% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp19.034.573.512,54.

Saldo Piutang per 31 Desember 2021 terdiri atas Piutang, Belanja Dibayar Dimuka, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.13
Piutang Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 31-12 2021 (Rp) | 31-12- 2020 (Rp) |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Piutang Pajak | 11.543.811.889,54 | 10.100.588.296,12 |
| | Penyisihan Piutang Pajak | (6.700.821.408,38) | (5.590.475.390,48) |
| | Piutang Pajak Netto | 4.842.990.481,16 | 4.510.112.905,64 |
| 2 | Piutang Retribusi | 3.243.676.649,00 | 3.045.942.462,00 |
| | Penyisihan Piutang Retribusi | (2.445.089.124,83) | (1.808.532.774,44) |
| | Piutang Retribusi Netto | 798.587.524,17 | 1.237.409.687,56 |
| 3 | Piutang Dana Bagi Hasil | 5.809.527.411,00 | 10.025.579.119,00 |
| | Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 |
| | Piutang Dana Bagi Hasil Netto | 5.809.527.411,00 | 10.025.579.119,00 |
| 4 | Piutang Deviden | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Piutang Lainnya | 0,00 | 35.000.000,00 |
| | Penyisihan Piutang Lainnya | 0,00 | - |
| | Piutang Lainnya Netto | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 6 | Belanja Dibayar Dimuka | 2.969.280.200,00 | 381.153.304,45 |
| 7 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 2.778.761.737,25 | 2.845.318.495,90 |
| | Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto | 2.778.761.737,25 | 2.845.318.495,90 |
| Jumlah | | 17.199.147.353,58 | 19.034.573.512,55 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5.5.1.1.2.1 Piutang Pajak | <u>31-12-2021 (Rp)</u> | <u>31-12-2020 (Rp)</u> |
| | 11.543.811.889,59 | 10.100.588.296,12 |

Saldo Piutang Pajak bruto pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp11.543.811.889,59 mengalami kenaikan senilai Rp1.443.223.593,47 atau 14,29% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp10.100.588.296,12 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.14
Rincian Piutang Pajak Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 31-12 2020 (Rp) | Piutang atas Penetapan 2020 | Penambahan | Pengurangan | 31-12 2021 (Rp) |
|----|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Pajak Hotel | 83.926.921,20 | 0,00 | 415.716.422,00 | 415.017.422,00 | 84.625.921,20 |
| 2 | Pajak Restoran | 68.510.812,83 | 0,00 | 1.269.300.346,20 | 1.255.900.981,20 | 81.910.177,83 |
| 3 | Pajak Hiburan | 1.700.000,00 | 0,00 | 19.426.900,00 | 19.426.900,00 | 1.700.000,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 71.770.143,29 | 191.549.167,50 | 376.278.962,31 | 581.545.363,40 | 58.052.909,71 |

| No | Uraian | 31-12 2020 (Rp) | Piutang atas Penetapan 2020 | Penambahan | Pengurangan | 31-12 2021 (Rp) |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 0,00 | 0,00 | 8.463.177.492,00 | 8.463.177.492,00 | 0,00 |
| 6 | Pajak Parkir | 2.512.250,00 | 0,00 | 113.586.000,00 | 114.736.000,00 | 1.362.250,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 29.952.502,80 | 0,00 | 45.769.896,18 | 46.170.792,18 | 29.551.606,80 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 0,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 0,00 | 0,00 | 207.879.473,75 | 207.879.473,75 | 0,00 |
| 10 | PBB | 9.056.810.616,00 | 0,00 | 5.199.104.615,00 | 3.633.609.655,00 | 10.622.694.974,00 |
| 11 | Pajak BPHTB (Bea Perolehan Tanah dan Bangunan) | 785.405.050,00 | 0,00 | 4.650.929.910,00 | 4.772.420.910,00 | 663.914.050,00 |
| Jumlah | | 10.100.588.296,12 | 191.549.167,50 | 20.772.670.017,44 | 19.521.384.989,53 | 11.543.811.889,54 |

Dari jumlah Piutang Pajak senilai Rp11.543.811.889,54 telah dilakukan penyisihan senilai Rp6.700.821.408,38 sehingga nilai Piutang Pajak neto adalah senilai Rp4.842.990.481,16 dengan rincian sebagai berikut.

a. Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp84.625.921,20 mengalami kenaikan senilai Rp699.000 atau 0,83% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp83.926.921,20 sebagaimana pada **Lampiran 1** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.15

Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2021 dan 2020

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Penambahan | Pembayaran Tahun 2021 | Piutang 2021 (Rp) | Penyisihan 2021 | NRV 2021 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2011 | 39.562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.562.000,00 | 39.562.000,00 | 0,00 |
| 2012 | 23.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.350.000,00 | 23.350.000,00 | 0,00 |
| 2013 | 12.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.850.000,00 | 12.850.000,00 | 0,00 |
| 2014 | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 0,00 |
| 2017 | 3.026.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.026.800,00 | 1.513.400,00 | 1.513.400,00 |
| 2018 | 542.621,20 | 0,00 | 0,00 | 542.621,20 | 271.310,60 | 271.310,60 |
| 2019 | 573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 573.000,00 | 286.500,00 | 286.500,00 |
| 2020 | 772.500,00 | 0,00 | 127.500,00 | 645.000,00 | 64.500,00 | 580.500,00 |
| 2021 | | 415.716.422,00 | 414.889.922,00 | 826.500,00 | 4.132,50 | 822.367,50 |
| Jumlah | 83.926.921,20 | 415.716.422,00 | 415.017.422,00 | 84.625.921,20 | 81.151.843,10 | 3.474.078,10 |

Dari jumlah Piutang Pajak Hotel senilai Rp84.625.921,20 telah dilakukan penyisihan senilai Rp81.151.843,10 sehingga nilai Piutang Pajak Hotel neto adalah senilai Rp3.474.078,10.

b. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp81.910.177,83 mengalami kenaikan senilai Rp13.399.365,00 atau 19,56% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp68.510.812,83 sebagaimana pada **Lampiran 2** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.16

Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2021 dan 2020

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Penambahan | Pembayaran Tahun 2021 | Piutang 2021 (Rp) | Penyisihan 2021 | NRV 2021 |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2010 | 13.677.000,00 | 0,00 | 0 | 13.677.000,00 | 13.677.000,00 | 0,00 |
| 2011 | 13.429.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.379.000,00 | 13.379.000,00 | 0,00 |
| 2012 | 4.684.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.634.000,00 | 4.634.000,00 | 0,00 |
| 2013 | 13.181.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.181.900,00 | 13.181.900,00 | 0,00 |
| 2014 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 10.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.840.000,00 | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 |
| 2018 | 3.218.912,83 | 0,00 | 0,00 | 3.218.912,83 | 1.609.456,42 | 1.609.456,42 |
| 2019 | 5.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755.000,00 | 2.877.500,00 | 2.877.500,00 |
| 2020 | 3.690.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 3.120.000,00 | 312.000,00 | 2.808.000,00 |
| 2021 | | 1.269.300.346,20 | 1.255.195.981,20 | 14.104.365,00 | 70.521,83 | 14.033.843,18 |
| Jumlah | 68.510.812,83 | 1.269.300.346,20 | 1.255.900.981,20 | 81.910.177,83 | 55.161.378,24 | 26.748.799,60 |

Dari jumlah Piutang Pajak Restoran senilai Rp81.910.177,83 telah dilakukan penyisihan senilai Rp55.161.378,24 sehingga nilai Piutang Pajak Restoran neto adalah senilai Rp26.748.799,59.

c. Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp1.700.000,00 sebagaimana pada **Lampiran 3** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.17

Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2021 dan 2021

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Penambahan | Pembayaran Tahun 2021 | Piutang 2021 (Rp) | Penyisihan 2021 | NRV 2021 |
|-------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Penambahan | Pembayaran Tahun 2021 | Piutang 2021 (Rp) | Penyisihan 2021 | NRV 2021 |
|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2021 | | 19.426.900,00 | 19.426.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.700.000,00 | 19.426.900,00 | 19.426.900,00 | 1.700.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |

d. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp58.052.909,71 mengalami penurunan senilai Rp13.717.233,59 atau 19,11 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp71.770.143,30 sebagaimana pada sebagaimana pada **Lampiran 4** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.18
Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2021 dan 2020

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Piutang atas Penetapan 2020 | Penambahan | Pembayaran Tahun 2021 | Piutang 2021 (Rp) | Penyisihan 2021 | NRV 2021 |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2017 | 5.681.589,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.681.589,66 | 2.840.794,83 | 2.840.794,83 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 66.088.553,63 | 0,00 | 0,00 | 32.626.797,50 | 33.461.756,13 | 3.346.175,61 | 30.115.580,52 |
| 2021 | | 191.549.167,50 | 376.278.962,31 | 548.918.565,90 | 18.909.563,92 | 94.547,82 | 18.815.016,10 |
| Jumlah | 71.770.143,29 | 191.549.167,50 | 376.278.962,31 | 581.545.363,40 | 58.052.909,71 | 6.281.518,26 | 51.771.391,44 |

Terdapat pembayaran atas pendapatan diterima dimuka senilai Rp161.422.834,69 dan dari jumlah Piutang Pajak Reklame senilai Rp58.052.909,71 telah dilakukan penyisihan senilai Rp6.281.518,26 sehingga nilai Piutang Pajak Reklame neto adalah senilai Rp51.771.391,44.

e. Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp29.551.606,80. sebagaimana pada **Lampiran 6** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.19
Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2021 dan 2020

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Penambahan | Pembayaran Tahun 2021 | Piutang 2021 (Rp) | Penyisihan 2021 | NRV 2021 |
|-------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 2012 | 291.570,00 | 0,00 | 0,00 | 291.570,00 | 291.570,00 | 0,00 |
| 2013 | 4.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590.000,00 | 4.590.000,00 | 0,00 |
| 2014 | 5.934.360,00 | 0,00 | 0,00 | 5.934.360,00 | 5.934.360,00 | 0,00 |
| 2015 | 10.579.830,00 | 0,00 | 0,00 | 10.579.830,00 | 10.579.830,00 | 0,00 |
| 2016 | 8.155.830,00 | 0,00 | 0,00 | 8.155.830,00 | 8.155.830,00 | 0,00 |

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Penambahan | Pembayaran Tahun 2021 | Piutang 2021 (Rp) | Penyisihan 2021 | NRV 2021 |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2018 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 8,40 | 8,40 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 400.896,00 | 0,00 | 400.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 45.769.896,18 | 45.769.896,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 29.952.502,80 | 45.769.896,18 | 46.170.792,18 | 29.551.606,80 | 29.551.598,40 | 8,40 |

Dari jumlah Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp29.551.606,80 telah dilakukan penyisihan senilai Rp29.551.598,40 sehingga nilai Piutang Pajak Air Tanah neto adalah senilai Rp8,40

f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan Perkotaan

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan Perkotaan (PBB - P2) pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp10.622.694.974,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.565.884.358,00 atau 17,29% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp9.056.810.616,00 sebagaimana pada **Lampiran 7** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.20
Rincian Piutang PBB-P2 Tahun 2021 dan 2020

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Penambahan | Pendapatan di Bayar di Muka | Pembayaran Tahun 2021 | Total Pembayaran | Piutang 2021 (Rp) | Penyisihan 2021 | NRV 2021 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2011 | 553.567.885,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 553.562.775,00 | 553.562.775,00 | 0,00 |
| 2012 | 636.917.351,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 636.912.241,00 | 636.912.241,00 | 0,00 |
| 2013 | 585.642.611,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 585.637.501,00 | 585.637.501,00 | 0,00 |
| 2014 | 730.304.873,00 | 0,00 | 0,00 | 12.875.970,00 | 12.875.970,00 | 717.428.903,00 | 717.428.903,00 | 0,00 |
| 2015 | 964.000.095,00 | 0,00 | 0,00 | 14.282.247,00 | 14.282.247,00 | 949.717.848,00 | 949.717.848,00 | 0,00 |
| 2016 | 1.193.871.962,00 | 0,00 | 0,00 | 21.206.149,00 | 21.206.149,00 | 1.172.665.813,00 | 1.172.665.813,00 | 0,00 |
| 2017 | 1.160.985.060,00 | 0,00 | 0,00 | 23.239.805,00 | 23.239.805,00 | 1.137.745.255,00 | 568.872.627,50 | 568.872.627,50 |
| 2018 | 1.056.949.772,00 | 0,00 | 0,00 | 19.786.171,00 | 19.786.171,00 | 1.037.163.601,00 | 518.581.800,50 | 518.581.800,50 |
| 2019 | 938.355.531,00 | 0,00 | 0,00 | 22.643.646,00 | 22.643.646,00 | 915.711.885,00 | 457.855.942,50 | 457.855.942,50 |
| 2020 | 1.236.215.476,00 | 0,00 | 0,00 | 76.605.338,00 | 76.605.338,00 | 1.159.610.138,00 | 115.961.013,80 | 1.043.649.124,20 |
| 2021 | | 5.199.104.615,00 | 389.398,00 | 3.442.565.601,00 | 3.442.954.999,00 | 1.756.539.014,00 | 8.782.695,07 | 1.747.756.318,93 |
| Jumlah | 9.056.810.616,00 | 5.199.104.615,00 | 389.398,00 | 3.633.220.257,00 | 3.633.609.655,00 | 10.622.694.974,00 | 6.285.979.160,37 | 4.336.715.813,63 |

Dari jumlah Piutang PBB senilai Rp10.622.694.974,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp6.285.979.160,37 sehingga nilai Piutang Pajak PBB neto adalah senilai Rp4.336.715.813,63.

g. Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Saldo Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp663.914.050,00 mengalami penurunan senilai Rp121.491.000,00 atau

15,47% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp785.405.050,00 sebagaimana pada **Lampiran 8** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.21
Rincian Piutang BPHTB Tahun 2021 dan 2020

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Penambahan | Pembayaran Tahun 2021 | Piutang 2021 (Rp) | Penyisihan 2021 | NRV 2021 |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2014 | 10.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.460.000,00 | 10.460.000,00 | 0,00 |
| 2015 | 12.339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.339.600,00 | 12.339.600,00 | 0,00 |
| 2016 | 14.017.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.017.500,00 | 14.017.500,00 | 0,00 |
| 2017 | 96.188.100,00 | 0,00 | 0,00 | 96.188.100,00 | 48.094.050,00 | 48.094.050,00 |
| 2018 | 113.362.200,00 | 0,00 | 0,00 | 113.362.200,00 | 56.681.100,00 | 56.681.100,00 |
| 2019 | 151.891.300,00 | 0,00 | 6.466.000,00 | 145.425.300,00 | 72.712.650,00 | 72.712.650,00 |
| 2020 | 387.146.350,00 | 0,00 | 117.275.000,00 | 269.871.350,00 | 26.987.135,00 | 242.884.215,00 |
| 2021 | | 4.650.929.910,00 | 4.648.679.910,00 | 2.250.000,00 | 11.250,00 | 2.238.750,00 |
| Jumlah | 785.405.050,00 | 4.650.929.910,00 | 4.772.420.910,00 | 663.914.050,00 | 241.303.285,00 | 422.610.765,00 |

Dari jumlah Piutang BPHTB senilai Rp663.914.050,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp241.303.285,00 sehingga nilai Piutang BPHTB neto adalah senilai Rp422.610.765.

j. Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp1.362.250,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp542.625,00 sehingga nilai Piutang neto adalah senilai Rp819.625 sebagaimana pada **Lampiran 24**.

Tabel 5.5.22
Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2021 dan 2020

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Penambahan | Pembayaran Tahun 2021 | Piutang 2021 (Rp) | Penyisihan 2021 | NRV 2021 |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2019 | 1.016.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 |
| 2020 | 1.496.250,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 346.250,00 | 34.625,00 | 311.625,00 |
| 2021 | | 113.586.000,00 | 113.586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 2.512.250,00 | 113.586.000,00 | 114.736.000,00 | 1.362.250,00 | 542.625,00 | 819.625,00 |

5.5.1.1.2.2 Piutang Retribusi

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| 3.243.676.649,00 | 3.045.942.462,00 |

Saldo Piutang Retribusi bruto pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp3.243.676.649,00 mengalami kenaikan senilai

Rp197.734.187,00 atau 6,49% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp3.045.942.462,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.23
Rincian Piutang Retribusi Tahun 2021 dan 2020

| No | Piutang Retribusi | Piutang 2020 (Rp) | koreksi | Penambahan | Pengurangan | Piutang 2021 (Rp) |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan | 1.949.336.822,00 | 0,00 | 1.341.138.924,00 | 720.099.537,00 | 2.570.376.209,00 |
| 2 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 249.185.000,00 | 2.500.000,00 | 605.070.000,00 | 497.585.000,00 | 359.170.000,00 |
| 3 | Retribusi Pengendalian Menara | 36.321.840,00 | 0,00 | 197.284.000,00 | 187.738.000,00 | 45.867.840,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 811.098.800,00 | 0,00 | 268.262.600,00 | 811.098.800,00 | 268.262.600,00 |
| Jumlah | | 3.045.942.462,00 | 2.500.000,00 | 2.411.755.524,00 | 2.216.521.337,00 | 3.243.676.649,00 |

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir serta Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima. Penyisihan piutang merupakan estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sesuai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Dari jumlah Piutang Retribusi senilai Rp3.243.676.649,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp2.445.089.124,83 sehingga nilai Piutang Retribusi neto adalah senilai Rp798.587.524,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.24
Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2021 dan 2020

| No | Piutang Retribusi | Piutang Retribusi 2021 | Penyisihan 2021 | NRV 2021 | Piutang 2020 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan | 2.570.376.209,00 | 2.137.863.737,09 | 432.512.471,91 | 1.949.336.822,00 |
| 2 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 359.170.000,00 | 267.482.499,99 | 91.687.500,01 | 249.185.000,00 |
| 3 | Retribusi Pengendalian Menara | 45.867.840,00 | 39.742.887,75 | 6.124.952,25 | 36.321.840,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 268.262.600,00 | 0,00 | 268.262.600,00 | 811.098.800,00 |
| Jumlah | | 3.243.676.649,00 | 2.445.089.124,83 | 798.587.524,17 | 3.045.942.462,00 |

Penjelasan masing-masing akun piutang retribusi sebagai berikut:

a. Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Saldo Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp2.570.376.209,00 mengalami peningkatan senilai Rp621.039.397,00 atau 31,86% dibandingkan dengan per

31 Desember 2020 senilai Rp1.949.336.822,00 sebagaimana pada **Lampiran 10** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.25
Mutasi Piutang Retribusi Pasar/Grosir Tahun 2021 dan 2020

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Penambahan | Pembayaran Tahun 2021 | Piutang 2021 (Rp) | Penyisihan 2021 | NRV 2021 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2010 | 114.245.220,00 | 0,00 | 0,00 | 114.245.220,00 | 114.245.220,00 | 0,00 |
| 2011 | 123.061.001,00 | 0,00 | 0,00 | 123.061.001,00 | 123.061.001,00 | 0,00 |
| 2012 | 61.799.028,00 | 0,00 | 0,00 | 61.799.028,00 | 61.799.028,00 | 0,00 |
| 2013 | 54.311.750,00 | 0,00 | 0,00 | 54.311.750,00 | 54.311.750,00 | 0,00 |
| 2014 | 71.485.067,00 | 0,00 | 0,00 | 71.485.067,00 | 71.485.067,00 | 0,00 |
| 2015 | 13.209.910,00 | 0,00 | 0,00 | 13.209.910,00 | 13.209.910,00 | 0,00 |
| 2016 | 184.150.110,00 | 0,00 | 0,00 | 184.150.110,00 | 184.150.110,00 | 0,00 |
| 2018 | 416.873.230,00 | 0,00 | 0,00 | 416.873.230,00 | 416.873.230,00 | 0,00 |
| 2019 | 325.037.928,00 | 0,00 | 0,00 | 325.037.928,00 | 325.037.928,00 | 0,00 |
| 2020 | 585.163.578,00 | 0,00 | 53.444.000,00 | 531.719.578,00 | 531.719.578,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1.341.138.924,00 | 666.655.537,00 | 674.483.387,00 | 241.970.915,09 | 432.512.471,91 |
| Total | 1.949.336.822,00 | 1.341.138.924,00 | 720.099.537,00 | 2.570.376.209,00 | 2.137.863.737,09 | 432.512.471,91 |

b. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp359.170.000,00 mengalami penurunan senilai Rp109.985.000,00 atau 44,14% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp249.185.000,00.

Tabel 5.5.26
Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 dan 2020

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Piutang atas Penetapan 2020 | Penambahan | Pengurangan | Piutang 2021 (Rp) |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| A | Bagian Umum (Lampiran 11) | | | | |
| 2010 | 56.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.035.000,00 |
| 2011 | 2.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520.000,00 |
| 2012 | 2.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580.000,00 |
| 2013 | 16.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.610.000,00 |
| Jumlah | 77.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.745.000,00 |
| B | BPKAD (Lampiran 12) | | | | |
| 2019 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 2020 | 24.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900.000,00 |
| 2021 | 0,00 | 2.500.000,00 | 399.070.000,00 | 365.935.000,00 | 35.635.000,00 |
| Jumlah | 26.040.000,00 | 2.500.000,00 | 399.070.000,00 | 365.935.000,00 | 61.675.000,00 |

| Tahun | Piutang 2020 (Rp) | Piutang atas Penetapan 2020 | Penambahan | Pengurangan | Piutang 2021 (Rp) |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| C | Dinas Kelautan dan Perikanan (Lampiran 13) | | | | |
| 2015 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 2016 | 12.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.425.000,00 |
| 2017 | 49.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.925.000,00 |
| 2018 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 2019 | 39.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000.000,00 |
| 2020 | 38.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900.000,00 |
| 2021 | | 0,00 | 206.000.000,00 | 131.650.000,00 | 74.350.000,00 |
| Jumlah | 145.400.000,00 | 0,00 | 206.000.000,00 | 131.650.000,00 | 219.750.000,00 |
| Total | 249.185.000,00 | 2.500.000,00 | 605.070.000,00 | 497.585.000,00 | 359.170.000,00 |

c. Piutang Retribusi Pengendalian Menara

Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp45.867.840,00 mengalami kenaikan senilai Rp9.546.000,00 atau 26,28% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp36.321.840,00 dan sudah dilakukan penyisihan senilai Rp39.742.887,09 dengan NRV senilai R6.124.952,25 Piutang 2021 secara rinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.27

Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 dan 2020

| NO | NAMA PEMILIK / WAJIB RETRIBUSI | PIUTANGANG 31/12/2020 | PENETAPAN 2021 | TOTAL REALISASI 2021 | PIUTANG 31/12/2021 |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | PT. TOWER BERSAMA | 10.466.265,00 | 25.456.000,00 | 19.092.000,00 | 16.830.265,00 |
| 2 | PT. XL-AXIATA | 20.714.161,00 | 3.182.000,00 | 3.182.000,00 | 20.714.161,00 |
| 3 | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA | 0,00 | 35.002.000,00 | 35.002.000,00 | 0,00 |
| 4 | PT. IDA LOMBOK / PT. KOMET INFRA NUSANTARA | 0,00 | 38.184.000,00 | 38.184.000,00 | 0,00 |
| 5 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 0,00 | 25.456.000,00 | 25.456.000,00 | 0,00 |
| 6 | PT. SARANA INTI PERSADA | 5.141.414,00 | 3.182.000,00 | 0,00 | 8.323.414,00 |
| 7 | PT. PERSADA SOKKA TAMA | 0,00 | 19.092.000,00 | 19.092.000,00 | 0,00 |
| 8 | SOLUSINDO KREASI PRATAMA | 0,00 | 12.728.000,00 | 12.728.000,00 | 0,00 |
| 9 | INDOSAT | 0,00 | 6.364.000,00 | 6.364.000,00 | 0,00 |
| 10 | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKA | 0,00 | 15.910.000,00 | 15.910.000,00 | 0,00 |
| 11 | PROTELINDO / PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 0,00 | 12.728.000,00 | 12.728.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 36.321.840,00 | 197.284.000,00 | 187.738.000,00 | 45.867.840,00 |

d. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo Piutang Pelayanan Kesehatan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp268.262.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.28
Piutang Pelayanan Kesehatan

| No | PUSKESMAS | Uraian | Bulan | Rincian | Tanggal Setor |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 | Penanae | Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan November dan Desember 2021 (Retribusi Pelayanan Kesehatan) | November | 23.122.100,00 | 28 January 2022 |
| | | | Desember | 16.475.000,00 | 28 January 2022 |
| | Saldo 31 Desember 2021 | | | 39.597.100,00 | |
| 2 | Rasanae Timur | Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November, Desember 2021 (Retribusi Pelayanan Kesehatan) | Oktober | 9.875.000,00 | 28 January 2022 |
| | | | November | 9.850.000,00 | 28 January 2022 |
| | | | Desember | 8.322.100,00 | 28 January 2022 |
| | Saldo 31 Desember 2021 | | | 28.047.100,00 | |
| 3 | Jatibaru | Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November, Desember 2021 (Retribusi Pelayanan Kesehatan) | Oktober | 20.050.000,00 | 28 January 2022 |
| | | | November | 14.700.000,00 | 28 January 2022 |
| | | | Desember | 20.550.000,00 | 28 January 2022 |
| | Saldo 31 Desember 2021 | | | 55.300.000,00 | |
| 4 | Mpunda | Dana Klaim BPJS Puskesmas BulanNovember dan Desember 2021 (Retribusi Pelayanan Kesehatan) | November | 21.150.000,00 | 28 January 2022 |
| | | | Desember | 23.400.000,00 | 28 January 2022 |
| | Saldo 31 Desember 2021 | | | 44.550.000,00 | |
| 5 | Kumbe | Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November, Desember 2021 (Retribusi Pelayanan Kesehatan) | Oktober | 7.525.000,00 | 28 January 2022 |
| | | | November | 9.925.000,00 | 28 January 2022 |
| | | | Desember | 5.547.100,00 | 01 maret 2022 |
| | Saldo 31 Desember 2021 | | | 22.997.100,00 | |
| 6 | Paruga | Dana Klaim BPJS Puskesmas BulanNovember dan Desember 2021 (Retribusi Pelayanan Kesehatan) | November | 26.752.100,00 | 28 January 2022 |
| | | | Desember | 39.197.100,00 | 28 January 2022 |
| | Saldo 31 Desember 2021 | | | 65.949.200,00 | |
| 7 | Kolo | Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November, Desember 2021 (Retribusi Pelayanan Kesehatan) | Oktober | 3.600.000,00 | 28 January 2022 |
| | | | November | 5.022.100,00 | 28 January 2022 |
| | | | Desember | 3.200.000,00 | 01 maret 2022 |
| | Saldo 31 Desember 2021 | | | 11.822.100,00 | |
| Jumlah | | | | 268.262.600,00 | |

5.5.1.1.2.3 Piutang Dana Bagi Hasil

31-12-2021 (Rp)
5.809.527.411,00

31-12-2020 (Rp)
10.025.579.119,00

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima menyatakan bahwa Piutang DBH akan diakui apabila telah diterbitkan Peraturan Kurang Bayar.

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp5.809.527.411,00 mengalami penurunan senilai Rp4.216.051.708,00 atau 42,05 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp10.025.579.119,00 rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.29
Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | Koreksi Piutang 2020 | | | 2021 | | | Piutang 2021 (Rp) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Piutang 2020 pada LKPD TA 2020 (Rp) | Total Koreksi Piutang 2020 | Penyesuaian Piutang 2020 pada LKPD TA 2020(Rp) | Penetapan berdasarkan Perpres 113 Tahun 2020 | Pembayaran Piutang | Pembayaran Tahun Berjalan | |
| 1 | 2 | 3 | 7=3-6 | 8=6 | 9 | 11 | 12 | 13=8+9-10-11-12 |
| DBH Pemerintah Pusat | | | | | | | | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | | | | | | | | |
| 1 | DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Kab/Kota | 595.993.792,00 | (595.993.792,00) | - | - | - | - | - |
| 2 | DBH PBB menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Bagi Rata | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Biaya Pemungutan PBB Sektor Migas | 26.974.835,00 | (24.151.335,00) | 2.823.500,00 | 21.365.000,00 | 2.823.500,00 | 21.365.000,00 | - |
| 4 | DBH PBB Biaya Pemungutan Sektor Lainnya | 3.291.931,00 | 7.486.024,00 | 10.777.955,00 | - | 10.777.955,00 | - | - |
| 5 | DBH PBB Bagian Daerah Sektor Migas | 16.276.775,00 | 64.937.525,00 | 81.214.300,00 | 615.304.000,00 | 81.214.300,00 | 615.304.000,00 | - |
| 6 | DBH PBB Bagian Daerah Sektor Lainnya | 85.956.118,00 | 215.599.007,00 | 301.555.125,00 | 61.505.000,00 | 301.555.125,00 | 61.505.000,00 | - |
| 7 | DBH PBB untuk Provinsi/Kabupaten/Kota sektor pertambangan lainnya | | | | 6.119.000,00 | | 6.119.000,00 | |
| 8 | DBH Pajak PPh Pasal 21 | - | 1.623.297.899,00 | 1.623.297.899,00 | 6.106.314.000,00 | 1.537.769.600,00 | 6.106.314.000,00 | 85.528.299,00 |
| 9 | DBH Pajak PPh Pasal 25/29 | - | 234.023.340,00 | 234.023.340,00 | 271.679.000,00 | 80.838.000,00 | 271.679.000,00 | 153.185.340,00 |
| 10 | DBH PBB Bagi Rata | - | 1.991.959.998,00 | 1.991.959.998,00 | 2.913.675.000,00 | 1.710.380.317,00 | 2.913.675.000,00 | 281.579.681,00 |

| No | Uraian | Koreksi Piutang 2020 | | | 2021 | | | Piutang 2021 (Rp) |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Piutang 2020 pada LKPD TA 2020 (Rp) | Total Koreksi Piutang 2020 | Penyesuaian Piutang 2020 pada LKPD TA 2020(Rp) | Penetapan berdasarkan Perpres 113 Tahun 2020 | Pembayaran Piutang | Pembayaran Tahun Berjalan | |
| 1 | 2 | 3 | 7=3-6 | 8=6 | 9 | 11 | 12 | 13=8+9-10-11-12 |
| 11 | DBH Cukai Hasil Tembakau TA. 2019 | 76.286.930,00 | 276.383.420,00 | 352.670.350,00 | 2.309.484.000,00 | 352.670.350,00 | 2.136.272.700,00 | 173.211.300,00 |
| Jumlah I | | 804.780.381,00 | 3.793.542.086,00 | 4.598.322.467,00 | 12.305.445.000,00 | 4.078.029.147,00 | 12.132.233.700,00 | 693.504.620,00 |
| | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA | | | | | | | |
| 12 | DBH SDA Pertambangan Umum Royalty | 5.678.186.312,00 | 2.452.040.391,00 | 8.130.226.703,00 | 11.529.810.000,00 | 8.130.226.703,00 | 11.529.810.000,00 | - |
| 13 | DBH SDA Pertambangan Panas Bumi | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | DBH SDA Kehutanan | 69.049.112,00 | 19.144.951,00 | 88.194.063,00 | 23.016.000,00 | 88.194.063,00 | 23.016.000,00 | - |
| 15 | DBH SDA Kehutanan TA 2019 | - | 2.563.441,00 | 2.563.441,00 | - | 2.563.441,00 | - | - |
| 16 | DBH SDA Perikanan | 229.300.150,00 | 316.881.000,00 | 546.181.150,00 | 1.128.319.000,00 | 229.300.150,00 | 1.128.319.000,00 | 316.881.000,00 |
| Jumlah II | | 5.976.535.574,00 | 2.790.629.783,00 | 8.767.165.357,00 | 12.681.145.000,00 | 8.450.284.357,00 | 12.681.145.000,00 | 316.881.000,00 |
| Jumlah I + Jumlah II | | 6.781.315.955,00 | 6.584.171.869,00 | 13.365.487.824,00 | 24.986.590.000,00 | 12.528.313.504,00 | 24.813.378.700,00 | 1.010.385.620,00 |
| DBH Pemerintah Provinsi | | | | | | | | |
| 1 | DBH Pajak Kendaraan Bermotor | 971.191.446,00 | | 971.191.446,00 | 7.120.769.264,00 | 971.191.446,00 | 5.701.468.899,00 | 1.419.300.365,00 |
| 2 | DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 693.682.508,50 | | 693.682.508,50 | 5.604.703.473,00 | 693.682.508,50 | 4.681.003.042,00 | 923.700.431,00 |
| 3 | DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 1.575.383.265,50 | | 1.575.383.265,50 | 13.004.005.655,00 | 1.575.383.265,50 | 10.554.674.701,00 | 2.449.330.954,00 |
| 4 | DBH Pajak Air Permukaan | 4.005.944,00 | | 4.005.944,00 | 37.553.501,00 | 4.005.944,00 | 30.743.460,00 | 6.810.041,00 |
| 5 | DBH Pajak Rokok | - | | - | 16.515.160.964,00 | - | 16.515.160.964,00 | - |
| Jumlah | | 3.244.263.164,00 | - | 3.244.263.164,00 | 42.282.192.857,00 | 3.244.263.164,00 | 37.483.051.066,00 | 4.799.141.791,00 |

| No | Uraian | Koreksi Piutang 2020 | | | 2021 | | | Piutang 2021 (Rp) |
|----|--------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Piutang 2020 pada LKPD TA 2020 (Rp) | Total Koreksi Piutang 2020 | Penyesuaian Piutang 2020 pada LKPD TA 2020(Rp) | Penetapan berdasarkan Perpres 113 Tahun 2020 | Pembayaran Piutang | Pembayaran Tahun Berjalan | |
| 1 | 2 | 3 | 7=3-6 | 8=6 | 9 | 11 | 12 | 13=8+9-10-11-12 |
| | Total | 10.025.579.119,00 | 6.584.171.869,00 | 16.609.750.988,00 | 67.268.782.857,00 | 15.772.576.668,00 | 62.296.429.766,00 | 5.809.527.411,00 |

| | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 5.5.1.1.2.4 Piutang Deviden | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | 0,00 | 0,00 |

Saldo Piutang Deviden pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00

| | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 5.5.1.1.2.5 Piutang Lainnya | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | 0,00 | 35.000.000,00 |

Saldo Piutang Lainnya pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 5.5.1.1.2.6 Belanja Dibayar Dimuka | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | 2.969.280.200,00 | 381.153.304,45 |

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp2.969.280.200,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.588.126.895,55 atau 679,03% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp381.153.304,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.30

Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2021 dan 2020

| No | SKPD | Keterangan | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Bagian Administrasi Pemerintah umum Setda | Sewa Kantor Lurah Dan Mess | 0,00 | 41.500.000,00 |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak | Sewa Rumah Aspirasi kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Tahun 2021 | 13.750.000,00 | 13.750.000,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum | Aset tetap Renovasi | 0,00 | 201.368.079,05 |
| | | jaringan Transmisi | 0,00 | 124.535.225,40 |
| 4 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Pembangunan Gedung Perpustakaan | 724.074.200,00 | 0,00 |
| 5 | Sekretariat Daerah | Pembangunan Sayap kantor Walikota Bima | 2.231.458.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | | 2.969.282.200,00 | 381.153.304,45 |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.5.1.1.2.7 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 31-12-2021 (Rp) 2.778.761.737,25 | 31-12-2020 (Rp) 2.845.318.495,90 |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo Piutang Lancar atas Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah yang sudah memiliki Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua bahwa piutang ganti rugi disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp2.778.761.737,25 mengalami penurunan senilai Rp66.556.758,65 atau 2,34% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp2.845.318.495,90 sebagaimana pada **Lampiran 14**.

| | | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5.5.1.1.3 | Persediaan | 31-12-2021 (Rp) 10.469.710.895,88 | 31-12-2020 (Rp) 17.698.117.595,74 |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

Saldo Persediaan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp10.469.710.895,88 mengalami penurunan senilai Rp7.228.406.699,86 atau 40,84% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp17.698.117.595,74.

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Bahan Pakai Habis/material yang terdiri dari obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis, ATK, bibit tanaman, benih ikan, barang untuk diserahkan kepada masyarakat dan barang Persediaan lainnya pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bima tahun 2021 dan tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.5.31
Laporan Persediaan Per SKPD Tahun 2021

| NO. | NAMA SKPD | ATK | BAHAN LAINNYA | BAHAN CETAK | OBAT-OBATAN | BAHAN KOMPUTER | BIBIT TERNAK | KERTAS DAN COVER | PERSEDIAAN |
|-----|------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.000,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | | 136.863.995,00 | 17.016.800,00 | 9.565.140.161,24 | | | | 9.719.020.956,24 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NO. | NAMA SKPD | ATK | BAHAN LAINNYA | BAHAN CETAK | OBAT-OBATAN | BAHAN KOMPUTER | BIBIT TERNAK | KERTAS DAN COVER | PERSEDIAAN |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|
| 8 | DINAS SOSIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | DINAS KETAHANAN PANGAN | | 28.080.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.080.050,00 |
| 12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 455.000,00 | 0,00 | 262.111.435,64 | 0,00 | 13.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 276.466.435,64 |
| 14 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | | 304.632.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.632.014,00 |
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | 0,00 | 58.525.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.525.000,00 |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 40.000,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0,00 | 0,00 | 39.178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.178.200,00 |
| 18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180.000,00 | 200.000,00 | 4.880.000,00 |
| 21 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | DINAS PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352.240,00 |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | SEKRETARIAT DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | KECAMATAN RASANAE BARAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | KECAMATAN RASANAE TIMUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | KECAMATAN ASAKOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | KECAMATAN MPUNDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | KECAMATAN RABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| 31 | INSPEKTORAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) | 272.000,00 | 0,00 | 30.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970.000,00 | 34.622.000,00 |
| 34 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NO. | NAMA SKPD | ATK | BAHAN LAINNYA | BAHAN CETAK | OBAT-OBATAN | BAHAN KOMPUTER | BIBIT TERNAK | KERTAS DAN COVER | PERSEDIAAN |
|-------|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|
| | SDM | | | | | | | | |
| TOTAL | | 1.821.000,00 | 164.944.045,00 | 407.711.435,64 | 9.872.124.415,24 | 13.900.000,00 | 4.180.000,00 | 5.030.000,00 | 10.469.710.895,88 |

Tabel 5.5.32
Laporan Persediaan Per SKPD Tahun 2020

| NO. | SKPD | JENIS PERSEDIAAN | | | | | | | | | BARANG UNTUK DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT | TOTAL |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| | | ATK | BELANJA CETAK | MATERIAL/ BAHAN | BENDA POS | BAHAN MAKANAN POKOK | ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK | BAHAN/ BIBIT TERNAK | OBAT-OBATAN | ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 39.446.663,78 | 299.774.338,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.704.239.530,71 | 0,00 | 0,00 | 4.043.460.533,21 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.513.041.284,36 | 11.513.041.284,36 |
| 4 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABIMARUM AH SAKIT UMUM DAERAH KOTABIMARUM | 0,00 | 34.758.841,20 | 230.940.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145.268.632,33 | 0,00 | 0,00 | 1.410.967.723,53 |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 6 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.216.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.216.800,00 |

| NO | SKPD | JENIS PERSEDIAAN | | | | | | | | | BARANG UNTUK DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT | TOTAL |
|--------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| | | ATK | BELANJA CETAK | MATERIAL/ BAHAN | BENDA POS | BAHAN MAKANAN POKOK | ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK | BAHAN/ BIBIT TERNAK | OBAT-OBATAN | ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH | | |
| 7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 105.724.000,00 | 82.664.515,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.534.200,00 | 0,00 | 0,00 | 193.922.715,64 |
| 8 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.078.364,00 | 0,00 | 0,00 | 281.078.364,00 |
| 9 | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | 6.795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.795.000,00 |
| 10 | DINAS KOOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0,00 | 21.601.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.601.650,00 |
| 11 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 52.500,00 | 0,00 | 4.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.892.500,00 |
| 12 | DINAS PARIWISATA | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 13 | DINAS PERTANIAN | 0,00 | 96.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.889.275,00 | 0,00 | 0,00 | 64.986.025,00 |
| 14 | KECAMATAN ASAKOTA | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 15 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) | 2.775.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.775.000,00 |
| JUALAH | | 110.871.500,00 | 217.363.420,62 | 535.554.588,72 | 60.000,00 | 120.216.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.201.010.002,04 | 0,00 | 11.513.041.284,36 | 17.698.117.595,74 |

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

31-12-2021 (Rp)
14.612.249.186,29

31-12-2020 (Rp)
13.412.370.394,00

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Saldo Investasi Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp14.612.249.186,29 mengalami peningkatan senilai Rp1.199.878.792,29 atau 8,95 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp13.412.370.394,00 yang terdiri dari.

Tabel 5.5.33
Laporan Investasi Jangka Panjang Tahun 2021 dan 2020

| No | Investasi Jangka Panjang | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Investasi Permanen | 14.612.249.186,29 | 13.412.370.394,00 |
| Jumlah | | 14.612.249.186,29 | 13.412.370.394,00 |

5.5.1.2.1 **Investasi Non Permanen** **31-12-2021 (Rp)** **31-12-2020 (Rp)**
- Dana Bergulir **0,00** **0,00**

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima tersebut merupakan dana bergulir yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada kelompok usaha ekonomi produktif maupun masyarakat melalui dinas/instansi terkait dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang harus dikembalikan beserta bagi hasil keuntungannya dalam jangka waktu tertentu.

Saldo Investasi Non Permanen pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

Mutasi Dana Bergulir tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.34
Data Dana Bergulir Tahun 2021 dan 2020

| No | SKPD Pengelola | 31/12/2020 | Penambahan | Pengurangan | 31/12/2021 | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 1.051.968.423,00 | 0,00 | 1.036.753,00 | 1.050.931.670,00 | Lampiran 15 |
| 2 | Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah | 2.419.583.066,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419.583.066,00 | Lampiran 16 |

| No | SKPD Pengelola | 31/12/2020 | Penambahan | Pengurangan | 31/12/2021 | Keterangan |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 3 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (ex. BPMPK) | 60.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.975.000,00 | Lampiran 17 |
| Jumlah | | 3.532.526.489,00 | 0,00 | 1.036.753,00 | 3.531.489.736,00 | |

Sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima, dilakukan penyisihan atas dana bergulir dengan persentase penyisihan sebagai berikut.

Tabel 5.5.35
Perhitungan Dana Bergulir sesuai Kebijakan Akuntansi

| No | Umur Tunggakan Dana Bergulir | Kategori Penyaluran Dana Bergulir | % Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih |
|----|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 0 s.d 2 thn | Lancar | 0 % |
| 2 | > 2 thn s.d 3 thn | Kurang Lancar | 20 % |
| 3 | >3 thn s.d 4 thn | Diragukan | 50 % |
| 4 | > 4 thn ke atas | Macet | 100 % |

Dari jumlah Dana Bergulir senilai Rp3.531.489.736,0000 telah dilakukan penyisihan senilai Rp3.531.489.736,00 sehingga nilai Dana Bergulir neto adalah senilai Rp0,00.

Rincian dana bergulir beserta perhitungan penyisihannya masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.36
Perhitungan Dana Bergulir Per SKPD Tahun 2021

| No | SKPD Pengelola | 31/12/2021 | Penyisihan Tidak Tertagih | NRV 31 Desember 2020 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 1.050.931.670,00 | 1.050.931.670,00 | 0,00 |
| 2 | Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah | 2.419.583.066,00 | 2.419.583.066,00 | 0,00 |
| 3 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (ex. BPMPK) | 60.975.000,00 | 60.975.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 3.531.489.736,00 | 3.531.489.736,00 | 0,00 |

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <u>31-12-2021 (Rp)</u> | <u>31-12-2020 (Rp)</u> |
| 14.612.249.186,29 | 13.412.370.394,00 |

Saldo Investasi Permanen pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.612.249.186,29 dan Tahun 2020 senilai Rp13.412.370.394,00. Merupakan Akumulasi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bima pada Perusahaan Milik Daerah dengan menggunakan metode Ekuitas dan Metode Biaya.

Saldo Investasi Permanen tahun 2021 adalah berupa penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.37

Perhitungan Menggunakan Metode Ekuitas

| No | BUMD | Prosesntasi Kepemilikan Saham | Per 31 Des 2021 | Per 31 Des 2020 | Naik/ (turun) |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | PERUMDA Bima Aneka | 100,00% | 1.199.878.792,29 | 0,00 | 1.199.878.792,29 |
| J u m l a h | | | 1.199.878.792,29 | 0,00 | 1.199.878.792,29 |

Tabel 5.5.38

Perhitungan Menggunakan Metode Biaya

Data Penyertaan Modal Tahun 2021 dan 2020

| No | BUMD | Prosesntasi Kepemilikan Saham | Per 31 Des 2021 | Per 31 Des 2020 | Naik/ (turun) |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | PT. Bank NTB | 1,30% | 11.067.621.350,00 | 11.067.621.350,00 | 0,00 |
| 2 | PT. Jamkrida NTB Bersaing | 3,08% | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | PD. BPR NTB | 6,22% | 1.044.749.044,00 | 1.044.749.044,00 | 0,00 |
| 4 | KPN Sabua Ade | 2,37% | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 |
| J u m l a h | | | 13.412.370.394,00 | 13.412.370.394,00 | 0,00 |

Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima bahwa Investasi pada PT. Bank NTB, PT. Jamkrida NTB Bersaing, PD. BPR NTB menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham kurang dari 20%. Sedangkan sesuai PSAP 6 paragraf 40 menyatakan *bahwa hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatanya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.*

| 5.5.1.3 Aset Tetap | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1.864.964.691.001,61 | 1.841.488.709.197,05 |

Saldo Nilai Buku Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp 1.864.964.691.001,61, mengalami kenaikan senilai Rp23.475.981.804,56 atau 1.27% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai

Rp1.841.488.709.197,05 sebagaimana pada **Lampiran 18** dan rincian per Perangkat Daerah (PD) pada **Lampiran 19**.

Tabel 5.5.38
Rincian Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Tanah | 547.910.105.241,37 | 542.813.686.849,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 292.753.815.364,26 | 266.321.791.632,74 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 614.844.747.188,93 | 576.481.970.544,44 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.173.746.744.126,20 | 1.128.750.005.178,81 |
| 5 | Aset tetap lainnya | 80.079.328.699,71 | 76.900.049.609,80 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) | 29.496.862.800,00 | 3.412.148.409,46 |
| J u m l a h | | 2.738.831.603.420,47 | 2.594.679.652.224,25 |
| Akumulasi Penyusutan | | (873.866.912.418,86) | (753.190.943.027,20) |
| Nilai Buku Aset Tetap | | 1.864.964.691.001,61 | 1.841.488.709.197,05 |

Tabel 5.5.39
Mutasi Aset Tetap tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian | 2020 (Rp) | Mutasi | | 2021 (Rp) |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Tanah | 542.813.686.849,00 | 5.960.950.000,00 | 864.531.607,63 | 547.910.105.241,37 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 266.321.791.632,74 | 38.823.686.794,97 | 12.391.663.063,45 | 292.753.815.364,26 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 576.481.970.544,44 | 50.425.364.610,14 | 12.062.587.965,65 | 614.844.747.188,93 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.128.750.005.178,81 | 62.076.478.342,18 | 17.079.739.394,79 | 1.173.746.744.126,20 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 76.900.049.609,80 | 10.248.284.893,91 | 7.069.005.804,00 | 80.079.328.699,71 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) | 3.412.148.409,46 | 29.496.862.800,00 | 3.412.148.409,46 | 29.496.862.800,00 |
| Jumlah | | 2.594.679.652.224,25 | 197.031.627.441,20 | 52.879.676.244,98 | 2.738.831.603.420,47 |
| Akumulasi Penyusutan | | (753.190.943.027,20) | (132.895.824.763,01) | (12.219.855.371,35) | (873.866.912.418,86) |
| Nilai Buku Aset Tetap | | 1.841.488.709.197,05 | 64.149.474.776,19 | 40.659.820.873,63 | 1.864.964.691.001,61 |

Penambahan Aset Tetap senilai Rp197.385.914.441,20 terdiri dari:

- Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima senilai Rp6.849.944.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 937/029/07.3/2021 Tanggal 19 April 2021; Hibah tersebut di atas sebagaimana pada **Lampiran 20**.
- Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 terealisasi senilai Rp138.378.990.564,74 dikurangi dengan Bank Garansi senilai Rp2.955.530.200,00 sehingga Belanja Modal menjadi senilai Rp135.423.460.364,74;
- Kapitalisasi atas Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp665.252.000,00;
- Kapitalisasi atas Belanja Barang dan Jasa senilai Rp7.440.926.071,18;
- Koreksi tambah atas kurang catat nilai perolehan barang pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp445.903.304,45;
- Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp40.623.558.316,17; dan
- Reklas antar Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp5.582.583.384,66.

Pengurangan Aset Tetap senilai Rp51.730.384.637,35 terdiri dari:

- a. Pengurangan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/508/900.32/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima senilai Rp2.162.490.827,24 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- b. Pengurangan Aset Tetap atas Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/502/900.32/XII/2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Proses Pembongkaran Tahun 2021 dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp1.442.270.333,34;
- c. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya atas perubahan kondisi Rusak Berat dan Hilang senilai Rp1.757.241.208,57;
- d. Pengurangan atas Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp40.623.558.316,17; dan
- e. Reklasifikasi antar KIB senilai Rp5.582.583.384,66.
- f. Pengurangan Aset Tetap yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp1.311.532.175,00;

| 5.5.1.3.1 Tanah | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 547.910.105.241,37 | 542.813.686.849,00 |

Tanah per 31 Desember 2021 senilai Rp547.910.105.241,37 mengalami kenaikan senilai Rp5.096.418.392,37 atau 0,93% dibandingkan tahun 2020 Rp542.813.686.849,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.40
Rincian Aset Tanah Tahun 2021 dan 2020

| No. | Tanah | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|--------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Tanah Persil | 98.249.580.046,21 | 97.645.998.653,84 |
| 2 | Tanah Non Persil | 283.060.720.304,50 | 281.067.883.304,50 |
| 3 | Lapangan | 166.599.804.890,66 | 164.099.804.890,66 |
| Jumlah | | 547.910.105.241,37 | 542.813.686.849,00 |

Mutasi Tanah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|----------------------------------|--------------------|
| Saldo Awal per 1 Januari 2021 | 542.813.686.849,00 |
| Penambahan Tahun 2021 | 5.960.950.000,00 |
| Pengurangan Tahun 2021 | 864.531.607,63 |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 | 547.910.105.241,37 |

Penambahan Aset Tanah Tahun 2021 senilai Rp.5.960.950.000,00 berasal dari:

- a. Belanja modal tanah Tahun 2021 senilai Rp737.365.000,00;
- b. Kapitalisasi atas belanja Honorarium senilai Rp.3.710.000,00;
- c. Kapitalisasi atas belanja barang dan jasa senilai Rp.99.022.000,00;
- d. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima senilai Rp4.887.678.000,00; berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 937/029/07.3/2021 Tanggal 19 April 2021; **Lampiran 20.**
- e. Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp113.175.000,00;
- f. Koreksi tambah atas kurang catat nilai perolehan barang pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp120.000.000,00;

Pengurangan Aset Tetap Tanah selama Tahun 2021 senilai Rp.232.600.000,00 terdiri dari :

- a. Pengurangan Aset Tetap Tanah atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/508/900.32/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima senilai Rp721.391.607,63 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp19.965.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pengurangan Aset Tetap yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp10.000.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pengurangan atas Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp113.175.000,00;

Selama tahun 2021 tidak ada penambahan penerbitan sertifikat tanah yang telah diajukan oleh BPKAD Bidang BMD tahun 2012 dan Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Bima tahun 2016 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bima. Upaya sertifikasi akan terus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan prioritas pembangunan di lingkungan Kota Bima.

Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 21.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 terkait penerbitan sertifikat tanah masih dalam proses adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.41
Penerbitan Sertifikat Tanah masih dalam Proses

| No. | Uraian | 2018 | | Terbit 2021 | | Sisa dalam proses s/d Tahun 2021 | | Keterangan |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | Jumlah Bidang | Luas (m ²) | Jumlah Bidang | Luas (m ²) | Jumlah Bidang | Luas (m ²) | |
| 1 | Pengajuan Penerbitan Sertifikat 2012 | 8 | 36.272 | 0,00 | 0,00 | 8 | 36.272 | BPKAD Bidang Aset |
| 2 | Pengajuan Penerbitan Sertifikat 2016 | 6 | 12.981 | 0,00 | 0,00 | 6 | 12.981 | Bag. Administrasi Pemerintahan |
| | JUMLAH | 14 | 49.253 | 0,00 | 0,00 | 14 | 49.253 | |

5.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin

2021 (Rp)
292.753.815.364,26

2020 (Rp)
266.321.791.632,74

Saldo Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp292.753.815.364,26 mengalami kenaikan senilai Rp26.432.023.731,52 atau 9,92% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp266.321.791.632,74 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.42
Rincian Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

| No. | Peralatan dan Mesin | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Alat Besar Darat | 11.500.431.811,00 | 11.500.431.811,00 |
| 2 | Alat Besar Apung | 49.527.500,00 | 49.527.500,00 |
| 3 | Alat Bantu | 1.365.139.640,83 | 1.291.190.890,83 |
| 4 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 63.550.200.409,99 | 62.067.103.877,65 |
| 5 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 3.111.735.695,68 | 3.100.350.695,68 |
| 6 | Alat Angkutan Apung Bermotor | 8.831.355.159,50 | 8.811.145.393,00 |
| 7 | Alat Angkutan Apung Tak Bermotor | 539.792.000,00 | 498.592.000,00 |
| 8 | Alat Bengkel Bermesin | 998.511.325,11 | 917.911.325,11 |
| 9 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 296.032.674,02 | 296.032.674,02 |
| 10 | Alat Ukur | 2.043.682.647,33 | 1.896.259.384,83 |
| 11 | Alat Pengolahan | 5.240.682.873,90 | 4.942.790.098,90 |
| 12 | Alat Kantor | 12.443.411.004,34 | 11.102.269.875,55 |
| 13 | Alat Rumah Tangga | 34.524.718.749,55 | 32.771.165.269,70 |
| 14 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 7.933.320.874,24 | 7.572.162.275,16 |
| 15 | Alat Studio | 10.066.360.275,05 | 9.745.922.675,05 |
| 16 | Alat Komunikasi | 2.740.921.447,74 | 1.647.321.747,74 |
| 17 | Peralatan Pemancar | 1.912.524.975,28 | 1.907.524.975,28 |
| 18 | Alat Kedokteran | 39.565.151.020,02 | 34.235.553.411,77 |
| 19 | Alat Kesehatan Umum | 4.335.350.842,17 | 1.300.898.712,17 |
| 20 | Unit Alat Laboratorium | 9.990.733.456,91 | 7.951.683.561,69 |
| 21 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 260.523.708,65 | 257.773.708,65 |
| 22 | Alat Peraga Praktek Sekolah | 18.992.060.323,12 | 18.749.367.823,12 |
| 23 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 159.486.875,00 | 9.165.000,00 |
| 24 | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 184.444.000,00 | 184.444.000,00 |
| 25 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 447.245.000,00 | 447.245.000,00 |
| 26 | Peralatan Laboratorium Hydrodinamica | 193.498.085,75 | 8.300.000,00 |
| 27 | Senjata Api | 24.906.800,00 | 24.906.800,00 |
| 28 | Persenjataan Non Senjata Api | 29.375.000,00 | 29.375.000,00 |
| 29 | Alat Khusus Kepolisian | 8.210.350,00 | 2.310.350,00 |
| 30 | Komputer Unit | 36.647.215.401,80 | 29.353.379.379,40 |
| 31 | Peralatan Komputer | 10.920.395.633,28 | 9.959.666.612,44 |
| 32 | Alat Pengeboran Mesin | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Alat Deteksi | 101.950.000,00 | 101.950.000,00 |
| 34 | Alat Pelindung | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |

| No. | Peralatan dan Mesin | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 35 | Alat Sar | 333.305.000,00 | 330.805.000,00 |
| 36 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 2.979.463.600,00 | 2.979.463.600,00 |
| 37 | Peralatan Olah Raga | 402.151.204,00 | 247.801.204,00 |
| Jumlah | | 292.753.815.364,26 | 266.321.791.632,74 |
| Akumulasi Penyusutan | | (195.330.014.404,86) | (165.627.590.209,20) |
| Nilai Buku Peralatan dan Mesin | | 97.423.800.959,40 | 100.694.201.423,54 |

Tabel 5.5.43
Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian | 2020 (Rp) | MUTASI | | 2021 (Rp) |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Alat Besar Darat | 11.500.431.811,00 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 11.500.431.811,00 |
| 2 | Alat Besar Apung | 49.527.500,00 | - | - | 49.527.500,00 |
| 3 | Alat Bantu | 1.291.190.890,83 | 88.432.620,00 | 14.483.870,00 | 1.365.139.640,83 |
| 4 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 62.067.103.877,65 | 7.846.227.200,00 | 6.363.130.667,66 | 63.550.200.409,99 |
| 5 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 3.100.350.695,68 | 11.385.000,00 | - | 3.111.735.695,68 |
| 6 | Alat Angkutan Apung Bermotor | 8.811.145.393,00 | 2.695.533.393,00 | 2.675.323.626,50 | 8.831.355.159,50 |
| 7 | Alat Angkutan Apung Tak Bermotor | 498.592.000,00 | 41.200.000,00 | - | 539.792.000,00 |
| 8 | Alat Bengkel Bermesin | 917.911.325,11 | 96.481.250,00 | 15.881.250,00 | 998.511.325,11 |
| 9 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 296.032.674,02 | 21.261.850,00 | 21.261.850,00 | 296.032.674,02 |
| 10 | Alat Ukur | 1.896.259.384,83 | 270.543.262,50 | 123.120.000,00 | 2.043.682.647,33 |
| 11 | Alat Pengolahan | 4.942.790.098,90 | 297.892.775,00 | - | 5.240.682.873,90 |
| 12 | Alat Kantor | 11.102.269.875,55 | 1.594.261.744,79 | 253.120.616,00 | 12.443.411.004,34 |
| 13 | Alat Rumah Tangga | 32.771.165.269,70 | 2.351.073.553,13 | 597.520.073,28 | 34.524.718.749,55 |
| 14 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 7.572.162.275,16 | 436.714.100,00 | 75.555.500,92 | 7.933.320.874,24 |
| 15 | Alat Studio | 9.745.922.675,05 | 362.228.400,00 | 41.790.800,00 | 10.066.360.275,05 |
| 16 | Alat Komunikasi | 1.647.321.747,74 | 1.285.124.700,00 | 191.525.000,00 | 2.740.921.447,74 |
| 17 | Peralatan Pemancar | 1.907.524.975,28 | 25.831.940,00 | 20.831.940,00 | 1.912.524.975,28 |
| 18 | Alat Kedokteran | 34.235.553.411,77 | 5.352.471.478,25 | 22.873.870,00 | 39.565.151.020,02 |
| 19 | Alat Kesehatan Umum | 1.300.898.712,17 | 3.088.642.535,00 | 54.190.405,00 | 4.335.350.842,17 |
| 20 | Unit Alat Laboratorium | 7.951.683.561,69 | 2.040.093.780,22 | 1.043.885,00 | 9.990.733.456,91 |
| 21 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 257.773.708,65 | 2.750.000,00 | - | 260.523.708,65 |
| 22 | Alat Peraga Praktek Sekolah | 18.749.367.823,12 | 1.259.192.500,00 | 1.016.500.000,00 | 18.992.060.323,12 |
| 23 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 9.165.000,00 | 150.321.875,00 | - | 159.486.875,00 |
| 24 | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 184.444.000,00 | - | - | 184.444.000,00 |
| 25 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 447.245.000,00 | - | - | 447.245.000,00 |
| 26 | Peralatan Laboratorium | 8.300.000,00 | 185.198.085,75 | - | 193.498.085,75 |

| No. | Uraian | 2020 (Rp) | MUTASI | | 2021 (Rp) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| | Hydrodinamica | | | | |
| 27 | Senjata Api | 24.906.800,00 | - | - | 24.906.800,00 |
| 28 | Persenjataan Non Senjata Api | 29.375.000,00 | - | - | 29.375.000,00 |
| 29 | Alat Khusus Kepolisian | 2.310.350,00 | 5.900.000,00 | - | 8.210.350,00 |
| 30 | Komputer Unit | 29.353.379.379,40 | 7.720.270.602,38 | 426.434.579,98 | 36.647.215.401,80 |
| 31 | Peralatan Komputer | 9.959.666.612,44 | 1.108.004.149,95 | 147.275.129,11 | 10.920.395.633,28 |
| | | | 124.800.000,00 | 124.800.000,00 | - |
| 32 | Alat Deteksi | 101.950.000,00 | - | - | 101.950.000,00 |
| 33 | Alat Pelindung | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 34 | Alat Sar | 330.805.000,00 | 2.500.000,00 | - | 333.305.000,00 |
| 35 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 2.979.463.600,00 | - | - | 2.979.463.600,00 |
| 36 | Peralatan Olah Raga | 247.801.204,00 | 154.350.000,00 | - | 402.151.204,00 |
| J u m l a h | | 266.321.791.632,74 | 38.823.686.794,97 | 12.391.663.063,45 | 292.753.815.364,26 |
| Akumulasi Penyusutan | | (165.627.590.209,20) | (36.433.909.419,01) | (6.731.485.223,35) | (195.330.014.404,86) |
| Nilai Buku Peralatan dan Mesin | | 100.694.201.423,54 | 2.389.777.375,96 | 5.660.177.840,10 | 97.423.800.959,40 |

| U r a i a n | Jumlah (Rp) |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Akhir per 31 Desember 2020 | 266.321.791.632,74 |
| Penambahan Tahun 2021 | 38.823.686.794,97 |
| Pengurangan Tahun 2021 | 12.391.663.063,45 |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 | 292.753.815.364,26 |
| Akumulasi Penyusutan | (195.330.014.404,86) |
| Nilai Buku Per 31 Desember 2021 | 97.423.800.959,40 |

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2021 senilai Rp38.823.686.794,97 berasal dari:

- Belanja Modal tahun 2021 senilai Rp28.081.390.647,00;
- Kapitalisasi atas Belanja Pegawai atas Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp186.923.388,89;
- Kapitalisasi atas belanja barang dan jasa konsultan perencana serta konsultan pengawasan senilai Rp213.331.000,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) selama tahun 2021 senilai Rp9.251.105.933,88;
- Reklas dari aset tetap Tanah yang dicatat sebagai peralatan dan mesin senilai Rp19.965.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Reklas dari aset tetap Gedung dan Bangunan yang dicatat sebagai peralatan dan mesin senilai Rp930.054.412,70 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Reklas dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dicatat sebagai peralatan dan mesin senilai Rp70.198.012,50 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Reklas dari Aset Tetap Lainnya yang dicatat sebagai peralatan dan mesin senilai Rp70.718.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2021 senilai Rp12.391.663.063,45 terdiri atas :

- Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) selama tahun 2021 senilai Rp9.251.105.933,88;
- Pengurangan Aset Tetap yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp1.250.197.771,00 (**Lampiran 21**);

- c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp8.318.150,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp124.800.000,00 pada Dinas Pariwisata;
- e. Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas perubahan kondisi Rusak Berat, dan Hilang 2021 senilai Rp1.757.241.208,57.

Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor: 21.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 terkait kendaraan dinas tidak didukung BPKB adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.44
Kendaraan Dinas Yang Tidak Didukung BPKB

| No. | Uraian | Audited 2019 | | Sudah Ada Tahun 2021 | | Belum Ada | |
|-----|--------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | | Jumlah (unit) | Nilai (Rp) | Jumlah (unit) | Nilai (Rp) | Jumlah (unit) | Nilai (Rp) |
| 1 | Mobil Tangki/Tinja | 1 | 125.000.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 125.000.000,00 |
| 2 | Pick Up | 1 | 170.092.500,00 | 0 | 0,00 | 1 | 170.092.500,00 |
| 3 | Semi Trailer | 2 | 80.000.000,00 | 0 | 0,00 | 2 | 80.000.000,00 |
| 4 | Sepeda Motor | 38 | 621.261.450,00 | 0 | 0,00 | 38 | 577.659.450,00 |
| 5 | Station Wagon | 10 | 2.217.272.000,00 | 0 | 0,00 | 10 | 2.217.272.000,00 |
| 6 | Truck + Attachment | 7 | 655.750.000,00 | 0 | 0,00 | 7 | 655.750.000,00 |
| | JUMLAH | 59 | 3.869.375.950,00 | 0 | 0,00 | 59 | 3.825.773.950,00 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| 5.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan | 615.716.394.188,93 | 576.481.970.544,44 |

Saldo Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp615.716.394.188,93 mengalami kenaikan senilai Rp39.234.423.644,49 atau 6,81% dibanding dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp576.481.970.544,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.45
Nilai Bangunan dan Gedung Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan 2020

| No. | Gedung dan Bangunan | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 551.732.403.558,60 | 514.686.759.107,29 |
| 2 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 3.649.736.166,68 | 2.688.407.166,68 |
| 3 | Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 5.101.363.078,25 | 5.101.363.078,25 |
| 4 | Bangunan Menara Perambuan | 604.570.000,00 | 604.570.000,00 |
| 5 | Tugu/Tanda Batas | 54.628.321.385,40 | 53.400.871.192,22 |
| | Jumlah | 615.716.394.188,93 | 576.481.970.544,44 |
| | Akumulasi Penyusutan | (123,957,295,310.00) | (109.804.212.438,00) |
| | Nilai Buku Bangunan dan Gedung | 491,759,098,878.93 | 466.677.758.106,44 |

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.46

Mutasi Aset Tetap Bangunan dan Gedung Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | 2020 (Rp) | MUTASI | | 2021 (Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 514.686.759.107,29 | 48.007.091.147,73 | 10.961.446.696,42 | 551.732.403.558,60 |
| 2 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 2.688.407.166,68 | 1.037.829.000,00 | 76.500.000,00 | 3.649.736.166,68 |
| 3 | Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 5.101.363.078,25 | - | - | 5.101.363.078,25 |
| 4 | Bangunan Menara Perambuan | 604.570.000,00 | - | - | 604.570.000,00 |
| 5 | Tugu/Tanda Batas | 53.400.871.192,22 | 1.734.731.462,41 | 507.281.269,23 | 54.628.321.385,40 |
| J u m l a h | | 576.481.970.544,44 | 50.779.651.610,14 | 11.545.227.965,65 | 615.716.394.188,93 |
| Akumulasi Penyusutan | | (109.804.212.438,00) | (16.209.583.416,00) | (2.056.500.544,00) | (123,957,295,310.00) |
| Nilai Buku Bangunan dan Gedung | | 466.677.758.106,44 | 34.570.068.194,14 | 9.488.727.421,56 | 491,759,098,878.93 |

| U r a i a n | Jumlah (Rp) |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal per 1 Januari 2021 | 576.481.970.544,44 |
| Penambahan Tahun 2021 | 50.779.651.610,14 |
| Pengurangan Tahun 2021 | 11.545.227.965,65 |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 | 615.716.394.188,93 |
| Akumulasi Penyusutan | (123,957,295,310.00) |
| Nilai Buku Per 31 Desember 2021 | 491,759,098,878.93 |

Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2021 senilai Rp50.779.651.610,14 berasal dari :

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 senilai Rp66.975.887.199,03 dikurangi Konstruksi Dalam Pembangunan senilai Rp29.496.862.800,00 dan Bank Garansi senilai Rp2.955.530.200,00 sehingga Belanja Modal menjadi Rp34.523.494.199,03;
- Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp12.053.608.000,00;
- Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima senilai Rp1.962.266.000,00; berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 937/029/07.3/2021 Tanggal 19 April 2021 (**Lampiran 20**);
- Kapitalisasi atas Belanja Pegawai atas Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp129.808.611,11;
- Kapitalisasi atas belanja barang dan Jasa senilai Rp1.567.187.800,00;
- Reklas dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dicatat sebagai gedung dan bangunan senilai Rp189.000.000,00; pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2021 senilai Rp11.545.227.965,65 terdiri atas :

- Pengurangan Aset Tetap atas Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/502/900.32/XII/2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Proses

Pembongkaran Tahun 2021 dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp1.442.270.333,34;

- b. Pengurangan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/508/900.32/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Hibahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima senilai Rp1.441.099.219,61 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- c. Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp7.772.086.000,00;
- d. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dicatat sebagai Peralatan dan Mesin senilai Rp930.054.412,70 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp477.078.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.5.1.3.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 1.173.746.744.126,20 | 1.128.750.005.178,81 |

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp1.173.746.744.126,20 mengalami kenaikan senilai Rp44.996.738.947,39 atau 3,99% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp1.128.750.005.178,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.47
Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dan 2020

| No. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Jalan | 746.653.793.000,99 | 728.724.425.241,77 |
| 2 | Jembatan | 74.539.927.266,85 | 72.622.371.694,37 |
| 3 | Bangunan Air Irigasi | 65.275.921.916,53 | 63.999.620.916,53 |
| 4 | Bangunan Pengairan Pasang Surut | 2.926.462.554,99 | 2.729.376.554,99 |
| 5 | Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder | 2.409.472.769,23 | 2.409.472.769,23 |
| 6 | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam | 134.118.742.655,16 | 123.462.046.748,27 |
| 7 | Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah | 12.673.015.484,42 | 8.774.026.067,00 |
| 8 | Bangunan Air Bersih/Air Baku | 15.739.985.192,52 | 14.941.761.192,52 |
| 9 | Bangunan Air Kotor | 20.252.238.246,68 | 19.231.270.355,30 |
| 10 | Instalasi Air Bersih / Air Baku | 34.439.213.516,26 | 29.545.389.116,26 |
| 11 | Instalasi Air Kotor | 2.683.911.101,23 | 2.683.911.101,23 |
| 12 | Instalasi Pengolahan Sampah | 379.640.000,00 | 379.640.000,00 |
| 13 | Instalasi Pembangkit Listrik | 185.900.000,00 | 185.900.000,00 |
| 14 | Instalasi Gardu Listrik | 2.995.061.882,85 | 3.177.011.882,85 |
| 15 | Instalasi Pengaman | 22.250.000,00 | 22.250.000,00 |
| 16 | Jaringan Air Minum | 26.663.447.807,55 | 26.915.389.807,55 |
| 17 | Jaringan Listrik | 24.353.245.988,94 | 21.511.626.988,94 |
| 18 | Jaringan Telepon | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 |
| 19 | Jaringan Gas | 7.385.314.742,00 | 7.385.314.742,00 |

| No. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Jumlah | 1.173.746.744.126,20 | 1.128.750.005.178,81 |
| | Akumulasi Penyusutan | (554.775.768.371,00) | (477.759.140.380,00) |
| | Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan | 618.970.975.755,20 | 650.990.864.798,81 |

Tabel 5.5.48
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2020 (Rp) | MUTASI | | 2021 (Rp) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Jalan | 728.724.425.241,77 | 18.441.093.771,72 | 511.726.012,50 | 746.653.793.000,99 |
| 2 | Jembatan | 72.622.371.694,37 | 3.297.504.572,48 | 1.379.949.000,00 | 74.539.927.266,85 |
| 3 | Bangunan Air Irigasi | 63.999.620.916,53 | 1.276.301.000,00 | 0,00 | 65.275.921.916,53 |
| 4 | Bangunan Pengairan Pasang Surut | 2.729.376.554,99 | 197.086.000,00 | 0,00 | 2.926.462.554,99 |
| 5 | Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder | 2.409.472.769,23 | 0,00 | 0,00 | 2.409.472.769,23 |
| 6 | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam | 123.462.046.748,27 | 10.656.695.906,89 | 0,00 | 134.118.742.655,16 |
| 7 | Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah | 8.774.026.067,00 | 3.898.989.417,42 | 0,00 | 12.673.015.484,42 |
| 8 | Bangunan Air Bersih/Air Baku | 14.941.761.192,52 | 798.224.000,00 | 0,00 | 15.739.985.192,52 |
| 9 | Bangunan Air Kotor | 19.231.270.355,30 | 1.020.967.891,38 | 0,00 | 20.252.238.246,68 |
| 10 | Instalasi Air Bersih / Air Baku | 29.545.389.116,26 | 4.893.824.400,00 | 0,00 | 34.439.213.516,26 |
| 11 | Instalasi Air Kotor | 2.683.911.101,23 | 0,00 | 0,00 | 2.683.911.101,23 |
| 12 | Instalasi Pengolahan Sampah | 379.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.640.000,00 |
| 13 | Instalasi Pembangkit Listrik | 185.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.900.000,00 |
| 14 | Instalasi Gardu Listrik | 3.177.011.882,85 | 2.282.181.765,00 | 2.464.131.765,00 | 2.995.061.882,85 |
| 15 | Instalasi Pengaman | 22.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250.000,00 |
| 16 | Jaringan Air Minum | 26.915.389.807,55 | 907.969.500,00 | 1.159.911.500,00 | 26.663.447.807,55 |
| 17 | Jaringan Listrik | 21.511.626.988,94 | 14.405.640.117,29 | 11.564.021.117,29 | 24.353.245.988,94 |
| 18 | Jaringan Telepon | 49.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200.000,00 |
| 19 | Jaringan Gas | 7.385.314.742,00 | 0,00 | 0,00 | 7.385.314.742,00 |
| J u m l a h | | 1.128.750.005.178,81 | 62.076.478.342,18 | 17.079.739.394,79 | 1.173.746.744.126,20 |
| Akumulasi Penyusutan | | (477.759.140.380,00) | (80.252.331.928,00) | (3.235.703.937,00) | (554.775.768.371,00) |
| Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 650.990.864.798,81 | (18.175.853.585,82) | 13.844.035.457,79 | 618.970.975.755,20 |

| U r a i a n | Jumlah (Rp) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Saldo Awal per 1 Januari 2021 | 1.128.750.005.178,81 |
| Penambahan Tahun 2021 | 62.076.478.342,18 |
| Pengurangan Tahun 2021 | 17.079.739.394,79 |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 | 1.173.746.744.126,20 |
| Akumulasi Penyusutan | (544.775.750.371,00) |
| Nilai Buku Per 31 Desember 2021 | 618.970.975.755,20 |

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2021 senilai Rp62.076.478.342,18 berasal dari :

- a. Belanja Modal tahun 2021 senilai Rp40.902.636.451,71;
- b. Kapitalisasi atas belanja honorarium pengadaan barang dan jasa tahun 2021 senilai Rp335.790.000,00;
- c. Kapitalisasi atas belanja barang dan jasa tahun 2021 senilai Rp2.343.761.508,18;
- d. Mutasi tambah antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp16.540.238.382,29
- e. Koreksi tambah atas kurang catat nilai perolehan barang pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp124.535.225,40;
- f. Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dicatat sebagai Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp124.800.000,00 pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Bima;
- g. Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp477.078.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
- h. Reklas dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.227.638.774,60 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2021 senilai Rp17.079.739.394,79 terdiri atas:

- a. Mutasi kurang antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp16.540.238.382,29;
- b. Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp70.198.012,50 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
- c. Reklas ke Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp189.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
- d. Reklas ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp280.303.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

| 5.5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 80.079.328.699,71 | 76.900.049.609,80 |

Aset Tetap Lainnya senilai Rp80.079.328.699,71 dan Rp76.900.049.609,80 merupakan nilai Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.49
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan 2020

| No. | Aset Tetap Lainnya | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Bahan Perpustakaan Tercetak | 76.292.712.699,71 | 73.223.313.609,80 |
| 2 | Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 100.810.000,00 | 0,00 |
| 3 | Kartografi, Naskah Dan Lukisan | 1.679.050.000,00 | 1.679.050.000,00 |
| 4 | Musik | 48.370.000,00 | 39.600.000,00 |
| 5 | Three Dimensional Artefacts And Realita | 99.500.000,00 | 99.500.000,00 |
| 6 | Barang Bercorak Kesenian | 362.312.000,00 | 362.312.000,00 |
| 7 | Alat Bercorak Kebudayaan | 749.060.000,00 | 748.760.000,00 |
| 8 | Tanda Penghargaan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

| No. | Aset Tetap Lainnya | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 742.514.000,00 | 742.514.000,00 |
| Jumlah Aset Tetap Lainnya | | 80.079.328.699,71 | 76.900.049.609,80 |

Tabel 5.5.50

Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan 2020

Mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | 2020 (Rp) | MUTASI | | 2021 (Rp) |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Bahan Perpustakaan Tercetak | 73.223.313.609,80 | 10.138.404.893,91 | 7.069.005.804,00 | 76.292.712.699,71 |
| 2 | Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 0,00 | 100.810.000,00 | 0,00 | 100.810.000,00 |
| 3 | Kartografi, Naskah Dan Lukisan | 1.679.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679.050.000,00 |
| 4 | Musik | 39.600.000,00 | 8.770.000,00 | 0,00 | 48.370.000,00 |
| 5 | Three Dimensional Artefacts And Realita | 99.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.500.000,00 |
| 6 | Barang Bercorak Kesenian | 362.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 362.312.000,00 |
| 7 | Alat Bercorak Kebudayaan | 748.760.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 749.060.000,00 |
| 8 | Tanda Penghargaan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 9 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 742.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 742.514.000,00 |
| | Jumlah Aset Tetap Lainnya | 76.900.049.609,80 | 10.248.284.893,91 | 7.069.005.804,00 | 80.079.328.699,71 |

| U r a i a n | Jumlah (Rp) |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Saldo Awal per 1 Januari 2021 | 76.900.049.609,80 |
| Penambahan Tahun 2021 | 10.248.284.893,91 |
| Pengurangan Tahun 2021 | 7.069.005.804,00 |
| Saldo Akhir per 31 Desember 2020 | 80.079.328.699,71 |

Penambahan Aset tetap lainnya selama tahun 2021 senilai Rp10.248.284.893,91; terdiri dari:

- Belanja Modal tahun 2021 senilai Rp1.681.711.267,00;
- Kapitalisasi atas Honorarium Pengadaan/Jasa senilai Rp9.020.000,00;
- Kapitalisasi atas Belanja Barang dan Jasa senilai Rp3.217.623.763,00;
- Koreksi tambah atas kurang catat nilai perolehan barang pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp201.368.079,05 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
- Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp2.665.431.000,00;
- Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya senilai Rp8.318.150,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima
- Reklas dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya senilai Rp280.303.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;

- h. Reklas dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya senilai 2.184.509.634,86 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2021 senilai Rp7.069.005.804,00 terdiri dari:

- Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp6.946.953.000,00;
- Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp70.718.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- Koreksi Kurang Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai Aset senilai Rp51.334.404,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.

| | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 5.5.1.3.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 29.496.862.800,00 | 3.412.148.409,46 |

Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 senilai Rp29.496.862.800,00 dan Rp3.412.148.409,46 merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.51

Rincian Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Gedung dan Bangunan | 29.496.862.800,00 | 0,00 |
| 2 | Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 1.227.638.774,60 |
| 3 | Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 2.184.509.634,86 |
| | Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) | 29.496.862.800,00 | 3.412.148.409,46 |

Tabel 5.5.52

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | 2020 (Rp) | MUTASI | | 2021 (Rp) |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Gedung dan Bangunan | 0,00 | 29.496.862.800,00 | 0,00 | 29.496.862.800,00 |
| 2 | Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan | 1.227.638.774,60 | 0,00 | 1.227.638.774,60 | 0,00 |
| 3 | Aset Tetap Lainnya | 2.184.509.634,86 | 0,00 | 2.184.509.634,86 | 0,00 |
| | Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) | 3.412.148.409,46 | 29.496.862.800,00 | 3.412.148.409,46 | 29.496.862.800,00 |

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Saldo Awal per 1 Januari 2021 | 3.412.148.409,46 |
| 2 | Penambahan Tahun 2021 | 29.496.862.800,00 |
| 3 | Pengurangan Tahun 2021 | 3.412.148.409,46 |
| 4 | Saldo Akhir per 31 Desember 2021 | 29.496.862.800,00 |

| | | | |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.5.1.3.7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 874.063.078.085,86 | 753.190.943.027,20 |

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020 masing-masing senilai Rp874.063.078.085,86 dan Rp753.190.943.027,20.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk Tanah, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 disajikan sebagaimana tertuang pada rincian **Lampiran 22**.

Tabel 5.5.53

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Tanah | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 195.330.014.404,86 | 165.627.590.209,20 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 123.957.295.310,00 | 109.804.212.438,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 554.775.768.371,00 | 477.759.140.380,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | 874.063.078.085,86 | 753.190.943.027,20 |

Tabel 5.5.54

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | Nilai Perolehan 31-12-2020 | 2020 (Rp) | MUTASI | | 2021 (Rp) |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | Tanah | 542.813.686.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 266.321.791.632,74 | 165.627.590.209,20 | 36.433.909.419,01 | 6.731.485.223,35 | 195.330.014.404,86 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 576.481.970.544,44 | 109.804.212.438,00 | 16.209.583.416,00 | 2.056.500.544,00 | 123.957.295.310,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.128.750.005.178,81 | 477.759.140.380,00 | 80.252.331.928,00 | 3.235.703.937,00 | 554.775.768.371,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 76.900.049.609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) | 3.412.148.409,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 2.594.679.652.224,25 | 753.190.943.027,20 | 132.895.824.763,01 | 12.023.689.704,35 | 874.063.078.085,86 |

Mutasi Akumulasi Penyusutan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal per 1 Januari 2021 | 753.190.943.027,20 |
| Penambahan Tahun 2021 | 132.895.824.763,01 |
| Pengurangan Tahun 2021 | 12.023.689.704,35 |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2020 | 874.063.078.085,86 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.5.1.4 Aset Lainnya | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | 19.609.893.482,84 | 19.683.601.599,82 |

Saldo Nilai Buku Aset Lainnya Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp19.609.893.482,84 dan mengalami penurunan senilai Rp 73.708.116,98 atau 0,37% dibandingkan per 31 Desember 2020 senilai Rp19.683.601.599,82.

Berikut adalah Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.55
Rincian Aset Lainnya Tahun 2021 dan 2020

| No | Aset Lainnya | Saldo 31/12/2021 | Saldo 31/12/2020 |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 34.766.666,67 | 64.898.774,20 |
| 2 | Aset Tak Berwujud | 2.561.978.535,00 | 2.515.568.535,00 |
| 3 | Amortisasi Aset Tak Berwujud | (567.018.941,56) | (438.920.014,78) |
| 4 | Aset Lain-lain | 17.580.167.222,73 | 17.542.054.305,40 |
| Jumlah Aset Lainnya | | 19.609.893.483,84 | 19.683.601.599,82 |

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 5.5.1.4.1 | Tuntutan Ganti Rugi | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | | 34.766.666,67 | 64.898.774,20 |

Jumlah Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp34.766.666,67 (**Lampiran 14**) dan mengalami penurunan senilai Rp30.132.107,53 atau 46,40% jika dibandingkan per 31 Desember 2020 senilai Rp64.898.774,20.

| | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.5.1.4.2 | Aset Tak Berwujud | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | | 2.561.978.535,00 | 2.515.568.535,00 |

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 senilai Rp2.561.978.535,00 dan 2020 Rp2.515.568.535,00 merupakan Aset Tak Berwujud berupa Perangkat Lunak/*Software*. Rincian Aset Tak Berwujud tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.56
Rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2021 dan 2020

| No | Nama Perangkat Daerah (PD) | Nilai Perolehan 31/12/2020 | Amortisasi 31/12/2020 | Tambah Amortisasi 31/12/2021 | Penambahan Nilai Perolehan (Rp.) | Saldo 31/12/2021 | Nilai Buku 31/12/2021 |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | 195.480.000,00 | 57.053.500,00 | 9.774.000,00 | 0,00 | 195.480.000,00 | 128.652.500,00 |
| 2 | BPKAD | 443.650.000,00 | 143.750.000,00 | 22.182.500,00 | 0,00 | 443.650.000,00 | 277.717.500,00 |
| 3 | Dinas Pariwisata | 14.850.000,00 | 7.425.000,00 | 742.500,00 | 0,00 | 14.850.000,00 | 6.682.500,00 |
| 4 | Sekretariat Daerah | 34.100.000,00 | 10.230.000,00 | 1.705.000,00 | 0,00 | 34.100.000,00 | 22.165.000,00 |
| 5 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 436.096.000,00 | 108.596.888,00 | 21.804.800,00 | 0,00 | 436.096.000,00 | 305.694.312,00 |
| 6 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 1.349.432.275,00 | 108.766.613,78 | 67.471.613,78 | 0,00 | 1.349.432.275,00 | 1.173.194.047,44 |
| 7 | Dinas Sosial | 10.000.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 8 | BPBD | 31.960.260,00 | 1.598.013,00 | 1.598.013,00 | 0,00 | 31.960.260,00 | 28.764.234,00 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 2.320.500,00 | 46.410.000,00 | 46.410.000,00 | 44.089.500,00 |
| Jumlah | | 2.515.568.535,00 | 438.920.014,78 | 128.098.926,78 | 46.410.000,00 | 2.561.978.535,00 | 1.994.959.593,44 |

Tabel 5.5.57

Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2021 dan 2020

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo Awal 1 Januari 2021 | 2.515.568.535,00 |
| Penambahan Tahun 2021 | 46.410.000,00 |
| Pengurangan Tahun 2021 | 0,00 |
| Saldo Akhir per 31 Desember 2021 | 2.561.978.535,00 |
| Amortisasi | (567.018.941,56) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 1.994.959.593,44 |

Tabel 5.5.58

Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2021

| No | Aset Tak Berwujud | Saldo 31/12/2020 | Beban Amortisasi 2021 | Saldo 31/12/ 2021 |
|--------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | 57.053.500,00 | 9.774.000,00 | 66.827.500,00 |
| 2 | BPPKAD | 143.750.000,00 | 22.182.500,00 | 165.932.500,00 |
| 3 | Dinas Pariwisata | 7.425.000,00 | 742.500,00 | 8.167.500,00 |
| 4 | Sekretariat Daerah | 10.230.000,00 | 1.705.000,00 | 11.935.000,00 |
| 5 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 108.596.888,00 | 21.804.800,00 | 130.401.688,00 |
| 6 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 108.766.613,78 | 67.471.613,78 | 176.238.227,56 |
| 7 | Dinas Sosial | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 8 | BPBD | 1.598.013,00 | 1.598.013,00 | 3.196.026,00 |
| 9. | Dinas Tenaga Kerja | 0,00 | 2.320.500,00 | 2.320.500,00 |
| Jumlah | | 438.920.014,78 | 128.098.926,78 | 567.018.941,56 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.5.1.4.3 Aset Lain-Lain | | 31-12-2021(Rp) | 31-12-2020(Rp) |
| | | 17.580.167.222,73 | 17.542.054.305,40 |

Saldo Nilai Buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 2020 senilai Rp17.580.167.222,73 dan Rp17.542.054.305,40 (**Lampiran 23**) yang merupakan Barang Kondisi Rusak Berat dan Hilang.

Aset Lain-Lain Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 disajikan secara *netto*/bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap sebelum direklas ke Aset Lain-lain, sehingga mutasi Aset Lain-lain tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5.59

Mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian | Saldo 31/12/2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31/12/2021 |
|-----|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 33.171.823.911,36 | 1.757.241.208,57 | 1.124.828.604,65 | 33.804.236.515,28 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 1.391.369.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391.369.250,00 |
| 3 | Jalan, Jembatan Irigasi dan Jaringan | 6.286.913.515,33 | 0,00 | 0,00 | 6.286.913.515,33 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 2.438.721.170,18 | 0,00 | 0,00 | 2.438.721.170,18 |

| No. | Uraian | Saldo 31/12/2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31/12/2021 |
|-----|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Jumlah Aset Lain-lain | 43.288.827.846,87 | 1.757.241.208,57 | 1.124.828.604,65 | 43.921.240.450,79 |
| | Akumulasi Penyusutan | (25.746.773.541,47) | (1.597.711.093,47) | (1.003.411.406,88) | (26.341.073.228,06) |
| | Nilai Buku Aset Lain-lain | 17.542.054.305,40 | 159.530.115,10 | 121.417.197,77 | 17.580.167.222,73 |

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Saldo Awal per 1 Januari 2021 | 43.288.827.846,87 |
| 2 | Penambahan Tahun 2021 | 1.757.241.208,57 |
| 3 | Pengurangan Tahun 2021 | 1.124.828.604,65 |
| | Saldo Akhir per 31 Desember 2021 | 43.921.240.450,79 |
| | Akumulasi Penyusutan | (26.341.073.228,06) |
| | Nilai Buku Aset Lain-lain | 17.580.167.222,73 |

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 senilai Rp43.921.240.450,79 merupakan Aset Lain-lain yang disajikan dengan menggunakan harga perolehan secara neto/bersih.

| | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 5.5.2 Kewajiban | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | 728.647.582,76 | 2.256.420.850,40 |

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah Kewajiban Pemerintah Kota Bima terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Saldo Kewajiban pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp728.647.582,76 mengalami penurunan senilai Rp1.527.773.267,64 atau 67,71% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp2.256.420.850,40.

Perbandingan Kewajiban Pemerintah Kota Bima periode tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5.60
Rincian Kewajiban Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 dan 2020

| No | Kewajiban | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 642.444,00 | 5.577.486,00 |
| 2 | Pendapatan Diterima Dimuka | 219.049.136,00 | 176.542.524,40 |
| 3 | Utang Belanja | 508.956.003,00 | 2.074.300.840,00 |
| 4 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 728.647.582,76 | 2.256.420.850,40 |

Adapun akun-akun Kewajiban yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Bima tahun 2021 adalah sebagai berikut.

| | | | |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5.5.2.1 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 31-12-2021 (Rp) 642.444,00 | 31-12-2020 (Rp) 5.577.486,00 |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp642.444,00 mengalami penurunan senilai Rp4.935.042,00. atau 88,48 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp5.577.486,00.

Saldo Utang PFK Tahun 2021 senilai Rp642.444,00 telah disetorkan ke Kas Negara terdiri dari:

Tabel 5.5.61

Utang PFK SKPD Tahun 2021

| NO | SKPD | PPH 21 | PPH 22 | PPH 23 | PPN | Pajak Restoran | Total | Tanggal Penyetoran |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Bappeda Litbang | 0,00 | 41.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.932,00 | 12-Jan-22 |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.571,00 | 132.571,00 | 25-Jan-22 |
| 3 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.810,00 | 323.810,00 | 25-Jan-22 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.545,00 | 129.545,00 | 21-Jan-22 |
| 5 | Puskesmas Paruga | 14.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.586,00 | 03-Jan-22 |
| | JUMLAH | 14.586,00 | 41.932,00 | 0,00 | 0,00 | 585.926,00 | 642.444,00 | |

Sementara Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 senilai Rp642.444,00 merupakan utang PFK berupa PPh21, PPh22, dan Pajak Restoran dan semua telah terbayarkan ke Kas Negara pada tahun 2022.

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5.5.2.2 | Pendapatan Diterima Dimuka | 31-12-2021 (Rp) 219.049.136,00 | 31-12-2020 (Rp) 176.542.524,40 |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp219.049.136,00 mengalami kenaikan senilai Rp42.506.611,60 atau 24,08% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp176.542.524,40.

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.5.2.3 | Utang Belanja | 31-12-2021 (Rp) 508.956.003,00 | 31-12-2020 (Rp) 2.074.300.840,00 |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Saldo Utang Belanja pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2021 senilai Rp508.956.003,00 mengalami penurunan senilai Rp1.565.344.837,00 atau 75,46% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp2.074.300.840,00. Saldo Utang Belanja senilai Rp508.956.003,00 merupakan utang belanja atas kekurangan berkala gaji pegawai dan tunjangan profesi guru PNSD pada 20 (dua puluh) SKPD.

Tabel 5.5.62
Utang Belanja Tahun 2021 dan 2020

| No. | SKPD | Saldo 31/12/2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31/12/2021 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.900.098.630,00 | 374.262.754,00 | 1.900.098.630,00 | 374.262.754,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 108.582.648,00 | 72.601.853,00 | 108.582.648,00 | 72.601.853,00 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 565.525,00 | 1.627.263,00 | 565.525,00 | 1.627.263,00 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.101.207,00 | 0,00 | 1.101.207,00 | 0,00 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1.722.017,00 | 0,00 | 1.722.017,00 | 0,00 |
| 6 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0,00 | 8.134.155,00 | 0,00 | 8.134.155,00 |
| 7 | DINAS SOSIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | DINAS TENAGA KERJA | 765.000,00 | 1.810.128,00 | 765.000,00 | 1.810.128,00 |
| 9 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.536.048,00 | 698.858,00 | 2.536.048,00 | 698.858,00 |
| 10 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 728.713,00 | 0,00 | 728.713,00 | 0,00 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 648.627,00 | 0,00 | 648.627,00 | 0,00 |
| 12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.097.410,00 | 0,00 | 1.097.410,00 | 0,00 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 672.718,00 | 1.294.178,00 | 672.718,00 | 1.294.178,00 |
| 16 | DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 609.672,00 | 561.378,00 | 609.672,00 | 561.378,00 |
| 17 | DINAS STATISTIK DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.561.702,00 | 13.548.816,00 | 1.561.702,00 | 13.548.816,00 |
| 20 | DINAS PARIWISATA | 1.425.660,00 | 0,00 | 1.425.660,00 | 0,00 |
| 21 | DINAS PERTANIAN | 9.461.040,00 | 0,00 | 9.461.040,00 | 0,00 |
| 22 | SEKRETARIAT DAERAH | 8.023.923,00 | 3.264.956,00 | 8.023.923,00 | 3.264.956,00 |
| 23 | KEC. RASANA E BARAT | 0,00 | 4.203.330,00 | 0,00 | 4.203.330,00 |

| No. | SKPD | Saldo 31/12/2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31/12/2021 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 24 | KEC. RASANA E TIMUR | 17.698.267,00 | 2.112.401,00 | 17.698.267,00 | 2.112.401,00 |
| 25 | KEC. ASAKOTA | 0,00 | 6.585.340,00 | 0,00 | 6.585.340,00 |
| 26 | KEC. MPUNDA | 648.792,00 | 3.680.566,00 | 648.792,00 | 3.680.566,00 |
| 27 | KEC. RABA | 6.632.079,00 | 2.114.274,00 | 6.632.079,00 | 2.114.274,00 |
| 28 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1.224.000,00 | 2.729.130,00 | 1.224.000,00 | 2.729.130,00 |
| 29 | INSPEKTORAT | 4.472.420,00 | 6.009.986,00 | 4.472.420,00 | 6.009.986,00 |
| 30 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 457.112,00 | 2.019.491,00 | 457.112,00 | 2.019.491,00 |
| 31 | DPMP TSP | 854.855,00 | 0,00 | 854.855,00 | 0,00 |
| 32 | BPKAD | 2.712.775,00 | 872.180,00 | 2.712.775,00 | 872.180,00 |
| 33 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0,00 | 824.966,00 | 0,00 | 824.966,00 |
| Total | | 2.074.300.840,00 | 508.956.003,00 | 2.074.300.840,00 | 508.956.003,00 |

| | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 5.5.2.4 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | | 0,00 | 0,00 |

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021 senilai Rp 0,00 dan 2020 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Bima kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021.

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.5.3 | Ekuitas | 31-12-2021 (Rp) | 31-12-2020 (Rp) |
| | | 1.948.090.010.502,74 | 1.920.247.252.438,80 |

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 senilai Rp1.948.090.010.502,74 dan 2020 Rp1.920.247.252.438,80 yang bersumber dari ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.63
Rincian Ekuitas Tahun 2021 dan 2020

| NO | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Ekuitas Awal | 1.920.247.252.438,80 | 1.495.085.421.389,40 |
| 2 | Surplus/Defisit - LO | 12.416.076.447,07 | (15.808.583.659,79) |
| 3 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | 15.426.681.616,87 | 440.970.414.709,19 |
| 4 | Koreksi Ekuitas Lainnya | 15.426.681.616,87 | 440.970.414.709,19 |

| NO | Uraian | 2021 | 2020 |
|----|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6 | Penyisihan Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ekuitas Akhir | 1.948.090.010.502,74 | 1.920.247.252.438,80 |

5.6 PENJELASAN KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS

| | | | |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.6.1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 2021 (Rp) 151.589.600.028,99 | 2020 (Rp) 83.624.301.894,24 |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing senilai Rp151.589.600.028,99 dan Rp83.624.301.894,24. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan senilai Rp67.965.298.134,75 atau 81,27 % dibandingkan tahun 2020.

Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.6.1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020

| No | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Arus Masuk Kas | | | | | |
| 1 | Penerimaan Pajak Daerah | 19.507.819.782,88 | 18.558.631.974,13 | 949.187.808,75 | 5,11 |
| 2 | Penerimaan Retribusi Daerah | 15.196.689.454,00 | 11.151.090.529,36 | 4.045.598.924,64 | 36,28 |
| 3 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.284.388.411,79 | 1.579.915.958,62 | (295.527.546,83) | (18,71) |
| 4 | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 10.983.185.098,00 | 15.121.427.174,58 | (4.138.242.076,58) | (27,37) |
| 5 | Penerimaan Dana Bagi Hasil | 37.344.039.204,00 | 26.793.098.072,00 | 10.550.941.132,00 | 39,38 |
| 6 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | 432.159.814.000,00 | 439.644.557.000,00 | (7.484.743.000,00) | (1,70) |
| 7 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik | 68.320.563.668,00 | 63.487.181.845,00 | 4.833.381.823,00 | 7,61 |
| 8 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik | 56.185.780.202,00 | 57.622.822.299,00 | (1.437.042.097,00) | (2,49) |
| 9 | Penerimaan Dana Penyesuaian | 30.025.143.000,00 | 19.485.769.000,00 | 10.539.374.000,00 | 54,09 |
| 10 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 40.727.314.230,00 | 41.304.094.690,00 | (576.780.460,00) | (1,40) |
| 11 | Penerimaan Hibah | 17.931.340.700,00 | 19.766.446.840,26 | (1.835.106.140,26) | (9,28) |
| 12 | Penerimaan Lainnya - Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Penerimaan Atas Pengembalian Belanja (Contra Post) | 798.038.457,00 | 850.513.610,00 | (52.475.153,00) | (6,17) |
| Jumlah | | 730.464.116.207,67 | 715.365.548.992,95 | 15.098.567.214,72 | 2,11 |
| Arus Keluar Kas | | | | | |
| 1 | Pembayaran Pegawai | 357.632.648.357,55 | 361.094.244.676,29 | (3.461.596.318,74) | (0,96) |

| No | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 2 | Pembayaran Barang dan Jasa | 200.514.835.071,13 | 147.056.146.552,00 | 53.458.688.519,13 | 36,35 |
| 3 | Pembayaran Hibah | 16.770.982.000,00 | 36.416.309.932,36 | (19.645.327.932,36) | (53,95) |
| 4 | Pembayaran Bantuan Sosial | 1.422.000.000,00 | 60.905.490.115,06 | (59.483.490.115,06) | (97,67) |
| 5 | Pembayaran Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pembayaran Tak Terduga | 2.534.050.750,00 | 26.269.055.823,00 | (23.735.005.073,00) | (90,35) |
| Jumlah | | 578.874.516.178,68 | 631.741.247.098,71 | (52.866.730.920,03) | (8,37) |
| Total | | 151.589.600.028,99 | 83.624.301.894,24 | 67.965.298.134,75 | 81,27 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.6.1.1 Arus Masuk Kas | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | 730.464.116.207,67 | 715.365.548.992,95 |

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 senilai Rp730.464.116.207,67 terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah, Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, Penerimaan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Penerimaan Dana Penyesuaian, Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Hibah, Pendapatan Lainnya dari Aktivitas Operasi dan Penerimaan Atas Pengembalian Belanja (Contra Post). Jumlah tersebut mengalami peningkatan senilai Rp15.098.567.214,72 atau 2,11% dibandingkan tahun 2020 senilai Rp715.365.548.992,95.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 sudah termasuk pendapatan dari Dana Kapitasi pada 7 FKTP dan pendapatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 86 (delapan puluh enam) sekolah terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar dan 15 (lima belas) Sekolah Menengah Pertama sebagaimana yang diamanatkan dengan rincian pendapatan sebagai berikut.

Tabel 5.6.2
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Dana Kapitasi dan Dana BOS Tahun 2021

| No | Uraian | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Penerimaan Dana Kapitasi JKN | 7.572.851.153,00 |
| 2 | Penerimaan Dana BOS | 17.911.340.000,00 |
| Jumlah | | 25.484.191.153,00 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.6.1.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | 19.507.819.782,88 | 18.558.631.974,13 |

Jumlah Arus Masuk Kas Tahun 2021 dan Tahun 2020 dari Penerimaan Pajak Daerah adalah senilai Rp19.507.819.782,88 dan Rp18.558.631.974,13 terdiri dari:

Tabel 5.6.3
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pajak Daerah | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Pajak Hotel | 415.017.422,00 | 200.630.863,50 | 214.386.558,50 | 106,86 |
| 2 | Pajak Restoran | 1.255.900.981,20 | 1.326.384.079,71 | (70.483.098,51) | (5,31) |
| 3 | Pajak Hiburan | 19.426.900,00 | 24.028.240,00 | (4.601.340,00) | (19,15) |
| 4 | Pajak Reklame | 567.980.156,75 | 593.788.492,25 | (25.808.335,50) | (4,35) |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 8.463.177.492,00 | 8.339.356.068,00 | 123.821.424,00 | 1,48 |
| 6 | Pajak Parkir | 114.736.000,00 | 92.195.500,00 | 22.540.500,00 | 24,45 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 46.170.792,18 | 46.406.476,42 | (235.684,24) | (0,51) |
| 8 | Pajak Sarang Burung walet | 11.500.000,00 | 31.500.000,00 | (20.000.000,00) | (63,49) |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 207.879.473,75 | 361.976.516,25 | (154.097.042,50) | (42,57) |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 3.633.609.655,00 | 3.939.839.288,00 | (306.229.633,00) | (7,77) |
| 11 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 4.772.420.910,00 | 3.602.526.450,00 | 1.169.894.460,00 | 32,47 |
| Jumlah | | 19.507.819.782,88 | 18.558.631.974,13 | 949.187.808,75 | 5,11 |

Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.4
Rincian Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pajak Daerah | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Pajak Hotel | | | | | |
| 1 | Pajak Hotel | 377.505.977,00 | 0,00 | 377.505.977,00 | 0,00 |
| 2 | Hotel Bintang Satu | 0,00 | 151.239.039,50 | (151.239.039,50) | (100,00) |
| 3 | Hotel Melati Dua | 0,00 | 17.150.574,00 | (17.150.574,00) | (100,00) |
| 4 | Hotel Melati Satu | 0,00 | 1.050.000,00 | (1.050.000,00) | (100,00) |
| 5 | Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Rumah Kos | 29.427.975,00 | 18.261.250,00 | 11.166.725,00 | 61,15 |
| 6 | Rumah Kos Dengan Jumlah kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 8.083.470,00 | 12.930.000,00 | (4.846.530,00) | (37,48) |
| Jumlah | | 415.017.422,00 | 200.630.863,50 | 214.386.558,50 | 106,86 |
| Pajak Restoran | | | | | |
| 1 | Restoran | 569.871.164,00 | 614.540.894,90 | (44.669.730,90) | (7,27) |
| 2 | Rumah Makan | 165.634.014,00 | 166.010.500,50 | (376.486,50) | (0,23) |
| 3 | Kafetaria | 90.469.676,20 | 67.350.913,60 | 23.118.762,60 | 34,33 |
| 4 | Kantin | 8.741.706,00 | 8.633.381,55 | 108.324,45 | 1,25 |
| 5 | Katering | 244.165.173,00 | 251.177.330,51 | (7.012.157,51) | (2,79) |
| 6 | Warung | 177.019.248,00 | 218.671.058,65 | (41.651.810,65) | (19,05) |
| Jumlah | | 1.255.900.981,20 | 1.326.384.079,71 | (70.483.098,51) | (5,31) |

| No. | Pajak Daerah | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Pajak Hiburan | | | | | |
| 1 | Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya | 5.486.800,00 | 8.660.040,00 | (3.173.240,00) | (36,64) |
| 2 | Pertandingan Olahraga, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan | 13.940.100,00 | 4.250.000,00 | 9.690.100,00 | 228,00 |
| 3 | Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) | 0,00 | 525.000,00 | (525.000,00) | (100,00) |
| 4 | Hiburan Anak | 0,00 | 10.593.200,00 | (10.593.200,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 19.426.900,00 | 24.028.240,00 | (4.601.340,00) | (19,15) |
| Pajak Reklame | | | | | |
| 1 | Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 403.257.031,75 | 496.939.079,75 | (93.682.048,00) | (18,85) |
| 2 | Reklame Kain | 153.364.750,00 | 44.815.000,00 | 108.549.750,00 | 242,22 |
| 3 | Reklame Berjalan | 11.358.375,00 | 52.034.412,50 | (40.676.037,50) | (78,17) |
| Jumlah | | 567.980.156,75 | 593.788.492,25 | (25.808.335,50) | (4,35) |
| Pajak Penerangan Jalan | | | | | |
| 1 | Pajak Penerangan Jalan PLN | 8.463.177.492,00 | 8.339.356.068,00 | 123.821.424,00 | 1,48 |
| Jumlah | | 8.463.177.492,00 | 8.339.356.068,00 | 123.821.424,00 | 1,48 |
| Pajak Parkir | | | | | |
| 1 | Pajak Parkir | 114.736.000,00 | 92.195.500,00 | 22.540.500,00 | 24,45 |
| Jumlah | | 114.736.000,00 | 92.195.500,00 | 22.540.500,00 | 24,45 |
| Pajak Air Tanah | | | | | |
| 1 | Pajak Air Tanah | 46.170.792,18 | 46.406.476,42 | (235.684,24) | (0,51) |
| Jumlah | | 46.170.792,18 | 46.406.476,42 | (235.684,24) | (0,51) |
| Pajak Sarang Burung Walet | | | | | |
| 1 | Pajak Sarang Burung Walet | 11.500.000,00 | 31.500.000,00 | (20.000.000,00) | (63,49) |
| Jumlah | | 11.500.000,00 | 31.500.000,00 | (20.000.000,00) | (63,49) |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | | |
| 1 | Pasir dan Kerikil | 86.731.362,50 | 0,00 | 86.731.362,50 | 0,00 |
| 2 | Pasir | 0,00 | 59.964.018,75 | (59.964.018,75) | (100,00) |
| 3 | Kerikil | 0,00 | 46.733.550,00 | (46.733.550,00) | (100,00) |
| 4 | Batu Gunung/Kali | 0,00 | 110.915.612,50 | (110.915.612,50) | (100,00) |
| 5 | Pasir Batu/Sirtu | 0,00 | 24.507.225,00 | (24.507.225,00) | (100,00) |
| 6 | Tanah Liat | 7.503.875,00 | 5.216.000,00 | 2.287.875,00 | 43,86 |
| 7 | Tanah Urug | 0,00 | 114.640.110,00 | (114.640.110,00) | (100,00) |
| 8 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 113.644.236,25 | 0,00 | 113.644.236,25 | 0,00 |
| Jumlah | | 207.879.473,75 | 361.976.516,25 | (154.097.042,50) | (42,57) |
| Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | |
| 1 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 3.633.609.655,00 | 3.939.839.288,00 | (306.229.633,00) | (7,77) |
| Jumlah | | 3.633.609.655,00 | 3.939.839.288,00 | (306.229.633,00) | (7,77) |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | | | | | |
| 1 | BPHTB - Pemindahan Hak | 4.772.420.910,00 | 3.602.526.450,00 | 1.169.894.460,00 | 32,47 |
| Jumlah | | 4.772.420.910,00 | 3.602.526.450,00 | 1.169.894.460,00 | 32,47 |

| No. | Pajak Daerah | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| | Total | 19.507.819.782,88 | 18.558.631.974,13 | 949.187.808,75 | 5,11 |

| | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5.6.1.1.2 | Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah | 2021 (Rp) 15.196.689.454,00 | 2020 (Rp) 11.151.090.529,360 |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp15.196.689.454,00 dan Rp11.151.090.529,36 terdiri dari:

Tabel 5.6.5
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 10.106.612.479,00 | 7.105.913.743,00 | 3.000.698.736,00 | 42,23 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 869.616.000,00 | 281.565.000,00 | 588.051.000,00 | 208,85 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 227.542.000,00 | 203.670.000,00 | 23.872.000,00 | 11,72 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 89.801.000,00 | 505.599.000,00 | (415.798.000,00) | (82,24) |
| 5 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 24.475.000,00 | 67.965.000,00 | (43.490.000,00) | (63,99) |
| 6 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 47.225.000,00 | 0,00 | 47.225.000,00 | 0,00 |
| 7 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 187.738.000,00 | 203.750.017,36 | (16.012.017,36) | (7,86) |
| 8 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.339.855.000,00 | 909.015.000,00 | 430.840.000,00 | 47,40 |
| 9 | Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan | 720.099.537,00 | 647.418.109,00 | 72.681.428,00 | 11,23 |
| 10 | Retribusi Terminal | 11.350.000,00 | 7.646.000,00 | 3.704.000,00 | 48,44 |
| 11 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 206.356.000,00 | 211.476.000,00 | (5.120.000,00) | (2,42) |
| 12 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 23.400.000,00 | 19.545.000,00 | 3.855.000,00 | 19,72 |
| 13 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga | 393.395.000,00 | 494.613.000,00 | (101.218.000,00) | (20,46) |
| 14 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 932.224.438,00 | 470.164.660,00 | 462.059.778,00 | 98,28 |
| 15 | Retribusi Izin Gangguan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Retribusi Izin Trayek | 17.000.000,00 | 22.750.000,00 | (5.750.000,00) | (25,27) |
| 17 | Retribusi Izin Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 15.196.689.454,00 | 11.151.090.529,36 | 4.045.598.924,64 | 36,28 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5.6.1.1.3 | Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2020 (Rp) 1.284.388.411,79 | 2020 (Rp) 1.579.915.958,62 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp1.284.388.411,79 dan Rp1.579.915.958,62 terdiri dari:

Tabel 5.6.6

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 & 2020

| No. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 180.014.359,00 | 0,00 | 180.014.359,00 | 0,00 |
| 2 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 23.932.217,79 | 0,00 | 23.932.217,79 | 0,00 |
| 3 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) | 11.383.869,00 | 0,00 | 11.383.869,00 | 0,00 |
| 4 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta | 1.069.057.966,00 | 0,00 | 1.069.057.966,00 | 0,00 |
| 5 | KPN Sabua Ade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PT. Bank NTB | 0,00 | 1.403.055.467,00 | (1.403.055.467,00) | (100,00) |
| 7 | PD. BPR NTB | 0,00 | 150.769.525,00 | (150.769.525,00) | (100,00) |
| 8 | PT. Jamkrida NTB Bersaing | 0,00 | 26.090.966,62 | (26.090.966,62) | (100,00) |
| Jumlah | | 1.284.388.411,79 | 1.579.915.958,62 | (295.527.546,83) | (18,71) |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.6.1.1.4 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 10.983.185.098,00 | 15.121.427.174,58 |

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp10.983.185.098,00 dan Rp15.121.427.174,58 terdiri dari:

Tabel 5.6.7

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dan 2020

| No. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------|
| 1 | Penerimaan Jasa Giro | 688.317.761,77 | 1.339.340.650,48 | (651.022.888,71) | (48,61) |
| 2 | Pendapatan Bunga | 1.737.013.060,61 | 4.476.325.686,58 | (2.739.312.625,97) | (61,20) |
| 3 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 789.079.651,20 | 194.817.750,00 | 594.261.901,20 | 305,03 |

| No. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 4 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 68.896.386,00 | 0,00 | 68.896.386,00 | 0,00 |
| 5 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 27.868.961,50 | 31.663.338,00 | (3.794.376,50) | (11,98) |
| 6 | Pendapatan dari Pengembalian | 98.878.818,00 | 1.051.945.159,52 | (953.066.341,52) | (90,60) |
| 7 | Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 49.323.778,00 | (49.323.778,00) | (100,00) |
| 8 | Pendapatan Denda Pajak | 279.305,92 | 2.002.954,00 | (1.723.648,08) | (86,06) |
| 9 | Pendapatan Retribusi | 0,00 | 27.516.520,00 | (27.516.520,00) | (100,00) |
| 10 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 7.572.851.153,00 | 7.948.415.838,00 | (375.564.685,00) | (4,73) |
| 11 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat | 0,00 | 75.500,00 | (75.500,00) | (100,00) |
| 12 | Pendapatan Dana BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 10.983.185.098,00 | 15.121.427.174,58 | (4.138.242.076,58) | (27,37) |

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 03 Laporan Arus Kas Paragraf 8 ***bahwa arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah*** dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ***Pasal 6 ayat 4 berbunyi Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan bagian dari Rekening BUD.***

Dengan berpedoman pada aturan tersebut bahwa Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 senilai Rp10.983.185.098,00 sudah termasuk Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional senilai Rp7.572.851.153,00 pada 7 (tujuh) Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bima dengan rincian sebagai berikut.

- Puskesmas Mpunda senilai Rp1.746.675.899,00;
- Puskesmas Rasanae Timur senilai Rp 730.217.100,00;
- Puskesmas Paruga senilai Rp 1.335.810.336,00;
- Puskesmas Penanae senilai Rp 1.775.705.699,00;
- Puskesmas Kolo senilai Rp 342.821.986,00;
- Puskesmas Kumbe senilai Rp 342.679.554,00;
- Puskesmas Jatibaru senilai Rp 1.298.940.579,00.

Dapat kami jelaskan bahwa nilai yang ditampilkan dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LRA) senilai Rp11.004.619.098,00 sementara yang ditampilkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Laporan Arus Kas) senilai Rp10.983.185.098,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp21.434.000,00 yang merupakan Pendapatan atas Aset Lainnya. Dimana nilai tersebut direklasifikasi ke Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi.

5.6.1.1.5 Arus Masuk Kas dari 2021 (Rp) 2020 (Rp)

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Penerimaan Dana Bagi Hasil | 37.344.039.204,00 | 26.793.098.072,00 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp37.344.039.204,00 dan Rp26.793.098.072,00.

| No. | Dana Bagi Hasil | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 16.212.609.847,00 | 13.627.373.324,00 | 2.585.236.523,00 | 18,97 |
| 2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 21.131.429.357,00 | 13.165.724.748,00 | 7.965.704.609,00 | 60,50 |
| Jumlah | | 37.344.039.204,00 | 26.793.098.072,00 | 10.550.941.132,00 | 39,38 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | 16.212.609.847,00 | 13.627.373.324,00 |

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp16.212.609.847,00 dan Rp13.627.373.324,00 terdiri dari:

Tabel 5 .6.8
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun 2021 dan 2020

| No. | Dana Bagi Hasil Pajak | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 5.727.066.197,00 | 3.438.438.356,00 | 2.288.627.841,00 | 66,56 |
| 2 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 | 7.996.600.600,00 | 7.837.655.066,00 | 158.945.534,00 | 2,03 |
| 3 | Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau | 2.488.943.050,00 | 2.351.279.902,00 | 137.663.148,00 | 5,85 |
| Jumlah | | 16.212.609.847,00 | 13.627.373.324,00 | 2.585.236.523,00 | 18,97 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | 21.131.429.357,00 | 13.165.724.748,00 |

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 dan 2019 senilai Rp21.131.429.357,00 dan Rp13.165.724.748,00 terdiri dari:

Tabel 5.6.9
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun 2021 dan 2020

| No. | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---|
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---|

| No. | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Provisi Sumber Daya Hutan | 113.773.504,00 | 72.366.546,00 | 41.406.958,00 | 57,22 |
| 2 | Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) | 19.660.036.703,00 | 12.305.081.913,00 | 7.354.954.790,00 | 59,77 |
| 3 | Pungutan Hasil Perikanan | 1.357.619.150,00 | 788.276.289,00 | 569.342.861,00 | 72,23 |
| Jumlah | | 21.131.429.357,00 | 13.165.724.748,00 | 7.965.704.609,00 | 60,50 |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5.6.1.1.7 | Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum | 2021 (Rp) 432.159.814.000,00 | 2020 (Rp) 439.644.557.000,00 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp432.159.814.000,00 dan Rp439.644.557.000,00.

| | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.6.1.1.8 | Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik | 2021 (Rp) 68.320.563.668,00 | 2020 (Rp) 63.487.181.845,00 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp68.320.563.668,00 dan Rp 63.487.181.845,00 terdiri dari:

Tabel 5.6.10
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Tahun 2021 dan 2020

| No. | Dana Alokasi Khusus - Fisik | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Pendidikan | 26.882.745.323,00 | 12.668.368.723,00 | 14.214.376.600,00 | 112,20 |
| 2 | Kesehatan | 24.049.799.703,00 | 32.671.252.448,00 | (8.621.452.745,00) | (26,39) |
| 3 | Infrastruktur Jalan | 5.885.011.914,00 | 2.624.134.000,00 | 3.260.877.914,00 | 124,26 |
| 4 | Infrastruktur Air Minum | 4.030.742.000,00 | 0,00 | 4.030.742.000,00 | 0,00 |
| 5 | Infrastruktur Air Sanitasi | 1.844.456.000,00 | 2.350.667.000,00 | (506.211.000,00) | (21,53) |
| 6 | Kelautan dan Perikanan | 1.361.623.728,00 | 0,00 | 1.361.623.728,00 | 0,00 |
| 7 | Bidang Irigasi | 1.115.590.000,00 | 0,00 | 1.115.590.000,00 | 0,00 |
| 8 | Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 3.150.595.000,00 | 3.529.562.000,00 | (378.967.000,00) | (10,74) |
| 10 | Penugasan | 0,00 | 9.643.197.674,00 | (9.643.197.674,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 68.320.563.668,00 | 63.487.181.845,00 | 4.833.381.823,00 | 7,61 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.6.1.1.8 | Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik | 2021 (Rp) 56.185.780.202,00 | 2020 (Rp) 57.622.822.299,00 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp56.185.780.202,00 dan Rp57.622.822.299,00 terdiri dari:

| No. | Dana Alokasi Khusus – Non Fisik | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD | 3.703.500.000,00 | 3.396.400.000,00 | 307.100.000,00 | 9,04 |
| 2 | Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 42.213.111.000,00 | 39.361.215.000,00 | 2.851.896.000,00 | 7,25 |
| 3 | Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD | 432.000.000,00 | 540.750.000,00 | (108.750.000,00) | (20,11) |
| 4 | Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan | 5.073.270.071,00 | 8.837.846.500,00 | (3.764.576.429,00) | (42,60) |
| 5 | Non Fisik Akreditasi Puskesmas | 0,00 | 357.905.000,00 | (357.905.000,00) | (100,00) |
| 6 | Non Fisik Jaminan Persalinan | 0,00 | 791.457.000,00 | (791.457.000,00) | (100,00) |
| 7 | Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 1.264.393.269,00 | 1.368.704.630,00 | (104.311.361,00) | (7,62) |
| 8 | Dana pelayanan Administrasi Kependudukan | 892.665.262,00 | 642.287.876,00 | 250.377.386,00 | 38,98 |
| 9 | Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM | 361.347.600,00 | 408.962.193,00 | (47.614.593,00) | (11,64) |
| 10 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | 923.200.000,00 | 1.428.950.000,00 | (505.750.000,00) | (35,39) |
| 11 | Fasilitasi Penanaman Modal | 343.813.000,00 | 0,00 | 343.813.000,00 | 0,00 |
| 12 | Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 417.230.000,00 | 0,00 | 417.230.000,00 | 0,00 |
| 13 | Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 561.250.000,00 | 0,00 | 561.250.000,00 | 0,00 |
| 14 | Akreditasi Labkesda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Pengawasan Obat dan Makanan | 0,00 | 157.328.500,00 | (157.328.500,00) | (100,00) |
| 16 | Dana Pelayanan Kepariwisata | 0,00 | 331.015.600,00 | (331.015.600,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 56.185.780.202,00 | 57.622.822.299,00 | (1.437.042.097,00) | (2,49) |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.6.1.1.9 | Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 30.025.143.000,00 | 19.485.769.000,00 |

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2021 senilai Rp30.025.143.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat dan tahun 2020 senilai Rp19.485.769.000,00.

| | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.6.1.1.10 | Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 40.727.314.230,00 | 41.304.094.690,00 |

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp40.727.314.230,00 dan Rp41.304.094.690,00 terdiri dari:

Tabel 5.6.11
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun 2021 dan 2020

| No. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 6.672.660.345,00 | 6.971.358.360,00 | (298.698.015,00) | (4,28) |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 5.374.685.550,50 | 5.377.488.832,50 | (2.803.282,00) | (0,05) |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 12.130.057.966,50 | 11.705.278.407,50 | 424.779.559,00 | 3,63 |
| 4 | Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 34.749.404,00 | 28.826.544,00 | 5.922.860,00 | 20,55 |
| 5 | Pajak Rokok | 16.515.160.964,00 | 17.221.142.546,00 | (705.981.582,00) | (4,10) |
| Jumlah | | 40.727.314.230,00 | 41.304.094.690,00 | (576.780.460,00) | (1,40) |

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.6.1.1.11 | Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 17.931.340.700,00 | 19.766.446.840,26 |

Jumlah Arus masuk kas dari Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp17.931.340.700,00 dan Rp19.766.446.840,26. Pendapatan Hibah tahun 2020 merupakan Hibah dari luar negeri dan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri berupa Pendapatan Dana BOS yang terdapat pada 86 sekolah yang terdiri dari 71 SD & 15 SMP karena merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah.

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 5.6.1.1.12 | Arus Masuk Kas dari Pendapatan Lainnya | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 0,00 | 0,00 |

Jumlah Arus masuk kas dari Pendapatan Lainnya Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Lainnya merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi NTB berupa bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU).

| | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 5.6.1.1.13 | Arus Masuk Kas dari | | |
| | Penerimaan Atas | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | Pengembalian Belanja (Contra Post) | 798.038.457,00 | 850.513.610,00 |

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan atas Pengembalian Belanja (Contra Post) Tahun 2021 senilai Rp798.038.457,00 dan 2020 Rp850.513.610,00.

| | | | |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 5.6.1.2 | Arus Keluar Kas | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | | 578.874.516.178,68 | 631.741.247.098,71 |
| | | | |

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp578.874.516.178,68 dan Rp631.741.247.098,71 terdiri dari :

Tabel 5.6.12
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Pembayaran Pegawai | 357.632.648.357,55 | 361.094.244.676,29 | (3.461.596.318,74) | (0,96) |
| 2 | Pembayaran Barang | 200.514.835.071,13 | 147.056.146.552,00 | 53.458.688.519,13 | 36,35 |
| 3 | Pembayaran Hibah | 16.770.982.000,00 | 36.416.309.932,36 | (19.645.327.932,36) | (53,95) |
| 4 | Pembayaran Bantuan Sosial | 1.422.000.000,00 | 60.905.490.115,06 | (59.483.490.115,06) | (97,67) |
| 5 | Pembayaran Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pembayaran Tak Terduga | 2.534.050.750,00 | 26.269.055.823,00 | (23.735.005.073,00) | (90,35) |
| | Jumlah | 578.874.516.178,68 | 631.741.247.098,71 | (52.866.730.920,03) | (8,37) |

| | | | |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 5.6.1.2.1 | Arus Keluar Kas dari | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | Pembayaran Pegawai | 357.632.648.357,55 | 361.094.244.676,29 |
| | | | |

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp357.632.648.357,55 dan Rp361.094.244.676,29 terdiri dari :

Tabel 5.6.13
Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai
Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pembayaran Pegawai | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------|
| | Belanja Tidak Langsung | | | | |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 235.861.106.648,00 | 285.578.637.846,00 | (49.717.531.198,00) | (17,41) |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 49.161.076.804,00 | 16.710.868.000,00 | 32.450.208.804,00 | 194,19 |
| 3 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 61.921.077.845,00 | 0,00 | 61.921.077.845,00 | 0,00 |
| 4 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 9.934.861.816,00 | 0,00 | 9.934.861.816,00 | 0,00 |
| 5 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 253.725.644,55 | 0,00 | 253.725.644,55 | 0,00 |

| No. | Pembayaran Pegawai | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| 6 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH | 500.799.600,00 | 2.289.999.600,00 | (1.789.200.000,00) | (78,13) |
| 7 | Biaya Pemungutan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 0,00 | 499.999.999,64 | (499.999.999,64) | (100,00) |
| 9 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 0,00 | 99.714.733,65 | (99.714.733,65) | (100,00) |
| Jumlah | | 357.632.648.357,55 | 305.179.220.179,29 | 52.453.428.178,26 | 17,19 |
| Belanja Langsung | | | | | |
| 1 | Honorarium PNS | 0,00 | 41.656.267.400,00 | (41.656.267.400,00) | (100,00) |
| 2 | Honorarium Non PNS | 0,00 | 7.656.379.950,00 | (7.656.379.950,00) | (100,00) |
| 3 | Uang Lembur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Uang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Honorarium Pengelola Dana BOS | 0,00 | 4.608.125.147,00 | (4.608.125.147,00) | (100,00) |
| 6 | Belanja Honorarium Non Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uang Saku dan Transport Peserta PNS | 0,00 | 991.859.000,00 | (991.859.000,00) | (100,00) |
| 8 | Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS | 0,00 | 1.002.393.000,00 | (1.002.393.000,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 0,00 | 55.915.024.497,00 | (55.915.024.497,00) | (100,00) |
| Total | | 357.632.648.357,55 | 361.094.244.676,29 | (3.461.596.318,74) | (0,96) |

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun 2021 tersebut di atas termasuk pembayaran pegawai yang pencairannya langsung lewat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP di tujuh Puskesmas pada Dinas Kesehatan senilai Rp5.643.684.203,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.14
Rincian Pembayaran Pegawai Dana Kapitasi dan Dana BOS
Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pembayaran Pegawai | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Tambahan Penghasilan PNS | 25.005.655,00 | 0,00 |
| 2 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 5.618.678.548,00 | 0,00 |
| 3 | Honorarium PNS | 0,00 | 253.663.750,00 |
| 4 | Uang Saku/Transport | 0,00 | 9.310.000,00 |
| 5 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 0,00 | 77.898.750,00 |
| 6 | Uang Lembur | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Honorarium Tenaga Honorar/Tidak Tetap | 0,00 | 3.736.031.147,00 |

| No. | Pembayaran Pegawai | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8 | Honorarium Peserta Pengganti Uang Transport/ Akomodasi/Konsumsi | 0,00 | 96.302.000,00 |
| 9 | Honorarium Pengelolaan Dana BOS | 0,00 | 510.114.500,00 |
| Jumlah | | 5.643.684.203,00 | 4.683.320.147,00 |

| | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5.6.1.2.2 | Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang dan Jasa | 2021 (Rp) 200.514.835.071,13 | 2020 (Rp) 147.056.146.552,00 |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp200.514.835.071,13 dan Rp147.056.146.552,00 terdiri dari :

Tabel 5.6.15
Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang
Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pembayaran Barang | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 1 | Bahan Pakai Habis | 61.023.035.572,64 | 13.421.975.136,00 | 47.601.060.436,64 | 354,65 |
| 2 | Bahan/Material | 0,00 | 8.222.380.774,00 | (8.222.380.774,00) | (100,00) |
| 3 | Jasa Kantor | 62.821.689.346,00 | 55.010.898.412,00 | 7.810.790.934,00 | 14,20 |
| 4 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 10.291.840.000,00 | 0,00 | 10.291.840.000,00 | 0,00 |
| 5 | Perawatan Kendaraan Bermotor | 0,00 | 6.404.431.572,00 | (6.404.431.572,00) | (100,00) |
| 6 | Cetak/Penggandaan /Dokumentasi | 0,00 | 4.581.247.899,00 | (4.581.247.899,00) | (100,00) |
| 7 | Belanja Sewa Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 506.077.000,00 | 0,00 | 506.077.000,00 | 0,00 |
| 9 | Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir | 1.039.541.400,00 | 1.137.859.836,00 | (98.318.436,00) | (8,64) |
| 10 | Sewa Sarana Mobilitas | 0,00 | 117.500.000,00 | (117.500.000,00) | (100,00) |
| 11 | Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 0,00 | 926.885.000,00 | (926.885.000,00) | (100,00) |
| 12 | Makanan dan Minuman | 0,00 | 10.441.342.097,00 | (10.441.342.097,00) | (100,00) |
| 13 | Pakaian Dinas dan Atributnya | 0,00 | 333.800.200,00 | (333.800.200,00) | (100,00) |
| 14 | Pakaian Kerja | 0,00 | 270.465.950,00 | (270.465.950,00) | (100,00) |
| 15 | Pakaian Khusus dan Hari- Hari Tertentu | 0,00 | 364.475.240,00 | (364.475.240,00) | (100,00) |
| 16 | Perjalanan Dinas | 30.448.852.209,00 | 23.706.155.559,00 | 6.742.696.650,00 | 28,44 |
| 17 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 117.759.820,00 | 0,00 | 117.759.820,00 | 0,00 |
| 18 | Belanja Jasa Insentif bagi | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |

| No. | Pembayaran Barang | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| | Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | | | | |
| 19 | Beasiswa Pendidikan PNS | 315.000.000,00 | 170.000.000,00 | 145.000.000,00 | 85,29 |
| 20 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1.029.811.000,00 | 0,00 | 1.029.811.000,00 | 0,00 |
| 21 | Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 0,00 | 683.575.000,00 | (683.575.000,00) | (100,00) |
| 22 | Pemeliharaan | 5.201.355.163,00 | 4.607.993.360,00 | 593.361.803,00 | 12,88 |
| 23 | Sewa Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Jasa Konsultansi | 7.572.331.882,00 | 3.354.662.850,00 | 4.217.669.032,00 | 125,73 |
| 25 | Hadiah | 0,00 | 668.965.000,00 | (668.965.000,00) | (100,00) |
| 26 | Barang Dana BOS | 16.006.852.578,49 | 11.351.528.467,00 | 4.655.324.111,49 | 41,01 |
| 27 | Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 0,00 | 1.270.754.200,00 | (1.270.754.200,00) | (100,00) |
| 28 | Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS | 0,00 | 9.250.000,00 | (9.250.000,00) | 0,00 |
| 29 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 4.138.689.100,00 | 0,00 | 4.138.689.100,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 200.514.835.071,13 | 147.056.146.552,00 | 53.458.688.519,13 | 36,35 |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.6.1.2.3 | Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah | 2021 (Rp) 16.770.982.000,00 | 2020 (Rp) 36.416.309.932,36 |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp16.770.982.000,00 dan Rp36.416.309.932,3 terdiri dari :

Tabel 5.6.16
Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pembayaran Hibah | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| 1 | Hibah kepada Badan/ Lembaga/Organisasi | 16.648.750.000,00 | 16.134.046.000,00 | 514.704.000,00 | 3,19 |
| | Belanja Hibah Dana BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 122.232.000,00 | 0,00 | 122.232.000,00 | 0,00 |
| 2 | Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | 0,00 | 9.964.300.000,00 | (9.964.300.000,00) | (100,00) |
| 3 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 0,00 | 10.317.963.932,36 | (10.317.963.932,36) | (100,00) |

| No. | Pembayaran Hibah | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------|
| | Jumlah | 16.770.982.000,00 | 36.416.309.932,36 | (19.645.327.932,36) | (53,95) |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.6.1.2.4 | Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial | 2021 (Rp) 1.422.000.000,00 | 2020 (Rp) 60.905.490.115,06 |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp1.422.000.000,00 dan Rp60.905.490.115,06 terdiri dari :

Tabel 5.6.17
Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020

| No. | Pembayaran Bantuan Sosial | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------|
| 1 | Kelompok Masyarakat | 1.255.000.000,00 | 33.120.000.000,00 | (31.865.000.000,00) | (96,21) |
| 2 | Anggota Masyarakat | 87.000.000,00 | 27.785.490.115,06 | (27.698.490.115,06) | (99,69) |
| 3 | Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 1.422.000.000,00 | 60.905.490.115,06 | (59.483.490.115,06) | (97,67) |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5.6.1.2.5 | Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan | 2021 (Rp) 0,00 | 2020 (Rp) 0,00 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

| | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.6.1.2.6 | Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga | 2021 (Rp) 2.534.050.750,00 | 2020 (Rp) 26.269.055.823,00 |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp2.534.050.750,00 dan Rp26.269.055.823,00 dengan rincian tahun 2021 sebagai berikut.

- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak Pandemi corona virus disease 2019 melalui pengadaan Oksigen Central di RSUD Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp 141.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- Pembayaran tidak terduga untuk kegiatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Setara Kota Bima senilai Rp 647.062.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak mengantisipasi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kota

Bima Tahun 2021 senilai Rp112.850.000,00 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak mengantisipasi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp50.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pembayaran tidak terduga untuk kegiatan rehabilitasi korban kebakaran di Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp320.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak mengantisipasi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp50.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keperluan kegiatan Penanganan siaga banjir, penanganan sampah pasca banjir, sedimentasi, pohon tumbang dan pembersihan sekolah terdampak banjir di Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp49.893.750,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak mengantisipasi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp149.245.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- Pembayaran tidak terduga untuk santunan kematian untuk masyarakat di Kota Bima Tahun 2021 senilai Rp1.014.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

| | | | |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5.6.2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 2021 (Rp) (140.602.241.564,74) | 2020 (Rp) (164.893.605.175,02) |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing defisit senilai Rp140.602.241.564,74 dan Rp164.893.605.175,02. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Investasi yaitu arus masuk kas investasi dikurangi dengan arus keluar kas investasi.

Rincian aliran kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6.18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan 2020

| No. | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| Arus Masuk Kas | | | | | |
| 1 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penjualan atas Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 0,00 | 828.517.300,00 | (828.517.300,00) | (100,00) |
| 4 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 0,00 | 40.235.000,00 | (40.235.000,00) | (100,00) |
| 5 | Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No. | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| 6 | Penjualan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Penjualan Aset Lainnya | 21.434.000,00 | 0,00 | 21.434.000,00 | 0,00 |
| 8 | Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 21.434.000,00 | 868.752.300,00 | (847.318.300,00) | (97,53) |
| Arus Keluar Kas | | | | | |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Perolehan Tanah | 737.365.000,00 | 1.325.411.000,00 | (588.046.000,00) | (44,37) |
| 3 | Perolehan Peralatan dan Mesin | 28.082.138.647,00 | 49.285.156.662,00 | (21.203.018.015,00) | (43,02) |
| 4 | Perolehan Bangunan dan Gedung | 67.219.824.199,03 | 29.242.818.894,29 | 37.977.005.304,74 | 129,87 |
| 5 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 40.902.636.451,71 | 74.078.224.366,82 | (33.175.587.915,11) | (44,78) |
| 6 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | 1.681.711.267,00 | 11.830.746.551,91 | (10.149.035.284,91) | (85,79) |
| 7 | Perolehan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| 9 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 140.623.675.564,74 | 165.762.357.475,02 | (25.138.681.910,28) | (15,17) |
| Total | | (140.602.241.564,74) | (164.893.605.175,02) | 24.291.363.610,28 | (14,73) |

5.6.2.1 Arus Masuk Kas

| 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|----------------------|-----------------------|
| 21.434.000,00 | 868.752.300,00 |

Arus Masuk Kas Tahun 2021 dan 2020 dari hasil penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai, kendaraan dinas roda empat dan Bahan-bahan Bekas Bangunan senilai Rp21.434.000,00 dan Rp868.752.300,00 terdiri dari :

Tabel 5.6.19
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan 2020

| No. | Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 0,00 | 828.517.300,00 | (828.517.300,00) | (100,00) |
| 2 | Bahan-bahan Bekas Bangunan | 0,00 | 40.235.000,00 | (40.235.000,00) | (100,00) |
| 3 | Penjualan Aset Lainnya | 21.434.000,00 | 0,00 | 21.434.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | 21.434.000,00 | 868.752.300,00 | (847.318.300,00) | (97,53) |

5.6.2.2 Arus Keluar Kas

| 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 140.623.675.564,74 | 165.762.357.475,02 |

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 senilai Rp140.623.675.564,74 dan Rp165.762.357.475,02 terdiri dari Perolehan Aset Tetap (Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya) dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah terdiri dari :

Tabel 5.6.20
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan 2020

| No. | Arus Keluar Kas | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Perolehan Tanah | 737.365.000,00 | 1.325.411.000,00 | (588.046.000,00) | (44,37) |
| 2 | Perolehan Peralatan dan Mesin | 28.082.138.647,00 | 49.285.156.662,00 | (21.203.018.015,00) | (43,02) |
| 3 | Perolehan Bangunan dan Gedung | 67.219.824.199,03 | 29.242.818.894,29 | 37.977.005.304,74 | 129,87 |
| 4 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 40.902.636.451,71 | 74.078.224.366,82 | (33.175.587.915,11) | (44,78) |
| 5 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | 1.681.711.267,00 | 11.830.746.551,91 | (10.149.035.284,91) | (85,79) |
| 6 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Modal | | 140.623.675.564,74 | 165.762.357.475,02 | (25.138.681.910,28) | (15,17) |

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 tersebut di atas termasuk perolehan aset tetap yang pencairannya tidak melalui Kas Daerah tapi langsung lewat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP di 7 (tujuh) Puskesmas pada Dinas Kesehatan senilai Rp209.708.956,00 dan Bendahara Dana BOS pada 86 (delapan puluh Enam) sekolah senilai Rp1.877.654.259,00 dan dicatat dalam laporan arus kas karena merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah.

Rincian dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 5.6.21
Perolehan Aset Tetap yang pencairannya langsung lewat Bendahara Dana Kapitasi JKN dan Bendahara Dana BOS Tahun 2021 dan 2020

| No. | Perolehan Aset Tetap | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| 1 | Pengadaan <i>Electric Generating Set</i> | 0,00 | 35.000.000,00 | (35.000.000,00) | (100,00) |
| 2 | Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Perolehan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 8.000.000,00 | (8.000.000,00) | (100,00) |
| 4 | Perolehan Alat Pendingin | 5.665.000,00 | 39.150.000,00 | (33.485.000,00) | (85,53) |
| 5 | Perolehan Alat Pemadam Kebakaran | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 |
| 6 | Perolehan Pengadaan Komputer Jaringan | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | Perolehan Pengadaan Komputer/Personal Komputer | 40.000.000,00 | 2.067.164.737,00 | (2.027.164.737,00) | (98,06) |
| 8 | Perolehan Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya | 822.703.392,00 | 0,00 | 822.703.392,00 | 0,00 |
| 9 | Perolehan Meja Kerja Pejabat | 8.625.000,00 | 81.000.000,00 | (72.375.000,00) | (89,35) |

| No. | Perolehan Aset Tetap | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 10 | Perolehan Kursi Pejabat | 2.550.000,00 | 55.000.000,00 | (52.450.000,00) | (95,36) |
| 11 | Perolehan Kursi Tamu di Ruang Pejabat | 0,00 | 10.000.000,00 | (10.000.000,00) | (100,00) |
| 12 | Perolehan Lemari dan Arsip Pejabat | 0,00 | 10.000.000,00 | (10.000.000,00) | (100,00) |
| 13 | Perolehan Alat Studio Visual | 0,00 | 8.000.000,00 | (8.000.000,00) | (100,00) |
| 14 | Perolehan Alat Kedokteran Umum | 0,00 | 103.858.625,00 | (103.858.625,00) | (100,00) |
| 15 | Perolehan Alat Kesehatan Umum Lainnya | 92.259.206,00 | 0,00 | 92.259.206,00 | 0,00 |
| 16 | Peralatan Kantor Lainnya | 7.469.250,00 | 1.644.247.160,00 | (1.636.777.910,00) | (99,55) |
| 17 | Perolehan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 29.740.500,00 | 2.400.000,00 | 27.340.500,00 | 1.139,19 |
| 18 | Perolehan Bangunan Gedung Kantor | 0,00 | 20.000.000,00 | (20.000.000,00) | (100,00) |
| 19 | Pengadaan Buku | 1.054.950.867,00 | 985.115.018,00 | 69.835.849,00 | 7,09 |
| 20 | Pengadaan Alat Musik | 0,00 | 43.680.000,00 | (43.680.000,00) | (100,00) |
| 21 | Pengadaan Alat Olahraga | 0,00 | 60.883.300,00 | (60.883.300,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 2.087.363.215,00 | 5.173.498.840,00 | (3.086.135.625,00) | (59,65) |

| | | | |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5.6.3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 2021 (Rp) 1.036.753,00 | 2020 (Rp) (998.345.746,00) |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing defisit senilai Rp1.036.753,00 dan senilai Rp998.345.746,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu arus masuk kas pendanaan dikurangi dengan arus keluar kas pendanaan. Nilai tersebut merupakan pengembalian Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 5.6.22
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
Tahun 2021 dan 2020

| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| Arus Masuk Kas | | | | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Investasi Dana Bergulir) | 1.036.753,00 | 1.654.254,00 | (617.501,00) | (37,33) |
| Jumlah | 1.036.753,00 | 1.654.254,00 | (617.501,00) | (37,33) |
| Arus Keluar Kas | | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | (100,00) |
| Jumlah | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | (100,00) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | 1.036.753,00 | (998.345.746,00) | (1.000.617.501,00) | (100,10) |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5.6.3.1 | Arus Masuk Kas | 2021 (Rp) 1.036.753,00 | 2020 (Rp) 1.654.254,00 |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing senilai Rp1.036.753,00 dan Rp1.654.254,00 yang merupakan penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir yang disalurkan kepada masyarakat dan terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

| | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| 5.6.3.2 Arus Keluar Kas | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| | 0,00 | 1.000.000.000,00 |

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 senilai Rp0,00 dan Rp1.000.000.000,00.

| | | |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 2020 (Rp) | 2019 (Rp) |
| | 0,00 | 0,00 |

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari arus masuk kas aktivitas transitoris dikurangi dengan arus keluar kas aktivitas transitoris (PFK dan Sisa UP/TU) yang merupakan PFK tahun lalu yang terbayarkan tahun 2021.

Rincian arus kas dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6.23
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan 2020

| No. | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Arus Masuk Kas | | | | | |
| 1 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 55.602.010.042,53 | 52.638.031.729,27 | 2.963.978.313,26 | 5,63 |
| 2 | Penerimaan Sisa UP TA. 2019 | 0,00 | 1.616.000,00 | (1.616.000,00) | (100,00) |
| 3 | Penerimaan Sisa UP TA. 2020 | 0,00 | 140.478.567,00 | (140.478.567,00) | (100,00) |
| 4 | Penerimaan Sisa UP TA. 2021 | 172.013.382,00 | 0,00 | 172.013.382,00 | 0,00 |
| 5 | Penerimaan Sisa TU TA. 2020 dan TA. 2021 | 310.388.745,00 | 1.278.026.344,00 | (967.637.599,00) | (75,71) |
| Jumlah | | 56.084.412.169,53 | 54.058.152.640,27 | 2.026.259.529,26 | 3,75 |
| Arus Keluar Kas | | | | | |
| 1 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 55.602.010.042,53 | 52.638.031.729,27 | 2.963.978.313,26 | 5,63 |
| 2 | Pengeluaran Sisa UP TA. 2019 | 0,00 | 1.616.000,00 | (1.616.000,00) | 0,00 |
| 3 | Pengeluaran Sisa UP TA. 2020 | 0,00 | 140.478.567,00 | (140.478.567,00) | 0,00 |
| 4 | Pengeluaran Sisa UP TA. 2021 | 172.013.382,00 | 0,00 | 172.013.382,00 | 0,00 |
| 5 | Pengeluaran Sisa TU TA. 2020 dan TA. 2021 | 310.388.745,00 | 1.278.026.344,00 | (967.637.599,00) | (75,71) |
| Jumlah | | 56.084.412.169,53 | 54.058.152.640,27 | 2.026.259.529,26 | 3,75 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.6.4.1 Arus Masuk Kas

| 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 56.084.412.169,53 | 54.058.152.640,27 |

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing adalah senilai Rp56.084.412.169,53 dan Rp54.058.152.640,27 terdiri dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan penerimaan sisa Uang Persediaan (UP) dan sisa Tambahan Uang Persediaan (TU).

Uraian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.6.24
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2021 dan 2020

| No. | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Arus Masuk Kas | | | | | |
| 1 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 55.602.010.042,53 | 52.638.031.729,27 | 2.963.978.313,26 | 5,63 |
| 2 | Penerimaan Sisa UP TA. 2019 | 0,00 | 1.616.000,00 | (1.616.000,00) | (100,00) |
| 3 | Penerimaan Sisa UP TA. 2020 | 0,00 | 140.478.567,00 | (140.478.567,00) | (100,00) |
| 4 | Penerimaan Sisa UP TA. 2021 | 172.013.382,00 | 0,00 | 172.013.382,00 | 0,00 |
| 5 | Penerimaan Sisa TU TA. 2020 dan TA. 2021 | 310.388.745,00 | 1.278.026.344,00 | (967.637.599,00) | (75,71) |
| Jumlah | | 56.084.412.169,53 | 54.058.152.640,27 | 2.026.259.529,26 | 3,75 |

Rincian arus masuk kas dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing senilai Rp55.602.010.042,53 dan Rp52.638.031.729,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.25
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Tahun 2021 dan 2020

| No | Penerimaan PFK | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
| 1 | Iuran Wajib Pegawai | 1.850.099.374,00 | 1.873.053.705,00 | (22.954.331,00) | (1,23) |
| 2 | Potongan Taperum | 138.446.362,00 | 245.547.636,00 | (107.101.274,00) | (43,62) |
| 3 | BPJS Kesehatan | 7.571.493.128,00 | 7.610.943.439,00 | (39.450.311,00) | (0,52) |
| 4 | PPh Ps 21 | 11.268.427.938,53 | 9.573.141.026,80 | 1.695.286.911,73 | 17,71 |
| 5 | PPh Ps 22 | 726.471.777,00 | 905.003.345,63 | (178.531.568,63) | (19,73) |
| 6 | PPh Ps 23 | 90.938.980,00 | 47.258.885,00 | 43.680.095,00 | 92,43 |
| 7 | PPh Ps 4 | 2.741.311.404,00 | 2.287.281.113,68 | 454.030.290,32 | 19,85 |
| 8 | PPh Ps 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 15.717.798.823,00 | 15.013.108.830,16 | 704.689.992,84 | 4,69 |
| 10 | Iuran Wajib Pegawai (8%) | 13.384.723.099,00 | 13.580.764.182,00 | (196.041.083,00) | (1,44) |
| 11 | Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 387.852.137,00 | 375.786.828,00 | 12.065.309,00 | 3,21 |
| 12 | Jaminan Kematian (JKM) | 1.122.750.207,00 | 1.123.699.878,00 | (949.671,00) | (0,08) |
| 13 | TAPERA PEGAWAI | 583.505.103,00 | 0,00 | 583.505.103,00 | 0,00 |
| 14 | Potongan Askes | 3.496.231,00 | 2.442.860,00 | 1.053.371,00 | 43,12 |
| 15 | Pajak Restoran | 331.905,00 | 0,00 | 331.905,00 | 0,00 |
| 16 | Iuran Wajib Pegawai (3,25%) | 14.363.574,00 | 0,00 | 14.363.574,00 | 0,00 |

| No | Penerimaan PFK | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|------|
| | Jumlah | 55.602.010.042,53 | 52.638.031.729,27 | 2.963.978.313,26 | 5,63 |

5.6.4.2 Arus Keluar Kas

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| 56.084.412.169,53 | 54.058.152.640,27 |

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing adalah senilai Rp56.084.412.169,53 dan Rp54.058.152.640,27 terdiri dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan penerimaan sisa Uang Persediaan (UP) dan sisa Tambahan Uang Persediaan (TU).

Tabel 5.6.26
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitor Tahun 2021 dan 2020

| No. | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 1 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 55.602.010.042,53 | 52.638.031.729,27 | 2.963.978.313,26 | 5,63 |
| 2 | Pengeluaran Sisa UP TA. 2019 | 0,00 | 1.616.000,00 | (1.616.000,00) | (100,00) |
| 3 | Pengeluaran Sisa UP TA. 2020 | 0,00 | 140.478.567,00 | (140.478.567,00) | (100,00) |
| 4 | Pengeluaran Sisa UP TA. 2021 | 172.013.382,00 | 0,00 | 172.013.382,00 | 0,00 |
| 5 | Pengeluaran Sisa TU TA. 2020 dan TA. 2021 | 310.388.745,00 | 1.278.026.344,00 | (967.637.599,00) | (75,71) |
| | Jumlah | 56.084.412.169,53 | 54.058.152.640,27 | 2.026.259.529,26 | 3,75 |

Rincian arus keluar kas dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing senilai Rp55.602.010.042,53 dan Rp52.638.031.729,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.27
Arus Keluar Kas dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2021 dan 2020

| No | Pengeluaran PFK | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 1 | Iuran Wajib Pegawai | 1.850.099.374,00 | 1.873.053.705,00 | (22.954.331,00) | (1,23) |
| 2 | Potongan Taperum | 138.446.362,00 | 245.547.636,00 | (107.101.274,00) | (43,62) |
| 3 | BPJS Kesehatan | 7.571.493.128,00 | 7.610.943.439,00 | (39.450.311,00) | (0,52) |
| 4 | PPh Ps 21 | 11.268.427.938,53 | 9.573.141.026,80 | 1.695.286.911,73 | 17,71 |
| 5 | PPh Ps 22 | 726.471.777,00 | 905.003.345,63 | (178.531.568,63) | (19,73) |
| 6 | PPh Ps 23 | 90.938.980,00 | 47.258.885,00 | 43.680.095,00 | 92,43 |
| 7 | PPh Ps 4 | 2.741.311.404,00 | 2.287.281.113,68 | 454.030.290,32 | 19,85 |
| 8 | PPh Ps 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 15.717.798.823,00 | 15.013.108.830,16 | 704.689.992,84 | 4,69 |
| 10 | Iuran Wajib Pegawai (8%) | 13.384.723.099,00 | 13.580.764.182,00 | (196.041.083,00) | (1,44) |
| 11 | Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 387.852.137,00 | 375.786.828,00 | 12.065.309,00 | 3,21 |
| 12 | Jaminan Kematian (JKM) | 1.122.750.207,00 | 1.123.699.878,00 | (949.671,00) | (0,08) |
| 13 | TAPERA PEGAWAI | 583.505.103,00 | 0,00 | 583.505.103,00 | 0,00 |
| 14 | Potongan Askes | 3.496.231,00 | 2.442.860,00 | 1.053.371,00 | 43,12 |
| 15 | Pajak Restoran | 331.905,00 | 0,00 | 331.905,00 | 0,00 |

| No | Pengeluaran PFK | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 16 | Iuran Wajib Pegawai (3,25%) | 14.363.574,00 | 0,00 | 14.363.574,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 55.602.010.042,53 | 52.638.031.729,27 | 2.963.978.313,26 | 5,63 |

| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.6.5 | Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran | 2021 (Rp) 10.973.784.614,93 | 2020 (Rp) 93.241.433.641,70 |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Saldo Kas per 1 Januari 2021 senilai Rp 10.973.784.614,93 dan Tahun 2020 Rp93.241.433.641,70.

| | | | |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5.6.6 | Saldo Akhir Kas | 2021 (Rp) 21.962.966.165,30 | 2020 (Rp) 11.186.300.990,05 |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

Saldo akhir Kas Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp21.962.966.165,30 dan Rp11.186.300.990,05 dengan rincian berikut.

Tabel 5.6.28
Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Tahun 2020 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran | 21.962.179.832,18 | 10.973.784.614,93 | 10.988.395.217,25 | 100,13 |
| 2 | Kas di Bendahara Penerimaan | 143.889,12 | 206.938.889,12 | (206.795.000,00) | (99,93) |
| 3 | Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | 642.444,00 | 5.577.486,00 | (4.935.042,00) | (88,48) |
| | Jumlah | 21.962.966.165,30 | 11.186.300.990,05 | 10.776.665.175,25 | 96,34 |

- a. Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 senilai Rp21.962.179.832,18 terdiri dari :
 - Kas di BUD Per 31 Desember 2021 senilai Rp21.804.706.778,67;
 - Kas Dana Kapitasi merupakan Kas pada Bendahara FTP 7 (tujuh) Puskesmas pada Dinas Kesehatan senilai Rp0,00;
 - Kas Dana BOS yang berada pada Sekolah senilai Rp151.753.053,51; dan
 - Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah senilai Rp5.720.000,00.
- b. Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2021 senilai Rp143.889,12 yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- c. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran senilai Rp642.444,00 merupakan hutang PFK yang terdapat pada:
 - Dinas Kesehatan senilai Rp14.586,00;
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp456.381,00;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp41.932,00; dan
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp129.545,00.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kota Bima secara astronomis terletak di ujung timur Pulau Sumbawa di antara 8°20'-8°30' Lintang Selatan dan 118°41'-118°48' Bujur Timur, dengan sebagian besar batas wilayah Kota Bima di kelilingi oleh wilayah Kabupaten Bima yaitu: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palibelo, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wawo, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bima.

Luas wilayah Kota Bima meliputi wilayah daratan seluas 222,25km², dengan jumlah kecamatan sebanyak lima kecamatan yang dihuni oleh penduduk asli suku Mbojo (Bima) dan suku pendatang lainnya. Adapun lima kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Bima adalah: Rasanae Barat, Mpunda, Rasanae Timur, Raba, dan Asakota.

Asakota merupakan kecamatan yang memiliki luas area terbesar, yaitu 69,03km² sedangkan Kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan tersempit dengan luas wilayah hanya 10,14km². Artinya, hampir sepertiga atau 31,06% wilayah Kota Bima merupakan bagian wilayah Kecamatan Asakota, kemudian 28,83% dan 28,67% merupakan wilayah kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Raba. Sisanya 10% adalah wilayah Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda, sebagaimana yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Luas Wilayah Kota Bima Berdasarkan Kecamatan

| No. | Kecamatan | Luas (km ²) | Persentase |
|--------------|---------------|-------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Rasanae Barat | 10,14 | 4,56 |
| 2 | Mpunda | 15,28 | 6,88 |
| 3 | Rasanae Timur | 64,07 | 28,83 |
| 4 | Raba | 63,73 | 28,67 |
| 5 | Asakota | 69,03 | 31,06 |
| Total | | 222,25 | 100,00 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2021

Lebih rinci, kelima kecamatan tersebut terdiri dari total 41 kelurahan, yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.2
Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan per Kecamatan

| Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
|--------------------|--------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Rasanae Barat | Paruga | 6 |
| 2. Mpunda | Sadia | 10 |
| 3. Rasanae Timur | Kumbe | 8 |
| 4. Raba | Penaraga | 11 |
| 5. Asakota | Melayu | 6 |
| J u m l a h | | 41 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2021

Jumlah PNSD di Kota Bima adalah 3.596 orang, yang terdiri dari Eselon dan Non Eselon. Tidak ada Eselon I, Eselon II sebanyak 31 orang, Eselon III sebanyak 130 orang,

Eselon IV sebanyak 340 orang, dan Eselon V sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk Non Eselon terdiri dari Tenaga Fungsional sebanyak 1.779 orang dan Staf 1.315 orang. Jumlah PNS per golongan dan per jabatan Pemerintah Kota Bima sebagaimana yang tertuang dalam daftar berikut :

Tabel 6.3

Daftar Jumlah PNS Pergolongan Pemerintah Kota Bima Per 31 Desember 2021

| GOLONGAN/RUANG | PEGAWAI NEGERI SIPIL | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | ESELON | | | | | NON ESELON | | JUMLAH |
| | I | II | III | IV | V | JFT | JFU | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> |
| Golongan IV/e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golongan IV/d | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Golongan IV/c | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| Golongan IV/b | 0 | 6 | 30 | 1 | 0 | 194 | 0 | 231 |
| Golongan IV/a | 0 | 1 | 72 | 13 | 0 | 431 | 15 | 532 |
| Jumlah Golongan IV | 0 | 31 | 102 | 14 | 0 | 629 | 15 | 791 |
| Golongan III/d | 0 | 0 | 26 | 155 | 0 | 445 | 89 | 715 |
| Golongan III/c | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 337 | 137 | 586 |
| Golongan III/b | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 238 | 281 | 578 |
| Golongan III/a | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 402 | 491 |
| Jumlah Golongan III | 0 | 0 | 28 | 326 | 1 | 1106 | 909 | 2370 |
| Golongan II/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 166 | 187 |
| Golongan II/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 85 |
| Golongan II/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 | 118 |
| Golongan II/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Jumlah Golongan II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 358 | 402 |
| Golongan I/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Golongan I/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Golongan I/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Golongan I/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Golongan I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| J U M L A H | 0 | 31 | 130 | 340 | 1 | 1779 | 1315 | 3596 |

Untuk lebih rinci, berikut dilampirkan daftar jumlah PNS per golongan per jabatan Lingkungan Pemerintah Kota Bima :

Tabel 6.4
Rincian PNS Pergolongan Perjabatan Pemerintah Kota Bima Per 31 Desember 2021

| NO. | INSTANSI/UNIT KERJA | PEGAWAI NEGERI SIPIL | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------|----------------------|------|-------|-------|------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | ESELON | | | | | | | | | | | JUM |
| | | II/a | II/b | III/a | III/b | IV/a | IV/b | V | JML | JFT | JFU | JML | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Sekretariat Daerah | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Bagian Pemerintahan Setda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 14 |
| 3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 | 15 |
| 4 | Bagian Hukum Setda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| 5 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan Setda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 13 |
| 7 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 16 |
| 8 | Bagian Organisasi Setda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 |
| 9 | Bagian Umum Setda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 19 | 21 |
| 10 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 11 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 27 | 31 |
| 12 | Inspektorat | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 17 | 50 | 56 |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 | 3 | 33 | 36 | 48 |
| 14 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 39 | 57 | 67 |
| 15 | Dinas Kesehatan | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 61 | 12 | 73 | 82 |
| 16 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 52 | 65 | 75 |
| 17 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | 21 | 31 |
| 18 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 21 | 27 |
| 19 | Dinas Sosial | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 | 28 | 34 |
| 20 | Dinas Tenaga Kerja | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | 14 | 22 |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 9 | 17 | 24 |
| 22 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 17 | 22 |
| 23 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 | 108 | 121 | 131 |
| 24 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 19 | 28 | 35 |
| 25 | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 14 | 24 | 31 |
| 26 | Dinas Perhubungan | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 19 | 21 | 33 |
| 27 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 19 | 33 | 40 |
| 28 | Dinas KOPERINDAG | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 23 | 29 | 39 |
| 29 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 25 | 28 |

| NO. | INSTANSI/UNIT KERJA | PEGAWAI NEGERI SIPIL | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------|----------------------|------|-------|-------|------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | ESELON | | | | | | | | | | | JUM |
| | | II/a | II/b | III/a | III/b | IV/a | IV/b | V | JML | JFT | JFU | JML | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 11 | 27 | 35 |
| 31 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 | 25 | 31 |
| 32 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 12 | 26 | 31 |
| 33 | Dinas Pertanian | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 20 | 45 | 37 | 82 | 102 |
| 34 | BAPPEDA LITBANG | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 32 | 38 |
| 35 | BPKAD | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 21 | 5 | 51 | 56 | 77 |
| 36 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 18 | 26 | 32 |
| 37 | BPBD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 22 | 28 |
| 38 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 15 | 22 |
| 39 | Kecamatan Asakota | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | 14 | 22 |
| 40 | Kecamatan RasanaE Barat | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 12 | 19 |
| 41 | Kecamatan RasanaE Timur | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 11 | 20 |
| 42 | Kecamatan Mpunda | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 17 | 25 |
| 43 | Kecamatan Raba | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14 | 14 | 23 |
| 44 | Kelurahan Dara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Kelurahan Dodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 46 | Kelurahan Jatibaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 47 | Kelurahan Jatibaru Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 48 | Kelurahan Jatiwangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 49 | Kelurahan Kendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 11 |
| 50 | Kelurahan Kodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 51 | Kelurahan Kolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 52 | Kelurahan Kumbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 53 | Kelurahan Lampe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | Kelurahan Lelamase | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 55 | Kelurahan Lewirato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 56 | Kelurahan Mande | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 57 | Kelurahan Manggemaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 58 | Kelurahan Matakando | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 59 | Kelurahan Melayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 60 | Kelurahan Monggonao | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 61 | Kelurahan NaE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 62 | Kelurahan Nitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 63 | Kelurahan Ntobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 64 | Kelurahan Nungga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 65 | Kelurahan Oi Fo'o | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 66 | Kelurahan Oimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 |

| NO. | INSTANSI/UNIT KERJA | PEGAWAI NEGERI SIPIL | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------|------|-------|-------|------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | ESELON | | | | | | | | | | | JUM |
| | | II/a | II/b | III/a | III/b | IV/a | IV/b | V | JML | JFT | JFU | JML | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 67 | Kelurahan Pane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 68 | Kelurahan Panggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 69 | Kelurahan Paruga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 70 | Kelurahan PenanaE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 71 | Kelurahan Penaraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 72 | Kelurahan Penatoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 73 | Kelurahan Rabadompu Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 74 | Kelurahan Rabadompu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 75 | Kelurahan Rabangodu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 76 | Kelurahan Rabangodu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 77 | Kelurahan Rite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 78 | Kelurahan Rontu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 79 | Kelurahan Sadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 80 | Kelurahan SambinaE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 81 | Kelurahan Santi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 82 | Kelurahan SaraE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 83 | Kelurahan Tanjung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 84 | Kelurahan Ule | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 85 | SKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 16 |
| 86 | RSUD Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 77 | 14 | 91 | 94 |
| 87 | Puskesmas Kolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 14 |
| 88 | Puskesmas Mpunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 10 | 80 | 81 |
| 89 | Puskesmas Paruga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 11 | 72 | 73 |
| 90 | Puskesmas PenanaE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 7 | 67 | 68 |
| 91 | Puskesmas Rasanae Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 6 | 46 | 47 |
| 92 | Puskesmas Kumbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 31 | 32 |
| 93 | Puskesmas Jatibaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 8 | 46 | 47 |
| 94 | SDN 01 Melayu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 14 |
| 95 | SDN 02 Suntu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 | 27 |
| 96 | SDN 03 Jatiwangi Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 97 | SDN 05 Rabangodu Utara Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 17 |
| 98 | SDN 06 Kodo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 99 | SDN 07 Kumbe Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 14 |
| 100 | SDN 08 Penanae Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 101 | SDN 10 Penatoi Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 16 |

| NO. | INSTANSI/UNIT KERJA | PEGAWAI NEGERI SIPIL | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------|------|-------|-------|------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | ESELON | | | | | | | | | | | JUM |
| | | II/a | II/b | III/a | III/b | IV/a | IV/b | V | JML | JFT | JFU | JML | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 102 | SDN 11 Manggemaci Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 18 |
| 103 | SDN 12 Sarae Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| 104 | SDN 13 Kolo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 |
| 105 | SDN 14 Sadia Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 14 |
| 106 | SDN 15 Ntobo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 107 | SDN 16 Salama Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 108 | SDN 17 Pane Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 109 | SDN 18 Dodu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 110 | SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 22 |
| 111 | SDN 20 Rabadompu Timur Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 14 |
| 112 | SDN 21 Tolomundu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 19 |
| 113 | SDN 22 Jatibaru Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 114 | SDN 24 Rabangodu Utara Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| 115 | SDN 25 Santi Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 |
| 116 | SDN 26 Rabadompu Barat Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 |
| 117 | SDN 27 Rabadompu Timur Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 118 | SDN 28 Melayu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| 119 | SDN 29 Tanjung Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 22 |
| 120 | SDN 30 Nitu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 |
| 121 | SDN 31 Lelamase Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 |
| 122 | SDN 32 Panggi Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11 |
| 123 | SDN 33 Lampe Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 13 |
| 124 | SDN 34 Bonto Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 125 | SDN 35 Nungga Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 126 | SDN 36 Nggarolo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 127 | SDN 37 Kendo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 128 | SDN 39 Rabadompu Barat Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 129 | SDN 40 Lewirato Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 13 |
| 130 | SDN 42 Manggemaci Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| 131 | SDN 43 Melayu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 132 | SDN 44 Mande Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 |

| NO. | INSTANSI/UNIT KERJA | PEGAWAI NEGERI SIPIL | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------------|------|-------|-------|------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | ESELON | | | | | | | | | | | JUM |
| | | II/a | II/b | III/a | III/b | IV/a | IV/b | V | JML | JFT | JFU | JML | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 133 | SDN 45 Pane Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 134 | SDN 46 Lela Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 |
| 135 | SDN 47 Kodo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 136 | SDN 48 Kumbe Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 137 | SDN 49 Rabangodu Selatan Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 19 |
| 138 | SDN 50 Penaraga Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 139 | SDN 51 Rite Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 140 | SDN 52 Busu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 141 | SDN 53 Oi Fo'o Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| 142 | SDN 54 Santi Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 143 | SDN 55 Dara Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11 |
| 144 | SDN 56 Tolobali Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 145 | SDN 57 Wadumbolo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 |
| 146 | SDN 58 Tambana Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 147 | SDN 59 Rasalewi Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 12 |
| 148 | SDN 60 Sambinae Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 149 | SDN 61 Karara Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 11 |
| 150 | SDN 62 Rontu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 17 |
| 151 | SDN 63 Dodu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 152 | SDN 64 Sori Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 153 | SDN 65 Jatibaru Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 17 |
| 154 | SDN 66 Kuta Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 155 | SDN 67 Rabantala Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 11 |
| 156 | SDN 68 Kolo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 13 |
| 157 | SDN 69 Kabanta Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 11 |
| 158 | SDN 70 Tolotongga Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 159 | SDN 71 Wenggo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 160 | SDN 72 Ntobo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 161 | SDN 73 Sabali Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 162 | SDN 74 Songgela Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 163 | SDN 76 Toloweri Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 164 | SDN 77 Niu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 165 | SMPN 01 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 56 | 56 |

| NO. | INSTANSI/UNIT KERJA | PEGAWAI NEGERI SIPIL | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------|----------------------|------|-------|-------|------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | ESELON | | | | | | | | | | | JUM |
| | | II/a | II/b | III/a | III/b | IV/a | IV/b | V | JML | JFT | JFU | JML | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 166 | SMPN 02 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 57 | 57 |
| 167 | SMPN 03 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 | 26 |
| 168 | SMPN 04 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 33 | 33 |
| 169 | SMPN 05 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 31 | 31 |
| 170 | SMPN 06 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 36 | 36 |
| 171 | SMPN 07 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 37 | 37 |
| 172 | SMPN 08 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 35 | 35 |
| 173 | SMPN 09 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 21 |
| 174 | SMPN 10 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 22 |
| 175 | SMPN 11 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 | 27 |
| 176 | SMPN 12 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 12 |
| 177 | SMPN 13 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 25 | 26 |
| 178 | SMPN 14 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 15 |
| 179 | SMPN 15 Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 180 | SMP Muhamadiyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 181 | MIS Darul Hikmah Matakando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 182 | MI Dodu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 183 | MI Nurul Ilmi Paruga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 184 | MI SambinaE Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 185 | MIS Mande Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 186 | MTs Al- Husaini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 187 | MTs Darul Hikmah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 188 | MTsN Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 189 | MTsN Raba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 190 | SD Islam Al-Ikwan Santi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 191 | SD IT Imam Safi'i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 192 | SD Muhammadiyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 193 | TK. Negeri Pembina 01 Raba Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 194 | TK. Negeri Pembina 02 Kolo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 195 | TK. Negeri Pembina 03 Paruga Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 196 | TK. Negeri 04 Tanjung Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 197 | TK. Negeri 05 Rabadompur Timur Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 198 | TK. Negeri 06 Penaraga Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 199 | TK. Negeri 07 Pane Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 200 | TK. RA AL-Muhtadin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 201 | TK. Negeri 08 Penatoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |

| NO. | INSTANSI/UNIT KERJA | PEGAWAI NEGERI SIPIL | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|------|-------|-------|------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | ESELON | | | | | | | | | | | JUM |
| | | II/a | II/b | III/a | III/b | IV/a | IV/b | V | JML | JFT | JFU | JML | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Kota Bima | | | | | | | | | | | | |
| 202 | TK. Negeri 09 Rabadompu Barat Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 203 | TK. Negeri 10 Rabangodu Utara Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 204 | TK. Negeri 11 Jatibaru Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 205 | TK. Negeri 12 Penanae Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 206 | TK. Negeri 13 Monggonao Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 207 | TK. Negeri 14 Rite Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 208 | TK. Negeri 15 Kodo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 209 | TK. Negeri 16 Jatiwangi Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 210 | TK. Negeri 17 Nae Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 211 | TK. Negeri 18 Manggemaci Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 212 | TK. Negeri 19 Santi Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | TK. Negeri 20 Lampe Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 214 | TK. Negeri 21 Kumbe Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 215 | TK. Negeri 22 Rontu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 216 | TK. Negeri 23 Dodu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 217 | TK. Negeri 24 Nungga Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 218 | TK. Negeri 25 Rabangodu Utara Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 219 | TK. Negeri 26 Lelamase Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 220 | TK. Negeri 27 Dodu Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | TK. Negeri 28 Kodo Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 222 | TK. Negeri 30 Rabadompu Timur Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 223 | TK. Negeri 31 Bonto Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 224 | TK. Negeri 33 Ni'u Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 225 | TK. Aisyiyah I Ranggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | TK. Aisyiyah II Tolobali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 227 | TK. Al- Amin Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 228 | TK. Al-Iqra Kendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 229 | TK. Al-Maani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| NO. | INSTANSI/UNIT KERJA | PEGAWAI NEGERI SIPIL | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ESELON | | | | | | | | | | | JUM |
| | | II/a | II/b | III/a | III/b | IV/a | IV/b | V | JML | JFT | JFU | JML | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 230 | TK. Amal PGRI Paruga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 231 | TK. An-Nur Sadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 232 | TK. Darul Hikmah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 233 | TK. Kartika Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 234 | TK. Kemala Bayangkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 235 | TK. Masyita Saleko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 236 | TK. Mutmainah Asakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 237 | TK. Nurul Ilmi Ntobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 238 | TK. RA Darul Maarif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 239 | TK. RA Perwanida I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 240 | TK. RA Perwanida II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 241 | TK. RA Perwanida III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 242 | TK. Yaa Bunaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | TK. Paud IT Delima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| J U M L A H | | 1 | 30 | 45 | 85 | 154 | 186 | 1 | 502 | 1779 | 1315 | 3094 | 3596 |

Mulai Tahun 2017 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah telah berubah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Berikut Daftar Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Tabel 6.5
Daftar Nama Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

| No | Nama Perangkat Daerah |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| DINAS DAERAH | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Dinas Kesehatan |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5 | Dinas Sosial |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 7 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 9 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 13 | Dinas Perhubungan |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | Nama Perangkat Daerah |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 15 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 16 | Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 19 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 20 | Dinas Pariwisata |
| 21 | Dinas Pertanian |
| BADAN DAERAH | |
| 22 | Inspektorat |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 27 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| SEKRETARIAT | |
| 28 | Sekretariat DPRD |
| 29 | Sekretariat Daerah |
| 30 | Bagian Organisasi |
| 31 | Bagian Umum |
| 32 | Bagian Humas |
| 33 | Bagian Perekonomian |
| 34 | Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan |
| 35 | Bagian Kesra |
| 36 | Bagian LPBJ |
| 37 | Bagian Administrasi Pemerintahan |
| 38 | Bagian Hukum |
| KECAMATAN | |
| 39 | Kecamatan Asakota |
| 40 | Kecamatan Rasanae Barat |
| 41 | Kecamatan Rasanae Timur |
| 42 | Kecamatan Mpunda |
| 43 | Kecamatan Raba |

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua keuangan saat ini ataupun nanti.

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Bima telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bima di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Besar harapan kami, pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 ini dapat berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Bima di masa yang akan datang.



Kota Bima, 26 April 2022
WALIKOTA BIMA,

H. MUHAMMAD LUTFI, SE